

Masa Depan Partai Politik ISLAM

Studi Kasus Komunikasi Politik Partai
Bulan Bintang Propinsi Sumatera Utara

DR. HASRAT EFENDI SAMOSIR, MA

Penerbit
litrus.

**MASA DEPAN PARTAI POLITIK ISLAM (STUDI KASUS
KOMUNIKASI POLITIK PARTAI BULAN BINTANG PROPINSI
SUMATERA UTARA)**

Ditulis oleh:
Dr. Hasrat Efendi Samosir, MA

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Desember 2022

Perancang sampul: Asyiq Maulana
Penata letak: Syafira Isna

ISBN : 978-623-8177-10-3

xii + 293 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Desember 2022

PENGANTAR PENULIS

Puji dan syukur hanya milik Syukur Allah, Rabb sekalian alam yang Maha Mengetahui, Maha Mendengar, Maha Melihat dan Maha segala-galanya yang tergambar dalam *asma'* sifat dan *af'al*-Nya. Tuhan yang menguasai ilmu yang jika dibandingkan dengan ilmu manusia hanya laksana setetes air ditengah lautan samudera. Dengan rahmat dan *maunah*-Nya peneliti dapat merampungkan buku ini dengan judul: Masa Depan Partai Politik Islam: Studi Kasus Komunikasi Politik Partai Bulan Bintang Provinsi Sumatera Utara. *Subhanaka lailmalana illa ma'allamtana* (Maha Suci Engkau Allah, tiada ilmu kami kecuali yang Kau ajarkan kepada kami). Tak lupa juga shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. Sebagai Rasul pembawa ajaran Islam yang *rahmatan lil'alam*, toleran, damai, dan menegakkan keadilan, ajaran yang menjamin keselamatan dunia dan akhirat. Nabi yang dinobatkan sebagai manusia paling berpengaruh di dunia. *Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi Muhammad*.

Selesainya buku ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik materil maupun moril dan juga motivasi berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Penulis menyampaikan bahwa buku ini tidak lepas dari kesalahan. Sebab itu, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca, sehingga buku ini di masa yang akan datang dapat lebih sempurna. Akhirnya, segala sesuatunya kita serahkan kembali kepada Allah SWT. Semoga buku ini dapat menambah wawasan bagi pembaca dan berguna bagi ilmu pengetahuan. Amin ya Robbal 'alamin.

Medan, 20 Januari 2021

Penulis

Dr. Hasrat Efendi Samosir, MA

KATA PENGANTAR EDITOR

PASANG surut partai politik Islam di Indonesia dalam rentan waktu tiga masa kekuasaan politik Indonesia, yakni Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi selalu menarik untuk dikaji. Kajian akademik dalam bentuk *reseach* mendalam menjadi “busur” utama untuk menganalisisnya. Partai politik Islam menjadi variable yang tidak terpisahkan dari maju mundurnya dinamika politik ummat Islam di Indonesia.

Melihat perkembangan dan semangat para elite ummat Islam Indonesia mendirikan partai politik Islam pasca reformasi patut diapresiasi. Seiring perjalanan hasil pemilu ke pemilu yang berlangsung di Indonesia justru tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Jumlah pemilih ummat Islam jauh lebih banyak, tapi mengapa pemilih muslim tidak sepenuhnya menjatuhkan pilihan kepada partai politik Islam? Pertanyaan ini menjadi tanda tanya besar yang patut kita analisis. Di negara berpenghuni muslim terbesar di dunia, tetapi pemilih muslim setiap pemilihan umum dapat disebut berserak. Pemilih muslim justru ada menjatuhkan pilihan politiknya kepada partai politik nasionalis. Akhirnya, dalam konteks inilah ummat Islam tidak menyatu, bahkan segelintir elite politik dan politisi Islam dengan senang hati mendirikan partai politik Islam. Mereka inilah yang disebut *biang kerok*, perpecahan politik di kalangan ummat Islam.

Buku yang ada di tangan pembaca ini terbilang mudah untuk dipahami dengan bahasa lugas dan tegas, meerupakan hasil karya monumental dari seorang akademisi Hasrat Efendi Samosir. Beliau selama ini sangat aktif mengamati seluk beluk perkembangan partai politik Islam di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Salah satu kajian yang menjadi fokus kajian akademisi ini adalah penelitian yang diimplementasikan dalam *reseach* disertai saudara Hasrat Efendi Samosir tentang Partai Bulan Bintang (PBB) Propinsi Sumatera Utara.

Bagian pertama mengulas latar belakang masalah dari fokus kajian komunikasi politik PBB Sumatera Utara. Kajian yang dipaparkan pada bagian pertama ini, menguatkan studi kepemiluan yang diperoleh partai politik ini. Penulis secara detail merinci hasil perolehan suara pemilu dan wakil parlemen yang diperoleh PBB selama beberapa kali pemilu, yakni Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009 dan Pemilu 2014. Perolehan hasil pemilu itu, PBB mengalami pasang surut terutama hasil kursi yang diperoleh di parlemen.

Bagian kedua, penulis mengungkap kajian teoretis atas konsep-konsep komunikasi politik. Defenisi yang diuraikan memuat banyak pendapat pakar komunikasi politik. Begitu juga teori-teori yang dikaitkan dalam objek kajian itu sangat erat dengan konteks politik kekinian. Ia mampu memadukan konsep teoretis denha kajian teori yang sedang booming. Tak salah, jika beliau memakai teori agenda setting dan model SMCR yang menurut hemat kami sangat tepat dikonversi pada objek kajian politik Islam.

Uraian bagian ketiga dalam buku ini, penulis sukses mengkonversi kajian teoretis dengan term politik Islam , *ummah* sebagai raga politik, model pemilihan, *bai'at*, *musyawarah (syura)*, masalah loyalitas dan pelanggaran. Sedangkan bagian keempat dari buku ini, memuatkan paradigma partai politik Islam, partai politik Islam konservatif, partai politik Islam modernis dan partai politik Islam sekuler.

Penajaman buku di tangan pembaca ini, di bagian lima, nampak dan nyata ketika penulis mengulas tuntas proses komunikasi PBB Sumatera Utara. Buku yang diuraikan penulis, seakan kita terlibat langsung dalam aktivitas politik yang dilakukan PBB. Secara gamblang, ia mengulas sejarah berdirinya PBB di Indonesia dan di Sumatera Utara. Makna lambang PBB, makna, prinsip dan azas p erjuangan partai. Uraian utuh dari bagian lima ini, terlihat dari peluang dan tantangan PBB Sumatera Utara dari pemilu ke pemilu.

Di bagian keenam buku ini, menyimpulkan apa yang seharusnya diperbuat PBB pada pemilu akan datang. Sebagai partai politik Islam yang diinginkan ummat, PBB harus menjadi corong perjuangan ummat Islam, khususnya di Sumatera Utara.

Semoga karya monumental penulis ini menjadi masukan berharga kepada para politisi dan akademisi bahkan masyarakat umum yang membutuhkan referensi. Tim editor berharap pemikiran penulis yang dituangkan dalam uraian lugas dalam buku ini bermanfaat bagi peradaban Islam dan dunia. *Amien ya rabbal 'alamien.*

Medan, Januari 2023

Editor

Dr Anang Anas Azhar, MA

Daftar Isi

Pengantar Penulis.....	iii
Kata Pengantar Editor	v
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang Masalah	1
Batasan Studi.....	10
Tujuan Studi	12
Metodologi Kajian.....	12
BAB II KONSEP KOMUNIKASI POLITIK	21
Definisi Komunikasi	21
Teori Komunikasi.....	22
Definisi Komunikasi Politik	29
Unsur-unsur Komunikasi Politik.....	35
Fungsi Komunikasi Politik.....	37
BAB III KONSEP POLITIK ISLAM.....	41
Definisi Politik.....	41
Partai Politik Menurut Undang-undang Republik Indonesia	43
Definisi Politik Islam	45
Term, Istilah, dan Praktik Politik Islam	47

BAB IV PARTAI POLITIK ISLAM.....	67
Definisi Partai Politik.....	67
Partai Politik Islam.....	69
Paradigma Partai Politik Islam	72
Fungsi Partai Politik.....	81
BAB V KOMUNIKASI POLITIK DEWAN PIMPINAN	
WILAYAH PARTAI BULAN BINTANG SUMATERA UTARA	93
Profil dan Manifesto Politik Partai Bulan Bintang.....	93
Proses Komunikasi Politik DPW PBB Sumatera Utara.....	164
Bentuk-bentuk Komunikasi Politik DPW PBB Sumatera Utara ...	169
Peluang dan Tantangan DPW Partai Bulan Bintang Sumatera Utara..	184
BAB VI DISKURSUS UNSUR KOMUNIKASI POLITIK	
DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BULAN BINTANG	
SUMATERA UTARA.....	215
Komunikator Dewan Pimpinan Wilayah Partai	
Bulan Bintang Sumatera Utara.....	215
Pesan Politik Dewan Pimpinan Wilayah Partai	
Bulan Bintang Sumatera Utara.....	223
Saluran atau Media Politik Dewan Pimpinan Wilayah	
Partai Bulan Bintang Sumatera Utara	234
Sasaran atau Target Politik Dewan Pimpinan Wilayah	
Partai Bulan Bintang Sumatera Utara	239
Pengaruh atau Efek Komunikasi Politik Dewan Pimpinan	
Wilayah Partai Bulan Bintang Sumatera Utara.....	247
BAB VII PENUTUP	257

Daftar Pustaka.....	261
Daftar Wawancara.....	269
Transkrip Wawancara	273

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama, sebagaimana dinyatakan banyak kalangan, dapat dipandang sebagai instrument ilahiah untuk memahami dunia. Islam, dibandingkan agama-agama lain sebenarnya merupakan agama yang paling mudah untuk menerima premis semacam ini. Alasan utamanya terletak pada ciri Islam yang paling menonjol, yaitu sifatnya “hadir di mana-mana (*omnipresence*)”, kehadiran Islam selalu memberikan panduan moral yang benar bagi manusia.¹

Pandangan ini telah mendorong sejumlah pemeluknya untuk percaya bahwa Islam mencakup cara hidup yang total. Penubuhannya dinyatakan dalam bentuk *Syari'ah* (hukum Islam). Bahkan sebagian kalangan Muslim melangkah lebih jauh dari itu: mereka menekankan bahwa “Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan terhadap semua masalah kehidupan.” Tak diragukan lagi, mereka percaya akan sifat Islam yang sempurna dan menyeluruh sehingga, menurut mereka, Islam meliputi tiga “D” yang terkenal itu (*din*; agama, *dunya*; Dunia dan *dawlah*; Negara). Karenanya Islam menjadi panduan yang totalitas dan harus diterapkan dalam kehidupan keluarga, ekonomi dan politik. Bagi kalangan Muslim dibayangkan dalam penciptaan sebuah Negara Islam, yakni sebuah Negara “idiologis” yang didasarkan kepada ajaran-ajaran Islam yang lengkap.²

Dalam konteksnya sekarang, tidaklah terlalu mengejutkan, meskipun kadang-kadang mengkhawatirkan, bahwa dunia Islam kontemporer menyaksikan sebagian kaum Muslim yang ingin mendasarkan seluruh kerangka kehidupan sosial, ekonomi dan politik pada ajaran Islam secara *eksklusif*, tanpa menyadari keterbatasan-keterbatasan dan kendala-kendala yang bakal muncul dalam praktiknya. Ekspresi-ekspresinya dapat

1 Fazlur Rahman, *Islam* (New York: Holt Reinhart, 1996), h. 241

2 Nazih Ayubi, *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World*, h. 63-64

dapat ditemukan istilah-istilah simbolik yang dewasa ini populer seperti *revivalisme* Islam, kebangkitan Islam, *revolusi* Islam atau *fundamentalisme* Islam. Sementara ekspresi-ekspresi seperti itu didorong oleh niat yang tulus, tidak dapat dipungkiri bahwa semuanya itu kurang dipikirkan secara matang dan pada kenyataannya lebih banyak bersifat *apologetic*.³

Pandangan holistik terhadap Islam sebagaimana diungkapkan di atas mempunyai beberapa implikasi. Salah satu di antaranya, pandangan ini telah mendorong lahirnya sebuah kecenderungan untuk memahami Islam dalam pengertian yang “*literal*” dengan hanya menekankan dimensi “luar” “*eksterior*”-nya”. Dan kecenderungan seperti ini telah dikembangkan sedemikian jauh sehingga menyebabkan terabaikannya dimensi “*kontekstual*” dan “dalam” “*interior*” dari prinsip-prinsip Islam.

Munculnya berbagai mazhab fiqh, teologi, dan filsafat Islam, misalnya, menunjukkan bahwa ajaran-ajaran Islam itu *multi-interpretatif*.⁴ Watak *multi-interpretatif* ini telah berperan sebagai dasar kelenturan Islam dalam sejarah, selebihnya hal yang demikian juga mengisyaratkan keharusan *pluralisme* dalam tradisi Islam. Karena itu sebagaimana telah dikatakan oleh banyak pihak Islam tidak bisa dan seharusnya dilihat secara *monolitik*.⁴ Pandangan di atas memberikan implikasi dalam kehidupan politik Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam yang *multi-interpretatif* semacam ini. Pada sisi lain, hampir setiap Muslim percaya akan pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan politik. Pada saat yang sama, karena sifat Islam yang *multi-interpretatif* itu, tidak ada pandangan tunggal mengenai bagaimana seharusnya Islam dan politik dikaitkan secara pas. Bahkan, sejauh yang dapat ditangkap dari perjalanan diskursus intelektual dan historis pemikiran dan praktik politik Islam, ada banyak pendapat yang berbeda, bahkan beberapa saling bertentangan mengenai hubungan yang sesuai antara Islam dan politik.

Pada garis besarnya, dewasa ini ada dua spektrum pemikiran politik Islam yang berbeda, namun keduanya sama-sama mengakui pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan. Pada ujung satu spektrum beberapa kalangan muslim beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar Negara, bahwa *syari'ah* harus diterima sebagai

3 Kritik Umum atas kecenderungan semacam ini juga dibahas dalam Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transpormation of An Intellectual Tradition* (Chicago and London: University of Chicago Press, 1982), h. 70-71.

4 Tentang kecenderungan melihat Islam secara monolitis, lihat Muhammed Ayoob, *Myth of The Monolitiith*, h. 1-6.

konstitusi Negara, bahwa kedaulatan politik ada di tangan Tuhan, bahwa gagasan tentang Negara (*nation-state*) bertentangan dengan konsep *ummah* (komunitas Islam) yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan; dan bahwa, sementara mengakui prinsip *syura* (musyawarah), aplikasi prinsip ini berbeda dengan gagasan demokrasi yang dikenal dalam diskursus politik dewasa ini.⁵

Pada ujung spektrum yang lain beberapa kalangan Muslim lainnya berpendapat bahwa Islam “tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori Negara (atau sistem politik) yang harus dijalankan oleh *ummah*,⁶ dalam ungkapan Muhammad Imara seorang pemikir Muslim Mesir “Islam sebagai agama tidak menentukan suatu sistem pemerintahan tertentu bagi kaum Muslim, karena logika tentang kesesuaian agama ini untuk sepanjang masa dan tempat menuntut agar soal-soal yang selalu akan berubah oleh kekuatan evolusi harus diserahkan kepada akal manusia untuk memikirkannya, dibentuk menurut kepentingan umum dan dalam kerangka prinsip-prinsip umum yang telah digariskan agama ini.⁷

Menurut aliran pemikiran ini, bahkan istilah Negara (*dawlah*)-pun tidak dapat ditemukan dalam Alquran. Meskipun terdapat berbagai ungkapan dalam Alquran yang merujuk atau seolah-olah merujuk kepada kekuasaan politik dan otoritas, akan tetapi ungkapan-ungkapan ini hanya bersifat *incidental* dan tidak ada pengaruhnya bagi teori politik, bagi mereka jelas bahwa Alquran bukanlah buku tentang ilmu politik.

Pandangan di atas juga mengakui bahwa Alquran mengandung “nilai-nilai dan ajaran-ajaran etis Mengenai aktivitas sosial dan politik umat manusia”. Ajaran-ajaran ini mencakup prinsip-prinsip tentang; keadilan, kesamaan, persaudaraan dan kebebasan. Untuk itu bagi kalangan yang berpendapat demikian, sepanjang Negara berpegang kepada prinsip-prinsip seperti itu, maka mekanisme yang diterapkan adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.⁸ Dengan alur argumentasi semacam ini, pembentukan sebuah Negara Islam dalam artian yang formal dan ideologis tidaklah begitu penting. Bagi mereka yang terpenting adalah bahwa Negara karena

5 Di antara mereka yang termasuk ke dalam kategori pendukung alur pemikiran semacam ini adalah pemikir Mesir Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb, dan pemikir Pakistan Abul A'la Al-Maududi.

6 Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam as The Basis of State: A Study of The Islamic Political Ideas as Reflected In The Constituent Assambly Debates In Indonesia, Disertasi Doktor* (Chicago: University of Chicago, 1983), h. 23

7 Muhammad Imarah, *Al-Islam Wa As-Sulthan al-Diniyah* (Kairo: Dar Thaqafatal-Jadidah, 1979), h. 76-77.

8 Para Pendukung pemikiran ini di antaranya adalah pemikir Mesir Muhammad Husein Haykal dan pemikir Pakistan Fazlur Rahman dan Qamaruddin Khan.

posisinya yang bisa menjadi instrument dalam merealisasikan ajaran-ajaran agama dan menjamin tumbuhnya nilai-nilai dasar seperti itu. Jika demikian halnya, maka tidak ada alasan teologis atau religius untuk menolak gagasan-gagasan politik mengenai kedaulatan rakyat, prinsip-prinsip umum teori politik modern, dengan kata lain sesungguhnya tidak ada alasan kuat untuk meletakkan Islam dalam posisi yang bertentangan dengan sistem politik modern.

Indonesia yang nota bene sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan sebagai negara yang menganut sistem demokrasi tentu akan melahirkan sistem kepartaian, di mana partai politik akan menjadi motor dan penggerak demokrasi itu sendiri. Jika dikaitkan dengan sistem Islam yang menganut sistem *syura* (musyawarah) maka akan terdapat tiga pandangan Islam dan merespon demokrasi tersebut *pertama*, menolak demokrasi dengan alasan ajara demokrasi bersumber dari Yunani, Barat dan Kafir, bahkan mempertanyakan jika demokrasi diterapkan dianggap keluar dari Islam karena Islam sudah memiliki sistem yang *kaffah*. *Kedua*, menganggap Islam dan Demokrasi saling *completeble* (melengkapi) karena ajar Islam juga bisa diterapkan dalam kehidupan demokrasi, dalam hal ini demokrasi hanya dijadikan sebagai instrumen untuk mengamalkan ajaran Islam itu sendiri. *Ketiga*, pandangan yang menerima bulat-bulat dan totalitas demokrasi, bahkan demokrasi dianggap lebih sempurna dari sistem Islam tersebut. Konsekwensi dari sistem demokrasi dengan multi partai inilah memunculkan sistem kepartaian dengan berbagai aliran politik, ada yang beraliran keagamaan (Partai Islam, Partai Kristen dll), ada yang beraliran Nasionalis, bahkan ada yang beraliran sekuler). Corak aliran partai politik inilah yang menjadi jargon dan nilai jual untuk mendekati dan meyakinkan para konstituen yang mayoritas umat muslim.

Secara faktual Indonesia penduduknya mayoritas Muslim (bahkan Negara Muslim terbesar di dunia) pandangan di atas sangat relevan jika dikaitkan dalam kehidupan politik umat Islam. Dalam perjalanan sejarah baik era orde lama, orde baru dan reformasi eksistensi partai-partai Islam yang mengklaim sebagai wadah dan rumah politik ummat Islam tidak berbanding lurus (*linier*) antara jumlah umat Islam dengan jumlah suara yang diraih partai-partai Islam yang juga tercermin dari jumlah kursi yang diperoleh di perlemen (*legislative*), bahkan partai Islam justru kalah bersaing dengan partai nasionalis dan sekuler dalam merebut kantong-kantong suara, secara empiris dalam sejarah orde lama PNI yang nasionalis lebih dipilih masyarakat yang mayoritas muslim di Negara ini, begitu juga

dengan Partai Golkar (Golongan Karya) pada orde baru dan bahkan orde reformasi tetap menjadi partai dengan suara terbesar di samping Partai demokrat dan PDI-Perjuangan yang juga berlandaskan politik nasionalis dan sekuler. Hanya pada orde lama partai Islam memiliki suara yang agak signifikan (di bawah 40 %), sedangkan pada periode orde baru suara yang diperoleh PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang merupakan fusi dari berbagai partai Islam karena kebijakan pemerintahan orde baru yang mengharuskan penyederhanaan jumlah kontestan pemilu (hanya tiga partai) suara yang diraihnya lebih kecil lagi (dibawah 15%), demikian juga di masa orde reformasi hasil pemilu terakhir tahun 2009 partai Islam dan berbasis Islam bernasib yang sama (PPP 5 % PKS 8 % PKB 5 % PAN 6 %, bahkan PBB, PBR, PMB, PKNU dan partai Islam lainnya bernasib “NASAKOM “Nasib Satu Koma” yang tidak lolos ambang *Parlemen Threshold* dimana jumlah suara partai yang akan mendapatkan kursi di parlemen minimal 2 % (dua persen). Berikut ini daftar hasil pemilu di masa orde reformasi, di mana Partai-partai Islam kurang mampu meraih suara yang signifikan dan kurang bisa meyakinkan konstituen untuk memilih mereka. Berikut ini gambaran hasil pemilu tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan perkembangan serta kemajuan partai politik Islam:

1. Gambaran Hasil Pemilu Tahun 1999

Pada Pemilu tahun 1999, sebagai pemilu pertama di era orde reformasi dan diakui sebagai pemilu yang demokratis, gambaran hasil konstalasi suara keluar sebagai jawara adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan disusul partai lainnya masing-masing adalah; 1. PDIP Suara: 35.706.618 (33.7%) meraih 153 Kursi Parlemen 2. Partai Golkar: Suara: 23.742.112 (22.4%) meraih 120 Kursi Parlemen 3. PKB: Suara: 13.336.963 (12,6%) meraih 51 Kursi Parlemen 4. PPP: Suara: 11.330.387 (10,7%) meraih 58 Kursi Parlemen 5. PAN: Suara: 7.528.936 (7,1%) meraih 34 Kursi Parlemen 6. PBB: Suara: 2.050.039 (1,9%) meraih 13 Kursi Parlemen 7. PK: Suara: 1.436.670 (1,4%) meraih 7 Kursi Parlemen 8. PKP: Suara: 1.063.810 (1,%) meraih 4 Kursi Parlemen 9. PNU: Suara: 679.174 (0,6%) meraih 5 Kursi Parlemen. Sedangkan partai-partai lainnya seperti PDI, PP, PDKB, PPIIM, PDR, PSII, PNI FM, PNI, PNI MM, IPKI, PKU, PKD dan Partai Lainnya meraih di bawah 0,5 % suara dan jumlah kursi yang umumnya hanya meraih satu kursi di parlemen.⁹

9 Dwight King dalam *Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia; Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 68

Pemilu pertama yang digelar di masa orde reformasi ini tidak hanya melahirkan multi partai dengan jumlah partai ikut pemilu terbesar tapi juga memunculkan politik aliran seperti yang peneliti kemukakan di atas. Pemilu semasa orde baru yang hanya diikuti tiga partai karena semua partai diminta untuk fusi (dilebur ke satu partai), juga ditandai dengan dikekangnya iklim demokrasi, ternyata ketika kran reformasi dibuka menjadikan partai tumbuh subur seperti cendawan tumbuh dimusi hujan, jauh lebih menarik dari analisis peneliti, partai-partai di masa orde lama yang sudah hilang, ternyata kader-kadernya masih ada yang hidup dan bernostalgia untuk menghidupkan partai tersebut kembali, semisal PNI, PSII (Partai Syarika Islam Indonesia), Partai Masyumi Baru, PNU, IPKI, Marhaenisme, dll. Akan tetapi yang menarik untuk peneliti elaborasilan adalah dua ormas Islam di Indonesia yakni Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah yang justru melahirkan partai PKB dan PAN dengan corak Nasionalis religius dengan komunitas dan basis massa muslim, kedua ormas Islam ini justru tidak memunculkan partai Islam unsich, tapi justru mengintegrasikan Islam ke dalam nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme.

2. Hasil Pemilu Tahun 2004

Pada pemilu yang kedua diselenggarakan di era reformasi ini jumlah partai semakin berkurang, tapi konstalasi hasil pemilu, juga keluar sebagai jawara dimenangkan partai nasionalis dalam hal ini Partai Golkar yang bertukar posisi dengan PDIP, adapun gambaran hasil pemilu tahun 2004, sebagai berikut: 1. Partai Golkar Suara: 24.480.757 (21,6%) meraih 127 Kursi Parlemen. 2. PDIP: Suara: 21.026.629 (18,5%) meraih 109 Kursi Parlemen 3. PKB: Suara: 11.989.564 (10,6%) meraih 52 Kursi Parlemen. 4. PPP: Suara: 9.248.764 (8,2%) meraih 58 Kursi Parlemen. 5. PD: Suara: 8.455.225 (7,5%) meraih 56 Kursi Parlemen. 6. PKS: Suara 8.325.020 (7,3%) meraih 45 Kursi Parlemen 7. PAN: Suara: 7.303.320 (6,4%) meraih 53 Kursi Parlemen. 8. PBB: Suara: 2.970.487 (2,6%) meraih 11 Kursi Parlemen 9. PBR: Suara: 2.764.998 (2,4%) meraih 14 Kursi Parlemen 10. PDS: Suara: 2.414.254 (2,1%) meraih 13 Kursi Parlemen 11. PKPB: Suara: 2.399.290 (2,1%) meraih 2 Kursi Parlemen. Adapun partai lainnya berturut-turut PKPI, PPKD, PNBK, PP Pancasila, PNI Marhaenisme, PNUI, Partai Pelopor, PPDI, dan lain-lainnya (Komisi Pemilihan Umum RI).

Gambaran hasil pemilu 2004 di atas juga menunjukkan polarisasi distribusi suara yang dimenangkan partai-partai nasionalis ketimbang partai Islam atau berbasis Islam. Posisi partai Islam dan berbasis Islam hanya menempati partai tengah yang untuk memperkuat posisi pernah dibangun kelompok poros tengah yang diinisiasi tokoh-tokoh Politisi Islam di antaranya M Amien Rais, KH Abdurrahman Wahid, Yusril Ihza Mahendra, Hamzah Haz, Hidayat Nur Wahid dll. Akan tetapi ada perkembangan baru yang sedikit menarik dari hasil pemilu di 2004 ini, yakni lebih meratanya distribusi suara dan partai pemenang pemilu tidak terpaut jauh dengan partai di bawahnya. Dari hasil ini juga terlihat partai-partai Islam kurang berhasil menjalankan komunikasi politik untuk merebut suara umat.

3. Hasil Pemilu Tahun 2009

Gambaran hasil pemilu yang ketiga di masa orde reformasi hampir sama dengan konstalasi hasil pemilu sebelumnya, masih dikuasai partai nasionalis, bahkan nasib partai Islam dan berbasis Islam lebih menurun dibanding pemilu sebelumnya, hanya saja terjadi kejutan yang keluar sebagai jawara pemilu, yakni partai Demokrat yang beraliran nasionalis dengan jargon nasionalis religius dan religius nasional, walau tergolong partai baru, tapi bisa menyodok kenomor satu, partai besutan Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) ini mendapat simpati dan dukungan besar dari masyarakat, hingga bisa mengalahkan partai-partai yang sudah berpengalaman dan lama. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut: 1. Partai Demokrat: Suara: 21.703.137 (20,85) meraih 150 Kursi Parlemen 2. Partai Golkar Suara: 15.037.757 (14,45%) meraih 107 Kursi Parlemen 3. PDIP: Suara: 14.600.091 (14,03%) meraih 95 Kursi Parlemen 4. PKS: Suara: 8.206.955 (7,88%) meraih 57 Kursi Parlemen 5. PAN: Suara: 6.254.580 (6,01%) meraih 43 Kursi Parlemen 6. PPP: Suara: 5.533.214 (5,32%) meraih 37 kursi Parlemen 7. PKB: Suara: 5.146.122 (4,94%) meraih 27 Kursi Parlemen 8. Gerindra Suara: 4.646.406 (4,46%) meraih 26 Kursi Parlemen 9. Hanura: Suara: 3.922.870 (3,77%) meraih 18 Kursi Parelemen 10. PBB Suara: 1.864.752 (1,79%) tidak meraih Kursi Parlemen.

Selanjutnya berturut-turut PDS, PKNU, PKPB, PBR, PPRN, PKPI, PDP, BARNAS, PPPI, PDK, REPUBLIKAN, PPD, PATRIOT, PNBK, KEDAULATAN, PMB, PPI, PAKAR PANGAN, PELOPOR, PKDI, PIS, PNI M, PARTAI BURUH, PPIB, PPNU, PSI, PPDI,

MERDEKA (Komisi Pemilihan Umum). Dalam pemilu kali ini regulasi yang dibuat Komisi Pemilihan Umum lebih tegas, di mana ada aturan bagi partai politik yang tidak mampu meraih suara 2,5% maka suaranya akan dianggap hilang dan tidak berhak mendapatkan kursi di parlemen, aturan ini disebut *Parlementary Treashold* (PT), dan partai yang meraih suara di bawah 2,5% tersebut daeri PBB sampai ke partai Merdeka. Pada pemilu tahun 2009 ini jika dianalisis dan dicermati lagi-lagi partai nasionalis memenangkan pemilihan umum dengan partai Demokrat sebagai jawara. Adapun nasib partai-partai Islam dan berbasis Islam hanya menempati partai tengah, bahkan lebih merosot jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Partai Islam kembali gagal membangun dan meraih simpati ummat Islam sebagai pemilih terbesar dan potensial.

4. Gambaran Hasil Pemilu Tahun 2014.

Hasil pemilu tahun 2014 sebagai pemilu yang keempat di masa orde reformasi, penyebaran suara tetap didominasi partai-partai Nasionalis, sedangkan partai partai Islam dan berbasis Islam semakin tercecar dan tertinggal, pada pemilu tahun 2014 ini, kontestan pemilu semakin berkurang, hal ini dikarena adanya Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Pemerintah tentang syarat pendirian partai politik yang semakin diperketat, adapun hasil pemilu tahun 2014 tersebut, sebagai berikut: 1. PDIP Suara: 23.681.471 (18,95%) meraih 109 Kursi Parlemen 2. Partai Golkar: Suara: 18.432.312 (14,75%) meraih 91 Kursi Parlemen 3. Gerindra: Suara 14.760.371 (11,81%) meraih 73 kursi parlemen 4. Demokrat: Suara 12.728.913 (10,19%) meraih 61 Kursi parlemen 5. PKB: Suara: 11.298.957 (9,04%) meraih 47 Kursi Parlemen 6. PAN: Suara: 9.481.621 (7,59%) meraih 49 Kursi Parlemen 7. PKS: Suara 8.480.204 (6,79%) meraih 40 kursi Parelemen 8. Nasdem: Suara 8.402.812 (6,72%) meraih 35 Kursi Parelemen. 9. PPP: Suara: 8.157.488 (6,53%) meraih 39 Kursi Parlemen 10. Hanura : Suara 6.579.498 atau (5,26%) meraih 16 Kursi parlemen. Sedangkan dua partai politik lainnya yakni PBB dan PKPI tidak mendapatkan kursi di parlemen dikarenakan kedua partai tersebut tidak memenuhi ambang batas minimum 2,5% suara yang harus di raih secara nasional. Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Pada pemilu tahun 2014 ini ada beberapa catatan menarik, *pertama*, semakin sedikitnya kontestan pemilu yakni hanya diikuti 12

partai politik, hal ini karena ketatnya Undang-Undang pemilu yang dikeluarkan pemerintah dalam persyaratan mendirikan sebuah partai politik. *Kedua*, pada pemilu ini ada partai politik yang baru berdiri yakni partai Nasional Demokrat (selanjutnya disingkat Nasdem) yang dipimpin Surya Paloh mampu meraih suara cukup signifikan bahkan mengalahkan beberapa partai lama, dalam hal ini analisis peneliti kekuatan media yang dimiliki Surya paloh untuk menopang sosialisasi Partai Nasdem sangat kuat dan mampu merebut suara pemilih. Media memiliki kekuatan yang tidak bisa dikesampingkan, termasuk di dalamnya pemberitaan, sosialisasi, kampanye dan iklan politik yang dimainkan partai Nasdem. *Ketiga*, pada pemilu kali ini lagi-lagi partai Islam dan berbasis Islam hanya mampu menjadi partai tengah, bahkan PBB tidak lulus ambang batas dan PKS mengalami penurunan suara yang tidak disang-sangka partai tersebut.

Hasil-hasil pemilu yang terjadi di masa Orde reformasi di atas semakin menarik untuk diteliti dan dianalisis, jika dikaitkan dengan hasil pemilu orde Lama sebagai pemilu pertama dalam perjalanan bangsa yang dikenal sebagai negara demokratis terbesar, di mana hasil pemilu pertama justru menunjukkan hasil yang lebih baik dalam perolehan suara yang didapatkan partai Islam (dalam hal ini diwakili Partai Masyumi dan Partai NU). Adapun perbandingan hasil pemilu tahun 1955, adalah: PNI memperoleh 8.434.653 suara atau 22,3% dengan perolehan kursi sebanyak 57. Kemudian Masyumi mengumpulkan suara 7.903.886 atau 20,9% dengan total kursi 57. Selanjutnya NU memperoleh suara 6.955.141 atau 18,4% dengan 45 kursi. Disusul PKI 6.176.914 perolehan suara atau 16% dengan perolehan 39 kursi. Kemudian, PSII berhasil memperoleh suara 1.091.160 atau 2,9% dengan keterwakilannya 8 kursi. Sedangkan Parkindo 1.003.325 atau 2,6 setara dengan 8 kursi. Kemudian selanjutnya, Partai Katholik 770.740 atau 2,0% dengan keterwakilan 6 kursi. Untuk PSI mengumpulkan suara 753.191 atau 5 kursi. Untuk selanjutnya, IPKI suaranya 541.306 atau 1,4% dengan keterwakilan 4 kursi. Perti 483.014 atau setara 1,3% dengan perolehan 4 kursi. Selain itu, Murba berhasil mengumpulkan suara 199.588 sama dengan 0,5 persen atau 2 perolehan kursi. Belakangan, beberapa0 partai lainnya, berhasil mengumpulkan 3.472.381 suara atau 9,3% atau sama artinya

dengan memiliki keterwakilan 22 kursi.¹⁰ Fakta ini cukup menarik dan menantang bagi peneliti untuk melakukan kajian studi politik Islam.

B. Batasan Studi

Kajian ini berangkat atas dasar bahwa komunikasi politik pada partai politik Islam yang beririsan dengan konsep, ide, gagasan dan doktrin Islam. Namun di sisi lain, muncul problematika terkait dengan komunikasi politik Islam dan doktrin Islam, serta bagaimana relasi komunikasi politik Islam dengan religious Islam. Dari problem tersebut membutuhkan interpretasi dan Analisis yang cukup mendalam terkait dengan komunikasi politik yang dilakukan DPW PBB Sumatera Utara, termasuk komponen-komponen yang ada di dalamnya baik proses, model, unsur-unsur dan strategi. Kemudian bagaimana pasca rezim era orde baru yang membuka “kran” reformasi besar-besar yang menjadi sebuah periode sejarah yang ingin melakukan pembaharuan dan perubahan dalam kehidupan berpolitik dan berbangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Periode atau era reformasi dalam kehidupan berpolitik yang teraktualisasi lewat pemilu, selama era reformasi pemilu sudah dilaksanakan sebanyak empat kali yakni tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014.

Selanjutnya banyak partai politik Islam muncul sebagai jawaban dan berkontribusi untuk memajukan dan menentukan arah garis besar bangsa. Partai politik Islam yang tujuannya adalah; untuk menegakkan kedaulatan Tuhan di muka bumi dan menjadikan Islam sebagai jalan hidup di dunia ini. Tokoh-tokoh partai politik akan dikhususkan kepada orang-orang yang sungguh beriman dan bertaqwa, yaitu orang-orang yang ikhlas berjuang untuk menegakkan kalimat Allah dan mencari keridhaan-Nya. Partai politik Islam tidak hanya yang berorientasi pada *Islamic State* (Negara Islam) namun juga *Islamic Society* (Masyarakat Islam). Sebut saja partai politik Islam yang maksud ialah Partai Bulan Bintang yang menjadikan Islam sebagai azas partai dan perjuangan. Dalam menjembatani partai politik Islam tersebut dibutuhkan komunikasi yang baik. Komunikasi politik memiliki pesan yang bernuansa atau bermuatan politik. Komunikasi politik adalah segala aktivitas penyampaian pesan atau bentuk-bentuk komunikasi yang dilakukan partai politik Islam, khususnya Partai Bulan Bintang dalam rangka sosialisasi partai kepada masyarakat

¹⁰ *Ibid*, h. 67

dan untuk mendapatkan simpati publik agar memilih partai tersebut dalam pemilihan umum.

Dengan demikian untuk memperjelas ranah studi dalam buku ini, perlu diberikan batasan yang jelas dan tegas mengenai istilah dalam studi buku ini. Berikut ini penjelasannya:

1. Proses komunikasi politik Islam tidak hanya sebatas yang dapat di akses secara kebijakan dan peraturan yang dapat dilihat serta dirasakan oleh masyarakat akibat dari peraturan dan kebijakan tersebut. Namun perlu dilihat pula bagaimana proses komunikasi regulasi sebelum kebijakan dan peraturan tersebut, tentunya yang berdasarkan kepada nilai-nilai ajaran Islam. Politik itu sendiri memang berarti cerdas dan bijaksana, yang dalam pembicaraan sehari-hari kita seakan-akan mengartikan sebagai suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan, namun para ahli politik sendiri mengakui bahwa sangat sulit memberikan defenisi untuk ilmu politik.
2. Politik Islam meyakini bahwa cara, strategi, dan pola yang berdasarkan nilai-nilai Islam dikenal dengan *Siyasah Islamiyah*. Dalam konteks Politik Islam, atau *Siyasah Islam*, maka ditemukan sejumlah “*term*” atau istilah yang menunjukkan bahwa politik juga bagian dari ajaran Islam yang harus dijalankan sesuai konsep ajaran Allah dan Rasul. Maka diskursus politik Islam akan kita temukan sejumlah bentuk atau rupa dan wajah yang menjadi spirit politik Islam, adapun term politik Islam itu seperti istilah *ummah*, *syura* atau musyawarah, *bai’ah*, dll. Dalam masyarakat Islam, seperti halnya dalam lingkungan masyarakat dunia yang lain, lembaga-lembaga politik dibangun dengan cara yang dianggap paling cocok untuk mempromosikan garis-garis besar nilai-nilai pokok mereka.
3. Bentuk-bentuk komunikasi politik dalam studi penelitian ini adalah terkait dengan komunikasi masa, komunikasi kelompok dan komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh Partai Bulan Bintang Wilayah Sumatera Utara. Studi ini ingin menganalisis dan menginterpretasikan bagaimana DPW Partai Bulan Bintang dalam menjalankan komunikasi politik, pesan politik, saluran dan media politik, sasaran, target atau komunikan politik, dan efek atau pengaruh dari komunikasi politik.

C. Tujuan Studi

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah yaitu :

1. Mendiskripsikan proses komunikasi politik yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Wilayah Partai Bulan Bintang Sumatera Utara.
2. Menganalisis bentuk dan unsur komunikasi politik Islam yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Wilayah Partai Bulan Bintang Sumatera Utara
3. Membantu para pelaku politik dan peneliti komunikasi politik dalam mendapatkan gambaran, bahan, materi yang diperlukan baik untuk rujukan politikus dan referensi dalam melaksanakan roda organisasi serta ilmu pengetahuan.
4. Mendiseminasikan kepada masyarakat Islam begitu pentingnya politik dalam kehidupan sehari-hari dan bekerja sama untuk mengedukasi generasi penerus islam agar tidak “tabu”, “Ilfil” ketika berbicara politik sehari-hari yang berdasarkan kepada nilai-nilai Islam.

D. Metodologi Kajian

Dalam dunia penelitian hanya dikenal dua *mazhab* (jenis) penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Jika kualitatif lebih bersifat menemukan teori dan berlatar alamiah maka penelitian kuantitatif bersifat verifikasi atau pengujian teori dan berlatar ilmiah. Penelitian yang penulis lakukan ini adalah jenis penelitian kualitatif. Meleong mendefinisikan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.¹¹ Sedangkan Saryono menyatakan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.¹² Sugiyono menambahkan, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan

¹¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.8

¹² Saryono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam bidang Kesehatan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2010), h.1

pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹³

Dari beberapa definisi penelitian kualitatif yang dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan jenis penelitian ini digolongkan kepada penelitian kualitatif di mana peneliti bermaksud untuk meneliti kondisi obyek dengan memahami suatu fenomena dalam konteks sosial dengan seting alamiah yang mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan fenomenologis dengan menangkap tema budaya yang berkaitan dengan analisis komunikasi politiki, aktifitas, program, visi misi, platform perjuangan, bentuk-bentuk komunikasi politik, hasil-hasil yang dicapai dan kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan komunikasi politik yang menjadi faktor kegagalan dalam merebut suara konstituen umat Islam Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (PBB) Sumatera Utara. Guna memperoleh data atau informasi dalam kajian ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagaimana lazimnya penelitian kualitatif, metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Penentuan Lokus dan Subjek Penelitian

a. Lokus Penelitian

Lokasi penelitian ini difokuskan pada dua tempat, yakni sekretariat partai yang menjadi objek penelitian, yakni: dilakukan disekretariat DPW Partai Bulan Bintang Sumatera Utara. Peneliti juga akan menghimpun data dari KPU Sumatera Utara, informan penelitian ini dari Dokumentasi-dokumentasi kedua instansi tersebut.

b. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah data atau informasi/informan yang memiliki terkaitan langsung dan tidak secara langsung hal ini terwakili oleh Ketua KPU Sumatera Utara, Pengamat Politik dan Tokoh serta Ulama Sumatera Utara.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.15

Sedangkan objek penelitian ini adalah sebagai pelaku hal ini terwakili oleh ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan kader Partai Bulan Bintang Wilayah Sumatera Utara. Informan ini merupakan orang yang memiliki data atau informasi yang dibutuhkan penelitian ini. Subjek penelitian ini meliputi:

Tabel 1.1. Subjek dan Objek Penelitian

No	Nama	Profesi	Jabatan	Ket
1	Dr Masri Si-tanggung	Ketua DPW PBB periode 2010-2015	Key Informan (Informan Kunci)	Objek
2	Drs Bustami Manurung	Wakil Sekretaris DPW PBB Sumut Periode 2010-2015	Kini Pelaksana Sekretaris DPW PBB Sumut (2015-2020)	Objek
3	Drs Aidan Nazwir Pgb	Wakil Ketua DPW PBB Sumut Periode 2010-2015	Kini Ketua MPW PBB Sumut (20015-2020)	Objek
4	Amir Syam	Kader PBB Sumut	Sekretaris DPW Pemuda Bulan Bintang	Objek
5	Yunus Harahap	Kader PBB Sumut	Staf Sekretariat DPW PBB	Objek
6	Shohibul Anshar Srg	Akademisi atau Pengamat Politik	Ketua LHPK PWM Sumut/ Pengurus MUI Sumut	Subjek
7	Mulia Banurea	Tokoh Pemuda atau Ketua PW GP Anshor Sumut	Ketua KPU Sumut Periode 2015-2020	Subjek
8	H. Ismet Yunus	Ulama atau Tokoh Masyarakat Sumut	Ketua PI (Pusat Islam) UMA Alumnus Al-Azhar Mesir	Informan

2. Metode Pengumpulan Data

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu¹⁴ Basrowi dan Suwandi Mendefenisikan, wawancara adalah proses percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan bentuk wawancara secara mendalam, wawancara mendalam sendiri merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan ada atau tidak menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial dan interaksi komunikasi yang intensif.

Alasan peneliti menggunakan wawancara mendalam karena peneliti ingin mendapatkan informasi secara langsung dan jelas dari informan atau nara sumber. Dari hasil penelitian dengan metode wawancara mendalam ini peneliti mengharapkan informan lebih terbuka dengan peneliti, lebih akrab, tidak berjarak, bisa menggali data lebih dalam, sehingga data yang diperoleh lebih kongkrit dan spesifik dari hasil wawancara yang dilakukan tersebut

b. Metode Observasi (Observation)

Observasi ialah pengamatan atau pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data karena: (1). Sesuai dengan tujuan penelitian; (2). Direncanakan dan dicatat secara sistematis; (3). Dapat dikontrol keandalanya (realibilitas) dan kesahihannya (validitas). Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis.¹⁶ Dalam menggunakan observasi ini yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti. Nurbuko dan Ahmadi¹⁷ menyatakan observasi pengamatan sebagai alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistemik gejala-gejala yang diselidiki.

14 Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004) h. 180

15 Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 127

16 Lihat Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif ...*, h. 191

17 Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

Berangkat dari rumusan di atas, maka peneliti dalam konteks ini melakukan pengamatan di lapangan baik secara langsung maupun secara tidak langsung (*participant* dan *non participant obserbation*) terhadap aktivitas, kegiatan, sosialisasi, pemikiran, pesan-pesan yang dilakukan pengurus DPW Partai Bulan Bintang baik di sekretariat maupun secara langsung bersentuhan dengan konstituen. Pesen-pesan lewat media, baleho, brosur, buletin, majalah maupun pesan yang langsung melalui lisan yang baik sesama pengurus maupun dengan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengelaborasi dan mendapatkan data yang lebih dalam terkait dengan komunikasi politik yang dilakukan Pengurus DPW Partai Bulan Bintang Sumatera Utara.

c. Metode Dokumentasi (Documentation)

Dokumensi adalah teknik mengumpulkan data di mana peneliti mencari data sebanyak-banyaknya untuk melengkapi data yang sudah diperoleh lewat teknik pengumpul data wawancara dan observasi. Dokumen yang peneliti maksud di sini dapat diperoleh melalui notulen rapat, arsip kantor, surat kabar, majalah, boletin, buku-buku, AD/ART Partai, Pedoman Partai, fhoto-fhoto kegiatan lainnya, yang bertujuan untuk mendukung data yang dibutuhkan terhadap permasalahan yang diteliti. Ketiga teknik pengumpulan data ini akan peneliti kombinasikan dengan melakukan pengecekan data dengan menggunakan teknik triangulasi data. Dengan cara ini diharapkan data-data dan hasil penelitian bisa dipertanggungjawabkan dan bersifat objektif.

3. Metode Analisa Data

Metode analisa data ini yang bersifat penelitian kualitatif jika dikaitkan dengan paradigma pengolahan dan analisis data dapat dilakukan sekaligus oleh seorang peneliti. Data-data penelitian yang penulis peroleh dikumpulkan, dibaca dan dianalisis kandungannya, lalu diungkapkan hasil temuannya secara deskriptif dan objektif serta diuraikan melalui metode *deduktif* dan *induktif*. Namun demikian penulis akan tampilkan pandangan teoritis tentang pengolahan dan analisis data penelitian kualitatif. Spradley menawarkan ada empat tahap analisis data yang diselingi dengan pengumpulan data dimaksud. Menurut Spredly dalam Moleong keempat langkah itu meliputi ; (1) Analisis domain (2) Analisis taksonomi (3) Analisi komponen (4)

*Analisis tema*¹⁸. Maka dari analisis tersebut penelitian ini akan melihat pada jenis analisis Tema. *Analisis Tema* ; Analisis tema merupakan seperangkat prosedur untuk memahami secara holistik pemandangan yang sedang diteliti. Sebab setiap kebudayaan terintegrasi dalam beberapa jenis pola yang lebih luas. Tujuh cara untuk menemukan tema yaitu : (1) melebur diri, (2) melakukan analisis komponen terhadap istilah acuan, (3) menemukan perspektif yang lebih luas melalui pencarian domain dalam pemandangan budaya, (4) menguji dimensi kontras seluruh domein yang telah dianalisis, (5) mengidentifikasi domain terorganisir, (6) membuat gambar untuk memvisualisasi hubungan antar domein, (7) mencari tema universal, dipilih satu dari enam topik : Konflik Sosial, kontradiksi budaya, teknik kontrol sosial, hubungan sosial pribadi, memperoleh dan menjaga status dan memecahkan masalah. Sesuai dengan topik penelitian maka yang dipilih adalah memecahkan masalah¹⁹.

Pengolahan dan analisis data untuk lebih kongkritnya dirumuskan sebagai berikut ; Data-data yang peneliti peroleh dan kumpulkan dari berbagai literatur yang ada, dibaca dan dipahami kandungannya lalu dianalisis dengan metode interpretasi. Interpretasi dimaksudkan sebagai upaya tercapainya pemahaman yang benar terhadap fakta, data dan gejala.²⁰

Dalam suatu interpretasi perlu disadari adanya *emik* dan *etik*. *Emik* adalah data-data, kalimat-kalimat dan teks, sebagaimana dipahami oleh tokoh terhadap suatu pokok masalah. Sedangkan *etik* adalah pemahaman peneliti terhadap pemikiran (data, kalimat dan teks) objek yang sedang diteliti.²¹ Jadi pengolahan dan analisis data yang peneliti lakukan berjalan sekaligus secara simultan dengan langkah langkah. Mengumpulkan segala bahan-bahan literatur yang ada relevansinya dengan masalah penelitian, melakukan pengelompokan secara skala prioritas dengan tingkat signifikansinya, membaca dan memahami serta menganalisis berbagai literatur tersebut, Lalu kemudian diungkapkan berupa hasil temuan penelitian secara deskriptif

18 Spardley dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2005), h. 149.

19 *Ibid*, Hal. 149-151.

20 Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam* (Medan: Itiqamah Mulya Press, 2006), h. 59.

21 *Ibid*..., h.61.

dan objektif serta diuraikan melalului metode deduktif dan induktif.

Di samping analisis di atas, peneliti juga menggunakan analisis *memo writing* yakni menganalisis catatan-catatan dari penemuan data di lapangan baik melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Miles & Hubberman dalam Neuman menyatakan kode adalah tanda atau labels untuk menetapkan unit arti pada informasi *deskriptif* atau *inferensial* yang dipenuhi selama penelitian berlangsung. Kode biasanya ditandai melalui penggalan kata dan ukuran yang bervariasi, Prase kalimat atau keseluruhan paragraf yang berkaitan atau tidak berkaitan pada tempat tertentu²².

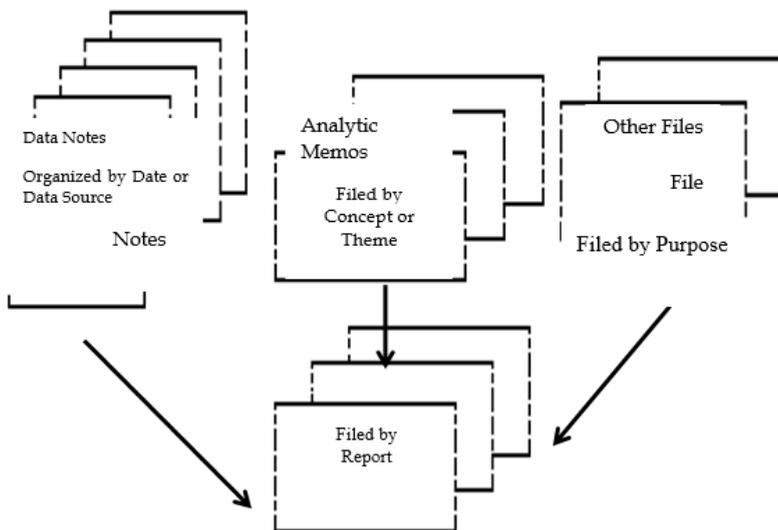
Pemberian kode merupakan dua kegiatan yang bersamaan yaitu pengurangan data mekanis dan kategori analisis data. Peneliti menentukan susunan tentang data, kegiatan ini bisa berlangsung berminggu-minggu dimana dia terkait dengan proses, juga dibutuhkan wawasan dan pemahaman yang mendalam. Pengkodean data juga merupakan pekerjaan berat terutama untuk mengurangi banyaknya data mentah kedalam tumpukan data yang dapat dimenej. Apalagi jika terdapat data yang besar, kemudian diatur. Pengkodean membolehkan sipeneliti kepada bagian yang relevan dengan cepat. Diantara moment sensasi dan inspirasi sejumlah besar pengkodean dapat menjadi menjemukan dan membosankan. Plath dalam Neuman menegaskan „Pengkodean mempunyai semua masalah yang membosankan ” Tugas pengkodean melalui materi bahan yang banyak dapat menjadi mematahkan semangat, selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan anda mungkin tidak mendapatkan apa-apa untuk ditumpukkan sebagai bukti upaya mencurahkan waktu. Pendataan merupakan jelmaan luar dari tekad hati sehingga sebagian besar kita harus terus berusaha untuk memahami orang-orang tertentu”²³. Struss (1987) menjelaskan ada tiga jenis pengkodean data kualitatif yaitu Pertama, Open Coding (pengkodean terbuka), Kedua, Axial Coding (pengkodean secara terus-menerus) dan Ketiga Selective Coding (Pengkodean yang diseleksi).

Disamping hal-hal diatas juga berlaku model *Analytic Memo Writing* yang dapat dirumuskan kedalam tiga bentuk ; *Pertama*, Data

22 *Ibid...*, h. 422

23 *Ibid...* Hal. 422

dalam penelitian kualitatif selalu dalam bentuk tulisan, peta, diagram dan gambar. *Kedua*, *Analytic memo writing* adalah bentuk catatan khusus dari peneliti berupa memo, pemikiran dan ide-ide tentang proses pengkodean sebagai panduan bagi peneliti. *Ketiga*, Setiap tema atau konsep dibuat memo yang merupakan hasil diskusi tentang suatu tema atau konsep yang ada.²⁴



Sumber : W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods*

²⁴ W. Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches Seventh Edition* (Assex: Pearson Education Limited, 2014) h. 427

BAB II

KONSEP KOMUNIKASI POLITIK

A. Definisi Komunikasi

Menurut bahasa “Komunikasi” berasal dari Bahasa Latin, yaitu “*Communicatio*”, dan bersumber dari kata “*Communis*” yang berarti “*sama*”. Sama disini maksudnya adalah sama makna²⁵. Sedangkan para ahli Ilmu Komunikasi mengemukakan pendapat yang berbeda-beda sesuai dengan sudut tinjauan masing-masing.

Pengertian Komunikasi secara terminology antara lain dikutip. Pertama, menurut Carl I. Houland “*Communication is the process by which an individual (the communicator) transmit stimuli (usually verbal symbols) to modify the behaviour of the individuals (communicates)*”. Artinya ; Komunikasi adalah suatu proses dengan mana seseorang (*komunikator*) menyampaikan *stimuli* (biasanya terdiri dari lambang kata-kata) untuk membentuk tingkah laku orang lain²⁶. Kedua, William Ablig dalam bukunya “*Public Opinion*” menyatakan “*Communication is the process of transmitting meaningful symbols between individuals*”. Artinya : Komunikasi adalah proses pengoperan lambang-lambang yang berarti antara individu-individu²⁷. Warren Weaver dalam bukunya “*The Mathematics of Communication*” menyatakan :” *Communication includes all the procedures by which one mind can affect another*”. Artinya : Komunikasi adalah keseluruhan prosedur dengan mana suatu pikiran mempengaruhi pikiran yang lainnya²⁸. Dan masih banyak sederatan definisi atau batasan yang diberikan para ahli komunikasi. Dari beberapa pengertian komunikasi tersebut dapat ditarik benang merah komunikasi

25 Onong Ucojhono Effendi, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Karya, 1984), h. 11.

26 Carl I. Houland dalam Tuanku Abbas, *Pengantar Ilmu Publisistik* (Banda Aceh: TP, 1972), h. 27.

27 William Albig dalam Lathief Rousydiy, *Dasar-dasar Rhetorika Komunikasi dan Informasi* (Medan: FA. Rinbow, 1985), h. 47.

28 Warren Weaver dalam Ton Kertapati, *Dasar-dasar Publisistik* (Jakarta: Bina Akasara, 1981), h. 98.

terjadi jika ada kesamaan makna antara komunikator dengan komunikan tentang suatu hal yang sedang dibicarakan. Dan apabila isi pesan dapat dilaksanakan menunjukkan nilai komunikatifnya percakapan tersebut.

B. Teori Komunikasi

1. Teori *Stimulus-Organism-Response* (SOR)

Teori S-O-R adalah singkatan dari *Stimulus-Organism-Response* ini semua berasal dari Psikologi. Kalau kemudian menjadi juga teori komunikasi, tidak mengherankan, karena objek material dari Psikologi dan ilmu Komunikasi adalah sama, yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen-komponen, sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi dan konasi.²⁹

Menurut *stimulus response* ini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan antara pesan dan reaksi komunikasi. Unsur-unsur dalam model ini adalah: *Pertama*, Pesan (*stimulus S*). *Kedua*, Komunikasi (*organism O*). *Ketiga*, Efek (*Response R*)

Dalam proses komunikasi berkenaan dengan perubahan sikap adalah aspek “*how*” bukan “*what*” dan “*why*”. Jelasnya *how to communicate*, dalam hal ini *how to change the attitude*, bagaimana mengubah sikap komunikan. Dalam proses perubahan sikap tampak sikap dapat berubah, hanya jika stimulus yang menerpa benar-benar melebihi kondisi semula.³⁰

Prinsip *stimulus-respons* pada dasarnya merupakan suatu prinsip belajar yang sederhana, di mana efek merupakan reaksi terhadap *stimuli* tertentu. Dengan demikian seseorang dapat mengharapkan atau memperkirakan suatu kaitan erat antara pesan-pesan media dengan reaksi *audience*. Prinsip stimulus respon ini merupakan dasar dari teori jarum *hipodermik*, teori klasik mengenai proses terjadinya efek media massa yang sangat berpengaruh. Dalam teori ini isi media dipandang sebagai obat yang disuntikkan ke dalam pembuluh darah *audience*, yang kemudian diasumsikan akan bereaksi

²⁹ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi (Baandung: Citraa Aditya Bakti, 2000., h. 254*

³⁰ *Ibid*, h. 254-255

seperti yang diharapkan. Di balik konsep ini sesungguhnya terdapat 2 (dua) pemikiran yang mendasarinya:

- a. Gambaran mengenai suatu masyarakat modern yang merupakan agregasi dari individu-individu yang relatif terisolasi (atomized) yang bertindak berdasarkan kepentingan pribadinya, yang tidak terlalu terpengaruh oleh kendala dan ikatan sosial.
- b. Suatu pandangan yang dominan mengenai media massa yang seolah-olah sedang melakukan kampanye untuk memobilisasi perilaku sesuai dengan tujuan dari berbagai kekuatan yang ada dalam masyarakat (biro iklan, pemerintah, partai politik dan sebagainya).

Dari pandangan pemikiran tersebut, dikenal apa yang disebut masyarakat massa, dimana prinsip stimulus respons mengasumsikan bahwa pesan dipersiapkan dan didistribusikan secara sistemik dan dalam skala yang luas. Sehingga secara serempak pesan tersebut dapat tersedia bagi sejumlah besar individu, dan bukannya ditujukan pada orang per orang. dalam hal ini tidak diperhitungkan kemungkinan adanya intervensi dari struktur sosial atau kelompok dan seolah-olah terdapat kontak langsung antara media dan individu. Konsekuensinya, seluruh individu yang menerima pesan dianggap sama/seimbang. Jadi kontak dengan media cenderung diartikan dengan adanya pengaruh tertentu dari media, sedangkan individu yang tidak terjangkau oleh terpaan media tidak akan terpengaruh.³¹

2. Teori *Source, Message, Channel, dan Receiver* (SMCR)

Rumus S-M-C-R adalah singkatan dari istilah-istilah : S singkatan dari *Source* yang berarti sumber atau komunikator, M singkatan dari *Message* yang berarti pesan; C singkatan dari *Channel* yang berarti saluran atau media, sedangkan R singkatan dari *Receiver* yang berarti penerima atau komunikan. Jangan keliru dengan singkatan pada Teori S-O-R, di mana S adalah singkatan dari Stimulus yang berarti pesan, sedangkan R adalah singkatan dari *Response* yang dalam bahasa Indonesia diartikan respons atau tanggapan atau reaksi. Baik S-M-C-R maupun S-O-R adalah proses komunikasi.

Khusus mengenai istilah *Channel* yang singkatan C pada rumus S-M-C-R itu yang berarti saluran atau media, komponen tersebut

31 S. Djuarsa Sendjaja, P.h.D, *Teori Komunikasi* (Jakarta: UT Fisip Press, t.t) h. 188-189

menurut Edward Sappir mengandung dua pengertian, yakni primer dan sekunder. Media sebagai *saluran-primer*, misalnya bahasa, kial (*gesture*), gambar atau warna, yaitu lambang-lambang yang dipergunakan khusus dalam komunikasi tatap muka (*face-to-face communication*), sedangkan media sekunder adalah media yang berwujud, baik media massa, misalnya surat kabar, televisi atau radio, maupun media nir massa, misalnya, surat, tetelpon, atau poster.³²

Jadi, komunikator pada komunikasi tatap muka hanya menggunakan satu media saja, misalnya bahasa, sedangkan pada komunikasi bermedia seorang komunikator, misalnya wartawan, penyiar atau reporter menggunakan dua media, yakni media primer dan media sekunder, jelasnya bahasa dan sarana yang ia operasikan.

3. Teori Performa Komunikatif

West dan Tunner,³³ menyatakan bahwa anggota organisasi melakukan performa komunikasi tertentu yang berakibat pada munculnya budaya organisasi yang unik. Pacanowsky dan O'Donnell³⁴ meyakini bahwa performa komunikasi sangat penting bagi budaya sebuah organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi politik atau yang dikenal sebagai partai politik, sedang yang akan diteliti adalah Partai Bulan Bintang di Sumatera Utara. Bagaimana partai ini menciptakan performa komunikasi di antara para pimpinan, kader, konstituen, simpatisan dan masyarakat secara luas, terutama dalam rentang waktu pemilu tahun 2009-2014.

Performa adalah metafora yang menggambarkan proses simbolik pemahaman akan perilaku manusia dalam sebuah organisasi, performa organisasi seringkali memiliki unsur teatral, di mana baik supervisor maupun karyawan, pimpinan maupun anggota atau dalam hal ini kader partai, memilih mengambil peranan atau bagian tertentu dalam organisasi mereka.³⁵ Performa komunikatif dibedakan menjadi lima bagian, performa ritual, performa hasrat, performa sosial, performa politis enkulturasi. *Pertama*, performa ritual, merupakan sebuah komunikasi yang terjadi secara teratur dan berulang. *Kedua*,

32 *Ibid*, h. 256

33 Richard West & Lynn H. Turner, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi* (Jakarta: salemba Humanika, 2008), h. 325

34 Pacanowsky, Michael E., and Nick O'Donnell-Trujillo, "Organizational communication as cultural performance." Paper presented at the 68th Annual Meeting of the Speech Communication Association, 1982 49pp. [ED 222 944]

35 Lihat Richard West & Lynn H. Turner, *Pengantar Teori ...*, h. 325.

performa hasrat, merupakan performa yang menunjukkan cita-cita dan keinginan sebuah partai politik, termasuk mencakup visi, misi, platform, aturan yang ada di partai dan tujuan yang ingin dicapai, *ketiga*, performa sosial, merupakan perpanjangan sikap santun dan kesopanan untuk menolong kerjasama di antara anggota organisasi, misalnya perilaku profesional, termasuk sikap empati dengan kesulitan anggota dan rakyat. *Keempat*, performa politis, merupakan perilaku organisasi yang mendemonstrasikan kekuasaan atau kontrol, karena kebanyakan organisasi bersifat hierarkis, harus ada seseorang yang memegang kekuasaan untuk mempertahankan eksistensi partai politik atau organisasi politik. *Kelima*, performa enkulturasi, hal ini merujuk kepada bagaimana anggota atau konstituen mendapatkan pengetahuan dan keahlian untuk dapat menjadi anggota organisasi yang mampu berkontribusi,³⁶ sehingga muncul kompetisi di antara para anggota secara baik dan sehat. Merujuk kepada kelima hal di atas dalam performa ini peneliti ingin mengungkapkan bagaimana Partai Bulan Bintang memberikan pengetahuan dan keahlian serta informasi yang cukup kepada kader-kadernya dalam rangka meningkatkan komunikasi politik tidak hanya dengan pihak internal tapi terutama pihak eksternal dalam hal ini konstituan atau *voter* yang diharapkan pilihan suaranya, performa ritual, hasrat, sosial, politis dan enkulturasi ini, akan peneliti gunakan untuk melakukan elaborasi data dan menggali lebih dalam informasi dan fakta-fakta di lapangan tentang komunikasi politik yang diimplementasikan DPW Partai Bulan Bintang di Sumatera Utara.

4. Teori Agenda Setting

Agenda setting model untuk pertama kali ditampilkan oleh M.E Mc. Combs dan D.L Shaw dalam “*Public Opinion Quarterly*” terbitan tahun 1972 berjudul “*The Agenda Setting Function of Massa Media*”. Kedua pakar tersebut mengatakan bahwa jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting.” Tatkala mengadakan studi terhadap pemilihan Presiden Amerika Serikat Tahun 1968 ditemukan korelasi yang tinggi antara penekanan berita dan bagaimana berita itu dinilai tingkatannya oleh para pemilih. Disimpulkan bahwa meningkatnya nilai terpenting suatu topik pada media massa menyebabkan meningkatnya nilai penting topik tersebut pada khalayak. Studi

36 *Ibid*, h. 325-327.

selanjutnya yang dilakukan McComb dan Shaw menunjukkan bahwa meski surat kabar dan televisi sama-sama mempengaruhi agenda politik pada khalayak, ternyata surat kabar pada umumnya lebih efektif dalam menata agenda ketimbang televisi. Pada tahun 1976, McCombs dan Shaw mengambil kasus *Watergate* sebagai ilustrasi dari agenda setting. Mereka menunjukkan bahwa sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru dalam mengungkap kasus politik yang korup, tetapi pemberitaan surat kabar yang sangat intensif dan diikuti oleh penayangan dengar pendapat di Dewan Perwakilan melalui televisi, telah membuat kasus *Watergate* menjadi “*topic of the year*”.³⁷

Tetapi David H. Weaver dalam karyanya yang berjudul “*Media Agenda Setting and Media Manipulation*” pada tahun 1981 mengatakan bahwa pers sebagai media komunikasi massa tidak merefleksikan kenyataan, melainkan menyaring dan membentuknya seperti sebuah kaleidoskop yang menyaring dan membentuk cahaya (*the press does not reflect reality, but rather filter and shapes it, much as a kaleidoscope filters and shapes it*). Dalam hubungannya dalam gerakan kampanye dan pemilihan presiden di Amerika pada tahun 1976 itu, berita surat kabar dan televisi tidak hanya sekedar merefleksikan hal-hal peristiwa-peristiwa dan argument-argumen yang dikampanyekan, melainkan menyeleksi dan membentuknya menjadi bernilai berita (*newsvalue*) dan hanya sedikit saja yang tidak ternilai berita. Dalam pada itu para calon dalam pemilihan umum beserta kualitas citranya dalam pemberitaan diberikan penekanan sehingga lebih menonjol bagi para pemilih ketimbang mereka yang tidak diberi penekanan. Manheim memahami proses agenda setting menyatakan bahwa agenda setting meliputi tiga agenda, yaitu agenda media, agenda khalayak dan agenda kebijaksanaan. Masing-masing agenda itu mencakup dimensi-dimensi sebagai berikut:

- a. Untuk agenda media, dimensi-dimensi
 - 1) *Visibility* (visibilitas) (jumlah dan tingkat menonjolnya berita)
 - 2) *Audience salience* (tingkat menonjol bagi khalayak) (relevansi isi berita dengan kebutuhan khalayak)

37 *Ibid*, h. 200

- 3) *Valence* (valensi) (menyenangkan atau tidak menyenangkan cara pemberitaan bagi suatu peristiwa)
- b. Untuk agenda khalayak, dimensi-dimensi:
- 1) *Familiarity* (keakraban (derajat kesadaran khalayak akan topic tertentu)
 - 2) *Personal salience* (penonjolan pribadi (relevansi kepentingan dengan ciri pribadi)
 - 3) *Favorability* (kesenangan) (pertimbangan senang atau tidak senang akan topic berita)
- c. Untuk agenda kebijaksanaan, dimensi-dimensi:
- 1) *Support* (dukungan) kegiatan menyenangkan bagi posisi suatu berita tertentu)
 - 2) *Likelihood of action* (kemungkinan kegiatan) (kemungkinan pemerintah melaksanakan apa yang diibaratkan)
 - 3) *Freedom of action* (kebebasan bertindak) (nilai kegiatan yang mungkin dilakukan pemerintah)

Dari berbagai asumsi mengenai efek komunikasi massa, satu yang bertahan dan berkembang dewasa ini menganggap bahwa media massa dengan memberikan perhatian pada issue tertentu dan mengabaikan yang lainnya, akan memiliki pengaruh terhadap pendapat umum. Orang akan cenderung mengetahui rentang hal-hal yang diberikan media massa dan menerima susunan prioritas yang diberikan media massa terhadap isu-isu yang berbeda. Asumsi ini berhasil lolos dari keraguan yang ditujukan pada penelitian komunikasi massa yang menganggap media massa memiliki efek yang sangat kuat, terutama karena asumsi ini berkaitan dengan proses belajar dan bukan dengan perubahan sikap atau pendapat. Studi empiris terhadap komunikasi massa telah mengkonfirmasi bahwa efek yang cenderung terjadi adalah dalam hal informasi. Teori agenda setting menawarkan suatu cara untuk menghubungkan temuan ini dengan kemungkinan terjadinya efek terhadap pendapat, karena pada dasarnya yang ditawarkan adalah suatu fungsi belajar dari media massa. Orang belajar mengenai isu-isu apa, dan bagaimana isu-isu tersebut disusun berdasarkan tingkat kepentingannya.³⁸

38 *Ibid.*, h. 199

Teoritis utama agenda setting adalah Maxwell McCombs dan Donald Shaw, mereka menuliskan bahwa adience tidak mempelajari berita-berita dan hl-hal lainnya melalui media massa, tetapi juga mempelajari seberapa besar arti penting diberikan pada suatu isu atau topik dari cara media massa memberikan penekanan terhadap topik tersebut. Misalnya, dalam merefleksikan apa yang dikatakan oleh para kandidat dalam suatu kampanye pemilu, media massa terlihat menentukan mana topik yang penting. Dengan kata lain, media massa menetapkan agenda kampanye tersebut. Kemampuan untuk mempengaruhi perubahan kognitif individu ini merupakan aspek terpenting dari kekuatan komunikasi massa. Dalam hal kampanye, teori ini mengasumsikan bahwa jika para calon pemilih dapat diyakinkan akan pentingnya suatu isu maka mereka akan memilih kandidat atau partai yang diproyeksikan paling berkompeten dalam menangani isu tersebut.³⁹

Asumsi agenda setting ini memiliki kelebihan karena mudah dipahami dan relatif mudah untuk diuji. Dasar pemikirannya adalah di antara berbagai topik yang dimuat media massa, topik yang mendapat lebih banyak perhatian dari media akan menjadi lebih akrab bagi pembacanya dan akan dianggap penting dalam suatu periode waktu tertentu, dan akan terjadi sebaliknya bagi topik yang kurang mendapat perhatian media. Perkiraan ini dapat diuji dengan membandingkan hasil dari analisis isi media.

5. Analisis *Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats* (SWOT)

SWOT adalah singkatan dari S = *Strenghts* (kekuatan), yaitu analisis yang ditujukan untuk mengukur kekuatan yang dimiliki oleh partai, sehingga kekuatan itu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kekuatan yang dimiliki satu partai misalnya, memiliki basis masa yang ril dan mengakar di masyarakat kader-kader militan, cerdas dan tangguh, dana kampanye yang kuat, kuhamasan yang tangguh dan sebagainya.

W = *Weakness* (kelemahan), yaitu analisis yang digunakan untuk membaca kelemahan yang dimiliki partai jika dibandingkan dengan partai kompetitor lainnya, sehingga kelemahan itu bisa ditutupi. Kelemahan adalah komponen yang harus dianalisis dan dibenahi secara internal. Misalnya, partai tidak memiliki manajemen yang bagus, citra partai yang belum terkenal di masyarakat, kader yang

39 *Ibid*, h. 199

tidak loyal, perangkat dan atribusi partai yang kurang lengkap, dana partai yang tidak tersedia. Ini adalah bentuk-bentuk kelemahan yang harus dianalisis secara internal dan tidak boleh sampai keluar.

O = *Opportunities* (peluang), yaitu analisis yang digunakan untuk melihat peluang-peluang yang mungkin bisa diperoleh. Peluang atau kesempatan yang bisa diperoleh untuk mendukung suatu upaya mencapai tujuan yang diinginkan. Partai dalam kaitan ini misalnya, ketika ada kader yang menduduki jabatan penting, baik swasta, eksekutif maupun legislatif yang bisa memberikan dukungan. Peluang juga bisa dilihat dari adanya pihak lain yang ingin memberikan bantuan berupa pinjaman kendaraan selama kampanye, dukungan dana kampanye, sumbangan atribut partai berupa kaos, bendera, topi, pin dan sebagainya.

T = *Threats* (ancaman), yaitu analisis yang terhadap ancaman-ancaman yang ditemui di lapangan. Ancaman merupakan unsur luar yang harus dianalisis dengan baik, karena faktor ini menentukan kelangsungan organisasi atau partai politik. Misalnya, ancaman yang muncul dalam kontestasi politik dapat dilihat dari adanya praktik politik uang (*money politics*), adanya ancaman penurunan spanduk dan baliho partai yang sudah terpasang. Ancaman terhadap kurangnya pendanaan kampanye. Ancaman terhadap terjadinya pelarian kader yang tidak loyal ataupun berubahnya keinginan khalayak untuk memilih partai tersebut.

C. Definisi Komunikasi Politik

Komunikasi politik terdiri dari dua suku kata; komunikasi dan politik, merupakan rangkaian kata yang jika dipisah memiliki makna masing-masing. *Komunikasi*; Komunikasi ada di mana-mana: di rumah, ketika anggota-anggota keluarga berbincang di meja makan; di kampus, ketika mahasiswa-mahasiswa mendiskusikan hasil tentamen; di kantor, ketika kepala seksi membagi-bagi tugas; di mesjid, ketika muballigh berkhotbah; di DPR, ketika wakil-wakil rakyat memutuskan nasib bangsa; juga ditaman-taman ketika seorang pecinta mengungkapkan rindu dendamnya. Komunikasi menyentuh segala aspek kehidupan kita. Sebuah

penelitian mengungkapkan bahwa 70 % waktu bangun kita digunakan untuk berkomunikasi. Komunikasi menentukan kualitas hidup kita.⁴⁰

Dengan komunikasi kita membentuk saling pengertian, menumbuhkan persahabatan, memelihara kasih sayang, menyebarkan pengetahuan, dan melestarikan persahabatan. Tetapi dengan komunikasi kita juga menyuburkan perpecahan, menghidupkan permusuhan, menanamkan kebencian, merintangi kemajuan, dan menghambat pemikiran. Begitu penting, begitu meluas dan begitu akrab komunikasi dengan diri kita sehingga kita semua merasa tidak perlu lagi mempelajari komunikasi.⁴¹

Politik; Sebagaimana tentang komunikasi, terdapat berbagai macam definisi tentang politik. Politik adalah siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana⁴². Pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang⁴³, kekuasaan dan pemegang kekuasaan⁴⁴, pengaruh,⁴⁵ tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan dan atau memperluas tindakan lainnya. Dari semua pandangan yang beragam itu ada persesuaian umum bahwa politik mencakup sesuatu yang dilakukan orang; politik adalah kegiatan. Dan ia adalah kegiatan yang dibedakan (meskipun tidak selalu berhasil dari kegiatan yang lain baik ekonomi, keagamaan, atletik dan sebagainya⁴⁶.

Komunikasi politik; Setelah menjelaskan pengertian kata komunikasi dan politik di atas, maka peneliti akan memberikan pengertian dari kata komunikasi politik itu sendiri sebagai definisi operasional dalam pembatasan masalah tesis ini. Ungkapan yang dikemukakan ilmuan politik Mark Roelofs yang dikutip di atas menunjukkan adanya hubungan yang erat dan signifikan antara politik dan komunikasi. Dia mengemukakan politik adalah pembicaraan walaupun tidak semua pembicaraan adalah politik. Disini penulis melihat pembicaraan itu sendiri adalah kegiatan komunikasi (*verbal*) dan andaipun tidak melalui pembicaraan hal itu bisa saja menjadi bagian komunikasi *non verbal*. Dan Nimmo malah menyatakan bahwa banyak aspek kehidupan politik dapat dilukiskan sebagai komunikasi.

40 Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), Edisi Revisi, h. vii.

41 *Ibid*, hal. Vii.

42 Harold Lasswell, *Politics: Who gets What. When How* (New York: Meridian books, 1958).

43 David Easton, *The Political System* (New York: Alfred A Knopf, 1953).

44 G.E.G Catlin, *A Study of Principles of politics* (New York: Macmillan, 1930).

45 Edward C. Banfield, *Political Influence* (New York: The Free Press of Glencoe, 1961).

46 Definisi yang terdapat pada catatan kaki poin 24 sampai poin 28 di atas terdapat pada Dan Nimmo, *Political communication and Public Opinion in America* (California: Goodyear Publishing Company, 1978) terj. Tjun Surjaman *Komunikasi politik ; Komunikator, Pesan dan Media* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005) Cet. V, h. 8.

Lalu Dan Nimmo memberikan defenisi singkat tentang komunikasi politik “...It is book of *Political Communacation (activity) consider political by virtue of its consesquences (actual and potential) which regulate human conduct under conditons of conflict*” “yaitu (kegiatan) komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik.”⁴⁷

Kajian komunikasi pada politik awalnya berakar pada ilmu politik, meskipun penamaan lebih banyak dikenal dengan istilah propaganda. Ini dimulai pada tahun 1922 dengan penelitian dari Ferdinand Tonnies dan Walter Lippmann yang meneliti tentang opini publik pada masyarakat, kemudin dilanjutkan oleh Bagehot, Maine, Bryce, dan Graha Wallas di Inggris yang menelaah peranan pers dan pembentukan opini publik. Bahkan ketika Harold D Lasswell menulis disertasi doktor tentang *Propaganda Technique In the War* (1927). Praktik propaganda berkembang terutama menjelang Perang Dunia II ketika Nazi Jerman berhasil melakukan ekspansi dengan gemilang di bawah propaganda Dr. Joseph Gobbel. Belajar dari pengalaman itu, Amerika Serikat yang tadinya memandang propaganda memiliki konotasi negatif dan amoral mulai menyadari kegunaannya lalu mengembngkan bidang ini sehingga menjelang Perang Dunia II sejumlah pakar dipekerjakan pada *office of war information*, AS di antaranya Carl L Hovland (*social psychology*), Kurt Lewin (*social group*), Lucian Pye (*politics*), Gordon Allport (*gosip and rumor*), dan Schramm (*content anaylisis*). Berkat rintisan Lasswell lewat disertasinya itu, Wilbur Schramm lalu menempatkan Lasswell sebagai tokoh utama dalam studi komunikasi politik, kemudian diikuti karya-karya lainnya, di antaranya *Propaganda and Promotional avtivities; An Annotated Bibliography* oleh Lasswell bersama Ralph D. Casey dan Bruce L Smith (1935) yang kemudian dikembangkan menjadi *propaganda, Communication, and Public Opinion* (1956). Ilmuwan politik lainnya yang memiliki peranan penting dalam disiplin komunikasi dan politik adalah Ithiel de Sola Pool, V.O. Key, dan Gabriel Almond.⁴⁸

Di Indonesia, pada awalnya perhatian untuk membicarakan komunikasi politik justru tumbuh di kalangan para ilmuwan atau sarjana ilmu politik dari pada ilmuwan dan sarjana ilmu komunikasi itu sendiri. Akan tetapi, tidak terlalu ketinggalan sebab pertengahan dekade 1980-

47 *Ibid.*, h. 9.

48 *Hafied, Komunikasi Politi....*, h. 3-33

an jurusan-jurusan ilmu komunikasi sudah mulai banyak mengajarkan studi komunikasi politik, sekalipun belum fokus dan masih banyak didukung oleh materi opini publik dan efek media massa terhadap perilaku politik. Bahkan sampai tahun 1991, majalah Prisma yang menurunkan edisi khusus tentang komunikasi dan kekuasaan (politik) belum bisa menyentuh substansi bidang ilmu ini, apa yang dimaksudkan dengan komunikasi politik. Oleh sebab itu, nuansa definisi-definisi komunikasi politik yang dibuat pada masa itu lebih berat pada perilaku politik, dan belum menyentuh secara substansial tentang peranan media massa terhadap penegakan demokrasi, kampanye dan pemilu.⁴⁹ Studi komunikasi politik sedikit agak lambat berkembang di Indonesia, hal ini terutama disebabkan tekanan rezim orde baru yang kurang senang dengan yang berbau politik, tidak senang dengan kebebasan pers dan iklim demokrasi yang sesungguhnya. Pada rezim ini pemilu hanya rutinitas sebagai stempel untuk dikatakan demokrasi, partai politik dipaksa hanya ada tiga partai, untuk DPR dan MPR disamping ketiga partai, masih ada utusan Militer (ABRI), utusan Golongan dan Daerah yang semuanya diangkat presiden dan bukan melalui mekanisme pemilihan rakyat. Maka sejak tumbangannya rezim orde baru, munculnya era reformasi maka kehidupan demokrasi terbuka lebar, dengan mengusung kebebasan mengemukakan pendapat yang digulirkan sejak tahun 1998, maka studi komunikasi politik mengalami perkembangan yang pesat, sehingga studi ini menjadi kajian ilmu yang menarik tidak hanya bagi mahasiswa ilmu komunikasi, tapi juga bagi penggiat ilmu politik, ilmu hukum dan ketatanegaraan.

Maswadi Rauf seorang pakar politik komunikasi politik sebagai objek kajian ilmu politik, karena pesan-pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi bercirikan politik yaitu berkait kekuasaan politik negara, pemerintahan dan aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik. Dalam konsep pemikiran Maswadi Rauf melihat komunikasi politik dari dua dimensi, yaitu komunikasi politik sebagai sebuah kegiatan dan sebagai kegiatan ilmiah. Komunikasi sebagai kegiatan politik merupakan penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. Kegiatan ini bersifat empirik karena dilakukan secara nyata dalam kehidupan sosial. Sedangkan sebagai kegiatan ilmiah maka komunikasi politik adalah salah satu kegiatan politik dalam sistem politik.⁵⁰

49 *Ibid*, h. 34

50 *Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun, Indonesia dan Komunikasi Politik (Jakarta: Gramedia, 1993)*.

Pengertian lain dikemukakan oleh Rusadi Kantraprawira yang melihat komunikasi politik dari sisi kegunaannya, menurutnya komunikasi politik adalah untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat baik pikiran intern golongan, instansi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan pemerintahan.⁵¹ Astrid S. Soesanto mengangkat satu formulasi defenisi komunikasi politik yang hampir diwarnai kajian ilmu hukum, dia menyatakan Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sangsi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik.⁵² Pengertian berikutnya dikemukakan oleh Rochajat Harun dan Sumarno AP dalam bukunya Komunikasi politik sebagai suatu pengantar menyatakan “ Komunikasi politik adalah suatu proses dan kegiatan-kegiatan membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi ke dalam suatu sistem politik dengan menggunakan simbol-simbol yang berarti.”⁵³

Meadow menyatakan defenisi “*political communication refers to any exchange of symbols or messages that to a significant extent have been shaped by or have consequences for political system*”. Di sini Meadow memberi tekanan bahwa simbol-simbol atau pesan yang disampaikan itu secara signifikan dibentuk atau memiliki konsekuensi terhadap sistem politik. Nimmo menggarisbawahi komunikasi politik kepada pengaturan manusia yang dilakukan di bawah kondisi konflik, Nimmo menyebutkan “*communication (activity) considered political by virtue of its consequences (actual or potential) which regulate human conduct under the condition of conflict*”.⁵⁴

McNair memberikan defenisi “*political communication as pure discussion about the allocation of public resources (revenues), official authority (who is given the power to make legal, legislative and executive decision)*, jadi komunikasi politik menurut McNair murni membicarakan tentang alokasi sumber daya publik yang memiliki nilai, apakah itu nilai kekuasaan atau nilai ekonomi, petugas yang memiliki kewenangan untuk memberi

51 Rusadi Kantraprawira, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: Sinar baru, 1983).

52 Astrid S. Soesanto, *Komunikasi Sosial* (Jakarta: Bina Cipta, 1975).

53 Rochajat Harun dan Sumarno AP, *Komunikasi Politik sebagai suatu pengantar* (Bandung: Mandar Maju, 2006) h. 5. Sebagai catatan pengertian yang dikemukakan oleh Maswadi Rauf, Rusadi Kantraprawira dan Astrid S. soesanto di atas juga dapat dilihat dalam buku yang sama pada catatan kaki no 34 ini pada halaman 2-5.

54 Hafied, *Komunikasi Politik.....*, h. 35

kekuasaan dan keputusan dalam pembuatan undang-undang atau aturan, apakah itu legislatif atau eksekutif, serta sangsi-sangsi, apakah itu dalam bentuk hadiah atau denda. Doris Greber menambahkan komunikasi politik dalam tulisannya “*political language*” bahwa komunikasi politik tidak hanya retorika, tetapi juga mencakup simbol-simbol bahasa, seperti bahasa tubuh serta tindakan-tindakan politik⁵⁵ seperti boikot, protes, unjuk rasa, *walk out*, lobbis, koalisi, dll.

Jack Plano dkk dalam buku *Kamus analisa politik* menyatakan Komunikasi politik adalah penyebaran aksi, makna atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik, melibatkan unsur-unsur komunikasi seperti komunikator, pesan dan lainnya. Kebanyakan komunikasi politik merupakan lapangan wewenang lembaga-lembaga khusus seperti media massa, badan informasi pemerintah atau partai politik, namun demikian komunikasi politik dapat ditemukan dalam setiap lingkungan sosial mulai dari lingkup dua orang hingga kantor pemerintahan.⁵⁶ Miriam Budiharjo menyatakan ; Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi partai politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa “penggabungan kepentingan” (*Interest aggregation*) dan “perumusan kepentingan” (*Interest articulation*) untuk diperjuangkan menjadi *public policy*.⁵⁷ Gabriel Almond (1960) Komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik “*All of the functions performed in the political system, political socialization and recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule making, rule application and education are performed by means of communication*. Ini berarti fungsi komunikasi politik terdapat secara *inherent* di dalam setiap fungsi sistem politik. Komunikasi politik (*Political Communication*) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru, juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara “yang memerintah” dan “yang diperintah”.⁵⁸

Menurut penulis komunikasi politik merupakan suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi dan konsekwensi terhadap aktivitas

55 *Ibid*, h. 36

56 Jack Plano, *Kamus Analisa Politik* (Jakarta: Rajawali, 1989).

57 Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1982).

58 *Komunikasi Politik*, [www. Geogle. Com](http://www.Geogle.Com) [www. Silabus.mata.kuliah.Komunikasi.politik.com](http://www.Silabus.mata.kuliah.Komunikasi.politik.com). 15 Juni 2009 pukul 15.00.

politik, dengan menekankan tentang isi pesan, sifat dan aktivitas yang diarahkan kepada keberhasilan penyampaian pesan-pesan komunikasi politik kepada khalayak untuk bisa dipengaruhi sehingga khalayak atau komunikan politik (publik) tersebut tertarik dan mau memilih atau mendukung suatu partai politik, dalam hal ini proses komunikasi politik yang dilakukan Partai Islam yakni DPW Partai Bulan Bintang Sumatera Utara.

D. Unsur-unsur Komunikasi Politik

Seperti halnya dengan disiplin komunikasi lainnya, komunikasi politik sebagai *body of knowledge* juga terdiri dari berbagai unsur, yakni sumber (*komunikator*), pesan, media atau saluran, penerima dan efek.⁵⁹

a. Komunikator Politik

Komunikasi politik tidak hanya menyangkut partai politik, melainkan juga lembaga pemerintahan legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, sumber atau komunikator politik adalah mereka-mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna atau bobot politik, misalnya Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, MPR, DPR, DPD, KPU, DPRD, politisi, fungsionaris partai politik, fungsionaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan kelompok-kelompok penekan (*pressuer*) dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan.

b. Pesan Politik

Pesan politik adalah pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara *verbal* maupun *non-verbal*, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung bobot politik. Misalnya pidato politik, undang-undang kepartaian, undang-undang pemilu, pernyataan politik, artikel atau isi buku/brosur dan berita surat kabar, radio, televisi dan internet yang berisi ulasan politik, propaganda, perang urat syaraf (*psywar*), makna

⁵⁹ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik; Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 37

logo, warna baju atau bendera, bahasa badan (*body language*), dan hal-hal lain yang sejenisnya.

c. Saluran atau Media Politik

Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya media cetak, yakni surat kabar, tabloid, majalah dan buku. Media elektronik. Misalnya film, radio, televisi, video, komputer, internet. Media format kecil, misalnya leaflet, brosur, selebaran, stiker, bulletin. Media luar ruang (*out door media*), misalnya baliho, spanduk, reklame, *electronic board*, bendera, jumbai, pin, logo, topi, rompi, kaos oblong, iklan mobil, gerbong kereta api, kalender, kulit buku, *block note*, pulpen, gantungan kunci, payung, dos jinjingan, kulit buku doa, kulit minuman aqua dan segala sesuatu yang biasa digunakan untuk membangun citra (*image building*), saluran komunikasi kelompok, misalnya partai politik (DPP, DPW, DPD, DPC, DPAC/DPRT, RAYON), organisasi profesi, ikatan alumni, organisasi sosial keagamaan, karag taruna, kelompok pengajian, majelis taklim, kelompok tani dan nelayan, koperasi, persatuan olah raga, kerukunan keluarga, perhimpunan minat bakat dan semacamnya. Saluran komunikasi publik, misalnya, aula, balai pertemuan, balai desa, pameran, alun-alun, panggung kesenian, pasar, swalayan (supermarket, mall, plaza), sekolah, kampus. Saluran komunikasi sosial, misalnya pesta perkawinan, acara sunatan, arisan, pertunjukan budaya seperti wayang, tor-tor, dan lain-lain, pesta rakyat, rumah ronda, sumur umum, pesta tani, dan semacamnya.

d. Sasaran atau Target Politik

Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberi dukungan dalam bentuk pemberian suara (*vote*) kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum atau pesta politik. Mereka adalah konstituen atau masyarakat yang sudah punya hak suara untuk ikut menggunakan hak politiknya baik pengusaha, pegawai negeri sipil (PNS), buruh, pemuda, petani, perempuan, pegawai swasta, ibu rumah tangga, pensiunan, veteran, pedagang kaki lima, para tukang (kayu, batu, cukur, becak) orang cacat, mahasiswa, tuna netra, supir angkutan, dosen, guru, nelayan,

para siswa atau remaja yang sudah punya hak pilih yakni berusia 17 tahun. Semua mereka ini menjadi sasaran atau target politik, sebagai komunikan yang harus direbut simpati dan pilihan mereka.

e. Pengaruh atau Efek Komunikasi Politik.

Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, dimana nuansanya akan bermuara pada pemberian suara (*vote*) dalam pemilihan umum. Pemberian suara ini sangat menentukan terpilih tidaknya seorang kandidat untuk posisi mulai dari tingkat Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, anggota DPR, MPR, DPD, DPRD, termasuk dipilihnya partai politik tertentu. Karena pentingnya pengaruh politik atau efek politik tersebut maka pendidikan politik yang dilakukan partai politik menjadi suatu keharusan yang diberikan kepada masyarakat.

E. Fungsi Komunikasi Politik

Sebagai disiplin ilmu, komunikasi politik menurut McNair⁶⁰ memiliki lima fungsi dasar, yakni sebagai berikut:

1. Informatif, memberikan informasi kepada masyarakat apa yang terjadi disekitarnya. Di sini media komunikasi memiliki fungsi pengamatan dan juga fungsi monitoring apa yang terjadi dalam masyarakat.
2. Educatif, mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada. Di sini para jurnalis diharapkan melihat fakta yang ada sehingga berusaha membuat liputan yang objektif (*objective reporting*) yang bisa mendidik masyarakat atas realitas fakta tersebut.
3. Mediasi, menyediakan diri sebagai platform untuk menampung masalah-masalah politik sehingga bisa menjadi wacana dalam membentuk opini publik, dan mengembalikan hasil opini itu kepada masyarakat. Dengan cara demikian, bisa memberi arti dan nilai pada usaha penegakan demokrasi.

⁶⁰ Brian McNair, *An Introduction to Political Communication*, (New York- London: Routledge Taylor & Francis Group, 2003) h. 21-24.

4. Kontrol sosial, membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga politik. Di sini media bisa berfungsi sebagai anjing penjaga (*watchdog*) sebagaimana pernah terjadi dalam kasus mundurnya Nixon sebagai presiden Amerika karena terlibat dalam kasus *Watergate*
5. Advokatif, dalam masyarakat yang demokratis, media politik berfungsi sebagai saluran *advokasi* (pembelaan) yang bisa membantu agar kebijakan dan program-program lembaga politik dapat disalurkan kepada media massa.

Goran Hedebro⁶¹ menambahkan pendapat beliau tentang fungsi komunikasi politik, sebagai berikut :

1. Informasi, memberikan informasi kepada masyarakat terhadap usaha-usaha yang dilakukan lembaga politik maupun dalam hubungannya dengan pemerintah dan masyarakat.
2. Sosialisasi, segala kebijakan, program, dan tujuan lembaga politik harus melakukan kegiatan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat sehingga memberikan efek positif dan perubahan kearah yang lebih baik, sosialisasi ini bisa langsung dan tidak langsung.
3. Motivasi, memberikan motivasi kepada para politisi, fungsionaris dan para pendukung partai politik, sehingga mereka lebih semangat dan sungguh-sungguh memahami dan menjalankan suatu program dan prinsip yang dianut suatu partai politik.
4. *Platform*, menjadi platform yang bisa menampung ide-ide masyarakat sehingga menjadi bahan pembicaraan dalam bentuk opini publik.
5. Mendidik, mendidik masyarakat dengan pemberian informasi, sosialisasi tentang cara-cara pemilihan umum dan penggunaan hak mereka sebagai pemberi suara.
6. Menghibur, menjadi hiburan masyarakat sebagai “pesta demokrasi” dengan menampilkan para juru kampanye, artis, dan para komentator atau pengamat politik
7. Nasionalisme, memupuk integritas dengan mempertinggi rasa kebangsaan guna menghindari konflik dan ancaman berupa tindakan separatis yang mengancam persatuan nasional.

61 Goran Hedebro, *Communication and Social Change in Developing Nations* (Iowa Ames: Iowa State University Press, 1982) h. 39-41

8. Reformasi, menciptakan iklim perubahan dengan mengubah struktur kekuasaan melalui informasi untuk mencari dukungan masyarakat luas terhadap gerakan reformasi dan demokratisasi.
9. Aktif, meningkatkan aktivitas masyarakat melalui siaran berita, agenda setting, maupun komentar-komentar politik
10. Kontrol Sosial, menjadi *watchdog* atau anjing penjaga dalam membantu terciptanya *good governance* (pemerintah yang baik), yang transparansi dan akuntabilitas terhadap masyarakat atau rakyat.

BAB III

KONSEP POLITIK ISLAM

A. Definisi Politik

Apakah politik itu sebenarnya? Politik dalam bahasa Arab disebut *siyasyah*, yang selanjutnya kata ini kemudian diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *politics*. Politik itu sendiri memang berarti cerdas dan bijaksana, yang dalam pembicaraan sehari-hari kita seakan-akan mengartikan sebagai suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan, namun para ahli politik sendiri mengakui bahwa sangat sulit memberikan definisi untuk ilmu politik.⁶²

Pada prinsipnya politik mempunyai ruang lingkup negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, jadi negara dalam keadaan bergerak. Selain dari itu, politik juga menyelidiki ide-ide, azas-azas, sejarah pembentukan negara, hakikat negara, serta bentuk dan tujuan Negara. Di samping itu, menyelidiki hal-hal seperti kelompok elit, kelompok kepentingan, kelompok penekan, pendapat umum, peranan partai politik, dan keberadaan pemilihan umum.

Asal mula kata politik berasal bahasa Yunani dari kata *polis* yang berarti negara kota, dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, perilaku pejabat, legalitas kekuasaan dan akhirnya kekuasaan. Politik juga dapat dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan pemerintah, pengaturan konflik yang menjadi konsensus nasional, serta kekuatan massa atau rakyat.⁶³

Politik bisa diartikan sebagai seni dan ilmu. adapun disebut sebagai seni, karena banyak kita lihat para politikus atau pemimpin politik yang tanpa pendidikan ilmu politik, tetapi mampu dan memiliki kiat dalam politik, karena membawa bakat yang dibawa sejak lahir dari naluri sanubarinya

⁶² Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)*, h. 9

⁶³ *Ibid*, h. 10

sebagai seniman politik, sehingga dia mampu dengan kharismanya menjalankan dan memainkan peranan roda politik pemerintahan dan kekuasaan dalam tatanan politik praktis. Sedangkan politik dikatakan sebagai ilmu, karena merupakan pengetahuan yang memiliki objek, subjek, metodologi, sistem, terminologi, ciri, teori yang khas dan spesifik serta diterima secara universal di seluruh dunia, di samping dapat diajarkan dan dipelajari orang banyak.

Politik, sebagaimana tentang komunikasi, terdapat berbagai macam definisi tentang politik. Politik adalah siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana⁶⁴. Pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang⁶⁵, kekuasaan dan pemegang kekuasaan⁶⁶, pengaruh,⁶⁷ tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan dan atau memperluas tindakan lainnya. Dari semua pandangan yang beragam itu ada persesuaian umum bahwa politik mencakup sesuatu yang dilakukan orang; politik adalah kegiatan. Dan ia adalah kegiatan yang dibedakan (meskipun tidak selalu berhasil dari kegiatan yang lain baik ekonomi, keagamaan, atletik dan sebagainya)⁶⁸.

Berikut beberapa definisi ilmu politik dari berbagai pakar, antara lain: Roger H Soltau⁶⁹: *Political science, then, is going to be study of the state, its aims and purposes, the institutions by which those are going to be realized, its relation with its individual members and with other states. And also what men have thought, side and written about all these questions*, (Ilmu politik, untuk selanjutnya akan dianggap pelajaran tentang negara, maksud dan tujuan negara, lembaga yang melaksanakan tujuan tersebut, hubungan antar negara dengan warganegaranya, serta hubungan antar negara, dan juga apa yang dipikirkan warganya, keluhan tulisan dalam berbagai pertanyaan). Menurut Raymond G. Gettel⁷⁰: *political science is the science of the state. It deal with: the relation of individuals to one other insofar as the state, the relation of state to state*. (Ilmu politik adalah ilmu yang membahas negara, hal tersebut berlaku baik antar seseorang dengan orang lain yang paling ujung sekalipun disentuh hukum, hubungan antar perorangan,

64 Harold Lasswell, *Politics: Who gets What. When How* (New York: Meridian books, 1958).

65 David Easton, *The Political System* (New York: Alfred A Knopf, 1953).

66 G.E.G Catlin, *A Study of Principles of politics* (New York: Macmillan, 1930).

67 Edward C. Banfield, *Political Influence* (New York: The Free Press of Glencoe, 1961).

68 Dan Nimmo, *Political communication and Public Opinion in America* (California: Goodyear Publishing Company, 1978) terj. Tjun Surjaman Komunikasi politik ; Komunikator, Pesan dan Media (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005) Cet. V, h. 8.

69 Roger H Soltau, *An Introduction to Politics*, (London: Longman, 1960)

70 Raymond G Miltenberger, *Behavior Modification: Principle and procedures* (5th ed.) (University of South Florida: Wadsworth, Cengage Learning, 2012)

ataupun kelompok orang-orang dengan negaranya, serta hubungan negara dengan negara).

Dannimmo dalam bukunya komunikasi politik merumuskan dan menggunakan kata politik hanyalah untuk mengartikan kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Dalam berbagai hal orang berbeda satu sama lain ; jasmani, emosi, kebutuhan, cita-cita, inisiatif, perilaku, dan sebagainya. Kadang-kadang perbedaan ini merangsang argumen, perselisihan dan percekocan. Jika mereka menganggap perselisihan itu serius, perhatian mereka dengan memperkenalkan masalah yang bertentangan dengan itu, dan selesaikan; inilah kegiatan politik⁷¹.

Ilmuan politik Mark Roelofs mendefenisikan politik dengan cara sederhana, "*Politics is talk or to put the matter, more exactly the activity of (politicking) is talking*". Yang maksudnya ; politik adalah pembicaraan; atau lebih tepat kegiatan politik (berpolitik) adalah berbicara. Di sini, Mark menekankan, bahwa politik tidak hanya pembicaraan, juga tidak semua pembicaraan adalah politik. Akan tetapi. "Hakikat pengalaman politik, dan bukan hanya kondisi dasarnya, ialah bahwa ia adalah kegiatan berkomunikasi antara orang-orang."⁷²

B. Partai Politik Menurut Undang-undang Republik Indonesia

Di Indonesia mengenai fungsi partai politik, hak dan kewajiban partai politik telah diatur dalam Undang-Undang no 2 Tahun 2008, pasal 11, 12, 13 sebagai berikut;

- 1. Fungsi Partai Politik (pasal 12) yakni fungsi partai politik menjadi sarana:**
 - a. Pengendalian politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menjejahterakan masyarakat.

71 *Ibid, h. 8.*

72 *Ibid, h. 8.*

- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan.
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

2. Partai Politik (Pasal 12) berhak:

- a. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari Negara.
- b. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri.
- c. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang dan tanda gambar partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- d. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Mengusulkan pemberhentian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Membentuk dan memiliki organisasi sayap paratai politik, dan
- j. Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban Partai Politik (13) meliputi:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
- d. Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak azasi manusia;
- e. Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik;
- f. Menyuskeskan penyelenggaraan pemilihan umum;
- g. Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
- h. Membuat pembukaan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima serta terbuka kepada masyarakat;
- i. Membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan,
- j. Memiliki rekening khusus dana kampanye Pemilihan Umum, dan
- k. Mensosialisasikan program partai politik kepada masyarakat.

C. Definisi Politik Islam

Politik dalam bahasa arab disebut *as-Siyasiyah*, yang kemudian didopsi dalam bahasa Indonesia menjadi siasat. Politik Islam atau *as-siyasah al-Islamiyah*, memiliki makna bagaimana pandangan dan perspektif Islam tentang politik. Politik yang diidentikkan dengan bagaimana mengatur, mengelola dan melaksanakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam sistem Islam. Islam sebagai agama yang *kaffah* (mencakup seluruh aspek kehidupan) dan agama yang *syumul* (lengkap dan sempurna), memberikan tuntunan dan aturan tentang sistem bernegara dan praktek kekuasaan yang dilaksanakan seorang pemimpin. Khalid Ibrahim Jindan dalam bukunya *Praktek Politik Islam*, mengisilahkan dengan ada sejumlah rupa-rupa politik dalam Islam. *Pertama*, *ummah* sebagai raga politik. *Kedua*, model pemilihan yang dipraktekkan dengan model pemilihan

“*Bai'ah*”. *Ketiga*, istilah dan praktek “*syura*” atau musyawarah yang ditekankan dalam Islam. *Keempat*, masalah loyalitas dan pelanggaran (*al-Wala' wal bara'*) dan pemberontakan (*bughat*).

Dalam konteks Politik Islam, atau *Siyasah Islam*, maka ditemukan sejumlah “*term*” atau istilah yang menunjukkan bahwa politik juga bagian dari ajaran Islam yang harus dijalankan sesuai konsep ajaran Allah dan Rasul. Maka diskursus politik Islam akan kita temukan sejumlah bentuk atau rupa dan wajah yang menjadi spirit politik Islam, adapun term politik Islam itu seperti istilah *ummah*, *syura* atau musyawarah, *bai'ah*, dll. Dalam masyarakat Islam, seperti halnya dalam lingkungan masyarakat dunia yang lain, lembaga-lembaga politik dibangun dengan cara yang dianggap paling cocok untuk mempromosikan garis-garis besar nilai-nilai pokok mereka.⁶

Lembaga khilafah yang muncul setelah wafat Nabi saw mempunyai kedudukan sebagai lembaga politik tertinggi dalam Islam yang menimbulkan kesatuan umat Islam di mana pun. Sebagaimana diketahui, lembaga itu menjadi sasaran aneka ragam tantangan praktis dan teoretis yang berakhir dengan runtuhnya kekuatan dan prestise kantor kekhalifahan. Kendati demikian, lembaga tersebut tetap mengganggu pengaruh simbolis dalam bentuk ummat Islam dan sebenarnya berupaya terus hidup dalam bentuk lain sampai kemudian lenyap secara resmi pada masa mustafa Kemal Ataturk tahun 1924. Telah diutarakan juga bahwa Ibnu Taimiyah, dengan metodologi reformisnya, berjuang untuk mengalihkan perhatian dari lembaga khilafah kepada urgensi atau kewajiban ummat Islam untuk memiliki kekuasaan politik meskipun ciri utamanya tidak sama dengan bangunan konstitusi tertentu seperti *khilafah* atau *imamah*.

Ciri utama itu adalah penerapan syariat melalui berbagai upaya kerjasama antara umara dan ulama jadi, menurut pendapatnya, suatu negara Islam tidak Wajib mempunyai seorang khalifah sebagai puncak pimpinan atau demi menandai ciri umum dalam rangka mewujudkan masyarakat “Islam”. Suatu bentuk pemerintahan yang meletakkan syariat sebagai penguasa tertinggi adalah gambaran dari pemerintahan Islam yang memenuhi syarat⁷³ Ibnu Taimiyah bahkan melihat semua warga di berbagai negara Islam sebagai satu masyarakat yang disebut dengan *Ummah*. Dalam berbagai negara Islam itu setiap individu dapat hidup berdampingan secara damai dengan individu lain kendati *independensi*

73 Qomaruddin, *The Political Thought.....*, h. 63

dan konstitusi negaranya masing-masing tidak sama⁷⁴. Namun, syarat pokok yang mendasari kekuasaan negara Islam dengan mendasarkan segala perilakunya pada ajaran-ajaran syariat memerlukan suatu standar tingkah laku tertentu atau serangkaian norma yang menjadi basis tegaknya negara Islam.

D. Term, Istilah, dan Praktik Politik Islam

1. *Ummah* sebagai Raga Politik

Mungkin saja, konsep terpenting dalam pemikiran politik Islam adalah konsep *Ummah* atau komunitas orang-orang yang beriman. Nieuwenhuize mengatakan bahwa “sejarah Islam agaknya dapat ditulis dengan berpedoman pada kesatuan fungsional primordialnya. *Ummah*, yang saat ini telah diwujudkan di bawah kondisi-kondisi cakupannya yang dianggap sederajat. Dengan Cara serupa, kedudukan Islam pada waktu tertentu dapat dikaji dengan Cara yang mereka gunakan dalam memahami kedudukannya demi mewujudkan *Ummah*.” Pada tahap permulaan, kata *Ummah* ditejemahkan sebagai suatu kesatuan abstrak yang menimbulkan kesatuan semua warga muslim, jika tujuhnya *Ummah* yang kongkret muncul ke permukaan sebagai suatu konsep kehidupan dengan mempertibangkan parameter-parameter linguistik dan budaya, maka *Ummah* dapat berlaku sebagai suatu kekuatan yang memelihara dan memperkuat kohesi yang telah mapan. jadi, konsep tersebut berperan sebagai simbol kesatuan dan kekuatan yang mewujudkan kesatuan secara bersamaan.⁷⁵

Dalam Alquran, makna istilahnya bervariasi sesuai dengan kondisi obyektif yang mengiringi kelahiran dan kebangkitan Islam. Pada awal-awal Surat-surat Makkiyah, kata *Ummah* secara sinonim disamakan dengan istilah-istilah berikut: *Qawm* (kaum), *Millah* (golongan), *Din* (agama), *Thariqah* (jalan), *jamaah* (komunitas), dan *Sya’b* (suku) dalam artian yang bebas. Namun secara bertahap, pada periode Madinah, istilah-istilah itu dipakai dalam arti teknis yang khusus dan artinya dapat dipastikan sesuai dengan perkembangan penggunaannya dalam Alquran. Jadi, dalam surat-surat Madaniyah,

⁷⁴ *Ibid.*, h. 130

⁷⁵ *Ibid.*, h. 13

Ummah sering kali digunakan dalam arti lebih terbatas yang mengarah pada kelahiran masyarakat Islam baru.⁷⁶

Menurut makna istilah, *Ummah* meliputi totalitas (jamaah) individu-individu yang saling terikat oleh tali atau ikatan agama, bukan kekeluargaan maupun ras. Di dalam *Ummah* itu segenap anggota bersaksi sepenuhnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Di hadapan Allah swt, semua anggota mempunyai derajat yang sama, tidak ada perbedaan tingkatan, kelas atau ras.⁷⁷ Sedang makna *Ummah* dalam arti yang lebih luas tidak hanya terbatas pada masyarakat Madinah. Dalam dokumen yang disebutkan “Konstitusi Madinah” atau “Piagam Madinah”, istilah *Ummah* digunakan dalam dua arti yang berbeda dalam dua bagian dokumen: (1) pada bagian awal istilah itu digunakan dalam arti khusus, yakni masyarakat keagamaan orang-orang yang beriman; Serta (2) pada bagian kedua, kata itu diartikan sebagai masyarakat perseketentuan secara umum atau suatu aliansi defensif.⁷⁸ Namun demikian, corak *konfederasi* dengan masyarakat non-muslim itu dipandang tidak mengubah keunikan dasar dan kekhususan ummat Islam.

Sebuah ayat dalam Alquran menyebutkan bahwa umat Islam adalah sebaik-baik umat manusia⁷⁹; kriteria inilah yang membedakan mereka dengan masyarakat-masyarakat lain. Mereka membentuk sebuah organisasi tunggal yang tidak dapat dipecah dengan dibebani kewajiban untuk menegakkan iman yang benar, menyuruh (mengajak) manusia agar meniti jalan yang lurus atau jalan Allah, mengajak pada kebaikan dan mencegah mereka dari kejahatan kata-kata atau perbuatan.⁸⁰ Ayat lain menerangkan istilah itu sebagai ummat “*pertengahan*” di antara masyarakat-masyarakat lain. Fungsi dan tugasnya adalah untuk memberi kesaksian kepada Allah swt. dalam kaitannya dengan segenap anggota ummat dan manusia lain.

⁸¹ Sisi paling penting peranan *Ummah* dalam Islam adalah tingkat

76 Ahmad Manzooruddin, *Umma: The Idea of a universal Community, Islamic Studies vol 14, 1975*, h. 27

77 Gibb, *Constitutional Organization, dalam Khuddari dan Liebesny, Law in the Middle East (Washington D.C.: Middle East Institute, 1995)*, h. 3

78 Manzooruddin, *Umma.....*, h. 34-35

79 QS. 3: 110 “Kamu adalah ummat yang terbaik dikeluarkan di tengah ummat manusia menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar serta beriman kepada Allah, sekiranya ahul kitab itu beriman tentulah itu lebih baik bagi mereka, sebagian mereka beriman dan kebanyakan mereka fasiq”

80 QS. 3: 110

81 QS. 2: 134

solidaritasnya yang tinggi. Bentuk solidaritas itu tidak sama dengan solidaritas mekanis yang muncul dari keberadaan manusia dalam suatu masyarakat dengan faktor-faktor yang umum seperti wilayah, budaya dan bahasa (faktor-faktor yang lazim ada pada sebuah bangsa). Solidaritas Islam adalah sebuah solidaritas organik yang mencitakan dan berupaya meneropong eksistensi tujuan yang bersifat umum dan menghendaki partisipasi setiap warganya untuk merealisasikan tujuan itu dalam batas-batas perangkat yang dimiliki sejalan dengan keragaman tugas (kewajiban) masing-masing⁸²

Unsur organik dalam studi tentang konsep negara Islam menurut Ibnu Taimiyah itu tidak lain adalah suatu ungkapan tentang realitas dasar serupa yang terungkap dalam istilah-istilah lain. Ketika menekankan struktur organisasi masyarakat Islam, Ibnu Taimiyah hanya mengikuti kriteria Nabi SAW. yang bersabda, *"Dalam urusan cinta dan kasih sayang, ummat Islam mestinya mirip sebuah tubuh; jika Salah seorang warganya sakit, maka anggota-anggotayang lain juga merasakan demam dan lemas."*⁸³ Hadis yang lain juga menuturkan pengertian serupa, *"Hubungan antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat bagian-bagian dalam sebuah bangunan; masing-masing saling menguatkan."*⁸⁴ makna kesatuan dan solidaritas itu juga berakar pada tradisi Islam yang memiliki independensi tersendiri terhadap berbagai ragam tantangan kehidupan politik. Eksistensinya telah merasuk dan dirasakan dalam setiap kalbu muslim kendati tidak ada lagi kekalifahan dan dunia Islam terpecah menjadi berbagai bentuk pemerintahan yang kadang-kadang saling bertumpah darah.

Rasa identitas dan kesatuan sebagai sebuah *Ummah* tunggal, *din An-nas*, yakni suatu masyarakat yang berbeda dengan ummat lain, tetap memiliki dan menyimpan daya serta efektivitas meskipun tidak ada kesatuan politik. Kesatuan politik *Ummah* dalam satu macam bentuk atau bentuk lain memang menjadi sebuah harapan, namun hal itu tidak merupakan suatu kondiai pokok bagi kelangsungan eksistensinya.⁸⁵ Dalam batas-batas negara Islam, *Ummah* mempunyai peranan penting dalam gelanggang politik. *Ummah* tidak hanya menyediakan diri sebagai badan politik yang menjadi dasar negara Islam, tetapi juga

82 *Laoust, Doktrines.... h. 225*

83 *Hadis Sahih Bukhari dan Muslim*

84 *Hadis Sahih Bukhari dan Muslim*

85 *Bernard Lewis, Politics and War, dalam Schacht dan Bosworth, The Legacy of Islam (Oxford: Oxford University Press, 1974), h 173*

“dilimpahi karunia Allah dengan ciri khusus seperti yang tersurat dalam sabda Nabi saw, “Masyarakat tidak akan pernah sepatat dalam kesalahan.”⁸⁶ Karakteristik khusus itu menjadi dasar ide Ijma’ sebagai salah satu sumber hukum Islam. Seperti yang dikemukakan terdapat Ijma’ yang merupakan produk ulama itu tidak mengurangi peranan *ummah* dalam proses kehidupan, karena ulama dianggap mewakili seluruh jajaran masyarakat. Unsur perwakilan ini menjadi ciri khas pemikiran Ibnu Taimiyah yang tidak hanya memandang remeh peranan kekhalifahan, tetapi juga enggan memberikan kedudukan istimewa kepada ulama, yang akan membedakan mereka dengan, atau tidak terkait dengan masyarakat pada umumnya.⁸⁷ Lagi pula, sudah menjadi keyakinan umum di kalangan Sunni bahwa sejak Nabi saw. wafat, yang tidak menunjukan seseorang atau sebuah panitia untuk mewarisi kepemimpinannya, maka tugas tersebut secara otomatis dipikul atau menjadi tanggung jawab seluruh *Ummah*. jadi, *Ummah* dapat dianggap sebagai satu-satunya penerus Nabi saw sedang kadar kekuasaan dan kesuciannya dapat disejajarkan dengan Nabi saw. Untuk mendukung peranan dan ciri-ciri itu, ada beberapa ayat dalam Alquran yang menegaskan *Ummah* sebagai pelanjut kepemimpinan itu.⁸⁸ Status ini terbukti dengan tanggungjawab legislatifnya dalam ijma’ sebagai media yang mentransformasi “kehendak” masyarakat (secara teoritis merupakan kehendak Allah SWT. kepada “hukum-hukum” syariat.

2. Model Pemililhan: *Bai’at*

Sisi penting politik yang terkait dengan *Ummah* dalam teologi dan sejarah Islam barangkali tercermin dalam gaya pemimpin negara Islam yang terpilih. Idealnya, pemimpin negara Islam yang juga pemimpin masyarakat adalah seseorang yang terpilih di antara beberapa calon setelah melalui proses pemilihan yang melibatkankonsultasi pendahuluan. Bila nominasi itu ditentukan kepada orang tertentu, maka permasalahannya dikembalikan kepada seluruh jajaran *ummah* yang berhak memberikan konfirmasi atau ratifikasi terakhir. Proses yang kedua ini disebut *bai’at*. *Bai’at* adalah sumpah setia yang mempertalikan pemimpin dan masyarakatnya. *Bai’at* identik dengan sebuah “perjanjian”, dan sebagaimana layaknya

⁸⁶ Leonard Binder, *Al-Ghazali and Islamic Government*, h. 234

⁸⁷ Qomaruddin, *The Political Thought..... h. 137-139*

⁸⁸ Q.S. 6: 165 dan Q.S. 2: 30

semua ragam perjanjian, *bai'at* melibatkan dua kelompok: di satu sisi, pihak pemimpin dan masyarakat; disisi lain, tidak hanya ulama yang berperan penting dalam proses konsultasi sebelum *bai'at* terwujud, tetapi semua pihak yang berpengetahuan, berbakat, berpengaruh dan mempunyai kekuasaan juga turut terlibat dalam proses itu.⁸⁹ Perluasan sekup *bai'at* dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang berpengaruh merupakan salah satu pemikiran pokok Ibnu taimiyah yang tidak sejalan dengan implikasi elitis konsep *ahlul-halli wal-'aqdi*, ciri khas teori khilafah klasik. Sebagai ahli teori klasik memang memandang *ahlul-halli wal-'aqdi* mempunyai kekuasaan yang begitu besar dalam menentukan hasil proses konstitusi, sehingga dalam berbagai kesempatan mereduksi praktik *bai'at* atau bahkan mengabaikannya. misalnya, untuk membenarkan adanya suksesi dinasti.

Mawardi menegaskan bahwa *bai'at* dapat dikatakan sah (*valid*) kendati hanya lahir dari perjanjian pemerintah dengan satu pemilih sehingga membenarkan bagi praktik suksesi yang turun-temurun.⁹⁰ Ibnu jamah melangkah lebih jauh lagi dengan melepaskan *bai'at* masyarakat dan memandang *bai'at* perseorangan pendahuluan antara pemerintah dan jamaah (barangkali saja *ahlul-halli*) "cukup untuk mewujudkan perjanjian demi kesatuan ummat Islam."⁹¹ Prinsip ini membuka peluang bagi para pembangkang untuk mengklaim pemerintahan *de facto*-nya yang disahkan dengan *ahlul-halli* melalui penerapan sebagian kecil prinsip-prinsip yuridis (hukum) yang berlaku.⁹² Karena kemungkinan itulah Ibnu Taimiyah melontarkan kritik pedas terhadap lembaga *ahlul-halli*. Menurut pendapatnya, tidak satu pun ayat Alquran maupun Sunnah Nabi saw. yang mendukung eksistensi badan pemerintahan dengan supremasi yuridis itu, baik untuk menobatkan atau mencopot seorang pemimpin.⁹³ Peranan penting yang ia berikan kepada ulama dalam administrasi negara tidak berarti bahwa mereka mempunyai wewenang untuk menunjuk seorang pemimpin. Tidak hanya kerjasama mereka yang diperlukan untuk memilih pemimpin yang baru, tetapi juga kerjasama semua unsur efektif lain dalam masyarakat. Mencoba membatasi sekup

89 *Laoust, Doctrines.....*, h. 287

90 *Siegman, The State and the Individual.....* h. 17

91 *Faruki, The Evolution of Islamic.....* h. 57

92 *Qomaruddin, The Political Thought.....* h. 133

93 *Ibid*, h. 133

pemilihan kepada dewan pemilih yang kecil dengan memberinya derajat tinggi Serta hak institusionalisasi bukan saja tidak dapat diterima, tetapi juga tidak mempunyai dasar dalam kitab Suci Alquran dan as-Sunnah, terutama jika lembaga itu menampilkan berbagai keputusan yang tidak senada dengan semangat syariat.

Tampaknya, Ibnu Taimiyah mengajukan kesimpulan bahwa elitisme yang tergabung dalam *ahlul-halli wal-'aqdi* dapat manggeser makna rujukan Alquran tentang kebutuhan manusia akan adanya konsultasi dan kerjasarna dalam managemen berbagai tata pergaulan masyarakat.⁹⁴ Sebagaimana diketahui, rujukan-rujukan itu tak lebih dari sekadar penegasan prinsip-prinsip umum yang dimaksudkan untuk mengatur kehidupan masyarakat Islam termasuk pemilihan pemimpin Namun, Alquran tidak menjelaskan tata Cara pemilihan, identitas maupun jumlah para pemilih bahan-bahan yang termasuk dalam tulisan al-Mawardi, tetapi tidak terdapat dalam karya~karya Ibnu Taimiyah.⁹⁵ Mengenai masalah tersebut, ia membatasi dirinya pada prinsip-prinsip Alquran yang umum dengan menyajikan pengertian yang telah diterangkan dalam syariat.

Ibnu *Taimiyah* juga mendasarkan pendapatnya tentang masalah pemilihan pada praktik kehidupan Nabi saw. dan Khulafaur-Rasyidin menurut pendapatnya, keempat khalifah itu meraih kekuasaan berdasarkan pemilihan masyarakat meskipun metode suksesi masing-masing tidak sama. Nabi saw. telah memberikan petunjuk-petunjuk Serta indikasi-indikasi bahwa *Khulafaurrasyidin* kelak akan meneruskan kepemimpinannya dalam memikul amanat pemerintahan di dunia. Namun, bagi mereka sendiri, berbagai petunjuk dan indikasi itu tidak mengualifikasikan orang-orang yang berhak menjadi khalifah kecuali jika masyarakat Islam memilih dan menghendaki mereka. Dalam *minhaj as-Sunnah*, ia mempertahankan pendapatnya dengan kisah seorang anggota kunci dalam dewan yang dibentuk untuk memilih pengganti Khalifah Umar r.a. ia menjajaki berbagai tempat seraya mengadakan konsultasi dengan tokoh-tokoh muslim terkemuka di Madinah dan pemerintahan-pemerintahan lokal di berbagai propinsi yang ada untuk memperoleh masukan

94 *Al-Qasimi, Nizham al Hukm..... h. 232-234*

95 *Ibnu Taimiyah, Minhaj as- Sunnah..... h. 202-203*

tentang orang yang paling banyak meraih dukungan dari enam calon khalifah.⁹⁶

Ibnu Taimiyah juga mengajukan pendapat bahwa Khalifah Umar terpilih menjadi khalifah bukan karena penunjukan khalifah sebelumnya, Abu Bakar ra, tetapi karena masyarakat memberikan mandat kepadanya yang terwujud dalam *bai'at*. Pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah itu menunjukkan, bahwa restu masyarakat yang terungkap dalam *bai'at* menjadi dasar bagi keabsahan pemerintahan Islam,⁹⁷ karena *bai'at* mempunyai arti yang amat penting, makak pelaksanaannya harus dilakukan dalam suasana yang menjamin kebebasan berpendapat dan kemungkinan adanya opsi meskipun harus senantiasa terkait dengan syariat, yang wajib dipatuhi pemerintah maupun masyarakat sebagai suatu komitmen tegas untuk menaati semu aturan dalam Alquran dan as-Sunnah.⁹⁸ Ia juga mengaitkan keabsahan pemerintah Islam dengan faktor kekuasaan tanpa mengabaikan tujuan-tujuan pemerintahan.

Ibnu Taimiyah sering menyebut *ahlusy-syaukah* (orang-orang yang memegang tampuk kekuasaan) dan memandang dukungan mereka kepada pemerintah Islam sebagai syarat pokok bagi kemandapan dan konsolidasi negara Islam. Menurut pendapatnya, negara tidak didirikan oleh aliansi sekelompok ulama atau kelompok yang menamkan diri *ahlul-halliwal-'aqdi*, namun ditegakkan oleh kerjasama seluruh masyarakat, karena kekuasaan dan kekuatan *ahlusy-syaukah*, imamah akan kehilangan kekuasaan dan kekuatan, bahkan seluruh tujuan yang dicitakan,⁹⁹ demikian kata Ibnu Taimiyah. Meskipun dipandang penting, isi pernyataan *bai'at* tidak cukup untuk mendukung tegaknya lembaga *imamah* (kepemimpinan) jika tidak didukung dengan kekuatan fisik.¹⁰⁰ Dalam masalah ini Ibnu Taimiyah dapat dianggap bersikap realitis dan berpandangan modren, karena ia lebih memahami peranan kekuasaan dalam politik ketimbang fuqaha lain. Pada abad ke-12.

Max Weber mendefenisikan negara sebagai "sebuah komunitas manusia yang dengan gemilang berhasil mengklaim monopoli

96 *Ibid*, h. 203

97 *Al-Mubaraak, Nizham al-Islam.....*, h. 76

98 *Ibnu Taimiyah, Minhaj as-Sunnah jilid 4*, h. 202-303, *al-Qasimi, Nizham al-Hukm..* h. 274-275, lihat juga *Q.S. 5: 47, 48 dan 50*

99 *Al-Mubarak, Nizham al-Islam.....*, h. 75

100 *Ibid*, h. 75

pemakaian kekuatan fisik yang sah.”¹⁰¹ Ibnu Taimiyah, tokoh abad ke-14, tidak sulit untuk menyetujui defenisi Weber itu. Hanya saja, ia menambahkan *bai'at* sebagai dasar bagi keabsahan penggunaan kekuatan fisik. Apresiasi peran kekuatan dalam pandangannya tentang syarat-syarat pemimpin negara Islam. Jauh sebelum menawarkan seperangkat syarat moral dan intelektual seperti yang terdapat pada teori-teorinya yang pertama tentang khilafah, pusat perhatiannya tertuju pada dua prasyarat pokok: Kejujuran atau dapat dipercaya (*amanah*) dan kekuatan atau kecakapan (*quwawah*). Dasar yang digunakan adalah ayat Alquran sebagai berikut, “... *sesungguhnya orang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.*”¹⁰² syarat-syarat serupa juga dijelaskan oleh ayat lain berikut: “*sesungguhnya engkau (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai disini kami.*”¹⁰³

Syarat lain seperti berpengaruh luas, bersikap adil dan saleh yang harus dipenuhi seorang pemimpin, sejalan dengan metode Ibnu Taimiyah yang menekankan unsur terpenting dalam setiap situasi, dianggap tidak perlu, karena setidaknya pemimpin diharapkan mampu menjalin kerjasama dengan kemampuan, sumber-sumber dan aneka ragam tingkat kehidupan mereka.”¹⁰⁴ syarat-syarat ideal yang telah di contohkan dan diyakini oleh *Khulafaurrasyyidin* dan syarat-syarat yang tercantum dalam berbagai teori khilafah periode awal, menurut pandangannya, dapat dipenuhi oleh seluruh jajaran ummat. Oleh karena itu, setiap muslim dapat dipilih untuk menduduki posisi tertinggi bila ia memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Memperoleh dukungan mayoritas ummat yang dalam Islam ditentukan dengan konsultasi dan *mubaya'ah*.
- b. Memenangkan dukungan *ahlusy-syaukah* atau unsur-unsur pemegang kekuasaan dalam masyarakat.
- c. Memiliki syarat-syarat kekuatan pribadi dan dapat dipercaya

3. Musyawarah (*Syura*)

Konklusi *bai'at* mengandung suatu proses seleksi. Di situlah *syura*, sebagaimana diketahui, memainkan peranan penting untuk

101 C.W. Mills dan H. H. Gerth, *From Max Weber (New York: Oxford University Press, 1958)*, h. 78

102 Q.S. 28: 26

103 Q.S. 12: 54

104 Qomaruddin, *The Political Thought....* h. 145

menentukan pilihan *ummah* tentang orang yang dipandang paling tepat menduduki jabatan sebagai pemimpin. Jika pemilihan itu ditentukan melalui *bai'at*, maka fokus *syura* bergeser ke kawasan lain, yakni kepentingan masyarakat. Jadi andaikan *bai'at* berarti sebuah transaksi atau keputusan dalam kaitanya dengan masalah kepemimpinan, maka *syura* merupakan penajagan penelitian dan pemikiran dengan tujuan meraih cita-cita atau keputusan paling baik yang berkaitan dengan semua persoalan, termasuk masalah kepemimpinan. Alquran banyak menjelaskan sisi penting *syura* atau konsultasi.¹⁰⁵ ayat-ayat tersebut membuktikan bahwa Islam tidak hanya memandang konsultasi sebagai suatu prosedur yang direkomendasikan, tetapi merupakan sebuah tugas keagamaan. Contoh:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ^ع

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhanNya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka”.¹⁰⁶

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ

Artinya: “Berkatalah ia (Balqis), ‘Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini); aku tidak pernah memutuskan suatu persoalan sebelum kalian berada dalam majelisku”.¹⁰⁷

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ع وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ
حَوْلِكَ^ط فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ع فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ^ط إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: ”Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan

105 *Bai'at juga disebutkan dalam Alquran (tiga tempat) yakni: Q.S. 48: 10, 18 dan Q.S. 60: 12*

106 *Q.S. 42: 38*

107 *Q.S. 27: 32*

bermusyawrahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwallah kepada Allah.”¹⁰⁸

Orang yang dimaksudkan dalam ayat terakhir itu tidak lain adalah Nabi saw. Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin masyarakat Islam. Bila Nabi saw, dengan segenap kemaksuman dan kebesarannya, wajib berkonsultasi dengan rakyatnya, maka pemimpin Islam sesudahnya tentu lebih banyak dituntut untuk berkonsultasi ketimbang Nabi SAW, sesuai dengan kadar perbedaan antara keduanya. Lalu, orang mungkin saja mengajukan pernyataan: mengapa Nabi saw., yang sudah maksum perlu berkonsultasi? Jawaban yang sering diberikan terhadap masalah tersebut, seperti diadopsi oleh Ibnu Taimiyah adalah bahwa Allah swt. Menghendaki Nabi Muhammad saw. Untuk memberikan contoh nilai konsultasi agar ditiru oleh umat lain.¹⁰⁹ Untuk memperkuat peringatannya kepada pemimpin Islam tentang pentingnya konsultasi. Ia menyebutkan sabda Nabi saw. Yang mengisahkan bahwa beliau “sering memanfaatkan dan menggunakan konsultasi kepada siapapun yang ditemui”.¹¹⁰ Konsep Ibnu Taimiyah tentang musyawarah atau konsultasi sama luasnya dengan konsep yang dikemukakannya tentang *bai'at*. Ia menghendaki adanya musyawarah yang lebih efektif dan umum.

Seorang pemimpin seharusnya tidak hanya menimba (meminta) pertimbangan dari ulama, tetepi semua kelas dalam masyarakat dan siapa saja yang mampu memberikan suatu pendapat yang dinamis.¹¹¹ hanya saja, ada batasan yang melingkari berlakunya konsultasi secara wajar. Tidak semua permasalahan dapat dijadikan materi konsultasi. Misalnya, ajaran-ajaran Islam pokok yang merupakan dasar-dasar agama tersebut tidak perlu lagi dipermasalahkan atau dimusyawarahkan. Memusyawarahkan validitas ajaran-ajaran itu justru dipandang sebagai tindakan kufur dan *bid'ah*. Jika tidak ada tuduhan (serangan) terhadap Islam dari non-muslim, maka seorang pemeluk Islam dapat kehilangan status ke-Islamannya jika ia mengajak muslim lain untuk membahas apakah minuman khamr atau zina itu haram atau halal.¹¹² Ibnu Taimiyah membatasi musyawarah itu

108 Q.S. 3: 159

109 *Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa...., Jilid 28, h. 386*

110 *Ibid, h. 386*

111 *Laoust, Doctrines....., h. 301-302*

112 *Abdur-Rahman Abdul Khaliq, asy-Syura fi Zhilil Nizham al-Hukm al-Islami (Kuwait: ad-Dar-s-Salafiyah, 1975), h. 15*

pada “berbagai masalah yang tidak dijelaskan oleh wahyu”. Andaikan pendekatan Ibnu Taimiyah terhadap pemerintahan Islam yang didasarkan pada syariat dilihat suatu kerangka kerja umum bukan konstitusi khusus, maka terbuka lebar kawasan luas yang belum ditegaskan sehingga kreativitas dan imajinasi menjadi penting. Dengan kata lain, ada ruang gerak yang lebih luas adanya konsultasi dalam teori pemerintahan Ibnu Taimiyah ketimbang pemulaan teori Sunni periode pertama tentang *khalifah* atau teori Syi’ah tentang *imamah*. Kedua teori tersebut dibatasi dengan rumusan atau standar-standar kaku yang berasal dari *over-reading* atau *mis-reading* (salah baca) mereka terhadap syariat. Bila terjadi “*over reading*“, maka teori khilafah dianggap sebagai satu-satunya sistem konsultasi yang dapat diterima dalam syariat. Sedang masalah salah baca atau “*mis-reading*” terdapat pada golongan Syi’ah yang memandang *imamah* sebagai bentuk penegasan iman sehingga tak terjemah pembahasan akal.¹¹³

Menurut Ibnu Taimiyah, bila kebutuhan akan pemerintahan dianggap perlu, baik karena alasan-alasan rasional maupun agama, maka bentuknya yang khusus atau konstitusinya harus ditentukan oleh ummat atas dasar kerjasama dan konsultasi. Jadi, para pemimpin politik yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah adalah mereka yang berdasarkan pada prinsip *syura* dan menata berbagai problema kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, para pemimpin berkewajiban menerima atau mempertimbangkan masak-masak berbagai hal yang sejalan dengan syariat. Di sisi lain, mereka harus menolak tanpa mempedulikan akibat apa pun yang muncul jika syariat. dan, para pemimpin dihadapkan pada situasi dengan berbagai pilihan yang harus dipertimbangkan, mereka harus mengadopsi pilihan yang paling selaras dengan syariat.¹¹⁴

4. Masalah Loyalitas dan Pelanggaran

Allah swt. Berfirman dalm Alquran: “*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasul-Nya dan mereka yang diberikan wewenang kekuasaan di antara kamu. Andai terjadi perbedaan pendapat di antara kamu semua, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya.*”¹¹⁵ Ayat ini menggambarkan dasar kewajiban politik dalam Islam serta batas-batas kewajiban itu. Dalam Islam Sunni,

113 Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam* (Surabaya h: Risalah Gusti, 1995), h.. 102

114 Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*..... h. 287

115 Q.S. 4:5

perkembangan kekuatan yang ada biasanya cenderung terpengaruh oleh bagian pertama rumusan itu (ketaatan) dengan mengorbankan bagian yang kedua (pelanggaran). “Kecendrungan” itu dibenarkan atau tidak banyak tergantung pada cara seorang menafsirkan materi yang relevan dalam Alquran dan as-Sunnah. Hanya saja, penafsiran Ibnu Taimiyah dianggap paling sesuai dalam kajian ini. Begitu juga akan dikemukakan beberapa Hadis yang menjelaskan segi-segi kedua masalah itu. Abdullah Ibnu Mas’ud (seorang sahabat Nabi saw.) berkata, *“Nabi Muhammad saw. Pernah bersabda kepada kami bahwa masa-masa sepeninggalan beliau akan menjadi saksi adanya berbagai kezaliman dan penyimpangan yang disetujui penguasa.” Para sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, apakah yang harus kami lakukan. Untuk mengatasi Situasi itu?” Beliau menukas, “Taatilah penguasa Itu mintalah kepada Allah apa yang menjadi hakmu!”*¹¹⁶ Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi saw bersabda, *“Jika seorang melihat pemerintahnya sepakat dengan perilaku zalim, maka ia harus bersabar, karena siapapun yang menyimpang dari ketaatan pemimpin, ia akan mati seperti kematian pada masa jahiliyah (masa pra-Islam).”*¹¹⁷

Hadis-hadis tersebut juga hadis-hadis serupa yang lain telah digunakan untuk membenarkan ketaatan yang teguh kepada penguasa, apapun yang dilakukan oleh penguasa itu. Tentu saja hal itu merupakan penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar dan tujuan-tujuan syariat yang dikemukakan oleh pihak-pihak pemerintah tertentu untuk mengesahkan berbagai kebijakan mereka. Hadis-hadis tersebut juga hanya membentuk setengah sejarah keharusan politik yang utuh. Masih banyak Hadis *masyhur* lain yang menunjukkan keharusan mematuhi pemimpin muslim dan tidak *absolut*. Kekuasaan pemimpin itu senantiasa dibatasi dengan ketaatan kepada Dzat Yang Maha Kuasa, Allah swt, seperti yang diisyaratkan dalam hadis-hadis berikut:

- › Ubadah bin Shamit berkata, *“tidak ada keharusan untuk mematuhi siapa pun yang tidak mematuhi Allah.”* (Dari musnad Ibnu Hanbal).¹¹⁸

116 Dikutip dalam M. Mujeeb, “Orthodoxy and the Orthodox: the Syariah as Law”, *Islamic Culture* 38 (1964), h. 32-34

117 *Ibid.*, h. 34

118 Dikutip dalam al-Munifi, “The Islamic Constitutional Theory”, h. 332

- › Anas bin Malik berkata, “Tidak ada kewajiban untuk mentaati orang yang tidak taat kepada Allah swt. ” (Dari musnad Ibnu Hanbal).¹¹⁹
- › Umran bin al-Husain berkata, “tidak ada kewajiban menaati suatu makhluk bila ia terlibat dalam pelanggaran terhadap Sang Maha Pencipta, Allah swt. ” (Dari Musnad Ibnu Hanbal).¹²⁰
- › *Mendengar dan mematuhi pemimpin adalah kewajilaan yang harus dilaksanakan setiap muslim dalam segala hal, baik yang menyenangkan maupun yang menyusahkan, kecuali jika iadiminta untuk berbuat dosa. Andai seseorang diperintahkan untuk berbuat dosa, maka mendengar dan mematuhinya tidaklah wajib.* ” (Dari Bukhari-Muslim).¹²¹

Ketaatan politik juga dibatasi dengan dengan berbagai pertimbangan keadilan dan kebenaran sebagaimana terlihat pada hadis-hadis berikut:

- › “Tidak ada keharusan untuk mematuhi perbuatan dosa, ingatlah, ketaatan hanya wajib pada perilaku yang benar ” (Dari koleksi Bukhari).¹²²
- › “Bila seseorang di antara kamu melihat kejahatan, ia diperintahkan untuk mengubahnya dengan tangannya sendiri, jika tidak Sanggup hendaknya ia menegaskan bahwa perbuatan itu adalah perilaku dosa; dan kalau tidak bisa demikian, maka ia harus yakin bahwa parbuatan itu jahat. Inilah bentuk iman yang paling lemah. ” (Dari koleksi Muslim).¹²³
- › “Jihad yang paling tinggi nilainya adalah jihad seseorang yang dengan tegar menegakkan kebenaran di hadapan sultan (penguasa) yang zalim. ” (Dari Muslim).¹²⁴

Beberapa ayat Alquran juga menegaskan bahwa pemimpin yang tidak adil tidak wajib ditaati sepenuhnya. Dengan kata lain, kepatuhan kepadanya sama sekali tidak dapat dibenarkan. Contohnya adalah:

119 *Ibid*

120 *Ibid*

121 Dikutip dalam Mujeeb, “Orthodoxy and.....”, h. 319

122 Dikutip dalm al-Munifi “The Islamic Constitutional.....” h. 332

123 Dikutip dalam Mujeeb, “Orthodoxy and.....”, h. 32-34

124 *Ibid*

Allah swt. Berfirman:

قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

”janji-Ku tidak mengenai orang zalim” 125

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرَ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”¹²⁶

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka^[1045] ialah ucapan. “Kami mendengar, dan Kami patuh”. dan mereka Itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, Maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan”.¹²⁷

Sedangkan ayat-ayat lain (seperti QS. 3: 104, 3: 110 dan 9: 71) dapat dijadikan dasar untuk membenarkan eksistensi kelompok oposisi dalam negara Islam untuk mengontrol perilaku kelompok

125 Q.S. 2:124

126 Q.S. 60:12

127 Q.S. 24: 51-52

yang berkuasa.¹²⁸ lebih dari itu, perilaku *bai'at* sendiri menunjukkan adanya eksistensi sebuah perjanjian atau ikrar yang berisi sumpah setia masyarakat untuk mematuhi pemimpin yang berjanji mempertahankan dan menjaga syariat. Kesepakatan antara pemimpin dan komunitas Islam itu tidak dapat digugat selama pemimpin mampu melaksanakan tanggung jawabnya. “Bila ia tidak lagi sanggup memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat, maka kekuasaannya hilang dan perjanjian antara kedua belah pihak pun batal.”¹²⁹

Dalam pidato pengukuhanannya, Abu Bakar r.a. menekankan masalah yang sama: “*Bila aku melangkah di atas jalan yang benar, yakni syariat, maka ikutilah aku. Bila aku menyimpang, luruskan aku! Orang yang paling lemah di antara kalian justru aku anggap yang terkuat sampai aku melindungi dan memenuhi hak-haknya. Orang yang paling kuat di antara kalian aku pandang sebagai orang yang terlemah sampai aku sejajar dengannya. taatilah aku selama aku mentaati Allah dan Rasul-Nya, dan jika aku tidak mematuhi Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada kewajiban bagi kalian untuk mematumiku.*”¹³⁰

Pendapat Ibnu Taimiyah mirip dengan pernyataan paham Sunni yang tercermin dalam sebuah Hadis, “*Tidak ada kewajiban untuk mematahi orang yang tidak mematuhi Allah swt.*” Ringkasnya, pelanggaran pemimpin terhadap syariat sama sekali tidak dapat dibenarkan. Dalam tulisannya, *Minhaj* ia merujuk pada sebuah Hadis yang telah disebutkan di muka kendati dengan perubahan bentuk, tetapi misinya sama, “*Siapa Saja yang menyimpang dari masyarakat Islam dengan kadar yang paling sedikit pun, maka kualitas ke-Islamannya akan terkikis. Barang siapa meninggal dalam kondisi tidak mematuhi pemimpin, maka kematiannya sama dengan kematian di masa jahiliyah.*”¹³¹ Berdasarkan Hadis tersebut dan Hadis-Hadis lain yang senada, Ibnu Taimiyah mencela ketidak patuhan kepada pemimpin, karena sikap itu dapat membelah atau mengikis kesatuan dan persatuan ummat Islam. Namun ia juga menegaskan bahwa hukuman mati bagi seseorang tidak mematuhi pemerintah dapat mengancam ummat Islam setelah bersatu di bawah satu pimpinan

128 *Al-Qasimi, Nizham al-Hukm..... h. 100-105*

129 *David D. Santillana, “Law and Society”, dalam The Legacy of Islam, disunting Thomas Arnold dan Alfred Guillaume (Oxford: Oxford University Press, 1931), h. 300*

130 *Dikutip dalam al-Qasimi, Nizham al-Hukm..., h. 165*

131 *Dikutip dalam Minhaj as-Sunnah....., h. 236*

atau diatur oleh suatu kebijaksanaan tertentu.¹³² Meskipun demikian, ia menjelaskan bahwa kesatuan yang dimaksudkan adalah kesatuan yang dituntun oleh Alquran dan as - Sunnah.

Kesatuan apapun yang tidak didasarkan pada syariat dianggap salah dan menyimpang dari kebenaran atau perintah Allah swt. Ia mengatakan “Andai kata terdapat dua kelompok manusia; yang Satu mematuhi Allah dan Rasul-Nya, sedang yang lain melanggar aturan keduanya, adalah suatu kewajiban bagi seseorang untuk menyimpang dari kelompok itu selama ia mematuhi perintah-perintah Allah swt. Dalam suasana demikian, ia harus dapat bergabung dengan kelompok yang mematuhi Allah swt., meskipun mengakibatkan kekacauan yang lebih luas.”¹³³ Untuk mendukung pendapatnya tentang ketaatan politik yang tergantung pada ketaatan kepada Allah swt, Ibnu Taimiyah mengajukan, tafsirnya sendiri tentang ayat “ketaatan” yang telah disebutkan di muka (Q.S. 4: 62). Dalam ayat ini, begitu tafsirnya, Allah swt. menggunakan kata “taatilah” hanya dua kali, satu di depan kata “Allah” dan satu lagi di depan kata “Nabi”. Di depan kata “mereka yang berwenang memerintah”, kata tersebut digantikah dengan kata sambung “dan”. Allah swt. tidak akan mengatur sedemikian rupa jika tanpa maksud. Maksudnya adalah bahwa ketaatan kepada penguasa tergantung kepada atau termasuk di dalam ketaatan kepada Allah swt. Dan Nabi saw.¹³⁴ dengan kata lain, dalam negara Islam, kewajiban politik mestinya di pandang sebagai suatu kewajiban yang bergabung pada kewajiban agama itu sendiri.¹³⁵ Namun demikian, Ibnu Taimiyah kembali pada nada yang konservatif ketika memandang masalah pemberontakan bersenjata (militer). Pemberontakan militer terhadap pemerintah tidak pernah dibenarkan oleh agama kendati dilakukan sebagai reaksi terhadap kezaliman atau kejahatan sebaian oknumnya, demikian ia menegaskan.¹³⁶ agaknya, ia melontarkan kritik kepada khawarij yang menganggap pemberontakan terhadap pemimpin yang tidak adil sebagai perwujudan iman.

Pendapat itu juga mengandung peringatan atau serangannya kepada Syi'ah yang menganjurkan pembangkangan sistematis terhadap pemimpin yang tidak memenuhi kualifikasi ke-Tuhanan.

132 *Ibnu Taimiyah, as-Siyasah asy-Syar'iyyah (Qatar: Dar aal-Kitab al-Arabi, tt), h. 124*

133 *Ibnu Taimiyah, Minhaj as-Sunnah, h. 235*

134 *Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa, h. 266-267*

135 *Ibnu Taimiyah, al-Fatawa al-Kubra, h. 461*

136 *Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa, h. 444*

Cukup menarik, bahwa Ibnu Taimiyah yang merujuk pada Hadis Nabis saw tentang peringatan bagi ummat Islam terhadap “Kegagalan untuk mengekang suatu kejahatan yang nyata” dalam karyanya, *as-siyasah asy-syar*, menampilkan sikap yang berbeda dalam *minhaj as-Sunnah*. Dalam tulisan yang kedua itu ia mengajak ummat Islam untuk tidak menentang pemimpin yang zalim karena penentangannya hanya akan menggiring pada suasana yang anarkis.

Ketidak selarasan dalam pemikiran Ibnu Taimiyah itu dengan mudah dapat dijelaskan jika telah diketahui bahwa *Minhaj as-Sunnah* ditulis untuk menangkis doktrin Syi'ah. Di sisi lain, *as-Siyasah asy-Syar'iyah* dianggap mencerminkan pemikiran yang ortodoks. Jadi, adanya perbedaan dalam audiensi dan maksud agaknya dapat dipertanggung jawabkan (diterima) karena perubahan gejala hati (*mood*). Kendati demikian, Ibnu Taimiyah mempunyai berbagai alasan untuk menopang sikapnya yang anti revolusioner.¹³⁷ Ia mengajukan alasan bahwa perlawanan terhadap kezaliman atau korupsi pemimpin dapat menggiring pada kezaliman atau korupsi pemimpin dapat kejahatan yang lebih besar, karena munculnya perpecahan di kalangan masyarakat (*fitnah*). Oleh sebab itu, jika dipastikan bahwa perlawanan terhadap pemerintahan zalim dapat menimbulkan pertikaian penduduk, situasi yang dianggapnya tak terhindarkan dalam situasi dengan pemimpin yang didukung kelompok yang berkuasa, maka ummat Islam lebih baik mempertahankan apa yang telah dimiliki ketimbang memulai suatu tindakan yang dapat menimbulkan suasana yang lebih buruk.¹³⁸ Hanya saja, manakala pemerintah tidak lagi populer karena kehilangan kepercayaan dan dukungan dan masyarakat, apakah alasan cukup untuk menumbangkannya? Andai Ibnu Taimiyah tidak memikirkan kemungkinan itu, orang lain boleh berpikir bahwa ia sebenarnya menentang sikap itu sebagaimana yang terungkap dalam kutipan berikut: “Tidak diizinkan bagi setiap muslim untuk memberontak Kepada setiap pemerintah yang zalim dan tiran. Alasan-alasan pemerintah yang zalim untuk mengambil alih hak milik dan tanah rakyat biasanya ditolak atas dasar pertimbangan-pertimbangan material. Orang-orang (rakyat) menentangnya demi mengembalikan (mempertahankan) hak milik mereka dan

137 Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik* h. 109

138 Ibnu Taimiyah, *Minhaj as-Sunnah*..... , h. 87

mengakhiri kezalimannya, jadi, motif mereka bukan demi mengabdikan kepada Allah swt. atau menjunjung kalimat-Nya yang tertinggi.”¹³⁹

Sebenarnya, Ibnu Taimiyah di sini berada pada titik yang paling lemah karena apa yang dikatakannya akan menggiring pada sebuah kontradiksi, tidak saja dengan ajaran-ajaran itu Syariat tetapi juga dengan pemahamannya tentang ajaran-ajaran itu, yakni bahwa Islam adalah sebuah agama dan cara hidup dengan nilai-nilai sosialnya yang tertinggi: keadilan, kerjasama dan kejujuran. jadi, tidak berguna jika kita mencoba membedakan antara sebuah perilaku yang “melayani agama dan mengangkat kalimat Allah Yang Mulia” dengan orang yang bermaksud mengakhiri kezaliman dan memperbaiki hak-hak perorangan yang sah. Ketika khalifah pertama berkata. “Patuhilah aku selama aku mematuhi Allah dan Rasul-Nya,” Ia belum dapat memahami situasi dengan standar-standar universal yang sederhana tentang keadilan dan persamaan berada di depan, dan menentang nilai ketaatan kepada Allah SWT. Dan Rasul-Nya. Bagaimana ia dapat melaksanakan tugas jika dihadapkan pada ayat Alquran sebagaimana berikut; *“Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan”*.¹⁴⁰ Menggunakan perbedaan yang membingungkan antara pelanggaran dan pemberontakan tidak mudah untuk menentukan garis pemisah antara pelanggaran yang dapat diterima dan pemberontakan yang tidak dapat diterima. Dalam situasi yang ditandai dengan kezaliman dan tirani, setiap pelanggaran dapat dianggap sebagai pemberontakan. Karenanya pilihan yang mesti ditentukan tidak muncul di antara kezaliman dan pemberontakan, tetapi antara memaafkan kezaliman dan menentangnya. Bila orang memilih diam, berarti ia mengabaikan makna ayat tersebut di atas serta kebenaran Hadis Nabi.saw yang masyhur, *“Sungguh, andai Orang melihat kejahatan naman tidak memperingatnya, maka sangat mungkin adzab Allah akan meluluhlantakkan mereka”*¹⁴¹

Ibnu Taimiyah banyak bersandar pada Hadis tersebut dalam menuangkan berbagai tulisannya. Ia juga bertumpu pada hadis lain yang menekankan pentingnya kesepakatan dan kerelaan bersama (umm). Dalam hadis. itu Nabi saw. bcrsabda:

139 *Ibid*, h. 37

140 *Q.S. 26: 151-152*

141 *Dikutip dalam Qomaruddin, “Al-Mawardi’s Theory.....” h. 80*

”Sungguh, orang yang paling dekat denganku dan paling aku cintai pada hari Kiamat adalah pemimpin yang adil, sedang orang yang paling aku benci dan aku jahui pada hari Kiamat adalah pemimpin yang tiran.”¹⁴²

¹⁴² Al-Mubarak, “Ad-Daulah ‘ind Ibn Taimiyah” dalam *Usbu’ al-Fiqh*, h. 858

BAB IV

PARTAI POLITIK ISLAM

A. Definisi Partai Politik

Terdapat beragam definisi partai politik di antaranya, Imawan menyebutkan, tidak kurang dari 80 variasi definisi tentang partai politik. Beragamnya pendapat dan pengertian tentang partai politik ini terutama karena berbeda dalam penekanannya. Ada yang menekankan akar ideologi partai seperti pendapat Burke dan Reagan, penekanan partai sebagai alat untuk mendapatkan akses pemerintah seperti Epstein, Schlesinger, dan Aldrich. Juga ada yang menekankan sebagai desain instrumen mediasi yang penting dalam mengorganisir dan menyederhanakan pilihan pemilih dalam mempengaruhi tindakan pemerintah seperti Downs, Key, dan Chambers, dan sebagainya.¹⁴³

Defensi partai politik yang beragam tersebut, akan penulis kutip beberapa di antaranya; Cerl J Fredirch mendefinisikan partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan pengawasan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan pengawasan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material.”*a political party is a group of human beings stability organized with the objective of giving to members of the party, trough such control ideal and material benefits and advantages*”.¹⁴⁴

Raymond Garfield Gettel memberi batasan bahwa, partai politik terdiri dari sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memakai kekuasaan memilih bertujuan mengawasi pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka ” (*a political party of a group of citizens, more*

143 Whtie, Katz dan Crotty dalam Sigit Pamungkas, *Partai Politik.....*, h. 4-5

144 Dan Nimmo, *Political communcation.....* h. 8

or less organized who acts political unit and who, by the use of their voting power and to control the government and carry out their general polingles).

Kemudian, George B Huszr dan Thomas H. Stevenson menyebutkan partai politik adalah sekelompok orang-orang yang terorganisir untuk ikut serta mengendalikan pemerintahan, agar dapat melaksanakan programnya dalam jabatan “*a political party is a group at people organized to secure control of government morder to puts program in to effect and it member in office*”.¹⁴⁵

Sigmund Neumann dalam karangannya menyebutkan “*Modern Political Parties*” bahwa defenisi partai politik adalah organisasi dan aktivitas-aktivitas politik yang berusaha menguasai pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan satu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda” (*a politica party terniiculate organization of society as active political agent those who are conserned with the control of the governmental power and who compete for popular support with another group holding divergent view*)”. Suatu batasan jauh lebih sederhana dan batasan yang dikemukakan oleh Neumann, dikemukakan oleh RH. Soltau. Dalam hal ini Soutlau menyatakan: “Partai politik adalah sekelompok warga Negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan untuk menuasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka” (*a political party is a group of citizen more or less organized, who act as a political unit and who, bay the use of their voting power, aim to control the government and carry out their general polities*).¹⁴⁶

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggota mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konsultasional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.¹⁴⁷ Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan suka rela melalui nama seseorang turut serta langsung atau tidak langsung dalam pemilihan umum. Kegiatan-kegiatan ini mencakup kegiatan memilih dalam pemilihan umum, menjadi golongan anggota politik

145 *Ibid*, h. 8

146 *Ibid*, h. 9

147 *Sukama, Sistem Politik (Bandung: Alumni, 1997), h. 89*

seperti partai. Kelompok penekan, kelompok kepentingan, duduk dalam anggota politik seperti DPR atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu, berkampanye mengikuti diskusi dan lain sebagainya.

Menurut penulis partai politik setidaknya dapat didefinisikan sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui menguasai struktur kekuasaan dan kekuasaan ini diperoleh melalui keikutsertaan di dalam pemilihan umum. Maka dari berbagai definisi di atas dapat dirumuskan partai politik itu mencakup tiga hal, *pertama*, partai politik merupakan sebuah institusi atau organisasi. *Kedua*, partai politik merupakan instrumen perjuangan nilai atau ideologi, jadi partai politik sebagai alat perjuangan. *Ketiga*, perjuangan partai politik melalui penguasaan struktur kekuasaan, jadi partai pasti berorientasi kekuasaan, yaitu mendapatkan, mempertahankan dan memperluas kekuasaan.¹⁴⁸

B. Partai Politik Islam

Pengertian partai politik Islam secara definisi tidak dapat peneliti temukan secara *implisit*, namun secara literatur, dengan berdasarkan kepada latar belakang *histories* partai politik Islam dapat didefinisikan dari segi tujuan. Menurut Abul'ala al-Maududi: Partai politik Islam tujuannya adalah “untuk menegakkan kedulatan Tuhan dimuka bumi” dan “menjadikan Islam sebagai jalan hidup di dunia ini”. Tokoh-tokoh partai politik akan dikhususkan kepada orang-orang yang sungguh beriman dan bertaqwa. Yaitu orang-orang yang “ikhlas berjuang untuk menegakkan kalimat Allah dan mencari keridhaan-Nya”. Orang-orang yang berniat “mengeksplorasi Islam” untuk mencari kekuasaan duniawi yang bersifat sementara, tidak diterima menjadi pengurus. Namun dalam prakteknya partai politik Islam ada yang bersifat ingin menjadikan Islam sebagai sistem dalam bernegara dan ada yang hanya memperjuangkan nilai-nilai (*value*) Islam yang bersifat universal untuk dilaksanakan.¹⁴⁹

Ada yang berorientasi pada *Islamic State* (memperjuangkan negara Islam) namun ada juga yang berorientasi tidak hanya kepada bentuk formalistik Islam sebagai negara namun menekan kepada pentingnya

148 Risadi Kantraprawira, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999), h. 5-6

149 Katimin, *Politik Islam Indonesia: membuka Tabir Perjuangan Islam Ideologis dalam Sejarah Politik Nasional*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), h. 34-35

Islamic society (membangun masyarakat Islam yang madani seperti pada konsep Piagam Madinah ketika Nabi membuat undang-undang yang bersifat universal, terbuka, toleran dan mengakomodir kaum minoritas di luar Islam). dalam catatan dan analisis peneliti, tentang kepemimpinan juga terdapat sejumlah istilah diberikan dengan merujuk kepada Alquran dan as-Sunnah, ada istilah, *khalifah, ulil amri, rais, rain, amirul mukminin* dan *imam*. Istilah-istilah tersebut juga memiliki *stressing* dan identitas tertentu untuk menjelaskan karakteristik pemimpin dalam konteks politik Islam.¹⁵⁰

Partai dalam Alquran diistilahkan dengan *hizb*, kata *hizb* bisa diartikan partai atau golongan, merujuk dari Alquran, maka kata *hizb* hanya dikelompokkan ke dalam dua kelompok, pertama diistilahkan dengan *hizbullah* (golongan/partai Allah) dan kedua *hizbu as-syaithan* (golongan/partai setan). Penggolongan ini juga disertai dengan identitas dan ciri-cirinya. Adapun ciri golongan/partai Allah itu sebagai berikut:

1. Cinta kepada Allah
2. Lembut terhadap orang mukmin
3. Keras terhadap orang kafir
4. Berjihad di jalan Allah
5. Tidak pernah takut dengan celaan dan orang yang mencela
6. Hati yang selalu menyatu dengan sesama mukmin
7. Berhimpun atau berkumpul karena didasari cinta kepada Allah
8. Menegakkan dan membela hukum Allah
9. Bercita-cita syahid di jalan Allah

Katimin dalam bukunya Politik Islam Indonesia, mengemukakan terdapat tiga bentuk respon yang diberikan oleh intelektual muslim, terkait dengan hubungan Islam dan negara pada era kontemporer belakangan ini, dan menjadi pijakan menarik dalam menganalisis corak atau kecenderungan politik aliran di tanah air. *Pertama*, adalah **kelompok konservatif**, yang tetap mempertahankan integrasi antara Islam dan negara, karena menurut mereka Islam telah lengkap mengatur sistem kemasyarakatan. Mereka ingin melakukan reformasi sistem sosial dengan kembali kepada ajaran Islam secara total dan menolak sistem yang dibuat manusia. Di antara tokohnya adalah Sayyid Quthb dan al Maududi. *Kedua*, adalah **kelompok modernis**, yang berpandangan bahwa dalam Islam,

¹⁵⁰ Miriam Budiharjo, *Ilmu Politik (Jakarta: Sumber Ilmu, 1992)*, h. 24.

masalah kenegaraan hanya diatur secara garis besarnya saja, sedangkan penjabarannya secara teknis bisa mengadopsi sistem lain, khususnya Barat yang telah memperlihatkan keunggulannya. Para pemikir kenegaraan yang termasuk kelompok ini antara lain adalah Muhammad Abduh. *Ketiga*, adalah **kelompok sekuler**, yaitu kelompok yang memisahkan secara tegas antara Islam dan negara. Menurut kelompok ini Islam sama sekali tidak mengatur masalah-masalah keduniawian, sebagaimana halnya yang terjadi di Barat. Untuk itu, dalam menganalisis kecenderungan-kecenderungan dan praktek serta pemikiran kenegaraan pada masa modern dan kontemporer ini, kategorisasi sebagaimana dikemukakan Katimin tersebut berkisar kepada ketiga bentuk respon yang diberikan oleh intelektual muslim di atas. Yakni kategorisasi konservatif, modern dan sekuler¹⁵¹.

Katimin menambahkan, ketiga bentuk kecenderungan tersebut tentu saja berdasarkan kategorisasi yang sebenarnya telah banyak dilakukan. Akan tetapi menurut Binder hal itu belum mampu menjelaskan realitas pemikiran politik modern. Hal ini karena kebanyakan dari skema-skema klasifikasi ini digunakan hanya untuk alasan kesenangan, tidak pernah dijadikan dalam bentuk tema-tema besar pemikiran politik Islam. Lebih dari itu, masing-masing skema dibuat tanpa mengacu pada usaha-usaha lain yang paralel, dan seringkali terkait erat dengan masalah spesifik yang ada di benak para peneliti.¹⁵²

Bahkan William Sephard¹⁵³ mengkritisi lebih dalam lagi, dia menyatakan bahwa label-label yang digunakan, khususnya label “fundamentalis” sering menjadi penghambat dalam memahami realitas kehidupan ummat Islam, sebagian karena mereka sering digunakan tanpa defenisi eksplisit, sebagian lagi karena memaksa penggalan konsep masuk ke dalam fenomena yang sangat luas, dan sebagian lainnya karena mereka sering membawa bias implisit atau memberikan penilaian¹⁵⁴. Bahkan dalam pandangan peneliti sendiri, sering terjadi penilaian yang keliru, melakukan standar ganda dalam penilaian, bahkan cenderung memojokkan dan menjustifikasi kata-kata fundamentalis, radikal dengan kecenderungan negatif, ummat Islam selalu diidentikkan dengan terorisme, ekstrimisme, walau sebenarnya itu lebih banyak berupa sterotif, phobia Islam dan

151 *Lihat Katimin, Politik Islam Indonesia; ...*, h. 34-35

152 *Lihat Katimin, Politik Islam Indonesia; ...*, h. 34-35

153 William Shepard, “Fundamentalism Christian and Islamic”, in *Religion 17* (New York: E.J. Brill, 1991)

154 *Lihat Katimin, Politik Islam Indonesia; ...*, h.35

permainan media yang tentu dikuasai oleh Barat dan Amerika yang punya kepentingan besar untuk melemahkan negara-negara muslim dan umat Islam. Belum lagi isu HAM (Hak Azasi Manusia) dan Demokratisasi yang dijadikan sebagai alat kepentingan untuk menguasai dan mengintervensi negara-negara muslim agar tuduk kepada keinginan mereka. Peranan media juga sangat dominan dan berpengaruh kuat untuk memojokkan kelompok yang dikategorisasikan fundamental atau radikal tersebut.

Terlepas dari berbagai persoalan-persoalan yang menyelimuti kategorisasi-kategorisasi tentang pemikiran Islam Modern di atas, kategorisasi tersebut dipadang sesuatu hal yang peting. Karena dengan melakukan kategorisasi, maka kecenderungan-kecenderungan yang menyangkut fenomena gerakan dan pemikiran Islam modern dalam bersentuhan dengan Barat dapat diungkap. Selain itu pengkategorisasi juga membantu untuk melihat sejauhmana tingkat pengaruh masing-masing gerakan maupun pemikiran itu dalam konteks kelanjutan warisan politik Islam.¹⁵⁵

C. Paradigma Partai Politik Islam

1. Partai Politik Islam Konservatif

Kaum konservatif menganggap bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap dan menyeluruh, bahkan Islam dianggap sebagai suatu sistem mencakup seluruh wilayah kultural (*cultural universa*). Berdasarkan pandangan ini, maka kaum konservatif menganggap bahwa apapun yang berbau Barat dianggap sebagai suatu hal yang terlarang dan harus ditentang, termasuk dalam wilayah politik. Mereka membuat formulasi sendiri dalam mengembangkan konsep-konsep mereka dari perspektif Islam sebagai respon atas konsep-konsep Barat. Para pemikir politik yang membahas hubungan Islam dengan negara yang bercorak konservatif ini antara lain al-Maududi (1903-1979) dan Sayyid Quthb (1906-1966).¹⁵⁶

Pemikiran politik al-Maududi tertuang dalam karyanya *Islam Law and Constitution* dan *Al-Khilafah wa al-Mulk*. Sebagai tokoh konservatif, al-Maududi merumuskan pandangan holistik tentang Islam, bahwa Islam menurutnya bukanlah campuran dari ide-ide yang

¹⁵⁵ *Ibid*, 36

¹⁵⁶ *Ibid*, h. 36

saling berhubungan. Islam adalah sistem yang teratur menyeluruh dan bersandar pada seperangkat postulat yang jelas dan pasti. Dalam hal hubungan antara Islam dan negara. Al-Maududi juga menyatakan bahwa pemegang kedaulatan adalah Tuhan, bukan rakyat. Negara hanyalah berfungsi sebagai instrumen politik bagi terlaksananya hukum Tuhan. Sedangkan bentuk negara yang dikonsepsikan adalah bentuk negara “*Teo-demokratis*”; yaitu demokrasi ke-Tuhanan di mana rakyat diberi kewenangan dan kedaulatan yang terbatas di bawah kemahakuasaan Tuhan. Konsepsi negara demikian kelihatannya sebagai bentuk penolakannya atas konsepsi politik Barat dimana kedaulatan sesungguhnya berada ditangan rakyat. Kedaulatan demikian menurutnya sekuler, kerana menafikan Tuhan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Jadi negara Islam menurut al-Maududi bertumpu pada dua pilar; kedaulatan (*sovereignty*) Tuhan dan perwakilan (*viceregency*) manusia.¹⁵⁷ Mengenai tujuan negara Islam dan sifat-sifat dasarnya, al-Maududi merujuk kepada sejumlah ayat Alquran, seperti Q.S. 57:25, Q.S. 22:41, QS: 3: 110, yaitu melindungi ummat dari para tiran, menjamin kebebasan, dan keadilan sosial.¹⁵⁸ Firman Allah:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa”.¹⁵⁹

157 *Ibid*, h. 37

158 Al-Maududi, dalam Katimini, *Politik Islam.....*, h. 37

159 QS. 57: 25

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ المُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”¹⁶⁰

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ مِنْهُمْ المُؤْمِنُونَ
وَآكْثَرُهُمُ الفَاسِقُونَ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”¹⁶¹

Negara Islam versi al-Maududi adalah bersifat universal sekaligus idiologis. Universal berarti melingkupi seluruh dimensi kehidupan manusia dan bersifat totalitas. Sedang idiologi karena didasarkan suatu idiologi tertentu yaitu idiologi Islam (*Nizham al-Islami*). Untuk membangun negara Islam al-Maududi menyerukan pentingnya ditempuh melalui jalan revolusi. Dengan jalan revolusilah dapat diciptakan suatu kesadaran sosial dan iklim moral yang sesuai dengan tuntunan idiologi Islam.¹⁶²

Tokoh lainnya yang mendukung tipe konservatif adalah Sayyid Quthb idenya dengan menolak secara total terhadap idiologi-idiologi modern Barat, penekanannya terhadap universalisme, revolusi sebagai jalan satu-satunya menuju cita-cita negara Islam. Sayyid Quthb mengajukan konsep “Pandangan Dunia Islam” (*al-tashawwur al-Islami*) sebagai Idiologi Islam. Pandangan dunia Islam hanya dari Tuhan. Karena langsung bersumber dari zat Yang Maha Sempurna, maka pandangan dunia Islam Sayyid Quthb-pun merupakan

160 QS. 22: 41

161 QS. 3 : 110

162 Al-Maududi, dalam Katimini, *Politik Islam.....*, h. 38

kesempurnaan, oleh sebab itu dianggap mengatasi segala Idiologi lainnya, seperti; Sekularistik, materialistik, kavitalistik, komunis dan lain sebagainya. Karen idiologi-idiologi tersebut adalah buatan manusia.

Pemikiran kenegaraan Sayyid Quthb yang agak menarik lainnya adalah penekanannya pada masalah keadilan. Keadilan yang ditawarkan Islam adalah keadilan yang mutlak, yang tidak terpengaruh oleh perasaan cinta dan benci, atau karena adanya hubungan kekerabatan, golongan, kekayaan, dan jabatan yang menggiaurkan. Bahkan perbedaan aqidahpun tidak boleh dijadikan alasan untuk berlaku tidak adil. Beliau menegaskan bahwa negara Islam akan menjamin pemerataan pembagian kesejahteraan sebagaimana mestinya dalam institusi keadilan sosial politik. Termasuk pendapat beliau tentang pentingnya partisipasi rakyat dalam urusan kenegaraan. Walaupun demikian konsep negara yang dimaksudkan Sayyid Quthb bukanlah negara dengan sistem demokratis, karena beliau tidak menjelaskan bagaimana ketentuan-ketentuan maupun mekanisme demokrasi. Beliau bahkan menggambarkan konspesi negara tersebut, tercermin sejauhmana negara tersebut menjadikan syariah dalam setiap kebijakannya. Beliau menjadikan syariah sebagai posisi sentral dalam setiap ide dan gagasannya. Dengan mengutip firman Allah swt., dalam Q.S. 5: 34-36,

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ
عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir Sekiranya mereka

mempunyai apa yang dibumi ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu (pula) untuk menebusi diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat, niscaya (tebusan itu) tidak akan diterima dari mereka, dan mereka beroleh azab yang pedih.”¹⁶³

Ayat tersebut Sayyid Qutb mencoba menafsirkannya secara literal, bahwa dalam negara Islam kedaulatan tertinggi berada di tangan Tuhan.¹⁶⁴

Pemikiran konservatif dapat digambarkan sebagai kaum yang selalu menempatkan syariat sebagai sentral dalam pemikiran politik, lebih bersifat tekstual dan literal dalam pemahaman ke-Islaman, mereka menolak keras pendapat yang coba-coba memisahkan antara agama dan negara atau agama dan politik. agama dan politik itu menyatu, berorientasi kepada praktik kehidupan bernegara pada zaman Nabi yang diistilahkan dengan negara Islam Teokrasi. Dinamika dalam Islam yang diakui hanya yang digali dari sumber ajaran Islam itu sendiri.¹⁶⁵

2. Partai Politik Islam Modernis

Modernisme merupakan istilah yang dimunculkan oleh masyarakat Barat ke dalam masyarakat muslim. Pada awalnya istilah ini diartikan sebagai aliran keagamaan yang melakukan penafsiran terhadap doktrin agama Kristen untuk menyesuaikannya dengan perkembangan pemikiran modern. Istilah modernisme juga sering diganti dengan istilah-istilah lain, seperti “*reformism*”, “*reawakening*”, “*renaissance*”, dan “*renewal*”.¹⁶⁶ Aliran modernisme sebagai aliran muncul sebagai respon kaum muslimin terhadap modernisasi dan westernisasi yang terjadi di dunia Islam melalui kolonialisme dan imperialisme. Lawan modernisme adalah kaum tradisionalisme. Mereka berpendapat penyebab kemunduran Islam adalah akibat kekakuan ulama dalam memahami ajaran Islam. melakukan ijtihad menjadi suatu keniscayaan. Melalui ijtihad revitalisasi ajaran Islam akan bisa sejalan dengan perkembangan dan dinamisasi masyarakat. Dan Karena perkembangan masyarakat yang sangat cepat, maka respon Islam juga harus cepat untuk menjawab tantangan zaman globalisasi

163 QS. 5: 34-36

164 Sayyid Qutb, *Khasa'is al-Ijtima'iyyah fi al-Islam wa Muqaawwamatuhu* (Cairo: 1962), h 77 dalam Katimin, *Politik Islam.....*, h. 39

165 Katimin, *Politik Islam.....*, h. 39

166 Hrair Dekmejian, *Islam and Revolution: Fundamentalism in the Arab World*, (Syracus: Syracus University Press, 1995), h 4 dalam Katimin, *Politik Islam.....*, h. 41

dan informasi. Pendekatan yang ditawarkan dalam memahasi ajaran Islam, di antaranya melalui rasionalisasi dalam pemikiran seperti yang dikembangkan Muhammad Abduh.

Menurut katimin dalam masalah kenegaraan, kaum modernis menganggap bahwa aturan-aturan tersebut diatur secara garis besar saja. Dalam kaitan inilah kaum modernis memandang bahwa ijtihad penting. Islam hanya mengemukakan prinsip-prinsip umum saja berkaitan dengan masalah kenegaraan, maka kaum modernis menganggap penting untuk mengadopsi sistem politik Barat, seperti nasionalisme, sosialisme, demokrasi, dan sebagainya. Pemikir Islam yang tergolong dalam kelompok ini di antaranya Muhammad Abduh. Pemikiran politik Muhammad Abduh (1849-1905) tertuang dalam karyanya *al-Islam wa al-Nashraniyyah ma'a al-'ilm wa al-Madaniyyah*. Letak modernisme Muhammad Abduh tercermin pada upayanya menghidupkan kembali pintu ijtihad, dan uapayanya mendamaikan keyakinan Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Karena menurutnya keterbelakangan ummat Islam selama ini adalah diakibatkan oleh sikap taqlid yang berlebihan dalam berbagai bidang kepada ulama.¹⁶⁷

Sebagai sosok yang banyak mendalami kemajuan Barat, pemikirannya di dalam bidang politik mencerminkan pengaruh Barat yang demikian kental. Abduh mengatakan bahwa Islam tidak mengakui segala bentuk kedaulatan agama (*al-Sulthan al-Diniyyah*), dengan kata lain, hakikat pemerintahan Islam menurut Abduh tidak bersifat keagamaan, melainkan murni bersifat duniawi (*al-Sulthan al-Madaniyyah*). kekhalfaaan historis menurutnya bukanlah rezim politik teokratis, dalam arti bahwa khalifah menerima hukum langsung dari Tuhan. Kepatuhan dan ketundukan rakyat pada khalifah karena keyakinan keagamaan mereka, seperti dinyatakan dalam kitabnya: “khalifah ... dipatuhi oleh rakyat bukan karena baiat dengan keadilan dan perlindungan sebagai prasyaratnya, tapi karena keyakinan keagamaan, sehingga orang yang beriman tidak pernah bisa menentanginya, walaupun khalifah tersebut musuh gama Tuhan... karena perbuatan-perbuatan penguasa dengan otoritas keagamaannya, bagaimanapun manifestasinya, adalah agama dan hukum.”¹⁶⁸

167 Katimin, *Politik Islam.....*, h. 42

168 *Ibid*, h. 42

Selanjutnya Muhammad Abduh menyatakan kekuasaan politik harus didasarkan pada kekuasaan rakyat (kehendak publik) dan kedaulat rakyat ini menurutnya harus dibangun atas dasar prinsip-prinsip kebebasan (*al-hurriyyah*) yang integral, konsultasi (*syura*), dan konstitusi (*aal-qanun*) yang berfungsi sebagai landasan sistem politik tersebut. Konsep Abduh dalam kebebasan mencakup kebebasan sosial dan politik (*muamalah*), seperti kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, dan kebebasan memilih, bahkan termasuk kebebasan bagi kaum perempuan, yang harus memperoleh hak-hak mereka. Pemikiran Abduh lainnya tentang aspek politik adalah teorinya tentang musyawarah. Sebagai konsekuensi dari adanya kebebasan, terutama kebebasan politik, kepentingan kolektif dalam bentuk opini (*al-ra'y al-'amm*) akan muncul dalam masyarakat. Untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam masyarakat, Abduh mengusulkan pemerintahan atas dasar perwakilan (*representatif*). Pemerintahan seperti ini sekalipun menurut Kerr bukanlah suatu demokrasi, akan tetapi tampak jelas ia diilhami oleh semangat demokrasi Barat.

Aspek modernis Muhammad Abduh dapat diketahui dari pernyataannya bahwa Islam tidak menentukan bentuk musyawarah. Dua ayat Alquran yang menyinggung prinsip musyawarah (Q.S. 3: 159 dan Q.S. 42: 38) hanyalah menyatakan tentang pentingnya musyawarah bagi ummat Islam dalam memecahkan persoalan-persoalan mereka. Sedangkan menyangkut bentuk dan praktik musyawarah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada ummat Islam sendiri. Namun walaupun Abduh konsern terhadap demokrasi tetapi beliau tidak mengabaikan syari'ah atau memisahkan agama dari politik. Pembaharuan politik yang beliau gelorakan masih dalam kerangka ajaran Islam. dapat dikatakan apa yang dilakukan Abduh adalah upaya-upaya melakukan interpretasi atau penafsiran baru terhadap ajaran Islam, melalui rasionalisasi, mendamaikan Islam dengan akal dan ilmu pengetahuan modern, juga upaya mencari titik temu antara cita-cita Islam dengan realitas politik, inilah sikap moderat dan jalan tengah yang ditawarkan Abduh.

Dengan demikian sebut Katimin, jelaslah bahwa paradigma modern menerima secara selektif atau mengadakan penyesuaian-penyesuaian tertentu dalam hubungannya dengan ide-ide politik Barat. Karakter modern yang demikian tidak menghindarkannya

dari sasaran kritik. Modernisme Islam yang berupaya mencari jalan tengah dengan mencari rekonsiliasi ide-ide dan institusi-institusi Barat modern dengan ajaran-ajaran Islam dalam tahap tertentu pada gilirannya akan menghasilkan suatu sintesis antara Islamisme dan modernisme. Akan tetapi tujuan modernisme tersebut lebih mengarah kepada ter-Baratkan, jujur harus diakui bahwa perkembangan umat Islam sebagai masyarakat yang modern memang terjadi, akan tetapi tampak tetap menjadi *inferior* dalam bayang-bayang adikuasa Barat.¹⁶⁹

3. Partai Politik Islam Sekuler

Secara sederhana sekuler atau kelompok sekuler diartikan “memisahkan agama dengan aktivitas bernegara”. Kelompok sekuler adalah kelompok yang memisahkan antara Islam dan negara. Menurut kelompok ini, Islam sebagaimana juga agama-agama lainnya tidak mengatur masalah keduniawian, sebagaimana dalam hal kenegaraan di negara-negara Barat. Salah satu tokoh yang tergolong ke dalam kelompok sekuler ini adalah ‘Ali ‘Abd al-Raziq. Pemikiran politik Ali Abd al-Raziq (1888-1966 M) tertuang dalam bukunya yang berjudul *al-Islam wa Ushul al-Hukum* (Islam dan Prinsip-Prinsip Pemerintahan). Buku ini ia tulis pada tahun 1925 untuk merespon krisis kekhalifahan. Inti pokok pemikiran politiknya adalah penolakannya atas institusi kekhalifahan. Menurutnya baik dari segi agama maupun rasio, pola pemerintahan khalifah ini tidak perlu. Seperti dicatat oleh *Dliya al-Din al-Ra’is* bahwa menurut Ali ‘Abd al-Raziq Islam tidak ada sangkut-pautnya sengan masalah kekhalifahan,. Kekhalifahan termasuk kekhalifahan yang empat, bukan sistem Islam atau keagamaan, melainkan suatu sistem duniawi. Isi pokok buku tersebut berpandangan: “Islam tidak menetapkan suatu rezim tertentu, juga tidak memerintahkan agar umat islam menganut suatu sistem tertentu atas dasar syarat-syarat tertentu yang kemudian dijadikan dasar bagaimana umat Islam diperintah; Islam lebih memberikan kebebasan absolut pada kita untuk mengorganisasi negara sesuai dengan kondisi-kondisi intelektual, sosial, ekonomi di mana kita hidup mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan-tuntutan zaman.”¹⁷⁰

169 *Ibid*, h. 44

170 *Ibid*, h.46-47

'Ali Abd al-Raziq mendasarkan argumentasinya bahwa kekhilafaan tidak memiliki dasar baik dalam Alquran maupun Hadis. Sebaliknya 'Ali Abd al-Raziq membantah bahwa Q.S 4:59 sebagai dasar bagi kewajiban mendirikan institusi khilafah. Bahkan Alquran dan Hadis tidak ada yang secara eksplisit menyebut sistem politik yang harus dianut oleh umat Islam. Ia juga menolak penafsiran para pemikir yang menyatakan bahwa *Uli al-Amr* (mereka yang berkuasa) Q.S. 4: 26 sebagai kekhilafaan atau imamah, apalagi sebagai dasar bagi pendirian khilafah. Aspek pemikiran 'Ali Abd al-Raziq adalah pemisahan yang tegas antara agama dan politik atau antara misi kenabian dengan tindakan politik. Ia memberikan argumen historis dan teologis dalam bagian kedua bukunya itu. Misalnya tindakan politik Nabi melakukan perang, memungut pajak dan zakat, bahkan jihad bukanlah mencerminkan fungsi Nabi sebagai utusan Allah. Dari pemikiran-pemikiran 'Ali Abd al-Raziq, dapat dikemukakan bahwa negara Madinah yang dipimpin Nabi merupakan suatu kebetulan saja yang terjadi di dalam sejarah Islam yang tidak harus diikuti oleh umat Islam pada masa sesudahnya.¹⁷¹

Meskipun terdapat perbedaan antara Islam dan negara pada masa pra-modern dengan masa modern dalam hal perumusannya, keduanya memiliki persamaan; yaitu disamping melakukan proses inovatif yang diilhami oleh Alquran dan Hadis, secara praktik keagamaan pada masa *al-Khulafa' al-Rasyidun*. Juga melakukan proses inovatif terhadap sebagian peradaban luar. Perbedaannya ialah, jika pada masa pra-modern proses imitatif-akomodatif berasal dari filsafat Yunani serta praktik kenegaraan Romawi Timur dan Persia, maka pada masa modern proses *imitatif-akomodatif* itu berasal dari pemikiran dan sistem politik Barat. Di samping itu, jika pemikiran kenegaraan pada masa pra-modern umumnya menjustifikasi sistem pemerintahan yang ada pada masanya, maka pemikiran kenegaraan pada masa modern tidak menjustifikasi praktik kenegaraan yang ada, kecuali jika pemerintahan itu dapat dikuasai oleh kelompok politik yang didukung oleh pemikir itu. Misalnya pemikir politik Hasan Turabi di Sudan dan pemikiran Ayatollah Khomeini di Iran. Sebagian besar merupakan kritik atau bahkan oposisi terhadap praktik kenegaraan yang ada. Kecuali pemikiran sarjana muslim di teluk-teluk yang umumnya menjustifikasi praktik kenegaraan yang ada, termasuk

171 *Ibid*, h. 47

sistem monarki murni yang diikuti oleh negara-negara di kawasan ini. Terlepas dari berbagai keunggulan-keunggulan pemikiran kenegaraan pada masa modern dibanding dengan pemikiran kenegaraan pada masa pra-modern, beberapa sarjana muslim melihat adanya krisis pemikiran politik Islam pada masa kontemporer ini, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Hamid Mutawalli dalam karyanya *'Azmah al-Fikr al-Siyasi al-Islami Fi 'Asr al-Hadits* (Krisis Pemikiran Politik Islam Pada masa Kontemporer). Menurutnya, krisis ini dapat dilihat dari beberapa gejala, terutama sempitnya lahan gerak untuk melaksanakan syariat Islam disebagian besar negara Muslim; dan kecendrungan para elit politik untuk berpaling dari syariat Islam, dan sebaliknya meniru sistem Barat.¹⁷²

D. Fungsi Partai Politik

Banyak kalangan berusaha mendekatkan sejumlah fungsi pada partai politik. Celakanya, fungsi itu didaftar sedemikian dekat tanpa berusaha memverifikasi apakah fungsi itu secara empirik dilakukan oleh partai politik. Cara itu adalah sebuah kekeliruan yang fatal. Selama ini, berbagai fungsi yang didekatkan pada partai politik didekatkan begitu saja lewat mekanisme, dalam bahasa LaPalambara, *'fiat'* (Latin) atau *'kun fayakun'* (Arab), yang artinya 'jadi maka jadilah', yang itu termasuk teoritis dan logis. Padahal, partai politik itu -- apakah fungsi, posisi, dan bobotnya dalam sistem politik—tidak dirancang oleh suatu teori tetapi ditentukan oleh kejadian-kejadian yang ada¹⁷³. Dengan demikian, fungsi partai politik sesungguhnya berasal dari realitas empirik yang dikerjakan partai politik dan berlangsung melalui proses evolusi yang panjang. Pada suatu masa boleh jadi partai politik dalam keadaan menopang bekarjanya demokrasi memainkan fungsi tertentu secara menonjol tetapi pada masa yang lain fungsi itu tidak dimainkan lagi karena perubahan konteks politik yang melingkupinya.

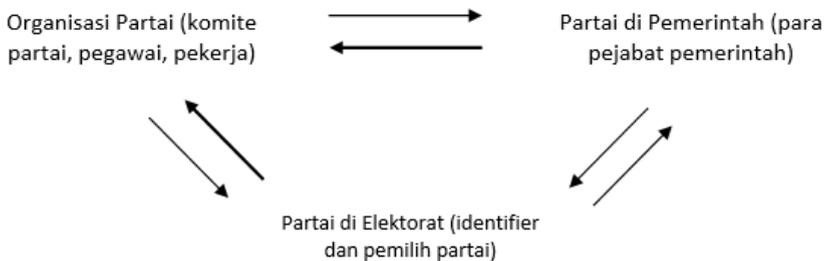
Ketidakpahaman akan hal ini sering kali menjadikan partai politik secara semena-mena dilekatkan berbagai fungsi yang semestinya tidak disandangnya. Akibatnya, berbagai fungsi yang dilekatkan kepada partai politik yang itu sering menimbulkan berbagai tuntutan yang berlebihan

¹⁷² *Ibid*, 48-49

¹⁷³ Sartori dalam Sigit Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia*, (Sleman Yogyakarta: perum Griya Suka Permai, 2011), h. 14

kepada partai politik. Partai politik menjadi korban ketidak hati-hatian akademisi atau penulis dan pengamat kepartaian. Oleh karena itu, melekatkan fungsi partai politu harus bersifat hati-hati. Kita bisa bertanya fungsi-fungsi apakah yang sungguh-sungguh diemban oleh partai-partai, apakah fungsi-fungsi itu berubah ubah dalam konteks waktu dan tempat, dan fungsi-fungsi mana yang dijalankan bersama dengan aktor-aktor lain dalam sebuah sistem politik.¹⁷⁴

Meskipun demikian, memang tidak mudah untuk melekatkan fungsi-fungsi apa yang semestinya disandang partai politik. Menurut Paul Allen Beck dan Frank J. Sorauf¹⁷⁵, kesulitan untuk melekatkan fungsi apa yang semestinya menjadi atribut partai disebabkan dua hal. *Pertama*, diantara ahli kepartaian sendiri tidak pernah mencapai kesepakatan tentang apa yang dimaksud dengan kata fungsi. Beberapa ahli menggunakan kata itu untuk menggunakan aktifitas nyata partai politik, seperti kontestasi dalam pemilu, sementara ahli lain menggunakan untuk menggambarkan konsekwensi-konsekwensi yang tidak direncanakan atau sebuah kebetulan yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Pakar yang lain menyatakan fungsi adalah menyatakan sebuah kontribusi partai untuk beroperasi dalam sistem politik yang luas. *Kedua*, kesulitan untuk memformulasikan kategori fungsi partai terkait dengan kebutuhan untuk dapat diobservasi dan diukur atas satu fungsi partai yang dijalankan. Beberapa peneliti berpendapat bahwa salah satu fungsi partai adalah mengorganisir konflik sosial atau artikulasi kepentingan-kepentingan partai sosial. Pertanyaannya adalah bagaimana melakukan observasi atas fungsi-fungsi itu?. Dari berbagai studi tentang partai politik, fungsi partai politik, fungsi partai tidak selalu konsisten dan cenderung mengalami tranformasi.



Bagan
Tiga Bagian Partai Politik

174 *Ibid*, h. 15

175 *Ibid*, h. 15

Mendasarkan pada konseptulasi V.O.Key tentang kerangka tiga bagian partai, yaitu partai dipilih (*party in electrote*), partai sebagian sebuah organisasi (*party organization*), dan partai diinstitusi pemerintahan (*party in government*), Russell J. Dalton dan Martin P. Wattenberg (2000:5-10) menjelaskan sejumlah fungsi partai dari setiap bagian tersebut:

1. Fungsi Partai di Elektrolat (*parties in the electorate*).

Pada bagian ini fungsi partai menunjukkan pada penampikan partai politik dalam menghubungkan individu dalam proses demokrasi. Terdapat empat fungsi partai yang termasuk dalam fungsi partai dielektorat. *Pertama*, menyederhanakan pemilihan bagi pemilih. politik adalah fenomena yang kompleks. Pemilih rata-rata mengalami kesulitan dalam memahami semua persoalan dan mengkonfrontasi berbagai isu-isu dalam pemilu. Partai politik membantu dalam membuat politik “*user friendly*” bagi warga negara. Label partai menyediakan kunci informasi singkat tentang bagaimana “orang-orang seharusnya memilih”. Sekali pemilih mengetahui partai mana yang biasanya mewakili kepentingan mereka, ini mejadi kunci informasi sebagai layar persepsi membantu bagaimana mereka melihat sebuah persoalan dan berperilaku ketika pemilihan.

Kedua, pendidikan warga negara. Partai politik adalah *edukator*. Pada konteks itu partai politik adalah mendidik, menginformasikan dan membujuk masyarakat, untuk berperilaku tertentu. Partai politik bertugas memberikan informasi politik yang penting bagi warga negara. Selain itu, partai politik juga mendidik warga negara mengapa mereka harus mengambil posisi kebijakan tertentu. Pemilu menjadi salah satu kursus pendidikan warga negara yang bersifat masal. *Ketiga*, membangkitkan simbol identifikasi dan loyalitas. Dalam sistem politik yang stabil, pemilih membutuhkan jangkar politik, dan partai politik dapat memenuhi fungsi itu. Keterikatan dan ketertarikan partisan terhadap partai politik dapat melestarikan dan menstabilkan pemerintahan yang demokratis, menciptakan kesinambungan politik pemilih dan hasil pemilu. Partai politik bisa menyediakan ruang identifikasi politik, ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah atau negara juga dan ditujukan kepada partai politik untuk menyalurkan aspirasi tersebut. *Keempat*, mobilisasi rakyat untuk berpartisipasi. Dihampir semua negara demokratis, partai politik memainkan peran penting dalam mendapatkan dan meyakinkan orang untuk memilih

dan berpartisipasi dalam proses pemilihan. Secara langsung dan tidak langsung partai politik harus memainkan peranannya.¹⁷⁶

2. Fungsi Partai sebagai Organisasi (*Parties as Organization*)

Pada fungsi ini menunjukkan pada fungsi yang melibatkan partai sebagai organisasi politik, atau proses di dalam organisasi partai itu sendiri. Dalam konteks ini partai politik setidaknya memainkan peranan dalam 4 (empat) fungsi. *Pertama*, rekrutmen kepemimpinan politik dan mencari pejabat pemerintah, fungsi ini termasuk fungsi yang sangat mendasar dari sebuah partai politik. Pada fungsi ini partai politik akan mencari, meneliti, dan mendesain kandidat yang akan bersaing dalam pemilu. Kualifikasi siapa yang akan diseleksi, dan siapa yang memutuskan nominasi, serta sejauhmana derajat demokratisasi dan desentralisasi adalah pertanyaan-pertanyaan kunci dalam seleksi kandidat.

Kedua, pelatihan elit politik. Dalam fungsi ini, partai politik melakukan pelatihan dan pembekalan terhadap elit yang prospektif untuk mengisi jabatan-jabatan politik. Berbagai materi pelatihan dapat meliputi pemahaman tentang proses demokrasi, norma-norma demokrasi, prinsip-prinsip partai, sistem tata negara, hak azasi manusia, memahami anggaran, proses melahirkan undang-undang dan persoalan strategis lainnya. Fungsi ini menjadi bagian vital kesuksesan kerja-kerja dari sistem demokrasi yang dilakoni partai politik.

Ketiga, pengartikulasian Pada fungsi ini, partai politik menyuarakan kepentingan pendukungnya melalui pilihan posisi dalam berbagai isu politik dengan mengekspresikan pandangan pendukungnya dalam proses pemerintahan. Dalam penstrukturan fungsi ini bisa dilakukan dalam kampanye politik, pengontrolan debat legisatif, dan pengarahannya langsung tindakan politisi untuk merepresentasikan kepentingan pendukungnya.

Keempat, pengagregasian kepentingan politik. Fungsi inilah yang membedakan partai politik dengan kelompok kepentingan, yakni partai melakukan *artikulasi* dan *agregasi* kepentingan, sedangkan kelompok kepentingan sebatas pada artikulasi kepentingan. Fungsi *agregasi* kepentingan menunjuk pada aktivitas partai untuk

176 *Ibid*, h. 17-18

menggabungkan dan menyeleksi tuntutan kepentingan dari berbagai kelompok sosial ke dalam alternatif-alternatif kebijakan atau program pemerintahan

3. Fungsi Partai di Pemerintahan (*Parties as Government*)

Pada konteks ini, partai memainkan fungsi dan pengelolaan dan penstrukturan persoalan-persoalan pemerintahan. Terdapat 7 (tujuh) fungsi utama partai di pemerintahan. *Pertama*, menciptakan mayoritas pemerintahan. fungsi ini dijalankan sesudah pemilihan, partai-partai yang memperoleh kursi di parlemen dituntut untuk menciptakan mayoritas politik, agar dalam sistem parlementer dapat membentuk pemerintahan, atau kalau dalam sistem presidensial, dapat mengefektifkan pemerintahan. Jika tidak ada mayoritas absolut maka koalisi partai menjadi sebuah keniscayaan. Kunci penting terbentuknya formasi koalisi untuk membentuk pemerintahan adalah, kesamaan platform, sharing kekuasaan, distribusi sumberdaya manusia dan posisi kebijakan partai. *Kedua*, pengorganisasian pemerintahan. Pada fungsi ini partai politik menyediakan mekanisme pengorganisasian kepentingan dan menjalin kerjasama diantara individu-individu legislator. Di parlemen, menjadi tanggung jawab partai untuk mengelola disiplin partai yang itu dapat dilakukan melalui berbagai variasi intensif dan mekanisme kontrol. Partai memonitor legislator dan menegakkan disiplin partai, mengontrol pemilihan kepemimpinan parlemen dan alat pelengkapannya, serta mendistribusikan sumber daya parlemen kepada legislator.

Ketiga, implementasi tujuan kebijakan. Ketika dipemerintahan, partai politik adalah aktor sentral yang menentukan output kebijakan pemerintahan. Normalnya, pelaksanaan fungsi itu dibentuk dari transformasi manifesto partai dan janji kampanye. Antara manifesto partai dan platform partai dan janji kampanye dengan kebijakan semestinya adalah linier. Ketika berkuasa, merealisasikan platform dan janji kampanyenya. *Keempat*, mengorganisasikan ketidaksepakatan dan oposisi. Fungsi ini diperankan oleh partai-partai yang tidak menjadi bagian dari pengusaha (eksekutif). Partai yang tidak berkuasa membentuk blok politik diluar partai penguasa. Pada fungsi ini, partai oposisi mengembangkan alternatif kebijakan diluar kebijakan yang ditempuh penguasa. Harapannya, partai oposisi dapat menarik

simpati pemilih sehingga dipemilihan berikutnya kekuasaan dapat diambil alih.

Kelima, menjamin tanggung jawab tindakan pemerintahan. Adanya partai oposisi menyiratkan kepada siapa tanggungjawab sebuah pemerintahan harus dibebankan, yaitu partai penguasa. Partai penguasa bertanggung jawab terhadap berbagai tindakan yang dipemerintah. Mekanisme ini menjadikan pemilih lebih mudah untuk memberikan kredit atau penghukuman atas keberhasilan atau kegagalan sebuah pemerintahan. Jika pemilih merasa puas dengan kinerja pemerintahan maka mereka dapat memberikan ganjaran kepada partai penguasa, tetapi apabila pemilih merasa tidak puas maka suara dapat diberikan kepada partai oposisi. *Keenam*, kontrol terhadap administrasi pemerintahan, fungsi ini terkait dengan peran partai dalam ikut mengontrol birokrasi pemerintahan. Peran itu diwujudkan dalam keterlibatan partai dalam menyeleksi sejumlah individu-individu yang akan menempati jabatan politik tertentu yang sudah disepakati. *Ketujuh*, terakhir adalah memperkuat stabilitas pemerintahan. Stabilitas pemerintahan secara langsung terkait dengan tingkat kesatuan partai politik. Stabilitas partai membuat stabil pemerintah, dan stabilitas pemerintahan berhubungan dengan stabilitas demokrasi. Dalam rangka itu fungsi partai untuk memperkuat stabilitas pemerintahan dan demokrasi adalah menjaga stabilitas partai. Kesatuan partai politik perlu dipelihara sedemikian rupa agar dapat memperkuat stabilitas pemerintahan.¹⁷⁷

Sementara itu menurut Caton¹⁷⁸, dalam negara demokrasi dari berbagai fungsi partai politik yang ada sebenarnya terdapat 4 (empat) fungsi sentral partai politik. *Pertama* adalah fungsi artikulasi kepentingan, yaitu mengembangkan program-program dan kebijakan pemerintahan yang konsisten. *Kedua*, fungsi agregasi kepentingan, memungut tuntutan masyarakat dan membungkusnya. *Ketiga*, rekrutmen, yaitu menyeleksi dan melatih orang untuk posisi-posisi dieksekutif dan legislatif. *Keempat*, mengawasi dan mengontrol pemerintah.

¹⁷⁷ *Ibid*, h. 20

¹⁷⁸ Caton, Matthias, *Effective Party Assistance: Parties for better Democracy*, (Cambridge, USA, 2007), h. 7

	Artikulasi	Agregasi	Rekrutmen
Pemerintah	Melaksanakan Kebijakan	Melanggengkan dukungan kepada Pemerintah	Mengisi posisi-posisi pemerintah
Oposisi	Mengembangkan alternative	Mendapatkan dukungan untuk perubahan	Membangun kelompok yang kompeten

Menurut Caton¹⁷⁹, ketiga fungsi yang pertama, yaitu artikulasi, agregasi, dan rekrutmen, memainkan dua peran fundamental dimana partai politik bermain dalam proses politik: mereka membentuk pemerintahan, atau mereka menjadi oposisi. Keberadaan atau posisi sebuah partai, yakni menjadi penguasa atau oposisi akan menentukan bagaimana fungsi artikulasi, agregasi, dan rekrutmen politik diekspresikan. Jika sebuah partai menjadi partai yang berkuasa maka fungsi artikulasi diwujudkan dalam bentuk melaksanakan kebijakan pemerintah atau partai, fungsi agregasi diwujudkan dengan melanggengkan dukungann kepada pemerintah, dan fungsi rekrutmen diekspresikan dengan mengisi posisi-posisi di pemerintahan. Ketika sebuah partai menjdi partai oposisi maka fungsi partai diekspresikan sebagai berikut; fungsi artikulasi kepentingan partai mengembangkan kebijakan alternatif, pada fungsi agregasi partai berusaha mendapat dukungan publik untuk perubahan, dan fungsi rekrutmen diekspresikan dengan membangun kelompok orang yang kompeten sebagai alternatif pejabat yaang sedang bekuasa.

Fungsi keempat partai politik yakni mengawasi dan mengontrol pemerintah, pada fungsi ini tergantung sistem politik dan pemerintahan yang berlaku. Pada sistem parlementer, di mana pemerintaah dipilih oleh parlemen maka funnngsi keempat hanya dimainkan oleh partai oposisi. Partai berkuasa berperang melegitimasi dan mendukung jalannya pemerintahan demi berkelanjutannya pemerintahan. Sedangkan pada sistem presidensial, di mana eksekutif adalah independen, maka legislatif secara keseluruhan memainkan fungsi ini, yaitu mangawasi dan mengontrol pemerintahan. Pada sistem presidensial, semua kekuatan partai di legislatif menjalankan fungsi

¹⁷⁹ *Ibid...*, h. 7

pengawasan dan kontrol terhadap eksekutif ini tanpa terkecuali, termasuk partai yang sedang berkuasa. Relasi antara eksekutif dan legislatif bersifat mutual-independensi yang itu terformulasikan dalam relasi “*check and balance*”. Di dalam fungsinya legislatif baik DPR RI maupun DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur, bahwa disamping fungsi mengawasi atau kontrol yang dijalankannya, masih terdapat dua fungsi anggota parlemen, yakni fungsi *legislasi* (membuat undang-undang) dan fungsi *budgeting* (menyusun, membuat dan mensahkan anggaran pemerintah, baik di tingkat pusat oleh DPR RI maupun tingkat lokal oleh DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Sebagai partai politik tentu berbeda dengan kelompok kepentingan (*interest group*) yang berusaha memberikan pengaruh terhadap kebijakan tertentu. Akan tetapi, sebuah partai politik memiliki tujuan dan cita-cita, tidak hanya mempengaruhi kebijakan publik secara luas, namun juga mengarahkan dan mengendalikan kebijakan-kebijakan itu melalui orang-orangnya yang ditempatkan pada jabatan publik. Misalnya Kementerian, Direktur Jenderal atau Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), itu makanya tidak jarang kita mendengar orang-orang partai memainkan peranan di lembaga-lembaga tersebut sekaligus sebagai lumbung pemasukan dana atau kas partai. Sebuah partai politik idealnya memiliki fungsi tertentu dalam sebuah pemerintahan yang bersifat demokratis.

Partai politik tidak hanya berfungsi untuk merebut kursi dan mengumpulkan suara pada saat pemilihan umum, tetapi partai politik juga berfungsi menjadi solusi bagi kepentingan bersama. Artinya partai politik juga berfungsi yang lebih luas lagi. Firmanzah menyatakan, fungsi partai politik secara umum dapat dibedakan menjadi dua, *pertama*, peran dan tugas internal organisasi, dalam hal ini organisasi partai politik memainkan peranan penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi, dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. *kedua*, partai politik juga mengemban tugas yang lebih bersifat eksternal organisasi. Artinya tanggung jawab partai politik tidak hanya internal partai, tetapi partai politik lebih luas, terhadap bangsa dan negara yang lebih bertanggung jawab masyarakat agar lebih baik.¹⁸⁰

180 Firmanzah, *Marketing Politik: antara pemahaman dan realitas*, (Jakarta: Obor, 2006), h. 70

Roy C Macridis dalam Amal¹⁸¹ sebagaimana dikutip Ichlasul Amal mengemukakan beberapa fungsi partai politik yang relatif umum diungkapkan, yaitu representasi/perwakilan, konversi dan agregasi, integrasi (partisipasi, sosialisasi dan mobilisasi), persuasi represi, rekrutmen (penerimaan anggota-anggota baru), dan pemilihan pemimpin, pertimbangan-pertimbangan dan perumusan kebijaksanaan, serta kontrol terhadap pemerintah. Mariam Budiharjo¹⁸² mengemukakan fungsi partai politik setidaknya ada empat macam fungsi; *pertama*, sebagai sarana komunikasi politik, artinya partai politik berperan sebagai sarana agregasi kepentingan (*interest aggregation*) dan sarana perumusan kepentingan (*interest articulation*). *Kedua*, sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu sarana bagi proses yang melaluinya di mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik dan untuk menciptakan citra (*image*) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. *Ketiga*, sebagai sarana rekrutmen politik, fungsi ini berkaitan dengan perkaderan dan rekrutmen calon-calon anggota legislatif maupun di eksekutif, partai politik harus betul-betul profesional dan orang-orang yang punya integritas. *Keempat*, adalah sebagai sarana pengatur konflik, karena masyarakat politik adalah masyarakat yang heterogen, tentu selalu berbeda, maka akan berpotensi konflik, maka partai politik dengan simbol partai yang aspiratif dan mampu mengatasinya.

Menurut Ramlan Surbakti dalam Muliensyah¹⁸³, ada tujuh fungsi partai politik yaitu; sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemandu kepentingan, komunikasi politik, pengendalian konflik, dan kontrol politik. Jika suatu partai politik dapat menjalankan fungsinya maka partai politik tersebut akan mendapatkan tempat di hati masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui, kebanyakan partai politik di Indonesia tidak dapat menjalankan fungsinya dikarenakan konflik internal di dalam tubuh partai tersebut. Berikut penjelasannya:

Pertama, Fungsi sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses

181 Ichlasul Amal, *Dimensi Politik Hubungan Pusat Daerah; Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan*, dalam Colin MC Andrewa, *Ichlasul Amal, Hubungan Pusat-Daerah Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali, 1993), h. 67

182 Mariam Budiharjo, *Demokrasi di Indonesia; Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 405-409.

183 Muliensyah A. Ways, *Political: Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik dan Welfare State*, (Yogyakarta: Mata Padi Presindo, 2015), h.135

sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, non formal, dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat;

Kedua, sebagai sarana rekrutmen politik, partai politik berfungsi menyeleksi dan memilih seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Rekrutmen politik dilakukan guna mencari dan merekrut anggota terbaik dari masyarakat untuk dijadikan kader partai politik sebagai bagian dari rotasi dan regenerasi partai politik:

Ketiga, sebagai sarana partisipasi politik, partai politik berfungsi untuk membuka kesempatan, mendorong dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik, jadi partai politik merupakan wadah partisipasi politik bagi warga negara. Untuk menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan maka partai politik dibentuk;

Keempat, fungsi pemandu kepentingan, di mana kegiatan menampung, menganalisis, dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, fungsi tersebut dinamakan pemandu kepentingan:¹⁸⁴

Kelima, sebagai sarana komunikasi politik, di mana partai politik tidak menyampaikan begitu saja segala informasi dari pemerintah kepada masyarakat atau dari masyarakat kepada pemerintah, tetapi merumuskan sedemikian rupa sehingga penerima informasi dapat dengan mudah memahami dan memanfaatkan. Dengan demikian, segala kebijakan pemerintah yang biasanya dirumuskan dalam bahasa teknis dapat diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Di lain pihak, partai politik berfungsi juga

184 *Ibid*, h. 136

untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah;

Keenam, sebagai sarana pengendalian konflik, partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi yang berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik;

Ketujuh, sebagai sarana kontrol politik, di mana partai politik harus melakukan suatu kontrol politik atau pengawasan demi terciptanya keseimbangan dalam menjalankan pemerintahan. Tolak ukur suatu kontrol politik berupa nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik seperti idiologi yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Tujuan kontrol politik di sini, yakni meluruskan kebijakan yang menyimpang dan memperbaiki yang keliru sehingga kebijakan dan pelaksanaannya sejalan dengan tolak ukur tersebut.

Sedangkan dalam *literature* lain ada tiga (3) fungsi partai politik, yakni:

- a. *Refresenting groups of interests*, dalam partai politik dikenal istilah konstituen, yakni; orang-orang yang mendukung atau mempercayakan hak pilihnya kepada partai atau kandidat partai, maka partai politik menyajikan kelompok seperti halnya individu.¹⁸⁵ Kelompok kepentingan ini mempunyai perhatian khusus. Misalnya, partai politik yang merepresentasikan petani, partai politik yang merepresentasikan buruh dan lain sebagainya. Di Indonesia, beberapa partai berhasil memposisikan dirinya, salah satunya adalah PDIP dan Gerindra, yang memposisikan dirinya sebagai partai politik yang memposisikan dirinya sebagai partai politik yang merepresentasikan wong cilik dan partai yang berpihak kepada kaum tani, buruh dll.
- b. *Simplifying choice*, di beberapa negara, partai politik mampu menempatkan dirinya pada posisi ideologi, filosofi ataupun nilai-nilai politik tertentu. Pemilihan dapat melihat partai politik tertentu

185 *Ibid*, h. 137-138

berdiri pada posisi tertentu, walaupun dengan penilaian secara sederhana. Sehingga pemilih tidak melihat partai politik sebagai sesuatu yang semu tanpa perhatian khusus yang mencirikannya. Misalnya di Amerika Serikat, partai Republik ditempatkan sebagai partai pendukung kalangan bisnis, dan partai Demokrat ditempatkan sebagai partai pendukung masyarakat bawah.¹⁸⁶ Di Indonesia beberapa partai politik dinilai mewakili ideologi tertentu. Partai ideologi yang mewakili Islam diwakili oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sedang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) di kelompokkan dalam partai berbasis massa Islam. Adapun partai lainnya dinilai mewakili partai dengan ideologi Nasionalis dan sekuler. Dan berideologi Islam pengelompokan inilah menjadi dasar peneliti untuk mengangkat Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai objek penelitian yang menjadi dasar masyarakat dalam menentukan pilihannya yakni *simplifying choice*, yakni karena ikatan ideologi membuat orang mudah memilih suatu partai dan ini merupakan kelebihan partai-partai berbasis ideologi Islam dan nilai lebih dalam merebut suara umat Islam, akan tetapi perolehan suara dan jumlah kursi yang diperoleh partai berideologi Islam tidak linier dengan jumlah umat Islam itu sendiri. Dan inilah muncul anomali atau keanehan politik.

- c. *Making policy*, partai politik secara organisasi, bukanlah pembuat kebijakan, namun partai secara pasti mengambil posisi pada kebijakan-kebijakan penting, terutama untuk menyediakan alternatif-alternatif kepada siapapun yang berkuasa. Ketika sebuah partai berkuasa, partai tersebut mencoba untuk meletakkan filosofisnya ke dalam praktek perundang-undangan. Jika seorang calon memenangkan jabatan dengan mayoritas besar, hal itu bahwa pemberi suara sudah memberikan suatu mandat untuk menyelesaikan program yang di kampanyekan.¹⁸⁷

¹⁸⁶ *Ibid*, h.138

¹⁸⁷ *Ibid*, h. 138-139

BAB V

KOMUNIKASI POLITIK DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BULAN BINTANG SUMATERA UTARA

A. Profil dan Manifesto Politik Partai Bulan Bintang

1. Sejarah Berdiri PBB di Indonesia dan di Sumatera Utara

Partai Bulan Bintang (PBB) adalah sebuah partai politik di Indonesia yang berazaskan Islam, berdiri pada tanggal 17 Juli 1998 di Jakarta dan dideklarasikan pada hari Jumat, 26 Juli 1998 di halaman Masjid Al-Azhar Kemayoran Baru Jakarta. PBB didirikan dan didukung oleh ormas-ormas Islam tingkat nasional, yaitu : Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Badan Koordinasi dan Silaturahmi Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI), Forum Silaturahmi Ulama, Habaib dan Tokoh Masyarakat (FSUHTM), Persatuan Islam (PERSIS), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Umat Islam (PUI), Perti, Al-Irsyad, Komite untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Lembaga Hikmah, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO), Pelajar Islam Indonesia (PII), Gerakan Pemuda Islam (GPI), KB-PII, KB-GPI, Hidayatullah, Asyafiyah, Badan Koordinasi Pemuda & Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Badan Koordinasi Muballigh Indonesia (Bakomubin), Wanita Islam, Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI), Ittihadul Mubalighin, Forum Antar Kampus dan Lembaga Penelitian Pengkajian Islam (LPPI).

Berbagai ormas di atas bergabung di dalam Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI) yang didirikan pada, 12 Mei 1998. BKUI merupakan pelanjut dari Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) yang didirikan, 1 Agustus 1989 oleh Pemimpin Partai Masyumi, yakni ;

DR.H. Mohammad Natsir, Prof. Dr.HM. Rasyidi, KH. Maskur, KH. Rusli Abdul Wahid, KH. Noer Ali, Dr. Anwar Harjono, H. Yunan Nasution, KH. Hasan Basri dan lain-lain. Ketika masa reformasi berkumpul tokoh-tokoh Islam dari golongan tua dan muda seperti Amien Rais (sering dipanggil Natsir muda), jauh sebelum reformasi terjadi Pak Natsir sudah membentuk Forum Ukhwah Islamiah (FUI). Hal tersebut yang menjadi embrio Partai Bulan Bintang secara nasional, sebagaimana ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Sumatera Utara periode 2010-2015 Dr. Masri Sitanggang: memaparkan:

“Pertama, Kita ikut dulu pada masa reformasi, bahwa perjuangan untuk kembali menegakkan syariat Islam di Indonesia ini tidak berhenti, sejak Masyumi dipaksa bubar oleh Soekarno kemudian tidak dibenarkan lagi untuk direhabilitasi pada masa Soeharto, walaupun sebenarnya itu inkonstitusional, namun tokoh-tokoh Islam ini masih kuat dan tidak kehilangan ideologinya mereka berkumpul di Dewan Dakwah yang dipimpin oleh M Natsir sebagai ketua Masyumi. Persisnya, ketika membentuk Dewan Dakwah ada yang menarik pada ucapan pak Natsir, ketika kita dulu berdakwah lewat jalur politik, maka sekarang kita berpolitik lewat jalur dakwah. Maka ketika masa reformasi berkumpul tokoh-tokoh Islam dari golongan tua dan muda seperti Amien Rais (sering dipanggil Natsir muda), jauh sebelum reformasi terjadi Pak Natsir sudah membentuk Forum Ukhwah Islamiah (FUI).”¹⁸⁸

Sedangkan menurut ahli sosiologi politik dan pengamat politik kenamaan di Sumatera Utara Shohibul Anshor Siregar, berbeda dalam memandang sejarah Partai Masyumi, bahkan sedikit menampik sejarah yang berkembang kalau parpol yang dipimpin Natsir saat itu dibubarkan Presiden Soekarno.

“Sebenarnya Masyumi tidak pernah dibubarkan oleh pemerintah, karena sebelum pemerintah yang dipimpin Presiden Soekarno saat itu, mengeluarkan surat tentang pembubaran Masyumi, sesungguhnya tokoh-tokoh Masyumi sudah terlebih dahulu membubarkan partai Masyumi tersebut”¹⁸⁹

Mengenai sejarah berdirinya PBB Dr. Masri Sitanggang secara nasional merinci adanya beberapa organisasi Islam untuk membentuk partai, pasca reformasi, namun dalam hal penamaan partai ada tarik

¹⁸⁸ Dr Masri Sitanggang MP, Ketua DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2016 pukul 14.30 s-d 16.00 di kediamana di Jalan Pasar 8 Bandar Khalifah Percut Sei Tuan.

¹⁸⁹ Shohibul Anshor Siregar MSI, Pengamat Sosiologi Politik Sumut, Wawancara diadakan tanggal 23 Oktober 2016, pukul 14.30-15.00 WIB, di ruang staf ahli bidang politik Fisip UMSU.

menarik soal partai yang akan dibentuk membawakan simbol Islam atau tidak.

"Mulanya di Sumut terbentuklah Forum Ukhwah Islamiah (FUI) di tahun 1995, saya termasuk sekretaris di Sumut. Berkumpullah organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, NU dan lain-lain. Ketika terjadi reformasi berkumpul semua dan memikirkan untuk membentuk kembali partai Islam seperti Masyumi. Tetapi terjadi perbedaan pemikiran, yang satu ingin membawa simbol Islam dan yang lain tidak mau membawa simbol Islam. orang dulu berharap dan berkeinginan partai ini membawa simbol Islam pak Amin Rais menjadi ketua dan pak Yusril Ihza Mahendra menjadi sekretaris jenderal (Sekjen). Nah, kemudian ketika saya menjadi sekretarisnya, artinya sudah tidak sulit lagi untuk berkomunikasi. Mandat itu hanya secara administrasinya tapi karena Forum Ukhwah Islamiyah ini sudah ada, tinggal orang-orangnya sajalah yang harus memenuhi administrasi, digunakanlah mandat dan diberikanlah kepada saya. Maka karena saya yang diberikan mandat sayapun menghubungi semua tokoh-tokoh tua, (seperti Fuad Said, Saldin Saleh, pak Yamin Lubis, dll). Alasan saya mendatangi dan menghubungi tokoh-tokoh tua ini adalah supaya komunikasi politik dan ideologi Masyumi dulu tertularkan ke yang muda-muda".¹⁹⁰

Drs Bustami Manurung wakil sekretaris DPW PBB Sumatera Utara periode 2010-2015 dan saat ini menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris DPW PBB Sumut (periode 2015-2020) senada dengan keterangan Dr. Masri Sitanggang dalam memandang sejarah berdirinya PBB. Bahkan plh Sekretaris DPW PBB Sumut tampak lebih merincikan keterangan pimpinannya.

"Kalau berdirinya PBB di Sumatera Utara di tahun 1998 nanti bisa diambil datanya, itu memang dari proses reformasi. Reformasi pada tahun 1998 itu, dari tiga partai menjadi beberapa partai lahirlah PBB secara nasional. Dikomandani tokoh-tokoh umat Islam, termasuk juga Amin Rais. Kemudian didaulatlah, setelah itu bekerjalah, karena pemilu mau dipercepat saat itu, sehingga secara formal wajib membentuk struktur partai. Maka, lahirlah di Sumatera Utara. Dan yang pertama itu ditunjuk Alm. Fuad Said. Walaupun mungkin tangga awalnya memang adalah tempat Dewan Dakwah dan ormas-ormas Islam yang tergabung dalam pendirian Partai Bulan Bintang itu. Kemudian ditingkat pusat pada awal berdirinya PBB diketuai oleh Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra, SH,MSc tokoh reformasi yang menjadi arsitek berhentinya Soeharto dari jabatan Presiden

¹⁹⁰ Dr Masri Sitanggang MP, Ketua DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2016, pukul 14.30 s-d 16.00 di kediamannya di Jalan Pasar 8 Bandar Khalifah Percut Sei Tuan.

RI ketika reformasi bergulir dan juga sebagai tokoh yang memelopori amandemen konstitusi pasca reformasi di tengah tuntutan federalisme dari berbagai tokoh reformasi ketika itu, dan pernah pula menjadi Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Menteri Sekretaris Negara. Sedangkan DR. H.MS. Kaban diangkat sebagai sekretaris jendral, bahkan tokoh HMI yang sangat disegani dan pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan juga dikenal tak kenal kompromi dengan para cukong kayu dan perambah hutan di Indonesia”.¹⁹¹

Dr Masri Sitanggang dalam menjelaskan hubungan PBB dengan Masyumi sebagai partai pemenang pemilu pertama, persisnya ketika negara Indonesia dipimpin Presiden Soekarno, serta mengantarkan Buya M Natsir terpilih sebagai Perdana Menteri pertama, diurai secara lugas.

“Kalau secara organisasi tentu tidak, jadi ada bahasa sederhananya begini ada pertemuan, teringat saya bulan juni tahun 1998 setelah pak Soeharto lengser bertemu di situ pak Amien Rais, Yusril semua tokoh-tokoh termasuk dari PPP ada pak A.M. Syaifuddin, Buya Ismail Hasan Materium waktu itu buya Ismail mengatakan sekiranya partai ini berdiri PPP bubar aja dibuat jadi satu partai saja, tetapi seperti saya katakan, pak Amien Rais tidak mau membawa nama Islam ke politik lebih memilih partai nasional akhirnya disini pecah, di mana pak Amin akhirnya mendeklarasikan Partai Amanat Nasional. Nah, kalangan yang menginginkan simbol Islam, gerakan Islam, dan ideologi Islam itupun pecah lagi yaitu dalam membuat nama partai sebagian menginginkan namanya tetap Masyumi, jadi semangatnya Masyumi. Tapi yang lainnya punya pandangan lain yang datang dari pak Anwar Haryono tokoh Dewan Dakwah dan juru bicara terakhir Masyumi dan beliau yang memelopori pertemuan tersebut, dia menyatakan saya khawatir kalau kita tetap menggunakan nama Masyumi generasi muda sekarang belum seberapa memahami dan belum bisa mengikuti bagaimana cara, prilaku, dan berpikirkannya orang Masyumi, kita khawatir malah justru membuat nilai yang kurang pas terhadap nilai perjuangan Masyumi yang sudah harum selama ini. Akhirnya beliau katakan ngak usahlah pakai nama Masyumi tapi ideologinya tetap Masyumi, lambangnya tetap Masyumi makanya Bulan Bintang lambangnya. Karena dulu kita disebut keluarga Bulan Bintang maka disebut Partai Bulan Bintang (PBB). Jadi hanya dinamai saja dan Yusril dianggap orang sebagai tokoh muda Masyumi karena dia mendalami secara akademis tentang Masyumi dan pernah sebagai sekretarisnya buya M. Natsir.”¹⁹²

191 Bustami Manurung, Wakil Sekretaris DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu Tanggal 18 September 2016, pukul 16-17.30 di Café Yuki Plaza.

192 Dr Masri Sitanggang MP, Ketua DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2016, pukul 14.30 s-d 16.00 di kediamannya di Jalan Pasar 8 Bandar Khalifah Percut Sei Tuan.

Drs Bustami Manurung justru berpendapat PBB tak memiliki hubungan erat dengan Masyumi, namun secara historis dia menekankan ada hubungan erat. Bahkan dengan blak-blakan dia menyatakan bahwa PBB adalah Masyumi itu sendiri yang mewujud pasca reformasi, kemudian dalam penegasannya juga, bahwa partai yang mula-mula berdiri dipimpin Politisi Yusril Ihza Mahendra tersebut merupakan partai Masyumi.

”Bukan ada hubungannya kalau bilang hubungan, kalau historisnya memang PBB ini karena Masyumi secara formal dibubarkan di negara ini. Tak pala segan kita mengatakan ini adalah Masyumi, cuma namanya PBB, jadi dapat saya katakan PBB ini sesungguhnya adalah reinkarnasi atau kemunculan kembali Masyumi yang pernah jaya dan menjadi partai kebanggaan umat Islam Indonesia pada zamannya, melalui PBB ini cita-cita dan perjuangan tokoh-tokoh Islam seperti Natsir akan dihidupkan kembali”¹⁹³

Sedikit mengundang penasaran peneliti, soal melekatnya sosok M Natsir namun nama partai bukan Masyumi melainkan PBB. Itu seperti yang dikemukakan Dr Masri Sitanggang dalam merinci perjalanan berdirinya PBB yang diwarnai tarik menarik dalam mengusulkan nama, di antaranya ; ada yang mengusulkan nama Partai Masyumi Baru, juga ada yang usulkan nama lain, dan ada yang pakai nama Masyumi, sehingga kesepakatan mengerucut nama menjadi PBB.

Menyikapi hal itu, Bustami Manurung justru lebih memastikan adanya hubungan historis yang erat antara PBB dan Masyumi, terlebih organisasi-organisasi yang menyokong berdirinya partai politik yang periode kepemimpinan keduanya di tingkat pusat dinahkodai MS Kaban tersebut, merupakan organisasi yang tokoh-tokohnya eksponen Masyumi.

“Ada Masyumi baru karena memang tokoh-tokoh ekponen di Masyumi itukan namanya partai politik lama, ormas itu termasuk Dewan Dakwah dan segala macam ada pulak karakternya berbeda-beda. Kepingin dia tampil di Masyumi itu, cuma ada sebagian orang perjuang-pejuang Masyumi ini melahirkan partai politik. Tetapi khittoh perjuangannya seperti yang diinginkan Natsir. Jadi filosofisnya adalah perjuangan Masyumi. Makanya PBB konsisten disetiap sidang umum MPR itu perjuangan syariat Islam, mengembalikan Piagam Jakarta itu. Tujuh kata

¹⁹³ Bustami Manurung, Wakil Sekretaris DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu Tanggal 18 September 2016, pukul 16-17.30 di Caf e Yuki Plaza.

dalam Piagam Jakarta yang di hapuskan, harus dikembalikan. Karena obsesi Masyumi itu adalah perjuangan syariat Islam walaupun bukan dalam bahasa formalistik”¹⁹⁴

Beda lagi, Dr Masri Sitanggang dalam menilai penggunaan nama partai politik Masyumi oleh tokoh-tokoh eksponen Masyumi, terpecah menjadi dua di antaranya menggunakan nama Partai Masyumi Baru kemudian Partai Masyumi lolos verifikasi dan ikut pemilu. Tak hanya itu, Masri Sitanggang juga memaparkan bahwa ketua Masyumi Baru Abdullah Heha Mahua akhirnya menjadi pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI).

“Oh, bukan. Masyumi baru itu lahir sebelum reformasi yang dibuat oleh Ridwan Saidi tapi tidak ikut pemilu. Yang ikut pemilu hanya yang menggunakan masyumi saja. Disitulah yang saya katakan adanya perbedaan nama partai yang pecah menjadi dua pendapat, yang satu tidak menggunakan nama Masyumi yang lain Menggunakan nama Masyumi. Nah partai yang menggunakan nama Masyumi ini dipimpin oleh Abdullah Heha Mahua yang pernah menjadi pimpinan KPK dan ikut pemilu.”¹⁹⁵

Dalam perjalanan PBB selanjutnya, MS Kaban terpilih sebagai Ketua Umum PBB pada tanggal 1 Mei 2005 dan Drs.H. Sahar L. Hasan sebagai Sekjen. Kemudian, sejak Muktamar ke-3, April 2010, di Medan partai ini telah menetapkan kembali DR.H.MS Kaban sebagai Ketua Umum dan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc. sebagai Ketua Majelis Syuro dan BM Wibowo,SE., MM, mantan Sekretaris Jenderal Organisasi Massa Islam Hidayatullah, sebagai Sekretaris Jenderal.

Diketahui, PBB sejak reformasi telah menjadi peserta pemilu dan telah mengikuti pemilu mulai dari tahun 1999, 2004, 2009 serta pemilu 2014. Pada Pemilu tahun 1999, PBB mampu meraih 2.050.000 suara atau sekitar 2% dan meraih 13 kursi DPR RI. Sementara pada Pemilu 2004 memenangkan suara sebesar 2.970.487 pemilih (2,62%) dan mendapatkan 11 kursi di DPR. Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif 2009, PBB memperoleh suara sekitar 1,8 juta yang setara dengan 1,7% dan dengan sistem *Parliamentary Threshold* (PT) 2,5% sehingga berakibat hilangnya wakil PBB di DPR RI. Namun PBB

¹⁹⁴ Bustami Manurung, Wakil Sekretaris DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu Tanggal 18 September 2016, pukul 16-17.30 di Café Yuki Plaza.

¹⁹⁵ Dr Masri Sitanggang MP, Ketua DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2016, pukul 14.30 s-d 16.00 di kediamana di Jalan Pasar 8 Bandar Khalifah Percut Sei Tuan.

masih memiliki sekitar 400 Anggota DPRD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia.

Sebagai mana dipahami, bahwa aturan yang dibuat KPU sesuai dengan Undang-Undang pemilu, untuk ambang batas minimal 2,5% suara hanya diberlakukan di tingkat nasional atau DPR RI, sedangkan untuk suara tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota suara tetap dihitung dan mendapatkan jatah di DPRD Tingkat satu dan dua, sehingga, walaupun PBB tidak berhasil mendudukkan kader-kadernya di senayan tapi PBB masih punya keterwakilan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Aturan ini, akan menarik diteliti dalam perspektif komunikasi politik.

2. Lambang PBB dan Makna



Adapun makna logo Partai Bulan Bintang, adalah ; Gambaran simbol Bulan Bintang yang dimaknai dalam partai ini untuk menggambarkan kesinambungan historis perjuangan Islam sejak berabad-abad lampau, sejak kaum muslimin mulai tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat yang kemudian berjuang dan mendirikan kesultanan-kesultanan Islam, bertempur melawan penjajah, dan akhirnya bahu-membahu dengan segenap komponen kekuatan bangsa mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, dilanjutkan dengan perjuangan politik pasca kemerdekaan, hingga saat ini. Selanjutnya warna dasar hijau yang dalam sejarah Nabi Muhammad sering dijuluki sosok berjubah hijau yang membawa Islam sebagai *rahmatan lil'alam*, dan kini telah menjadi ciri khas umat Islam, yang kemudian dimaknakan bahwa PBB berazaskan agama Islam, sedangkan warna kuning bermakna kesejahteraan, kemakmuran dan kejayaan.

3. Manifesto Politik PBB “Khittah Perjuangan, Prinsip & Azas Partai”

Berdasarkan tanfidz keputusan dari dokumen kepartaian yang ada, maka peneliti menemukan ketetapan dalam Mukhtamar III PBB melalui Surat Nomor: 09/TAP/Mukhtamar III/2016 tentang Khittah Perjuangan Partai Bulan Bintang dengan isi sebagai berikut:

a. Muqaddimah

Bahwa khittah perjuangan partai adalah garis-garis besar perjuangan partai yang merupakan refleksi operasional kandungan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART), serta Tafsir Asas juga akomodasi aspirasi dan upaya aktualisasi kepentingan partai yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia dalam bentuk program-program umum perjuangan politik partai yang akan dilaksanakan ke depan.

Bahwa khittah perjuangan partai harus memperhatikan kepentingan anggota, kepentingan masyarakat Indonesia pada umumnya dan dapat dijalankan dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya manusia yang ada. Dengan demikian juga perlu secara jeli melihat dan mewaspadaikan berbagai faktor kendala yang dihadapi agar program umum perjuangan ini mampu memaksimalkan harapan menjadi kenyataan.

Bahwa mencermati perkembangan dan dinamika masalah aktual nasional bangsa saat ini, berupa rusaknya akhlak atau moralitas masyarakat, lemahnya kesadaran dan pengamalan ajaran agama, kondisi perekonomian dan kemandirian ekonomi yang masih belum pulih, persoalan penyelesaian utang luar negeri yang belum teratasi, berbagai musibah yang silih berganti menimpa, sistem politik yang lebih demokratis, partisipasi rakyat yang luas dan nyata, sikap politik rakyat yang semakin kritis, lemahnya penegakan hukum dan disiplin nasional serta lemahnya kebanggaan nasional.

Pada sisi lain lewat muktamar itu juga, secara internal dikupas bahwa PBB tidak lolos *Parliamentary Threshold* (PT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2009. Namun berdasarkan hasil survei tahun 2009, PBB dapat eksis dengan rekomendasi, yakni: harus melakukan konsolidasi menyeluruh dan

berkesinambungan. Sehingga kedepannya meskipun tidak lolos PT di tingkat nasional, tetapi PBB masih memiliki modal yang cukup signifikan dengan meraih 1,9 juta lebih suara pemilih pada Pemilu 2009, memiliki 407 orang legislator tingkat I dan tingkat II di seluruh Indonesia dan jaringan partai sampai di tingkat ranting serta modal-modal lainnya. Dalam mutamar tersebut juga ditegaskan, Bahwa amanat perjuangan penegakan syariat Islam merupakan aspirasi umat Islam Indonesia dari waktu ke waktu, adalah ruh yang menggelora yang senantiasa menjiwai, memotivasi dan mendasari gerak langkah keluarga besar PBB dalam melaksanakan garis-garis besar perjuangan partai.

b. Visi dan Misi Partai

Visi partai adalah terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami, sedangkan misi partai adalah membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa, maju, mandiri, berkepribadian tinggi, cerdas, berkeadilan, demokratis dan turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam.

c. Strategi Perjuangan Partai

Dalam menghadapi perhelatan demokrasi di Indonesia maka strategi Perjuangan PBB dirincikan menjadi 6 poin. *Pertama*, konsolidasi dan pemberdayaan partai terutama membangun jaringan partai sampai tingkat paling bawah dan melakukan proses kaderisasi secara komprehensif. *Kedua*, pencitraan partai sebagai partai Islam yang dicintai dan menjadi aset umat serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. *Ketiga*, pembinaan dan pengembangan spirit ukhwah Islamiyah dengan menghormati *pluralitas* kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. *Keempat*, persiapan dini untuk pemilihan umum 2014 yang terencana dan sistematis. *Kelima*, upaya-upaya pemberdayaan generasi muda dan perempuan yang efektif. *Keenam*, tersusunnya konsep-konsep berdasarkan syariat yang dapat diimplementasikan.

4. Prinsip dan Azas Perjuangan Partai

Adapun prinsip dan azas perjuangan PBB sebagai Partai Islam yang konsisten menegakkan syariat dan cita-cita Islam, setelah peneliti telusuri dapat ditemukan pada keputusan Tanfidz Muktamar ke 3 PBB yang diadakan di Medan serta tertuang pada keputusan Nomor:

Nomor: 08/TAP/Muktamar III/2010 tentang Tafsir Asas Partai Bulan Bintang yang berbunyi:

a. **Landasan Pemikiran**

Allah Subhanauwa Ta'ala berfirman dalam surat al Maidah ayat 3 :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini Aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan Aku telah cukupkan ni'mat-Ku, dan Aku telah ridhai Al-Islam sebagai agama bagi kamu”.¹⁹⁶

Dalam wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, pada masa pelaksanaan *Haji Wada'* (Haji Perpisahan), Allah SWT menyatakan dengan tegas tentang kesempurnaan Al-Islam, sebagai Agama Allah (*Dinullah*), dan Allah meridhai Al-Islam sebagai pedoman dan jalan hidup bagi manusia.

Dalam satu bagian dari Khutbah *Wada'*nya, Rasulullah SAW (*Shallallahu 'Alaihi Wasallam*) menyampaikan wasiatnya, manusia tidak akan pernah tersesat dan akan selamat dalam hidup selamanya di dunia maupun di akhirat, jika berpegang teguh pada dua hal yang diwariskannya yaitu Alquran dan As-Sunnah, yang merupakan kodifikasi seluruh ajaran Al-Islam yang utuh dan lengkap: “*Telah Aku tinggalkan dua perkara (pedoman hidup) yang menjamin kamu tidak akan pernah tersesat dalam hidup selamanya, jika kamu berpegang teguh pada keduanya; kedua pedoman hidup itu ialah Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya*”. (Hadist Riwayat Abu Daud dan Malik).

Pada era 1980-an, dengan tujuan konsolidasi *ummah-jamaah-imamah* maka pada 2 Zuhijjah 1410 H 1 Agustus 1989 didirikan Forum Ukhuwah Isamiyah (FUI), dan kemudian untuk melaksanakan *amar a'ruf dan nahi munkar* disepakati oleh para ulama dan *zuama* untuk mendirikan Badan Koordinasi Umat Islam Indonesia (BKUI) pada 15 Muharram 1419 H bertepatan

196 QS. 5: 3

12 Mei 1998 di Jakarta, dan untuk mensikapi perkembangan sosial politik-ekonomi-hukum maka diselenggarakan MUNAS I BKUI dengan Sidang Pleno Pertama pada 4 Juni 1998 dan Sidang Pleno Kedua ada 10 Juni 1998, dan sebagai tindak lanjut hasil Sidang Pleno Kedua diselenggarakan “Rapat Tim Partai” oleh sub tim AD/ART Partai pada 12 Rabiul Awal 11419 H bertepatan 8 Juli 1998 di Jakarta yang menghasilkan persetujuan bahwa nama partai adalah Partai Bulan Bintang atau disingkat PBB. Berdasarkan dalil-dalil dari Alquran dan al-Hadis di atas serta sejarah perjuangan umat Islam Indonesia, maka dengan keinsyafan, keyakinan dan kesadaran sejumlah pimpinan umat Islam mendirikan PBB dengan Islam sebagai azas-nya.

Persepsi, pemahaman dan implemementasi Al-Islam sebagai Asas Partai yang menjiwai Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Pedoman Organisaais (PO), dan khittah perjuangan partai, diuraikan dalam tafsir Asas. “Asas ialah hukum dasar, yang berkenaan dengan dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi-partai) yang menjadi dasar tumpuan berfikir atau berpendapat”¹⁹⁷

Asas Islam bagi PBB berarti partai meyakini dengan sungguh-*sungguh* kebenaran *Al-Isam* sebagai Agama Allah yang diturunkan untuk mengeluarkan umat manusia dari suasana gelap gulita (kekafiran) kepada suasana terang benderang (keimanan). Allah *Subahanahu wa Ta'ala* berfirman alam surat al-Baqarah ayat 257 sebagai berikut:

اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Allah pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman); Dan orang-orang yang kafir pelindung-pelindungnya adalah thaghut, yang mengeluarkan mereka

197 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h 52.

dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.198

Sehingga setiap ucapan, pemikiran dan tindakan warga partai senantiasa berlandaskan kepada ajaran Islam yang melampaui ruang dan waktu. Ajaran Islam merupakan sumber inspirasi, motivasi, hukum dan pandangan hidup dalam arti sesungguhnya. Bagi warga bulan Bintang cahaya iman akan memancarkan *ukhuwah Islamiyah* dan menyuburkan *silaturahmi* dalam kehidupan masyarakat.

Asas Islam juga berarti bahwa PBB dalam segala kegiatannya berpedoman kepada petunjuk *Al-Islam* yang *kaaffah*. Allah swt berfirman dalam surat ar-Rum ayat 30 dan al-Baqarah ayat 208 sebagai berikut:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah) ; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu; Tidak ada perubahan pada fitrah Allah ; (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.199

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut ;angkah-langkah syaitan; Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”200

Maka ajaran Islam adalah ajaran agama yang baik, lurus dan *kaaffah*. Al-Islam adalah agama yang esensinya telah diturunkan Allah swt kepada para nabi dan Rasul Penutup yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai satu-satunya agama yang telah disempurnakan untuk ditegakan dalam keutuhan hidup dan

198 QS. 2 : 257

199 QS. 30 : 30

200 QS. 2 : 208

kehidupan manusia. Allah swt berfirman dalam surat al-Syura ayat 13:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا
بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ^ط

“Dia (Allah) telah mensyari’atkan bagimu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh, dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu tegakkan agama, dan janganlah kamu berpecah-pecah di dalamnya.”²⁰¹

PBB ber-*azas Islam*, artinya PBB ini berpedoman seutuhnya pada ajaran *Al-Islam*, sebuah sistem panduan hidup yang pokok-pokok ajarannya meliputi *akidah*, *syri’ah* dan *akhlak*. Dengan demikian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART), dan *Khittah Perjuangan Partai* berpedoman pada pokok-pokok ajaran *Al-Islam* tersebut. Karena itu seluruh seluruh aspek perjuangan dengan sikap, ucap dan perilaku segenap fungsionaris dan kader partai harus berlandaskan dan berpedoman pada *Al-Islam* yang prinsip-prinsip ajarannya cukup jelas, baik dari *Alquran* maupun *Al-Hadits*.

b. Prinsip-prinsip Ajaran Islam

Prinsip-prinsip ajaran Islam yang menjadi pegangan partai, mencakup 15 poin, sebagai berikut ; *Pertama*, tauhid (*Al-Ikhas: 1-4*). *Kedua*, manusia sebagai umat yang satu dan moderat (*Al-Baqarah: 213*), *Ketiga*, *tadarruj* (bertahap) dalam melaksanakan ajaran (*An-Nahl: 125*), *Keempat*, prinsip menegakan keadilan (*An-Nisa: 58*, *Al-Maidah: 8*, *Al-An’am: 152*). *Kelima*, prinsip kepemimpinan (*‘Ali Imran: 118*, *An-Nisa’: 59* dan *Asy-Syu’ara:150-152*), *Keenam*, prinsip musyawarah (*‘Ali Imran: 159* dan *Asy-Syu’ara: 38*), *Ketujuh*, persatuan dan persaudaraann (*‘Ali-Imron: 103* dan *Al-Hujurat: 10*). *Kedelapan*, prinsip persamaan (*An-Nisa’: 1* dan *Al-Hujurat: 13*). *Kesembilan*, prinsip hidup bertanggung secara individual dan kolektif (*An-Nisa’: 36*), *Kesepuluh*, prinsip tolong-menolong dalam kebaikan dan membela yang lemah (*Al-Maidah: 5*, *al-Balad:12-16*). *Kesebelas*, prinsip mengutamakan

201 QS. 42 : 13

perdamaian (*Al-Anfal: 61, Al-Hujurat: 9, Al Mumtahanah: 8*). Kedua belas, prinsip bela Negara (*Al-Baqarah: 216, 190, 193, At-Taubah: 38-39, dan Al-Anfal: 60*), Ketiga belas, prinsip memelihara hak asasi manusia (*Al-Isra': 33, Al-Baqarah: 188, An-Nisa': 29 dan 59, dan 32, An-Nur: 27, Al-Hujurat: 11-12, Ali-Imran: 104, Al-Baqarah: 256, An-Nisa': 58, Al-A'raf: 33, Al-Maidah: 52*). Keempat belas, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (*Ali Imran: 110*). Kelima belas, prinsip *tasamuh* (toleransi) (*Al-Mmumtahanah: 8,9. An-Nisa': 1. Al-Hujurat: 13*).

c. **Maqasahid Ajaran Islam**

Maqasahid (tujuan utama) ajaran Islam ialah untuk menarik *maslahat* (kebaikan) dan menolak *mafsadat* (kerusakan). *Maslahat* dan *mafsadat* ini dapat dirumuskan dalam *dharuri* (sesuatu yang wajib ada), *hajjiy* (dilakukan karena ada keperluan), dan *tahsini* (sesuatu yang menjadikan syariat ini jernih indah dan sempurna). Implementasi *maqashid al-Islam* tercermin dalam keharusan *hifzh* (memelihara) ajaran ini dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan *akidah*, *ibadah* maupun *muamalah* yang meliputi *hifzhu al-din* (memelihara agama), *hifzhu al nafs* (memelihara jiwa), *hifzhu al-nasl* (memelihara keturunan), *hifzhu al-mal* (memelihara harta), dan *hifzhu al-'aql* (memelihara akal).

Atas dasar prinsip-prinsip dan tujuan ajaran Islam itulah PBB berdiri, dan atas dasar ini pula partai bersama-sama dengan komponen bangsa berpartisipasi untuk membangun negara. Prinsip dan tujuan ini pulalah yang menjadi landasan perkataan, tindakan, gerakan, langkah, khithah, dan aktivitas politik PBB yang mencakup *aqidah* dan *syariah*, berikut rinciannya :

1) **Aqidah**

Dalam *aqidah* itu sendiri juga diuraikan lagi, yang bermuara menjadi sebuah ketetapan hati atau keyakinan untuk mempercayai dan meyakini Allah serta mengabdikan kepada sang pemilik alam itu, berikut uraiannya:

a) Keyakinan kepada Allah

Allah swt berfirman dalam ar-Rahman ayat 26-27:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

“Semua yang ada di atas bumi akan binasa; dan tetap kekal wajah Tuhanmy yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.”²⁰²

Sehingga *aqidah* Islam bagi PBB bermakna bahwa setiap anggota partai dengan sungguh-sungguh meyakini ke-Esa-an Allah sebagai Tuhan satu-satu-Nya yang patut dan wajib disembah, diagungkan, ditaati dan diperhatikan suruhan dan larangan-Nya, karena Allah merupakan *Dzul-Jalali wa 'I-kram* (Yang mempunyai ke-Agungan dan segala ke-Besaran-nya). Dengan kalimat *Laa ilaaha illal Allah*, partai berkeyakinan bahwa dalam pengutusan kepada selain Alah dan perubahan harus mengikuti jalan-Nya, yang berarti jalan keluhuran, kebenaran, keadilan, dan kebahagiaan seluruh umat maunisa.

b) Keyakinan mengabdikan kepada Allah

Aqidah Islam mengajarkan yakin ke pada Allah Yang Maha Esa yaitu, *tauhid* yang dimulai dengan dua kalimah syahadat, yakni ; *Laa Ilahailallah* yang artinya, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasul-Nya.

Karena itu sesuai dengan fitrah penciptaan-Nya, manusia adalah makhluk yang tugas pokoknya semata-mata untuk mengabdikan hanya kepada Allah, dan mengakui Nabi Muhammad adalah Rasul-Nya yang menuntun manusia agar melaksanakan fungsinya dengan benar. Sedangkan Allah tidak menuntut apapun dari manusia selain pengabdian kepada-Nya, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Dzaariat, ayat 56-57:

202 QS. 55 : 26-27

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mentembah kepada-Ku”²⁰³

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِ

“Aku tidak menginginkan rezki sedikitpun dari mereka dan aku tidak menginginkan mereka member Aku makan.”²⁰⁴

Ber-*aqidah* Islam artinya, siapapun yang bergabung yang bergabung dalam partai Buan Bintang wajib mempunyai niat dan motivasi yang ikhlas untuk beribadah kepada Allah. Menjadi anggota atau pengurus atau posisi apapun dalam Partai, harus diniatkan dan utamakan beribadah melalui partisipasi (*ta' awun*) dalam partai dengan bekerja keras untuk menegakan Al-Islam (*Jihad fi sabili 'Il-laahi*). Motivasi utamanya semata-mata uuntuk mendapatkan *mardhatillah* (ridha allah) dengan beribadah kepada-Nya, dan hanya semata-mata tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya.

2) Syari'ah

Usai pemantapan akidah atau keyakinan, tentunya untuk merefleksikannya adalah mengikuti atau menjalankan seluruh ketentuan Allah yang telah disampaikan melalui Rasulullah, sehingga dalam mengarungi kehidupan baik *horizontal* yakni berhubungan terhadap sesama manusia, serta *vertical* yaitu berhubungan kepada Allah mampu secara maksimal mengikuti tuntunan-Nya.

a) Melaksanakan Islam Secara *Kaffah*

Al-Islam adalah *agama fitrah* yang diturunkan Allah bersesuaian dengan *iradah-Nya* dalam menciptakan manusia. Karena itu ajaran-ajaran Al-Islam merupakan sebuah sistem pedoman dan tuntutan hidup yang *komprehensif* dan *munasabah* (relevan) dengan keutuhan

203 QS. 51 : 56

204 QS. 51 : 67

seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Manusia dituntut menghadapkan dan mengarahkan hidupnya untuk menegakkan *Al-Islam* seutuhnya. *Al-Qur'an* pada surah al-Rum ayat 30, secara eksplisit menyebutkan:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada aagam (Allah), (tetaplah atas) fitrah Allah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah ; (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”²⁰⁵

Rasulullah *shalalallahu ‘alaihi wasallam* yang memandu manusia dalam melaksanakan ibadah secara utuh, yaitu *ibadah mahdhah* (ritus/khusus) dan *ghair mahdhah* (muamalah/umum). Keteladanan Rasulullah dalam melaksanakan *Syari'at Islam* secara utuh setelah Hijrah ke Madinah, merupakan *sunnah* yang wajib diikuti umat Islam kapanpun dan di manapun. Implementasi *Syari'at Islam* yang disunahkan Rasulullah di Madinah dengan menggambarkan keutuhan sistem *Al-Islam*, seperti: spritiual, moral, politik, hukum, pendidikan, ekonomi, dan sistem sosial.

Allah SWT pun menyeru umat yang beriman agar menerima dan melaksanakan *Al-Islam* secara utuh, sebagaimana dalam Alquran pada surat al-Baqarah ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya; Dan janganlah kamu mengikuti

jalan-jalan syaitan; Sesungguhnya syaitan itu musush yang yata bagi kamu.”²⁰⁶

Menerima dan menegakkan *Al-Islam* secara utuh juga bermakna membentengi diri terhadap segala tipu daya setan, yang selalu mendorong manusia agar cenderung menerima dan melaksanakan *Al-Islam* sebagai saja, dan meninggalkan bagian lainnya, agar kehinaan dan kesengsaraan akhirat yang akan dialami setan dirasakan pula oleh manusia.

Dalam surat al-Baqarah ayat 85 diterangkan:

أَفْتَوْمُنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ
يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

“Apakah kamu beriman (percaya) kepada sebagian dari Al-Kitab (Turat) dan mengingkari sebagian yang lain? Tidaklah ada balasan abgi uang berbuat demikian dari padamu, melainkan kehinaan dalam kehidupan di dunia pada hari akhirat, mereka akan dihadapkan pada siksaan yang sangat berat; Dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kamu kerjakan.”²⁰⁷

Pelaksanaan *Syari'at Islam* yang utuh dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara memerlukan posisi dan peran politik yang kuat. Karena itu perjuangan politik umat Islam seperti yang dilaksanakan PBB merupakan *kewajiban syar'i* dalam upaya melaksanakan kewajiban mengikuti *sunnah* (teladan) *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam*.

b) Sumber dan Kesatuan Hukum

Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonnedisia (NKRI) kewajiban *syar'i* dalam kesatuan hukum menjadi mutlak adanya, mengingatkan umat Islam merupakan bagian terbesar bangsa ini. Mutlaknya kewajiban

206 QS. 2 : 208

207 QS. 2 : 85

tersebut karena mutlaknyanya menegakkan keadilan. Adalah adil jika umat Islam melaksanakan ajaran-ajaran yang ditetapkan syari'at agamanya, sebagaimana adilnya umat lain melaksanakan ajaran-ajaran menurut ketentuan agamanya masing-masing.

Bagi warga PBB, *Syairi'at* Islam adalah sumber hukum tertinggi, yang prinsip-prinsipnya dapat ditransformasikan menjadi hukum nasional, dengan memperhatikan keperluan ruang dan waktu untuk melindungi semua warga Negara. PBB dalam hal ini melihat kemajemukan dan kesatuan hukum dari sudut pandang Bhineka Tunggal Ika. Warga PBB berjuang untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang adil yang menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas di mana semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum.

c) Hak Asasi Manusia

Berhubungan erat dengan cita-cita negara hukum, warga Bulan Bintang menghormati harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah. Semua manusia pada hakikatnya duduk sama rendah dan tegak sama tinggi. Satu-satunya yang membedakan seorang manusia dengan yang lain adalah ketakwaan dan kedekatan dirinya kepada Allah.

Allah SWT berfirman dalam surat al-Hujurat ayat 11-13 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا
خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا
تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ
بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengolok-olokkan kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang

mengolok-olokan), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan-perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan-perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olokkan), dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk; Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman, siapa saja yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim”.208

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بََعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ
يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ
رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebgaaagian yang lain; sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik padanya: dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”.209

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal, Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara

208 QS. 49 : 11
209 QS. 49 : 12

kamu sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal”.²¹⁰

Karena itu warga Bulan Bintang menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Kewajiban menghormati HAM merupakan kewajiban setiap orang, lembaga, negara, organisasi, partai atau badan internasional. Warga PBB berjuang untuk menegakkan Hak Asasi Manusia agar setiap orang dapat hidup aman dan sentosa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Allah swt berfirman dalam surat al-An'am ayat 151 :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar; demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu, supaya kamu memahaminya (nya).”²¹¹

d) Penegakan Keadilan

- Adil Dekat kepada Taqwa

Kaidah akhlak paling mendasar yang harus dipegang teguh adalah kewajiban untuk berlaku adil, sebagaimana dalam surat al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil;

²¹⁰ QS. 49 : 13
²¹¹ QS. 6 : 151

dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kamum mendorong kamu berlaku tidak adil; Adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa; bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakaan.”²¹²

Pada surah al-An'am ayat 152, Allah swt berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

“Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil”.²¹³

Keadilan adalah norma dasar paling hakiki yang wajib ditegakkan sepanjang hayat. Keadilan wajib ditegakkan terhadap siapapun juga, termasuk diri sendiri. Ketidak sukaan, bahkan kebencian terhadap seseorang atau segolongan orang, tidak boleh menyebabkan warga PBB berlaku tidak adil kepada mereka. Berlaku adil, seperti firman Allah dalam Alquran, yang merinci akan mendekatkan manusia kepada ketakwaan.

- Melenyapkan Kezhaliman

Lawan keadilan adalah kezaliman, sedangkan *kezaliman* adalah perbuatan sewenang-wenang yang melampaui batas norma-norma syari'at, akhlak, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Warga PBB berjuang untuk menegakkan keadilan dan melenyapkan setiap bentuk kezaliman di muka bumi.

Norma keadilan harus menjadi landasan dan menyemangati hubungan antar individu, keluarga, masyarakat dan negara. Keadilan pertama kali adalah sesuatu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan *ilahi* dan setelah itu keadilan berdasarkan hati nurani dan fikiran yang sehat. Norma-norma hukum yang berlaku harus ditegakkan di atas

²¹² QS. 5 : 8

²¹³ QS. 6 : 152

landasan norma keadilan. Demikian pula hubungan antara negara dengan rakyat, dan hubungan pusat dengan daerah secara timbal balik. Setiap kezaliman, baik terang-terangan maupun tersembunyi, wajib ditentang melalui saluran-saluran yang sah dan demokratis serta menjunjung tinggi norma-norma akhlak hukum dan konstitusi. Karena itu warga PBB berkewajiban menegakkan keadilan dan melenyapkan kezaliman sebagai bagian integral dari perjuangan untuk menegakkan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* yang diperintahkan oleh Islam.

- Menegakkan Kejujuran dan Kebenaran

Di samping norma keadilan, warga PBB berkewajiban untuk menegakkan norma-norma kejujuran dan kebenaran. Yang mana Kejujuran adalah ketulusan yang didasari oleh niat dan i'tikad baik dalam berbuat dan bertindak, tanpa menyembunyikan tujuan-tujuan sebenarnya yang hendak dicapai. Kebenaran adalah rumusan konseptual yang diungkapkan melalui kata-kata tentang sesuatu yang sejalan dengan norma dan realitas yang ada dalam dunia nyata. Kebenaran tidak boleh disembunyikan atau diungkapkan sedemikian rupa, sehingga apa yang dikatakan berlainan dengan kenyataan sesungguhnya. Allah berfirman dalam surat al-Shaff ayat 2-3:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا
عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan? Amat besar kemurkaan di sisi Allah, bila janu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan”.²¹⁴

Kemudian, dalam surat al-Baqarah ayat 44, Allah berfirman:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ
الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

“Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) keebajikan, sedang kamu melupaka diri (keawajiban) mu sendiri, padaahal kamu membaca al-Kitab (Taurat)? Maka tidakkah kamu berfikir.”²¹⁵

Kewajiban warga bulan bintang adalah menegemukakan kebenaran itu kepada siapapun. Dalam mengungkapkan kebenaran, sikap bijak dengan memperhatikan sesuana, temoat dan waktu tetap diperlukan. Mengungkapkan kebenaran tidak perlu merusak hubungan baik antar sesama manusia, terkecuali terhadap orang-orang yang nyata-nyata berbuat kezhaliman.

- Pertanggungjawaban

Hak dan Kewajiban

Allah menciptakan manusia terdiri dari jenis laki-laki dan perempuan, serta menciptakannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, adalah untuk tujuan saling mengenal, dan antara yang satu dengan yang lain tidaklah lebih mulia kecuali karena ketakwaan kepada-Nya.

Prinsip ketakwaan yang menjadi dasar kemuliaan bagi manusia di hadapan Allah SWT. ini tidak terlepas dari ajaran Islam yang menegaskan bahwa dalam penciptaan manusia melekat hak dan kewajiban, sehingga Islam melarang kaum laki-laki dan kaum perempuan bersifat dan bersikap *hasad*, yaitu: sifat iri hati atau dengki atas kelebihan salah satu pihak baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan.

215 QS. 2 : 44

Maka Allah memberikan pelajaran: Apa sebabnya laki-laki memimpin perempuan, dan laki-laki memiliki kelebihan dari kaum perempuan? Allah SWT. Berfirman dalam surat al-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظْنَ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.216

Allah berikan kelebihan laki-laki atas perempuan adalah untuk menjaga dan melindungi kaum perempuan, sebagai kenyataan apabila terjadi perang maka kaum laki-laki yang segera tampil ke medan perang, yang diutamakan untuk diamankan menjadi pengungsi adalah: “anak-anak, orangtua lanjut usia, dan kaum perempuan”.

Ajaran Islam menetapkan laki-laki menjadi suami atas istrinya berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin dengan cara bergaul yang baik

(*mu'asyarah bi'l-ma'ruf*). Kewajiban suami atas istri di antaranya: memberi nafkah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pemeliharaan kesehatan. Kepemimpinan dan tanggungjawab sebagai suami atas istri diwujudkan dengan *Aqad Nikah* dan *Ijab Qabhul*, laki-laki sebagai calon suami memberikan Mahar (mas kawin) kepada perempuan sebagai calon istri, setelah calon istri menerima mahar (mas kawin) dengan ikhlas, maka sah-lah pernikahan dan perkawinan itu. Mahar melambangkan penghormatan dan penghargaan laki-laki atas perempuan yang telah menerima kepemimpinan laki-laki yang akan memikul tanggungjawab bersama dalam membangun kehidupan keluarga dan rumah tangga.

Ajaran Islam mengajarkan tentang hubungan laki-laki dengan perempuan yang maksudnya bukan *kesetaraan* tetapi *keseimbangan*, karena kenyataan secara fisik lahiriah Allah memberikan keutamaan yang bersifat *fithriyah*, yaitu: Kekuatan fisik dan kesempurnaan dalam kejadiannya, dan keutamaan yang bersifat *kasbiy*, ialah: karena itulah (kekuatan fisik) kepada suami dibebankan memberikan nafkah kepada kaum perempuan dan memimpin rumah tangga.

Kewajiban suami untuk melindungi dan memenuhi keperluan istrinya sangat beragam, disesuaikan dengan kemungkinan istri untuk melaksanakan tugasnya yang bersifat *fithriyah*, seperti; mengandung, melahirkan, menyusui bayi, mengasuh dan mendidik anak-anak. Karena sifat perempuan yang menjadi ibu adalah sabar dan lemah lembut.

› Tanggung Jawab

Tanggung Jawab Individu

Karena itu dari segi tanggung jawab memakmurkan bumi dan tugas penghambaan diri kepada Allah dalam kehidupan dunia, maka laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama di depan-Nya. Allah melarang baik laki-laki maupun perempuan bersikap *hasad*, yaitu: iri hati atau dengki dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan memakmurkan bumi.

Perbedaan yang diakui hanyalah perbedaan alami menjadikan laki-laki sebagai ayah (atau berfungsi sebagai ayah) dan perempuan sebagai ibu yang melahirkan keturunan), sehingga mengakibatkan *division of labours* (pembagian kerja) yang agak berbeda. Perbedaan alami ini menjadikan laki-laki sebagai *qawwam* (pelindung dan penegak keadilan) terhadap perempuan dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat dan menjadikan perempuan secara naluriah merasa memerlukan perlindungan dari kaum laki-laki. Untuk itu PBB sebagai partai yang berusaha menegakkan sistem Ilahi dan sistem alami berjuang untuk menegakkan kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dan mengakui perbedaan-perbedaan alami yang diciptakan Allah di antara mereka.

› Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pribadi dan keluarga, karena keluarga merupakan unit terkecil dari institusi masyarakat, dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menciptakan manusia dari Adam, kemudian Allah memberikan kepada Adam seorang istri yang bernama Hawa, Allah jelaskan di dalam firman-Nya yang dimulai dengan seruan kepada umat manusia di dalam surah An-Nisaa' pada ayat : 1 (satu), yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
 وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
 وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.²¹⁷

Dari ayat di atas amat jelas bahwa dari pasangan suami istri itu (yaitu Adam dan Hawa) maka lahirlah anak-anak dan cucu-cucu serta cicit-cicit keturunan manusia. Allah SWT. Menciptakan manusia dari asal tanah dan dari keturunan Adam dan Hawa, maka Allah jodohkan manusia menjadi pasangan hidup suami istri, membina keluarga dan membangun rumah tangga sebagai tempat tinggal bersama suami istri, agar mendapatkan ketenangan dan ketenteraman hidup berkeluarga dalam naungan kasih sayang. Selanjutnya pada surah ar-Rum ayat 21, Allah SWT, berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²¹⁸

Pribadi dan keluarga dalam pandangan Islam merupakan pondasi dasar dalam membangun kehidupan dan tanggungjawab sosial, sehingga dalam hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, warga Bulan Bintang taat kepada aturan Islam mengenai *mahram* dan *aurat*. Islam membatasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, menentukan jenis pakaian, tidak membenarkan memandang lain jenis secara mendalam, menantang khalwat dan hal-hal yang berhubungan dengan firman Allah SWT, dalam surat An-Nuur ayat 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ^ط
ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ
يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ^ط
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوْتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ
أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ
مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ^ط وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman:
“Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan

memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat”.(30). Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.219

3) Akhlak

a) Keteladanan Rasulullah

Akhlak adalah norma-norma moral universal berkenaan dengan apa yang baik dan buruk, hak dan batil, *al-ma'ruf dan al-munkar*. Norma-norma akhlak mengikuti semua orang. Para nabi dan rasul sepanjang sejarah selalu mengajak kepada *aqidah* yang benar dan *akhlak* yang luhur. Dimana prinsip-prinsip akhlak berasal dari Allah Yang Maha Tinggi sebagai sumber kebenaran, keluhuran, keadilan, dan segala yang baik dalam hidup ini. Sehingga *akhlak* yang baik hanya mungkin ditumbuhkan dengan keimanan yang dalam kepada Allah. Keimanan kepada keadilan dan pembalasan Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat mendorong untuk berakhlak baik. Warga PBB menjunjung tinggi akhlak

yang luhur serta berusaha keras/menerapkannya dalam kehidupan pribadi, keluarga, kepartaian, masyarakat, bangsa dan negara.

Islam sebagai jalan hidup universal seperti diformulasikan oleh para ulama terdahulu meliputi pokok-pokok *akidah*, *syariah* (*ibadah* dan *mu'amalah*), *akhlak* dan berbagai bidang menyangkut alam semesta dan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Warga Bulan Bintang berkeyakinan bahwa pokok-pokok *akidah* telah dijelaskan secara rinci dalam Alquran dan Sunnah, demikian pula segala sesuatu yang berhubungan dengan peribadatan secara khusus (*ibadah mahdhah*). Sistematisasi kedua bidang ini telah diulas dan dibahas oleh para ulama *mutakallimin* dan *fuqaha* yang hidup setiap zaman.

Panutan keteladanan dalam berakhlak adalah Nabi Muhammad SAW, karena Allah SWT, mengutusnyanya dengan tugas menuntun manusia agar manusia berakhlak mulia. Menurut Siti Aisyah gambaran dari akhlak Rasulullah SAW, adalah seluruh isi Alquran. Karena itu siapapun yang berupaya mengamalkan isi Alquran dia telah berupaya meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW.

Allah berfirman dalam surat al-Ahzab ayat 21 dan al-Anbiya' ayat 107 sebagai berikut:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا^ط

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.”²²⁰

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.²²¹

b) Masalah dan Mafsadat

Partai menyadari, bidang *mu'amalah* di samping prinsip-prinsip umum dan beberapa rincian yang digariskan oleh Alquran dan as-Sunnah, adalah bidang yang luas untuk berijtihad menggali ajaran Islam untuk membahas masalah-masalah baru yang timbul setiap saat, dengan selalu memperhatikan keadaan, tempat, dan zaman.

Prinsip-prinsip dasar tidak berubah, tetapi masa dan zaman selalu berubah, sebagaimana diterangkan dalam Alquran pada surat Yunus ayat 64 dan ar-Rum ayat 30:

لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۗ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ

“Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan (dalam kehidupan} di akhirat. tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. yang demikian itu adalah kemenangan yang besar.”²²²

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۗ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.²²³

221 QS. 21 : 107

222 QS. 10 : 64

223 QS. 30 : 30

Menghadapi perubahan, partai wajib mengambil peran aktif untuk memberikan arah kepada yang positif sesuai tuntutan Islam. Dalam hal perubahan, partai secara leluasa dapat menggali berbagai warisan pemikiran yang berkembang sepanjang sejarah umat manusia, dengan menimbang baik dan buruknya. Tradisi Islam mengakui dua jenis kitab Allah, adalah; *Pertama*, sebagai *mushhaf*, ia merupakan wahyu langsung yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. *Kedua*, sebagai alam berupa hukum-hukum alam, kehidupan dan kemasyarakatan dari *sunnah*-Nya yang tidak berubah. Islam pada dasarnya tidak ingin menghancurkan budaya berbagai bangsa yang berasal dari hukum-hukum kehidupan bermasyarakat dan tidak bertentangan dengan wahyu langsung dari Allah. *Wahyu matluw* yang dibacakan langsung adalah pengendali kehidupan alam ini.

Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umat Islam agar berperan aktif mencegah segala bentuk kemungkaran, sebagaimana dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: *“Siapa saja diantara kamu melihat sesuatu kemungkaran; maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya (dengan kekuatan atau kekuasaan); jika dia tidak sanggup demikian (lantaran tidak mempunyai kekuatan atau kekuasaan) maka dengan lidahnya (teguran dan nasehat dengan lisan atau tulisan); jika (tidak sanggup demikian (lantaran sera lemah) maka dengan hatinya, dan yang (akhir) ini adalah iman yang paling lemah.”*

Al-ma'ruf adalah semua yang dipandang baik oleh Alquran dan as-Sunnah, dan *al-munkar* adalah semua yang dipandang tidak baik oleh kedua sumber ini. Sementara itu warga Bulan Bintang harus meninggalkan segala yang bersifat *syuhbat* (diragukan kema'rifan atau kemungkarannya), karena hal itu dapat membawa kepada kemungkaran.

Rasulullah SAW bersabda: *“sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu juga jelas,*

antara keduanya terdapat perkara syubhat, yang tidak diketahui oleh banyak orang; siapa saja yang menjaga diri dari perkara syubhat maka ia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya; Siapa saja yang jatuh ke dalam perkara syubhat maka sesungguhnya ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram”.

c) Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar

Menyadari tugas sebagai khalifah, manusia bertanggung jawab kepada Allah dan negara. Ini dalam kehidupan dunia dan akhirat. Karena itu perbuatan kebajikan harus ditegakkan dan perbuatan keburukan harus dijauhan dari kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan negara adalah Ini adalah perjuangan terus-menerus yang ditegakkan secara individu dan kolektif. Dalam kehidupan dunia selalu ada penantang kebaikan dan pendukung kemungkaran. Warga Bulan Bintang adalah penegak semua *al-ma’ruf* dan pencegah dari semua *al-munkar* dalam kehidupan manusia.

Partai Bulan Bintang berusaha mengembangkan bentuk oposisi Islam dari konsep *amar ma’ruf* dan *nahi munkar*. Atas dasar ini, kebajikan umum oposisi partai adalah menentang semua *al-munkar* dan mendukung semua *al ma’ruf*, dari pihak manapun datangnya, karena kebatilan itu tetap batil dan kebenaran itu tetap benar, bagaimanapun bentuknya, pada masa dan zaman apapun peristiwanya. amar makruf nahi mungkar harus dijalankan secara bersama dan tidak hanya satu sisi saja.

4) **Kepemimpinan**

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan kelebihan dan keistimewaan, yaitu *akal* dan *nafsu*. Akal menjadikan manusia untuk memikirkan dan mendayagunakan segala ciptaan Allah untuk kemaslahatan (kebaikan) bagi makhluk Allah, sedangkan *nafsu* dapat mendorong manusia mencapai sesuatu kebaikan tetapi juga dapat mendorong manusia melakukan keburukan hingga jatuh ke dalam martabat yang

rendah, yaitu apabila manusia tidak dapat mengendalikan gelora dorongan *nafsu* yang buruk.

Akal dan nafsu sebagai keistimewaan dan kelebihan yang dimiliki manusia dibandingkan makhluk ciptaan Allah lainnya, pada hakikatnya terkait dengan peran penting yang diberikan Allah kepada manusia selaku khalifah yang memiliki beban dan tanggung jawab melaksanakan amanah menjadi *khalifah fi 'l-ardhi* (khalifah di bumi), sebagaimana Allah berfirman pada surat al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىۤ اَجْعَلُ فِىۤ الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ قَالُوۡا
اَتَجْعَلُ فِیۡهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیۡهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوۡنَ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.²²⁴

Islam mensyariatkan bahwa tugas kekhalifahan adalah untuk mengelola atau mengurus alam semesta, pribadi (diri sendiri), keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

a) Manusia dan Alam Semesta

Alam semesta sesungguhnya diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan stabil dan seimbang, sebagaimana dalam surat al-Mulk ayat 3:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ۗ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُتٍ ۗ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۗ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ

“Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, Adakah kamu Lihat sesuatu yang tidak seimbang”²²⁵

Islam menegaskan bahwa semua yang ada di alam semesta merupakan karunia yang harus dipelihara agar menjadi seimbang (stabil) dan terpelihara guna kemanfaatan bagi semua makhluk ciptaan Allah SWT, karena Dia tidak melakukan sesuatu melainkan mengandung hikmah dan maslahat serta pembalasan bagi manusia yang menyekutukan-Nya. Allah berfirman pula pada surat al-Dukhan ayat 38-39 dan 10:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ ۚ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. (38) Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui”²²⁶

Firman Allah, Dalam Surah al-Dukhan ayat 10:

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ

“Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata.”²²⁷

Islam mengajarkan bahwa pemahaman terhadap ketauhidan atas ciptaan Allah SWT, meyakini syariat-Nya dan menjadikannya sebagai prinsip dalam mengelola alam semesta bukannya mengikuti hawa nafsu, karena

225 Q.S. 67 : 3

226 Q.S. 44 : 38-39

227 Q.S. 44 : 10

itu manusia diperintahkan untuk mengelola alam semesta berdasarkan syariat-Nya, sebagaimana firman Allah SWT. Pada surat al-Mu'minin ayat 71:

وَلَوْ أَتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ^ط
بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ^ط

“Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Alquran) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.”²²⁸

b) Manusia sebagai Khalifah di Bumi

Pada hakikatnya, penciptaan manusia oleh Allah SWT, dimaksudkan sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang bekerja untuk menjalankan *iradah*-Nya, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 30 dan al-An'am ayat 165:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً^ط قَالُوا
أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ^ج وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ^ط قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”²²⁹

228 Q.S. 23 : 71

229 Q.S. 2 : 30.

Selanjutnya firman Allah dalam Surah Al-An'am: 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ خَلِيفًا وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ
وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.²³⁰

Manusia mendapat mandat untuk mengelola, memelihara dan mendayagunakan seluruh alam bagi kepentingan makhluk Allah, sebagaimana Allah berfirman pada al-Hajj ayat 65:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي
الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ
اللَّهَ بِالتَّائِبِينَ لَرْءُوفٌ رَّحِيمٌ

“Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. dan Dia menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izin-Nya? Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.”²³¹

Tugas kekhalifahan manusia di muka bumi adalah untuk mengelola segala makhluk Allah yang ada dilangit dan di bumi secara adil, berkeseimbangan bagi pelestarian keberlangsungan hidup seluruh makhluk ciptaan Allah, karena itu manusia dilarang melakukan kerusakan di muka bumi, sebagaimana firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 56:

²³⁰ Q.S. 6 : 165.

²³¹ Q.S. 22 : 65.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.²³²

Perbuatan manusia yang tidak berdasar syariat dalam mengelola bumi dapat menimbulkan kerusakan dan berdampak negatif yang mengancam kelangsungan hidup manusia, karena itu Allah telah memberikan karunia kepada manusia berupa akal pikiran, perasaan, dan tubuh untuk menjalankan tugas kekhalifahannya dalam memelihara kelangsungan hidup makhluk Allah di bumi, sebagaimana firman-Nya surat ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”²³³

c) Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

Islam mensyiarkan kepada manusia bahwa dalam rangka menjalankan tugas kekhalifahan (kepemimpinan) tentunya secara fitrah harus diawali dari diri sendiri (pribadi), tentunya dalam ketaatan menjalankan syariat sebagai wujud pengabdian kepada Allah (*hablun minallaah*) dan sosial kemasyarakatan (*hablun-minannaas*), sebagaimana firman-Nya surat al-Maidah ayat 105:

²³² Q.S. 7 : 56.

²³³ Q.S. 30 : 41.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ
 إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ
 تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, Maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”²³⁴

Sejalan dengan ketaatan untuk diri sendiri ini, disyariatkan pula kepada manusia dalam menjalankan tugas ke-*khilafahan* (kepemimpinan) untuk memelihara keluarga, sebagaimana firman Allah, pada surat at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
 وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
 أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”²³⁵.

Pada dasarnya, ketaatan diri sendiri (pribadi) dan keluarga terhadap syariat Allah merupakan pondasi bagi pelaksanaan tugas ke-*khilafahan* (kepemimpinan), mengingat pribadi merupakan individu dalam masyarakat dan keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, karena itu baik-buruknya kehidupan masyarakat dan bangsa terletak pada baik-buruknya pribadi dan keluarga yang hidup dalam masyarakat suatu bangsa tersebut.

234 Q.S. 5 : 105.

235 Q.S. 66 : 6

Masyarakat adalah kumpulan manusia yang secara kolektif menempati suatu kawasan tertentu, hidup bergaul satu sama lain dalam menyelenggarakan kepentingan bersama. Manusia adalah makhluk bermasyarakat, karena secara alamiah manusia tidak mungkin hidup menyendiri. Bangsa adalah kumpulan masyarakat yang mendiami suatu kawasan tertentu, baik berdasarkan ikatan kesamaan keturunan ataupun terbentuk karena kesamaan tertentu, ataupun terbentuk karena kesamaan nasib dan kehendak. Sedangkan Negara adalah wadah bangsa tersebut.

Negara adalah organisasi kekuasaan untuk mengelola kepentingan bersama dalam rangka *amar ma'ruf dan nahi munkar*, untuk menciptakan tatanan masyarakat yang di kehendaki oleh Allah *Subbahahu wa Ta'ala*. Negara memiliki kekuasaan dalam merumuskan kebijakan, melakukan tindakan, bahkan memaksakan sesuatu, berdasarkan kuasa yang di berikan oleh norma-norma hukum yang berlaku dan dilandasi oleh prinsip keadilan, kejujuran dan kebenaran. Bagi warga Bulan Bintang, Negara adalah wadah dan sekaligus alat untuk mencapai tujuan menegakkan syariat Islam, dan negara bukanlah tujuan itu sendiri.

- Negara Adalah Alat Mencapai Tujuan

Sebagai alat, keberadaan Negara adalah sebagai institusi yang perlu diciptakan, karena tanpa adanya negara, mustahil orang dapat merealisasikan tujuan bersama. Negara adalah alat yang bersifat keduniaan, di mana warga Bulan Bintang berkewajiban mempedomani *syariat islam* untuk membangun Negara.

Dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, warga Bulan Bintang memperjuangkan tegaknya tatanan masyarakat yang menjadi cita-cita islam. Setiap masalah yang dihadapi bersama wajib dipecahkan secara bermusyawarah yang berlandaskan hikmah dan

kebijaksanaan serta senantiasa memohon petunjuk dari Allah *Subhanahuwata'ala*.

Allah swt berfirman dalam pada surat al-Nahl ayat 125:

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik”.²³⁶

Musyawaharāh dikembangkan dari prinsip syura yang menjadi cirri umat beriman dan merupakan amanat Allah supaya pihak-pihak yang berwenang dalam masyarakat dan negara menagakkan syura dan memusyawaharkan masalah bersama dengan rakyat, sebagaimana diterangkan dalam al-Syura ayat 38:

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ^ج

“Dan urusan di antara mereka (diputuskan dan ditetapkan) berdasarkan syura (musyawarah) di antara mereka.”²³⁷

Allah berfirman dalam Ali Imran ayat 159 sebagai berikut:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ج

“Dan bermusyawaharlah dengan mereka dalam urusan itu (kepentingan bersama).”²³⁸

Warga Bulan Bintang meyakini sepenuhnya bahwa ajaran Islam universal dalam memberikan

236 QS. 16 : 125

237 QS. 42 : 38

238 QS. 3 : 159

bimbingan tentang cara penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- Menegakkan *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*

Kekhalifahan dalam bidang politik berarti penegakan as-sulthan (kekuasaan) serta as-siyasah asy-syar'iyah (kebijakan yang sah berdasarkan syari'ah) dan nizham al-hukm (system pemerintahan) dalam Negara hukum. Allah swt. berfirman dalam surat al-Nahl ayat 90 dan al-Jatsiyah ayat 18, sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”²³⁹

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”²⁴⁰

- Kemajemukan

Ajaran Islam mengakui keberadaan berbagai masyarakat dan bangsa di muka bumi dengan segala kemajemukan *internal* maupun *eksternal* yang ada padanya. Kemajemukan itu tidak perlu menyebabkan timbulnya konflik dan permusuhan,

239 Q.S. 16 : 90.

240 Q.S. 45 : 18.

karena sampai akhir zaman pun di muka bumi akan terus dijumpai kemajemukan etnik, bangsa, dan agama. Kemajemukan mengharuskan warga Bulan Bintang mencari kesepakatan-kesepakatan bersama dalam menyelenggarakan kepentingan bersama dan demi mencapai kemaslahatan bersama pula. Nabi Muhammad saw telah mencontohkan bagaimana membina kehidupan masyarakat yang majemuk ketika beliau hijrah ke Yastrib dan mengubah kota itu menjadi Madinah. Kesepakatan-kesepakatan itu di tuangkan dalam naskah yang dinamakan “*Piagam Nabi*” atau “*Piagam Madinah*”. Dilihat dari sudut pandangan hukum ketatanegaraan kontemporer, *Piagam Nabi* atau *Piagam Madinah* itu hampir setara dengan konstitusi sebuah Negara, memang piagam inilah yang menjadi cikal bakal perjalanan Rasul saw dalam menghadapi segala tantangan dalam berpolitiknya. Dalam piagam inilah tercantum prinsip-prinsip bernegara secara utuh dan komprehensif.

- Islam di Nusantara

Umat Islam di kawasan Asia Tenggara mempunyai sejarah dan tradisi yang panjang sejak berabad-abad yang lalu. Gelombang-gelombang Islamisasi di Asia Tenggara sangat mungkin telah terjadi sejak abad-abad pertama Hijriyah. Proses ini berlanjut terus sehingga terbentuk komunitas-komunitas masyarakat muslim. Kesultanan-kesultanan Islam mulai terbentuk pada penghujung abad ke-13 *Miladiyah* seiring dengan kian pudarnya pengaruh agama serta kerajaan-kerajaan Hindu Budha.

Kehadiran Islam di kawasan nusantara telah melahirkan zaman baru dan peradaban baru di kawasan ini, yakni peradaban Melayu Islam. Pengaruh Islam ke dalam cara berpikir, budaya hukum, ungkapan-ungkapan istilah serta pengayaan bahasa Melayu menjadi bahasa

intelektual keagamaan Islam di kawasan ini sangat besar. Kehadiran Islam telah mengubah cara pandang yang penuh dengan unsur-unsur kemusyrikan dan tahayul menuju pandangan berlandaskan semangat tauhid yang mendorong kearah penggunaan akal dan pikiran yang rasional. Proses Islamisasi institusi politik, hukum dan ketatanegaraan terus berlangsung, walaupun dalam berbagai segi telah terjadi *sinkretisme* antara Islam dan institusi-institusi lama yang berkembang sejak zaman pra Islam. Partai Bulan Bintang sebagai partai Islam akan terus berusaha meluruskan proses ini, sehingga tercipta kondisi yang lebih ideal sesuai tuntunan Islam. Proses pembentukan peradaban Melayu Islam di kawasan Asia Tenggara menghadapi tantangan besar dengan kedatangan bangsa-bangsa Eropa yang bermaksud untuk menaklukan kawasan ini. Sebab itulah sebagian besar energi telah dicurahkan dalam upaya membela dan mempertahankan diri. Akhirnya Islam tidak hanya diyakini sebagai keyakinan agama, tetapi juga sebagai identitas dan ideologi perjuangan untuk mempertahankan diri dan mengusir kaum penjajah. Sungguh pun demikian, kekalahan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perpecahan-perpecahan *internal* di kalangan umat Islam sendiri, mengakibatkan pada akhirnya satu demi satu kesultanan-kesultanan Islam itu dapat di taklukkan. Pada penghujung abad ke 19, sebagian besar kepulauan Nusantara telah jatuh ke tangan kekuasaan asing. Kerajaan Belanda kemudian menata pemerintahan kawasan ini dalam organisasi semi Negara yang bersifat kolonial, yakni Hindia Belanda. Partai Bulan Bintang akan terus berusaha menumbuh kembangkan identitas dan persatuan Islam bersifat nasional yang sudah terbentuk sehingga menjadi lebih sehat mengikis politik pecah belah serta orientasi sekuler warisan

penjajah yang masih tersisa. Allah berfirman dalam surat al-Anfal ayat 59-60:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ

“Dan janganlah orang-orang yang kafir itu mengira, bahwa mereka akan dapat lolos (dari kekuasaan Allah). Sesungguhnya mereka tidak dapat melemahkan (Allah).

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا
تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu mengentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).”²⁴¹

Meskipun hampir seluruh wilayah Nusantara jatuh ke tangan Belanda, perjuangan mengusir penjajah terus berlanjut. Seiring makin berkurangnya perlawanan bersenjata, cara-cara baru dalam berjuang mulai diperkenalkan, yakni melalui berbagai organisasi sosial keagamaan. Tujuannya adalah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat tentang nasib mereka sebagai bangsa yang terjajah. Warna Islam tampak jelas dari gerakan ini. Syarikat Dagang Islam (SDI) telah mengawali timbulnya semangat keagamaan dan sekaligus semangat kebangsaan, yang akhirnya menumbuhkan kesadaran bahwa

241 Q.S. 8 : 59-60.

masyarakat-masyarakat suku nusantara adalah suatu bangsa yang mengalami nasib yang sama dan mempunyai cita-cita yang sama, yakni membangun ikatan persaudaraan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Dalam hal ini, Partai Bulan Bintang tidak mempertentangkan antara kebangsaan Indonesia dan cita-cita Islam atau dengan kata lain Negara Nasional Indonesia dapat mewujudkan cita-cita Islam.

- Proklamasi 17 Agustus 1945

Kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945 patut disyukuri sebagai anugerah dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Kemerdekaan itu adalah juga buah dari hasil perjuangan bangsa selama berabad-abad. Umat Islam yang merupakan komunitas terbesar di tanah air telah menyambut dan mendukung kemerdekaan itu dan terus terlibat secara aktif dalam membela dan mempertahankannya. Sejak kemerdekaan sampai sekarang, Islam telah, sedang dan akan terus memainkan perannya dalam memberikan arah bagi perjalanan bangsa ke masa depan. Sebab itulah warga Bulan Bintang berkeyakinan bahwa pembicaraan Islam di Indonesia tidak mungkin terlepas dari pembicaraan tentang nasib bangsa. Demikian pula sebaliknya, pembicaraan nasib bangsa juga tidak mungkin terlepas dari pembicaraan tentang Islam.

Allah swt. Berfirman dalam surat al-A'raf ayat 96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ
مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ

“Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi

mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”²⁴²

Umat Islam sebagai komunitas terbesar bangsa, memikul beban dan tanggung jawab yang besar dalam memajukan bangsa Indonesia. Karena itulah, warga Partai Bulan Bintang bertekad untuk mempertahankan eksistensi bangsa dan Negara Indonesia terhadap kekuatan mana yang bermaksud merusak dan menghancurkannya. Usaha tersebut adalah bagian dari perjuangan keagamaan, karena bagi warga Partai Bulan Bintang antara ke-Islamanan dan kebangsaan bukanlah dua hal yang terpisah, tetapi sebuah kesatuan yang integral. Warga Bulan Bintang bertekad untuk menjadi muslim sejati dan sekaligus sebagai patriot sejati bangsa pembela kebenaran. Niat yang paling diutamakan adalah berjuang karena Allah demi kemuliaan bangsa Indonesia di mana umat Islam merupakan bagian terbesarnya dalam komunitasnya berbangsa dan bernegara.

Kemajemukan bangsa Indonesia bukan saja kemajemukan etnik dan agama, tetapi juga kemajemukan aliran politik dan golongan. Warga Bulan Bintang mengakui kemajemukan, menghormati perbedaan di tengatengah rakyat, dan membela kebebasan bagi setiap orang untuk menentukan sendiri pilihan dan pendirian politiknya. Warga Bulan Bintang membela sistem *syura* dan nilai-nilai demokrasi yang jujur dengan sistem multi partai berdasarkan prinsip *fastabiqul khairat* (berlomba-lomba dalam kebajikan) di mana semua golongan mendapat kesempatan yang sama untuk berkompetesi secara sehat serta membangun kerja sama yang adil dan harmonis dalam menegakkan kepetingan bersama. Aliran atau golongan satu-satunya yang tidak mempunyai hak hidup hanyalah

golongan yang memusuhi demokrasi itu sendiri. Sebab itu warga Bulan Bintang menolak keberadaan golongan komunis dan golongan lain yang ingin melenyapkan kemajemukan dan menciptakan sistem monolitik yang bersifat kediktatoran.

- Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial.

Dalam menegakkan harkat dan martabat manusia, ajaran islam meminta warga Bulan Bintang untuk membangun dan menciptakan kesejahteraan hidup di dunia. Ajaran Islam juga menyuruh untuk berusaha memperoleh keselamatan hidup di akhirat. Kesejahteraan hidup di dunia sangat beruntung kepada tingkat pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu warga Bulan Bintang berjuang untuk membangun kesejahteraan sosial dengan menegakkan suatu sistem pendidikan nasional yang dijiwai oleh prinsip-prinsip agama serta tujuan penghambaan diri kepada Allah, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang dapat menjangkau semua penduduk, penyediaan pemukiman yang layak huni sesuai harkat dan martabat manusia, dan usaha-usaha lainnya yang halal bagi kesejahteraan seluruh warga lahir dan batin. Program Islamisasi ilmu pengetahuan yang sedang dikembangkan oleh beberapa lembaga internasional dan Universitas Islam Internasional sejak beberapa dekade yang lalu, mendapat perhatian khusus Partai Bulan Bintang program ini diharapkan dapat mengisi kurikulum pendidikan nasional yang berwajah manusiawi dan Islami di masa depan.

Allah berfirman dalam surat at-taubah ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا
إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”²⁴³

Pada Surat al-Qashas ayat 77 Allah Swt berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ
الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي
الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۚ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.”²⁴⁴

- **Ekonomi**

Perjuangan pertama Partai Bulan Bintang dalam bidang sosial ekonomi adalah memenuhi keperluan-keperluan dasar (*basic needs*) seluruh warga Negara sesuai dengan hak-hak yang diberikan kepadanya sebagai hamba Allah, dan selanjutnya adalah perjuangan untuk memenuhi keperluan-keperluan manusia yang skunder dan seterusnya.

243 QS. 9 : 122

244 QS. 28 : 77

Dalam rangka perkembangan ekonomi, warga Bulan Bintang mendukung tegaknya prinsip demokrasi ekonomi yang bebas dari riba, penindasan, monopoli, dan maksiat yang sering diistilahkan sebagai ekonomi Islam. Bumi dan air beserta kekayaan alam yang dikandungnya dikuasai oleh Negara untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Penguasaan ini mengandung makna bahwa negara mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menetapkan pemanfaatan sumber daya alam demi kemakmuran bersama. Keberpihakan negara dalam pembangunan ekonomi adalah rakyat banyak, dan bukan kepada kelompok kecil orang dalam tatanan masyarakat sebagai warga negara. Untuk itu pemerataan kesempatan berusaha harus lebih dikedepankan daripada mengejar pertumbuhan ekonomi yang dapat menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial.

Karena itu, warga Bulan Bintang berjuang untuk menegakkan sistem perekonomian nasional yang adil dengan menjunjung tinggi prinsip demokrasi ekonomi yang bebas dari riba, penindasan, monopoli dan maksiat.

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275-278:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَكَ
مَوْعِظَةً مِّن رَّبِّهِ فَآتْهَا ۖ فَلَا تَمَسَّ مَا سَلَفَ ۗ وَأْمُرْهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۗ يَمْحَقُ اللَّهُ
الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۚ إِنَّ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”²⁴⁵

- Lingkungan Hidup

Partai Bulan Bintang melihat pemeliharaan terhadap lingkungan hidup dari sudut konsep *khilafah* (pengelolaan bumi berdasarkan mandat Allah), dan *tasykir* (pendayagunaan lingkungan alam sesuai tuntunan Allah). Lingkungan hidup mencakup bumi, air, hewan, tumbuh-tumbuhan serta semua yang ada di atas dan di dalam perut bumi dan langit

245 QS. 2 : 275-278

- Tabdzir

Tabdzir adalah perbuatan boros yang merusak kehidupan di bumi. Allah berfirman dalam surat al-Isra ayat 27:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ
كَفُورًا

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”²⁴⁸

- Israf

Makna *israf* adalah tindakan tidak patut, berlebihan, merupakan perbuatan melampaui batas. Allah berfirman dalam surat al-An’am ayat 141:

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۙ

“Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”²⁴⁹

Pada surat al-A’raf ayat 31, Allah berfirman:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”²⁵⁰

Pemanfaatan segala sumber rezeki yang halal dan *thayyib* (baik) bagi keperluan manusia sesuai ketentuan hukum Allah, tidak boleh merusak kehidupan dan lingkungan hidup alam semesta.

248 QS. 17 : 27

249 QS. 6 : 141

250 QS. 7 : 31

- Hubungan Internasional

Dalam pergaulan antar bangsa, warga Bulan Bintang menjunjung tinggi prinsip persaudaraan dan persamaan derajat semua bangsa di muka bumi (Surah Al-Hujurat ayat : 13, dan Surah Al-Maidah ayat : 8). Hubungan antar Negara dan bangsa berdasarkan atas prinsip saling menghormati sesuai ajaran Islam dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hubungan seperti ini hanya mungkin ditegakkan dalam dunia yang beriktikad baik untuk membangun hubungan antar bangsa yang bebas dari penindasan, *agresi*, dan *eksploitasi*. Warga Bulan Bintang mendukung keberadaan badan-badan internasional yang berusaha menciptakan tata dunia yang adil, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh suasana saling ketergantungan antar bangsa dan negara. Karenanya, Warga Bulan Bintang dalam berjuang untuk turut sertanya menegakkan perdamaian dan ketenteraman masyarakat secara internasional atau dunia berdasarkan prinsip persamaan derajat dan saling menghormati.

Menyadari saling ketergantungan antar negara dalam pembangunan sosial dan ekonomi, warga Bulan Bintang mendukung kerja sama bilateral dan internasional atas dasar saling menguntungkan, sesuai tuntunan Islam. Pertama dan yang paling di kedepankan adalah kerja sama antara sesama umat di dunia Islam berdasarkan *ukhuwah islamiyah*, *kesamaan akidah* dan *tujuan hidup*. Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong

dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”²⁵¹

Dalam surat at-Taubah ayat 71 Allah berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.”²⁵²

Pada surat al-Fath ayat 29 Allah berfirman:

“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan Dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka.”²⁵³

Selanjutnya membangun kerja sama antara berbagai bangsa pejuang kemerdekaan, perdamaian dan keadilan di dunia.

Khatimah

Tafsir asas ini menjadi pegangan dan rujukan yang mengikat bagi seluruh warga Partai Bulan Bintang di posisi manapun mereka berada, dalam memperjuangkan cita-cita Islam menuju “*Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Gafuurun*”. yang akan ditegakkan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepada Majelis Syura dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang serta Majelis Pertimbangan sesuai dengan tingkatannya diberikan tugas pengawalan atas Tafsir Asas ini, dengan kewenangan sebagai pemutus dalam berbagai persoalan yang kemungkinan terjadi di kemudian hari. Dengan komitmen yang kuat terhadap pelaksana tafsir asas ini, warga Partai Bulan Bintang yakin dan percaya bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* akan senantiasa membantu perjuangan berdasarkan keikhlasab karena Allah, dan untuk kemuliaan umat, bangsa, dan negara.

251 QS. 5 : 2

252 QS. 9 : 71

253 QS. 46 : 29

Demikian isi Tafsir Azas PBB sebagai Manifesto Politik dan sikap perjuangan partai yang semuanya ditanda tangani Pimpinan Muktamar III yang berlangsung di Medan, masing-masing ; Yasin Ardhy, SH (ketua), H Abdul Haq SH (sekretaris) dengan anggota: Drs Dwianto Ananias, Ir. H. Eddy Wahyudin, MBA, Drs. H. Suwito Suprayogi, Lc, Dr. Ir. H. Masri Sitanggang, MP, Drs H. Sudarno Hadi, M.Pd, Sugianto, SH, MH, Adolf Gim Perangin²⁵⁴

5. Struktur PBB Dan Kepengurusan Periode 2009-2014

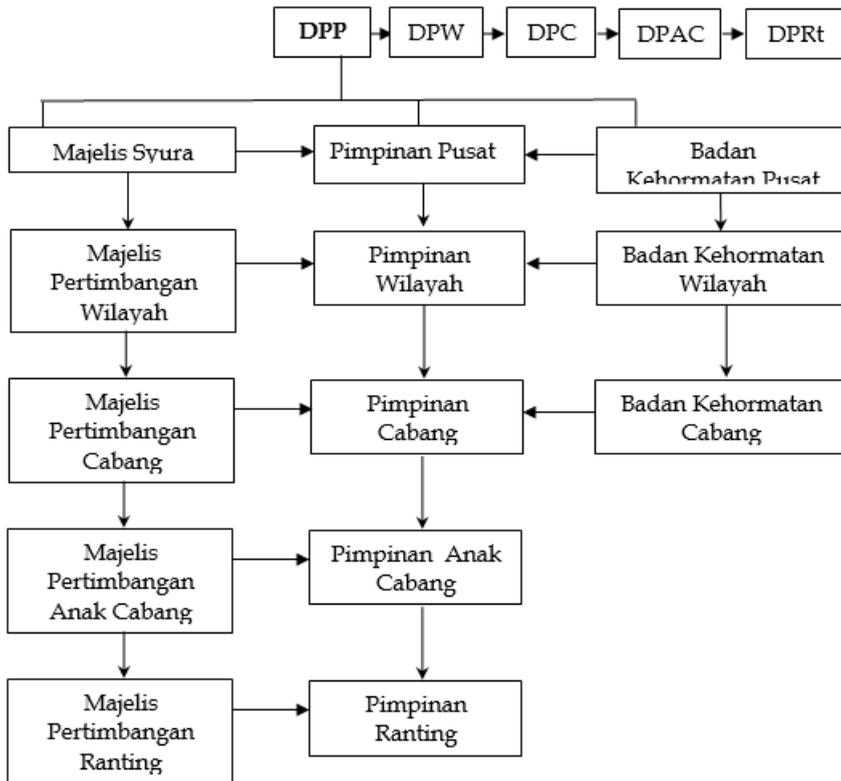
Adapun struktur kepemimpinan di Partai Bulan Bintang (PBB), sesuai dengan keputusan partai yang tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) pasal 11 sampai pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

- a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP), yaitu Majelis Syura, Pimpinan Pusat dan Badan Kehormatan Pusat.
- b. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), yaitu Majelis Pertimbangan Wilayah, Pimpinan Wilayah dan Badan Kehormatan Wilayah.
- c. Dewan Pimpinan Cabang (DPC), yaitu Majelis Pertimbangan Cabang, Pimpinan Cabang dan Badan Kehormatan Cabang
- d. Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) pada tingkat kecamatan atau sebutan lain yang setingkat, yaitu Majelis Pertimbangan Anak Cabang dan Pimpinan Anak Cabang.
- e. Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) pada tingkat kelurahan atau sebutan lain yang setingkat, yaitu Majelis Pertimbangan Ranting dan Pimpinan Ranting.
- f. Koordinator Rukun Warga pada tingkat Rukun Tetangga atau sebutan lain yang setingkat.
- g. Koordinator Rukun Tetangga pada tingkat Rukun Tetangga atau sebutan lain yang setingkat.

Pelaksanaan tugas eksternal dari DPP, DPW, DPC, DPAC, DAN DPRt secara berturut-turut dijalankan oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting.

²⁵⁴ DPP PBB, *Buku dokumentasi/Tanfidz Hasil Muktamar III Partai Bulan Bintang*, (Jakarta: 2010), h. 124-127

Struktur Partai Bulan Bintang



1. Majelis Syura dan Majelis Pertimbangan

Pada tingkat pusat dibentuk Majelis Syura, pada tingkat wilayah, cabang, anak cabang, ranting dibentuk Majelis Pertimbangan. Sedangkan ketentuan lebih lanjut tentang Majelis Syura dan Majelis Pertimbangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Majelis Syura berwenang dan berfungsi memberikan pertimbangan dan persetujuan kepada pimpinan pusat yang terkait antara lain; penentuan mitra politik atau koalisi dengan partai politik lain, penentuan calon presiden dan wakil presiden RI, penentuan kader partai yang masuk dalam jajaran eksekutif.

Selanjutnya Majelis Syura berwenang membuat keputusan-keputusan strategis dalam hal konsep-konsep pemikiran dan perjuangan partai. Kemudian, melakukan koordinasi fungsional dengan seluruh majelis pertimbangan wilayah dan majelis pertimbangan cabang. Dan

mengawasi kebijakan dan kinerja pimpinan pusat. Juga melakukan koordinasi fungsional dengan seluruh Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) dan Majelis Pertimbangan Cabang (MPC). Di samping itu, mengawasi kebijakan dan kinerja Pimpinan Pusat yang berkaitan dengan misi ideologis. Selain itu, turut serta melakukan uji kelayakan (*fit and proper test*) terhadap bakal calon ketua umum pimpinan pusat.

Untuk susunan Majelis Syura, yaitu: pimpinan terdiri dari seorang ketua, sebanyak-banyaknya tiga orang wakil ketua, tiga orang wakil ketua, satu orang sekretaris dan tiga orang wakil sekretaris. Kemudian para anggota sebanyak-banyaknya 9 orang. Sedangkan Ketua Majelis Syura dipilih dan ditetapkan oleh muktamar. Selanjutnya, Majelis Syura dapat membentuk komisi-komisi sesuai bidang yang dibutuhkan. Untuk pimpinan dan anggota Majelis Syura adalah para ulama yang *tafaqquh fiddien* dan/atau tokoh ummat yang dikenal memiliki integritas akhlak yang baik.

Selain itu, diatur seseorang boleh menduduki jabatan ketua terpilih maksimal dua periode dan masa jabatan pimpinan dan anggota Majelis Syura adalah lima tahun. Secara terperinci mekanisme dan tatacara pemilihan ketua Majelis Syura diatur dalam tata tertib pencalonan pemilihan dewan pimpinan pusat partai bulan bintang. Sementara, tugas Ketua Majelis Syura bertanggung jawab kepada muktamar. Serta Majelis Syura menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam dua tahun.

Sementara, Majelis Pertimbangan berwenang dan bertugas, antara lain: Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan partai sesuai tingkatnya. Melakukan koordinasi fungsional dengan seluruh Majelis Pertimbangan Partai setingkat di bawahnya. Dapat mengusulkan pokok masalah yang harus dibatasi oleh Majelis Syura.

Susunan Majelis Pertimbangan, yaitu: Pimpinan Majelis Pertimbangan yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris. Anggota Majelis Pertimbangan sebanyak-banyaknya 6 orang. Serta Ketua Majelis Pertimbangan dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah wilayah/Musyawah Cabang/Musyawah anak Cabang/Musyawah ranting/ Musyawarah rukun warga atau sebutan lain yang setingkat/Musyawah rukun tetangga atau sebutan lainnya yang setingkat.

Bahkan, Majelis Pertimbangan dapat membentuk komisi-komisi sesuai bidang yang dibutuhkan. dengan ketentuan pimpinan dan anggota pertimbangan adalah para ulama yang taffakuh fiddien dan tokoh umat yang dikenal memiliki integritas ahlak yang baik. Selanjutnya, seseorang boleh menduduki jabatan ketua terpilih maksimal 2 periode dan masa jabatan pimpinan dan anggota adalah 5 tahun.

Untuk dan wewenangnya, Ketua Majelis Pertimbangan bertanggung jawab kepada Musyawarah Wilayah (Muswil) / Musyawarah Cabang (Muscab) /musyawarah anak cabang / musyawarah ranting/ Musyawarah rukun tetangga atau sebutan lain yang setingkat. Dan majelis pertimbangan menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam 2 bulan.

2. Pimpinan Partai

Pimpinan Partai terdiri dari; Pimpinan Pusat di tingkat nasional, Pimpinan Wilayah di tingkat provinsi, Pimpinan Cabang di tingkat kabupaten atau kota, Pimpinan Anak Cabang di tingkat kecamatan atau sebutan lain yang setingkat, Pimpinan Ranting di tingkat kelurahan atau sebutan lain yang setingkat, Koordinator Rukun Warga ditingkat rukun warga atau sebutan lain yang setingkat, Koordinator Rukun Tetangga di tingkat rukun tetangga atau sebutan lain yang setingkat.

3. Badan Kehormatan

Pada tingkat pusat dibentuk Badan Kehormatan Pusat, pada tingkat wilayah dibentuk Badan Kehormatan Wilayah pada tingkat Cabang dibentuk Badan Kehormatan Cabang. Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Kehormatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

4. Kelengkapan Pimpinan Partai

Untuk membantu kelancaran tugas Pimpinan Partai, dibentuk; Departemen di tingkat pimpinan pusat, Biro di tingkat pimpinan wilayah, Bagian di tingkat pimpinan cabang, Seksi di tingkat pimpinan anak cabang, Urusan di tingkat pimpinan ranting.

5. Wali Amanah

Untuk mengefektifkan peran ormas pendiri Partai, dibentuk suatu badan yang diberi nama Wali Amanah.

6. Badan Otonom dan Badan Khusus

Pimpinan Pusat Partai dapat membentuk dan mengesahkan pendirian Badan Otonom. Kemudian, Pimpinan Partai dapat membentuk Badan Khusus yang bertanggungjawab kepada Pimpinan Partai sesuai tingkatan.

Struktur atau susunan kepemimpinan partai ini, lebih jauh dijelaskan secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) pada Bab II pasal 7, 8, 9 tentang Majelis Syura dan Majelis Pertimbangan. Bab III Pasal 10 tentang Pimpinan Partai. Bab IV pasal 16, 17, 18, 19 tentang Badan Kehormatan dan Kode Etik. Bab V pasal 20 tentang Wali Amanah dan Bab VI pasal 21 tentang Badan Otonom dan Badan Khusus. ART Bab II pasal 7,8 dan 9 tentang Majelis Syura dan Majelis Pertimbangan.

1. Pimpinan Partai

Pimpinan Pusat adalah kepemimpinan partai yang mempunyai ruang lingkup pada tingkat nasional, dengan ketentuan, sebagai berikut :

- a. Personalia Pimpinan Pusat terdiri dari:
 - 1) Pimpinan Harian yaitu: Ketua Umum, sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Jenderal, beberapa orang wakil sekretaris jenderal, seorang bendahara umum, beberapa orang bendahara, dan
 - 2) Beberapa orang ketua departemen;
 - 3) Ketua DPW DKI Jakarta secara ex office menjadi salah satu Ketua di Pimpinan Pusat;
- b. Ketua Umum Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar.
- c. Seseorang boleh menduduki jabatan ketua umum terpilih maksimal 2 periode.
- d. Masa jabatan Pimpinan Pusat adalah lima tahun.
- e. Pimpinan Wilayah adalah kepemimpinan partai yang mempunyai ruang lingkup pada tingkat provinsi, dengan ketentuan:
 - a. Personalia Pimpinan Wilayah terdiri dari:
 - 1) Pimpinan Harian yaitu: seorang ketua, sekurang-kurangnya seorang wakil ketua, seorang sekretaris, sekurang-kurangnya

seorang wakil sekretaris, seorang, seorang wakil bendahara;
dan

- 2) Beberapa orang ketua biro.
 - 3) Khusus DPW DKI Jakarta, para ketua DPC se DKI Jakarta ex officio menjadi wakil ketua di DPW DKI Jakarta.
- b. Ketua pimpinan wilayah dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah wilayah.
 - c. Seseorang boleh mendudukijabatan ketua terpilih maksimal 2 periode
 - d. Masa jabatan pimpinan wilayah adalah 5 tahun

Pimpinan cabang, adalah akepemimpinan partai yang mempunyai ruang lingkup pada tingkat kabupaten atau kota dengan ketentuan:

- a. Personalia pimpinan cabang terdiri dari :
 - 1) Pimpinan harian yaitu : seorang ketua, sekurang-kurangnya seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, seorang wakil bendahara
 - 2) Beberapa orang ketua bagian
- b. Ketua pimpinan cabang di pilih dan di tetapkan oleh musyawarah cabang.
- c. Khusus untuk provinsi DKI Jakarta pimpinan cabang di bentuk dan di usulkan oleh DPW
- d. Seseorang boleh menduduki jabatan ketua terpilih maksimal 2 periode
- e. Masa jabatan pimpinan cabang adalah 5 tahun

Pimpinan anak cabang adalah kepemimpinan partai yang mempunyai ruang lingkup pada tingkat kecamatan atau sebutan lain yang setingkat, dengan ketentuan :

- a. Personalia pimpinan anak cabang terdiri dari :
 - 1) Pimpinan harian yaitu seseorang ketua, sekurang-kurangnya seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, seorang wakil bendahara
 - 2) Beberapa orang ketua seksi

b. Ketua pimpinan anak cabang di pilih dan di tetapkan oleh musyawarah anak cabang.

c. Seseorang boleh menduduki jabatan ketua terpilih maksimal 2 periode.

d. Masa jabatan pimpinan kecamatan adalah 5 tahun

Pimpinan ranting adalah kepemimpinan partai yang mempunyai ruang lingkup pada tingkat kelurahan atau sebutan lain yang setingkat, dengan ketentuan:

a. Personalia pimpinan ranting, terdiri dari:

1) Pengurus harian yaitu : seorang ketua, sekurang-kurangnya seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, seorang wakil bendahara; dan

2) Beberapa orang ketua urusan

b. Ketua pimpinan ranting di pilih dan ditetapkan oleh musyawarah ranting

c. Seseorang boleh menduduki jabatan ketua terpilih maksimal 2 periode

d. Masa jabatan pimpinan ranting adalah 5 tahun

Koordinator rukun warga atau sebutan lain yang setingkat adalah kepemimpinan partai yang mempunyai ruang lingkup pada tingkat rukun warga atau sebutan lain yang setingkat, dengan ketentuan :

a. Personalia koordinator rukun warga atau sebutan lain yang setingkat, yaitu: seorang Ketua, sekurang-kurangnya seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, seorang wakil bendahara dan beberapa orang anggota.

b. Personalia Koordinator Rukun Warga atau sebutan lain yang setingkat diusulkan oleh pimpinan ranting dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang.

c. Seseorang boleh menduduki jabatan ketua terpilih maksimal 2 (dua) periode

d. Masa jabatan pimpinan ranting adalah 5 (lima) tahun.

Koordinator Rukun Tetangga adalah kepemimpinan partai yang mempunyai ruang pada tingkat rukun tetangga atau sebutan lain yang setingkat, dengan ketentuan:

- a. Personalia Koordinator Rukun Tetangga atau sebutan lain yang setingkat, yaitu: seorang Ketua, sekurang-kurangnya seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, seorang wakil bendahara dan beberapa orang anggota.
- b. Personalia Koordinator Rukun Warga atau sebutan lain yang setingkat diusulkan oleh pimpinan ranting dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Ranting
- c. Seseorang boleh menduduki jabatan ketua terpilih maksimal 2 (dua) periode
- d. Masa jabatan pimpinan ranting adalah 5 (lima) tahun.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Ketua Departemen/Biro/Bagian/Seksi/Urusan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya dapat mengusulkan anggotanya dalam bidangnya masing-masing sebagai kelompok kerja untuk ditetapkan oleh Pimpinan Partai dalam tingkatannya masing-masing. Selanjutnya dalam ART dijelaskan tentang struktur partai Bab IV pasal 16, 17, 18, 19 tentang Badan Kehormatan dan Kode Etik. Bab V pasal 20 tentang Wali Amanah dan Bab VI pasal 21 tentang Badan Otonom dan Badan Khusus.

2. **Badan Kehormatan dan Kode Etik**

Badan Kehormatan adalah badan yang didirikan oleh Partai dimasing-masing tingkatan (sampai tingkat Dewan Pimpinan Cabang yang bersifat tetap, mandiri yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili pengaduan terhadap anggota yang dianggap melanggar Ketetapan-ketetapan Muktamar, Ketentuan-ketentuan partai lainnya dan/atau kode etik. Susunan Badan Kehormatan Pusat yaitu: Pimpinan merangkap anggota terdiri dari seseorang ketua dan seorang wakil ketua. Kemudian, para anggota sebanyak 5 (lima) orang. Kemudian, ketua Badan Kehormatan Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar. Selanjutnya, Badan Kehormatan Pusat dapat membentuk majelis hakim sesuai kebutuhan yang bersifat *ad-hoc*. Sedangkan Pimpinan dan Anggota badan Kehormatan Pusat adalah kader yang memahami konstitusi dan ketentuan partai lainnya, memiliki integritas dan akhlak yang baik.

Selain itu, Ketua Badan Kehormatan Pusat bertanggung jawab kepada Muktamar, serta menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan. Dan seseorang boleh menduduki jabatan ketua terpilih

maksimal 2 (dua) periode. Untuk masa jabatan 5 tahun. Lebih rinci, tata cara dan mekanisme kerja Badan Kehormatan Pusat diatur lebih lanjut dalam Kode Etik partai oleh Dewan Pimpinan Pusat.

3. **Badan Kehormatan Wilayah**

Susunan Badan Kehormatan Wilayah, yaitu: pimpinan merangkap anggota terdiri dari seseorang ketua dan seorang wakil ketua dan para anggota sebanyak 3 (tiga) orang. Untuk selanjutnya, ketua dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah (Muswil). Kemudian, dapat membentuk majelis hakim sesuai kebutuhan yang bersifat *ad-hoc*. Pimpinan dan Anggota badan Kehormatan Wilayah adalah kader yang memahami konstitusi dan ketentuan partai lainnya, memiliki integritas dan akhlak yang baik. Ketua bertanggung jawab kepada Musyawarah Wilayah, serta menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan Seseorang boleh menduduki jabatan ketua terpilih maksimal 2 periode dan untuk masa jabatan Badan Kehormatan Pusat 5 tahun. Sedangkan tata cara dan mekanisme kerja diatur lebih lanjut dalam Kode Etik partai.

4. **Badan Kehormatan Cabang**

Untuk susunan Badan Kehormatan Cabang terdiri dari : Pimpinan merangkap anggota terdiri dari seseorang ketua dan seorang wakil ketua dan para anggota sebanyak 3 orang. Dan guna menentukan ketua, dilakukan pemilihan yang selanjutnya ditetapkan oleh Musyawarah Cabang. Kemudian Badan Kehormatan Cabang dapat membentuk majelis hakim sesuai kebutuhan yang bersifat *ad-hoc*. Sedangkan pimpinan dan Anggota badan Kehormatan Cabang adalah kader yang memahami konstitusi dan ketentuan partai lainnya, memiliki integritas dan akhlak yang baik, dan ketua bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang. Dalam tugasnya, Badan Kehormatan Cabang menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan lama jabatan ketua terpilih maksimal 2 periode atau 10 tahun. Selain itu, tata cara dan mekanisme kerja Badan Kehormatan Cabang diatur lebih lanjut dalam Kode Etik partai.

5. **Kode Etik**

Kode Etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofi mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota partai dalam menjalankan tugas selaku anggota, pimpinan dan pejabat public dari

partai. Adapun tujuan Kode Etik yakni untuk menjaga kehormatan dan citra kredibilitas anggota partai dan Partai Bulan Bintang, serta membangun anggota dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada negara, partai, masyarakat dan konstituennya. Dan tugas untuk menyusun dan mengesahkan kode etik adalah Dewan Pimpinan Pusat.

6. Wali Amanah

Wali Amanah berwenang dan berfungsi sedikitnya ada 4 poin, adalah: *Pertama*, memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan partai untuk kemajuan partai. *Kedua*, turut serta menyosialisasikan kebijakan partai kepada Pimpinan/ Anggota Organisasi Wali Amanah dalam rangka membesarkan Partai. *Ketiga*, turut serta melakukan uji kelayakan (*fit and proper test*) terhadap bakal calon Ketua Umum Pimpinan Pusat. Keempat, Wali Amanah menjadi peserta rapat konsultasi yang diselenggarakan oleh Partai.

7. Badan Otonom dan Badan Khusus

a. Badan Otonom.

Badan Otonom adalah lembaga yang bersifat mandiri yang merupakan perangkat pendukung mutlak partai yang dibentuk dan bertanggung jawab pada musyawarah yang diatur oleh Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga dari Badan Otonom yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, dan yang dimaksud adalah: Pemuda Bulan Bintang, Muslimat Bulan Bintang, Brigade Hizbullah, Bulan Sabit Merah, Lembaga Advokasi dan bantuan Hukum Ummat, Korps Mubaligh Indonesia. Serta, bila dipandang perlu, Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Badan Otonom lainnya, dan ketentuan lebih lanjut tentang Badan Otonom diatur dalam Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga masing-masing.

b. Badan Khusus.

Badan Khusus adalah lembaga yang menangani suatu program strategis yang bersifat monumental dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum/Ketua sesuai dengan tingkatannya yang menangani. Adapun Badan Khusus itu, antara lain: Dewan Pakar, Komite Aksi Pemenangan Pemilu (KAPPU), Litbang, Badan Pengelola Pagaderan (BP2). Kemudian, bila dipandang

perlu, Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Badan Khusus sesuai kebutuhan, untuk ketentuannya lebih lanjut diatur dalam Pedoman Dasar dan Pedoman masing-masing yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.²⁵⁵

8. Susunan DPW PBB Sumut Periode 2010 - 2015

Adapun Struktur Kepemimpinan Partai pada tingkat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Sumatera Utara (DPW PBB Sumut) Periode 1431 – 1436 H/2010 – 2015 M, terdiri dari: 1. Majelis Pertimbangan Wilayah 2. Badan Kehormatan Wilayah 3. Pimpinan Wilayah (Pimpinan Harian) yang diketua Dr Masri Sitanggang dan Sekretaris Drs Awaluddin Sibarani MSi . Kemudian untuk kepengurusan harian partai ini dilengkapi dengan Bendahara, Wakil Ketua, Wakil sekretaris, wakil bendahara 4. Dilengkapi dengan Biro-Biro yang membidangi tugas masing-masing secara spesifik.

Adapun susunan lengkap DPW PBB Sumatera Utara periode 2010-2015 melalui SK No: SKR.PP/912/2012, adalah : Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) dengan unsur-unsur pengurusnya, Ketua H. Muhammad Fahmi Ahmad Fuad Wakil-Wakil Ketua antara lain, KH. Nazaruddin Lubis An-Naqsabandi, Salahuddin Siregar, sedangkan sekretaris Iman Siregar, S.Pd, Wakil-Wakil Sekretaris: Mauddin Nasution, S.Ag, Abd. Muin Ritonga, serta beberapa anggota, yaitu ; H.M. Ridwan Yunus, H. Abdul Rahman Kasbi, Asnawi El Tambusei, Chairuddin Ragam. Selanjutnya, untuk kepengurusan Badan Kehormatan Wilayah (BKW), yaitu ; Ketua Hj. Noor Balqis, S.Psi, Wakil Ketua Drs. H. Fuad Helmi Lubis, dan anggota Habibullah Ritonga, S.Ag, Ir. Kevi Novlianhar.

Kemudian, untuk Pimpinan Wilayah (PW), adalah: Ketua Dr. Ir. Masri Sitanggang, MP, Wakil - Wakil Ketua terdiri dari ; Drs. H. Abdullah Abdurrahim, H.Mahmuddin Ginting, H. Salamuddin Simatupang, Hj. Ratna Rossie Djafar, Drs. Parno Kartiwi, MA, Ir. Asri Dharma, H. Syaiful Nahar, SE. MM, H. Aidan Nazwir Panggabean, Sirmas Munthe, ST, MT, Ir. Alexander Pasha, M.Sc, Akman Daulay, SE, MM, Ir. H. Toto Ferdandus Rambe, Hj. Hasnah Nasution, H. Najib Sanusi Hasan Lubis, Hj. Asriliyani, Ir. H. Sabaruddin Sagala, H. Ali Muthadho, S.Ag. M.Hum, Yarjuna, S. Kom, Edy Rianto, SE, Hanisyah

²⁵⁵ Sumber AD ART PBB Hasil Muktamar III yang diterbitkan DPP Partai Bulan Bintang periode 2010-2015, hasil Muktamar Medan yang dilangsungkan di Asraa Haji Medan.

Siregar, SP, Irwan A. Hasibuan, SE, M.Si, Suriyadi Syakubat. Dan susunan sekretaris pimpinan wilayah sebagai berikut : Sekretaris Drs. H. Awaluddin Sibarani, M.Si, serta Wakil-Wakil Sekretaris sebagai berikut, Drs. Bustami Manurung, Ahmad Ruluwat Simanjuntak, S. Pdi, Solehuddin, S.Ag, Junaidi Munir, Amru Lubis, S.Ag, Syamsir Anwar, SE, Amirsyam, S.Pd, Alfiandi, SH, M. Ali Pawiro, SS, MM, Drs. Top Namedi, Baginda Hasibuan, SE, Winda Wahyuni, Juaini Baharuddin, MA, Thamrin, B. Sc, Siti Rahmah Harahap, S.Sos.I, MA, Syahril Efendi, SE, MM, Drs. Ahmad Khairul Badri, Hidayatun Noor Lubis, Drs. H. Ahmad Idris Lubis, Ir Egon Rizar, Dewi Risayantika, S.Sos.I, Ahmad Sofyan, S.Sos.I

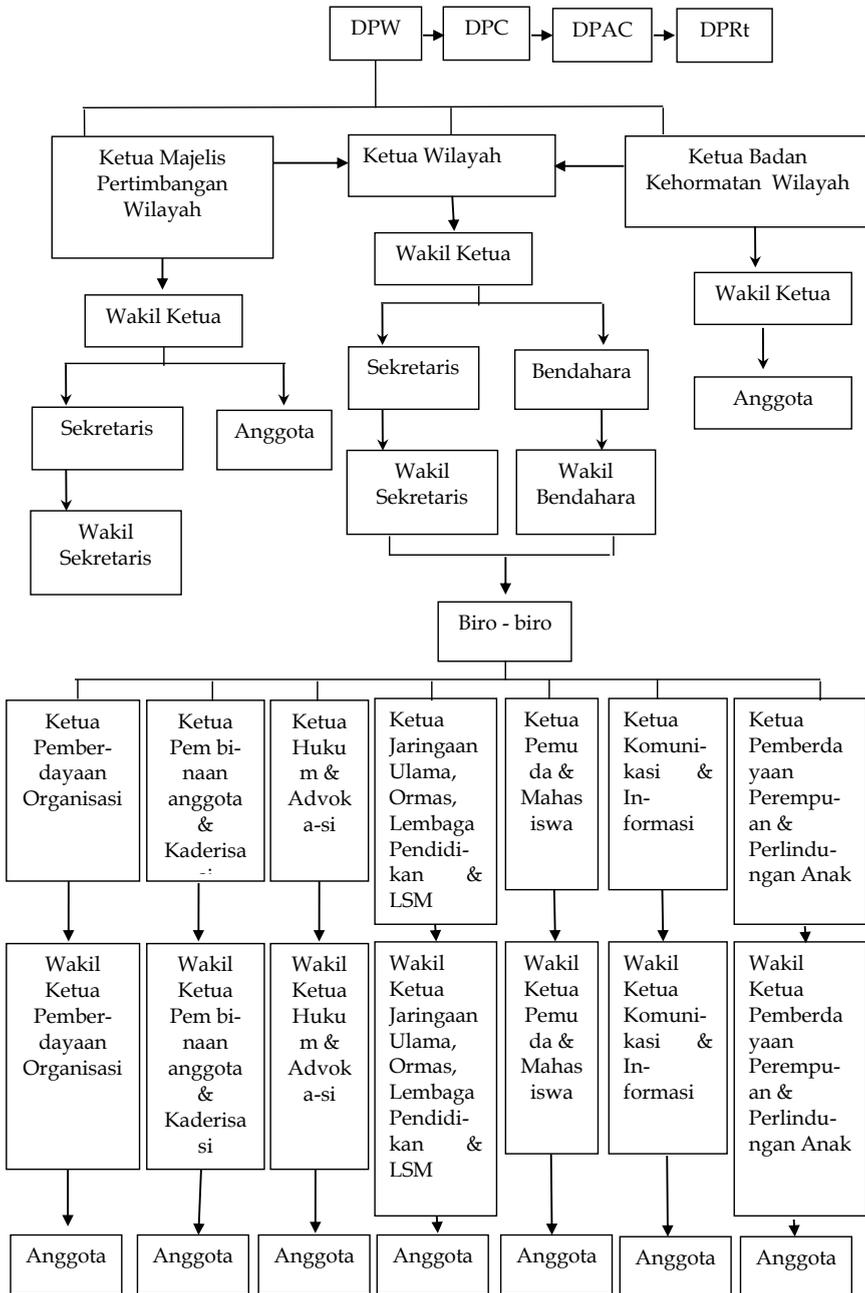
Sementara Bendahara Pimpinan Wilayah Sumatera Utara, Hj. Emy Eliamega Saragih, S.Ag. SH, dengan Wakil-Wakilnya, Emiyati, Hj. Deliana, Mariana, Hj. Ulfah, Arfil, SH, Suratman, SE, Almuroji Panjaitan, S.Sos.I, Medisyah Putra, Marasutan Ritonga, S.Ag, H.M Nurdin M, SH, Suryani, S.Pd.I, Muhammad Room, SH, M.Hum, Dedi Hermanto Sitorus, S.Pd.I, Titin Setiawaty, Drs. Hj. Siti Aisyah, S.Pd.I, Sri Wijaya Wati, Hasni Arita, Syarifah Hasibuan, S.Sos.I, Feri Tanurai Suando Kaban, H. Abdul Haris Badrum Jamil, SH, Latifah Hanum

Adapun Biro-biro pada pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Utara antara lain: Pertama, Biro Pemberdayaan Organisasi, Ketua Muhajir AM Sitorus, SE, sementara anggota, Darmawan Husenin, S. Sos.I Sugeng Budiono. Kedua, Biro Pembinaan Anggota & Kaderisasi, sebagai Ketua Muhammad Raja Alam III, SE, Anggota adalah : Auli Marzuki, S.Pd.I, Syahman, S.Pd, Yustika Efendi. Ketiga, Biro Hukum & Advokasi, Ketua Darwinsyah Siagian, S.Pd.I, dengan anggotanya Siti Hajar Marpaung, S.Pd.I. Untuk Biro Jaringan Ulama, Ormas, Lembaga Pendidikan & LSM dengan Ketua Ahmad Sadat Nasution, SE serta nggotanya, Okti Purnama Sari. Biro Pemuda & Mahasiswa, Ketua Amirullah, anggota Utami Indra Yani, Diah Wirasi. Terhadap Biro Komunikasi & Informasi menjabat Ketua Siti Habsyah, beranggotakan Radiany. Kemudian, Biro Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Ketua Rosnita yang anggotanya terdiri dari Neng Safua, Ros Juliana, Marhamah Abd. Rarim²⁵⁶.

256 *Lampiran SK No: SKR.PP912/2012 tentang Pengesahan Susunan dan Personalial DPW PBB Sumatera Utara periode 2010-2015 yang ditetapkan DPP PBB dengan ditandatangani Ketua Umm HMS. Kaban dan Sekretaris Jenderal HM Wibowo*

Susunan pengurus dan struktur DPW PBB Sumatera Utara tersebut ditanda tangani langsung Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PBB Periode 2010-2015 yakni DR. H. MS Kaban, SE, M.Si dan B.M. Wibowo, SE, MM. Melalui susunan pengurus yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) secara kolektif itu, peneliti menuangkannya dalam bagan struktur yang juga berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang kejelasan rinciannya telah dituangkan sebelumnya. Sekadar pengantar, bagan struktur yang digambar berdasarkan SK dan ADART tersebut, garis besarnya bahwa Dewan Pimpinan Wilayah terdiri dari : Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) dan Pimpinan Wilayah (PW) serta Badan Kehormatan Wilayah (BKW). Artinya Ketua PW dalam menjalankan tugasnya dikontrol langsung dengan MPW dan BKW. Berikut bagan strukturnya :

Bagan Struktur Organisasi DPW PBB Sumatera Utara



Kepengurusan DPW PBB Sumatera Utara juga terdapat Organisasi Otonom, adapun hasil pengamatan dan penelusuran yang peneliti lakukan, organisasi otonom yang eksis adalah: *Pertama*, Pemuda Bulan Bintang yang diketuai Fahrizal Dalimunthe dan Sekretaris Rafdinal (periode 2010-2015). Adapun untuk saat ini Pemuda Bulan Bintang ini dipimpin masing-masing Syarifuddin Pasaribu S.So.I (Ucok Bendol) sebagai Ketua dan Amir Syam sebagai sekretaris. Ortom pemuda inilah yang paling aktif dan eksis. *Kedua*, Muslimat Bulan Bintang, ortom atau sayap partai ini, menghimpun kekuatan ibu-ibu muslimat yang memang jika dikaitkan dengan potensi suara konstituen, maka perempuanlah yang sangat besar dan potensial. *Ketiga*. Brigade Hizbullah, ini khusus untuk satgas dan sayap partai yang berfungsi untuk pengamanan partai dan perjuangannya. Adapun sayap partai lainnya: Bulan Sabit Merah, Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Ummat serta Kors Muballigh Indonesia.

Jika idealnya struktur itu bisa difungsikan untuk mendulang suara dan eksis, namun hasil pengamatan atau observasi peneliti, keberadaan organisasi otonom kurang berkontribusi. juga kurang diberdayakan dengan maksimal sebagai sayap partai. Apalagi dalam konteks memberikan bantuan hukum serta keberadaan muballigh, seharusnya bisa dijadikan sebagai *opinion leader* untuk menyampaikan pesan-pesan partai atau sosialisasi partai ke masyarakat.

Dalam catatan peneliti di lapangan, hal inilah salah satu titik kelemahan PBB Sumatera Utara, sehingga tidak bisa mendapatkan kursi untuk DPRD tingkat I Sumatera Utara pada pemilu 2009 dan 2014. Padahal pada periode sebelumnya PBB mendapatkan suara yang relatif menggembirakan. Misalnya, pada periode awal pemilu 1999 di DPRD Sumatera Utara PBB meraih 3 kursi, masing-masing: Banuaran Ritonga, Bustinursyah Sinulingga (Uca Sinulingga) dan Fahrizal Dalimunthe. Lalu pemilu berikutnya tahun 2009 PBB masih bisa menempatkan wakilnya di DPRD Sumatera Utara walau hanya 1 kursi yakni dari Dapil Langkat Binjai yakni Fery Kaban, bahkan di Langkat PBB bisa menempati posisi pimpinan DPRD Langkat sebagai peraih suara terbesar ketiga.²⁵⁷

Adapun jumlah kursi yang didapatkan PBB pada pemilu 2014 lalu, untuk tingkat provinsi tidak mendapatkan kursi, akan tetapi untuk tingkat Kabupaten Kota mengalami peningkatan menjadi 20 kursi, yang terdistribusi masing-masing:

²⁵⁷ Diolah dari berbagai sumber dan berbagai pengamatan dilapangan

Perolehan Kursi PBB 2014 di Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kursi	Nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat II
1	Medan	1 Kursi	Ibnu Ubaidillah SE
2	Langkat	3 Kursi	Syafrizal Helmi Risna Laila Sari Muhammad Bahri SH
3	Tebing Tinggi	1 Kursi	Murli Purba. S.Fill
4	Batu Bara	1 Kursi	Azhar Amri
5	Asahan	1 Kursi	Drs. M Sofyan Ismail
6	Labuhan Batu	2 Kursi	Mara Abidin Hasibuan Ahmad Syaiful Sirait
7	Labuhan Batu Selatan	2 Kursi	H Bahrium Rambe Maningar, SP
8	Padang Lawas	1 Kursi	Tongku Khalik Hasibuan
9	Padang Lawas Utara	1 Kursi	Samsul Bahri Daulay
10	Padang Sidempuan	2 Kursi	Indar Sakti Tanjung Parsaulian Lubis
11	Mandailing Natal	1 Kursi	Syahriwan Nasution (Kocu)
12	Tapanuli Tengah	1 Kursi	Suhendra
13	Sibolga	2 Kursi	Hj. Nur Arifah A.Md Munzir
14	Nias Selatan	1 Kursi	Sapoteanus Manao

Total Kursi : 20 (Dua Puluh Kursi) Legislatif tingkat II²⁵⁸

B. Proses Komunikasi Politik DPW PBB Sumatera Utara

Komunikasi pada prinsipnya adalah proses interaksi seseorang dengan orang lain, proses penyampaian pesan, lambang-lambang atau informasi dalam suatu aktivitas untuk tercapainya pemahaman atau makna yang sama dalam suatu komunitas tersebut. Aktivitas komunikasi politik yang dilakukan PBB Sumatera Utara dalam rangka melakukan sosialisasi program dan pesan-pesan kepartaian untuk mendapatkan simpati atau dukungan suara dari masyarakat, maka DPW PBB mau tidak mau harus

²⁵⁸ Yunus Harahap kepala sekretariat DPW PBB Sumut, wawancara di kantor sekretariat DPW PBB Sumatera Utara jl Denai, Kamis tanggal 22 Desember 2016 jam 09.00 sampai 10.00

melakukan proses komunikasi politik tersebut. Karena partai politik pada prinsipnya berusaha untuk meyakinkan konstituen atau pemilih untuk memberikan *vote* atau suara mereka pada pemilu kepada suatu partai pilihannya.

Berdasarkan wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang peneliti lakukan terhadap *informan* dan objek penelitian maka, ditemukan hasil penelitian tentang proses komunikasi politik tersebut. Sebenarnya di awal-awal pemilu setelah reformasi, PBB hebat dan termasuk sukses. PBB masuk enam besar, maka dianggap orang sebagai partai harapan. Padahal ketika itu, PKS masih bernama PK Cuma meraih 7 kursi, sedangkan PBB sudah meraih 13 Kursi DPR RI. Begitu juga di Sumatera Utara PBB meraih 3 kursi sedangkan PKS²⁵⁹ hanya meraih 1 Kursi yakni atas nama Sigit Pramono Asri. Lalu, bagaimana PBB menurun? Karena dulu ideologinya masih kental dan ada. Waktu itu di mana-mana Dewan Dakwah berhubungan kental dengan PBB, bahkan PBB saat itu bermarkas di kantor Dewan Dakwah. Kemudian ketika itu juga masih kental euforia berpartai. Belakangan karena terlalu banyak saluran partai-partai yang saling tidak menguatkan, jadi itu persoalannya.

Hal itu terbukti di awal pemilu reformasi, PBB meraih 13 kursi DPR RI dan masuk peraih suara terbesar keenam, bahkan mengalahkan PKS. Dr Masri Sitanggang menyatakan, tentang pentingnya proses komunikasi politik, bahkan dipandang PBB masih kurang aktif dalam melaksanakan proses komunikasi. Adapun tanggapannya sebagai berikut.

“Komunikasi politik itu ada internal (ke dalam) dan ada eksternal (keluar). Sebenarnya kalau komunikasi politik ini, kalau hemat saya di PBB masih kurang dan PBB harus belajar banyak, karena memang yang masuk partai politik ini, sekian lama dia digodok rezim Seharto, kira-kira begitu, pola pikir dan sikapnya itu dalam melihat PBB sama dia dengan melihat partai lain, jadi perilaku dia dengan partai lain tidak ada bedanya, bisa jadi kutu loncat, nah itu yang salah kenapa? Karena ia tidak memahami tentang gerakan Islam, jadi itu yang jadi persoalan. Maka ketika itu terjadi, maka ia berkomunikasi pun sama masyarakat nuansa dakwahnya itu tidak nampak, jadi kita lihat masih ada juga orang kita berpikir, ah nantilah, nanti dekat pemilu kita siapkan saja uang, jadi gitu. Padahal kita tidak, saya tadi sudah katakan, ada contoh paling sederhana misalnya kalau kita lihat bagaimana kekuatan ideologi, kenapa ada orang sampai mau mengikatkan bom dipinggangnya, lalu mau meledakkan dengan dirinya, apa karena uang, tidak, apa mau jabatan, tidak. Apa mau kaya, tidak.

259 Saat itu PKS atau Partai Keadilan Sejahtera masih bernama PK atau Partai Keadilan.

Itu karena kekuatan idiologi, dan itu Islam punya potensi besar untuk membuat orang begitu. Karena orang Islam kalau sampai kepada aqidah yang betul, maka ia rindu mati syahid, Cuma inikan tidak pernah kita ekspoler dalam rangka membangun partai, itu yang jadi soal, sehingga ia berpikrnya, apa yang dilakukan orang bagi-bagi beras, dia berpikir begitu. Mak pasti kalah, ada pragmatis, nah inilah jadi persoalan dalam komunikasi politik ke luar, jadi di sini PBB agak gagal, jadi mestinya, apapun latar belakang pendidikan teman-teman di PBB, harus mampu dia disebut sebagai ustadz, harusnya begitu. Jadi kalau kita lihat Masyumi dulu, pendidikan apapun harus tau dakwah, harus tau Islam. misalnya Anwar Haryono, dia itu pendidikannya SH, S2 Hukum dan Doktor bidang Hukum, tapi orang mengakuinya. Kalau beliau bicara tentang Islam maka sangat dikuasainya. Proses Komunikasi politik yang terjadi di PBB, sudah terektualisasi sejak PBB berdiri, dimana partai ini berdiri, didukung atau melibatkan berbagai ormas Islam, terutama ada Dewan dakwah Islamiyah Indonesia, demikian juga organisasi Persis (Persatuan Islam) bahkan pentolan-pentolan Ormas Islam lainnya seperti Muhammadiyah, al Irsyad dll, juga ikut bergabung di dalamnya, hanya saja mereka ikut bergabung dengan PBB tidak secara mandat organisasi resmi, karena hal itu juga akan tidak sesuai dengan khittah atau ketentuan di masing-masing ormas yang tidak mau terlibat langsung secara organisatoris ke dalam satu wadah partai politik. Masing-masing ormas memberikan kebebasan kepada kadernya untuk bergabung dengan partai politik yang dianggap sesuai dengan prinsip perjuangannya”.²⁶⁰

Khusus untuk Sumatera utara DPW PBB sejak awal berdirinya juga melakukan proses komunikasi politik dengan mengajak keluarga besar Al-Washliyah Sumut agar ikut membidangi atau terlibat di kepengurusan DPW PBB Sumatera Utara, misalnya tokoh pendiri awal PBB seperti Ustadz Fuad Said adalah tokoh Al-Washliyah, demikian juga ketua DPW PBB pertama bapak Banuaran Ritonga adalah keluarga besar Al-Washliyah, bahkan pada pemilu pertama anggota DPRD PBB asal pemilihan Labuhan Batu, yakni sdr Fahrizal Dalimunthe adalah ketua DPW Pemuda Bulan Bintang Sumatera Utara, hal ini menjadi bukti proses komunikasi politik PBB dengan ormas-ormas Islam berjalan dengan baik. Akan tetapi proses komunikasi tersebut lebih bersifat informal tidak formal, sebagaimana yang dinyatakan Dr Masri Sitanggang

“Proses komunikasi dengan ormas-ormasi Islam tersebut sebagai berikut: “jadi, Forum Ukhwah Islamiyah (FUI) ikut mendeklarasikan. Jadi

²⁶⁰ Dr Masri Sitanggang MP, Ketua DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2016, pukul 14.30 s-d 16.00 di kediaman beliau Jalan Pasar 8 Bandar Khalifah Percut Sei Tuan.

bidan melahirkan PBB itu adalah forum ukhwh. Lalu forum itu diperbesar namanya menjadi Forum Komunikasi Umat Islam (FKUI) yang di dalamnya ada Muhammadiyah, semua juga ada di situ lalu mereka akan mendeklarasikan. Ketua Muhammadiyah saat itu adalah Amien Rais, Persis ada disitu, al-Irsyad. Secara formal memang tidak ada keterlibatan ormas dengan mandat resmi, tapi semua memang tetap datang tokoh-tokoh ormas Islam. Nanti kita kontak melalui ketuanya siapa yang dikirim dari sana. Kita takut kalau kita kirim surat nanti komplikasi. Karenakan yang namanya ormas tidak boleh terlibat dalam organisasi politik. Jadi hubungan emosional sebagai Organ yang melahirkan kita telepon. Dari Al-washliyah siapa dari Dewan Dakwah, bahkan pendekatannya pendekatan kekeluargaanlah. Dilibatkan seluruhnya yang bergabung di pusat waktu itu sebagai pendiri. Eksponeennya salah satunya Dewan Dakwah, banyak hampir 30-an ormas Islam, termasuk Alwashliyah dan segala macam masuk di dalam. Walaupun secara formal struktur tidak mengikat kesitu namum simpulnya itu Dewan Dakwah karena ini melanjutkan perjuangan M. Natsir gitu kan”²⁶¹

Pelaksana Sekretaris DPW PBB Sumatera Utara Bustami Manurung merinci, bahwasannya proses komunikasi politik di PBB bersifat dinamis dan terbuka, bahkan pengurus PBB bersedia tidak menjadi Caleg (Calon Anggota Legislatif), asalkan ada caleg yang lebih populer dan diterima luas di masyarakat. Karena itu dinyatakan Bustami.

”Komunikasi politik internal seperti di atas konsepnya, menjadi wajib bagi pengurus untuk lebih mengedepankan caleg yang populer, karena memang filosofis komunikasi dalam Partai Bulan Bintang mengacu keummatan. Tetapi memang kita tetap membawa misi penegakan hukum dan jangan lupa kalau kita pengembangan syariat Islam dan kita tidak boleh malu mengatakan kalau Islam jangkauannya bukan formalistik. Syariat Islam yang berdasarkan sosial Islam.”²⁶²

Jika merujuk kepada tekad PBB, maka proses komunikasi politik yang dijalankan meliputi; *Pertama*, konsolidasi yakni memantapkan struktur partai dan pengurus hingga ke basis yang terendah yakni ditingkat ranting. *Kedua*, kaderisasi, yakni menggiatkan kegiatan perkaderan untuk melahirkan sumberdaya pimpinan yang militan, berkualitas dan loyal melalui kegiatan perkaderan yang dinamakan LANTANG (Perkaderan Bulan Bintang).

²⁶¹ Dr Masri Sitanggang MP, Ketua DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2016, pukul 14.30 s-d 16.00 di kediaman beliau Jalan Pasar 8 Bandar Khalifah Percut Sei Tuan.

²⁶² Bustami Manurung, Wakil Sekretaris DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu Tanggal 18 September 2016, pukul 16-17.30 di Caf e Yuki Plaza.

Kegiatan konsolidasi dan kaderisasi tersebut bertujuan untuk mewujudkan tekad PBB untuk meraih 3 Tri Sukses PBB yakni ; *Pertama*, Sukses lolos verifikasi partai pada pemilu berikutnya (2019), *kedua*, sukses lolos *parliamentary treashold* (ambang batang suara minimal tingkat nasional), dan, *ketiga*, sukses pemilu 2019. Hal ini langsung peneliti temukan dan observasi di kantor DPW PBB Sumatera Utara yang terdapat papan dan baleho sekretariat.

Proses komunikasi politik di PBB Sumatera Utara yang utama dalam konsolidasi dan kaderisasi terkendala pada aspek finansial, sedangkan untuk rekrutmen pencalegkan, hampir tidak ada kendala, bahkan jumlah caleg juga cukup banyak yang didaftarkan, terkecuali di daerah-daerah tertentu yang mayoritas non muslim, caleg PBB minim bahkan terkadang kolomnya kosong. Proses komunikasi dalam penyusunan caleg dan penempatan caleg juga hampir tidak ada kendala dan konflik, hal ini karena pengurus PBB juga berkomitmen bersedia tidak jadi caleg, jika ada caleg yang lebih berkompeten dan populer di tengah-tengah masyarakat. Bustami Manurug menyatakan.

“Pertama adalah finansial, membangun partai tidak terlepas dari finansial. Kedua karena belum dikeluarkan undang-undang syarat parpol peserta pemilu yang masih gonjang-ganjing. Kalau sempat ada batasan lebih ketat dari 3,5% suara Nasional, harus 100% ditingkat DPC hingga ke ranting. Bagaimana PBB bermain di daerah tingkat dua yang muslim minoritas. Tapi kita punya semangat mencapai target yang ditetapkan DPW Sumut. Kita sudah memutuskan di KAPU dan DPW dalam rangkaian pemilihan di Labuhan Batu kemarin. Kita tidak segan DPW dan DPC tidak menjadi Caleg kalau ada orang yang kita anggap lebih berkompeten dalam berbagai hal. Hitungan kita misalnya menjadi calon yang prospektif dan produktif didudukkan menjadi caleg. Bahkan DPD sudah mengatakan dalam rapat kerja pengurus harian, kalau ada yang pengurus tidak mesti jadi caleg.”²⁶³

Selanjutnya Bustami menjelaskan tentang proses komunikasi politik yang berjalan di PBB Sumatera Utara termasuk tentang pencalegkan tersebut menyatakan bahwa secara komunikasi partai yang memiliki benang merah dari partai Masyumi itu tidak terlepas dari Islam.

“Ya pasti, secara formal komunikasi tidak bisa dilepaskan dari komunikasi Islam. Dan jangan dianggap komunikasi Islam itu tabu dan segala

²⁶³ Bustami Manurug, Wakil Sekretaris DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu Tanggal 18 September 2016, pukul 16-17.30 di Caf  Yuki Plaza.

macam, ya pasti komunikasi Islam-lah. Memang kita dalam menso-sialisasikan PBB tidak diperbolehkan menghujat partai lain. Kalaupun dimata kita kasarnya komunikasi itu ada sabotase itu bukan urusan kita. Pokoknya kita ngak boleh menghujat partai lain, ngak boleh menjelakkan instansi pemerintah dan segala macam. Tetapi kalau ada kelemahan komunikasi di lapangan kita disuruh memberikan solusi. Ini persoalannya begini maka jawabannya begini. Kita semampunya untuk menyampaikan yang baik-baik. Makanya dalam kasus transaksional itu kita dilarang mengangkat kasus-kasus money politic dan segala macam. Sejauh ini tidak, ada standar ukur dalam kiat-kiat menyusun nomor urut. Pertama kita standart ukur bahwa ada sistem perengkingan. Misalnya ada standart bakunya, pengurus jabatannya apa dan nilainya sekian. Berapa kali panitia, nilainya sekian. Keaktifan dia berapa kali ikut rapat termasuk yang paling utama pendidikan, kemudia lantang 1 2 dan 3, itu nanti ditentukan nilainya sekian dan bobotnya untuk kriteria itu hanya 40 % sampai 60% lagi kita adakan rapat. Mulai dari rapat silaturahmi, penyuluhan sampai pada pleno dan penetapan. Tapi khusus untuk periode kali ini dinamika itu tidak ada. Karena diberikan juga peluang dengan sistem sekarangkan suara terbanyak”.²⁶⁴

C. Bentuk-bentuk Komunikasi Politik DPW PBB Sumatera Utara

Bentuk-bentuk komunikasi yang diteliti disini, meliputi; komunikasi yang bersifat komunikasi massa, komunikasi kelompok dan komunikasi interpersonal. Sehingga ada tiga bentuk komunikasi yang akan peneliti deskripsikan dalam penelitian ini, yakni komunikasi massa, komunikasi kelompok dan komunikasi interpersonal. Di samping itu temuan dan analisis penelitian juga difokuskan kepada unsur-unsur komunikasi politik meliputi: Komunikator politik, Pesan Politik, Saluran atau media politik, sasaran, target atau komunikan politik, dan efek atau pengaruh komunikasi politik.

1. Komunikasi Interpersonal DPW Partai Bulan Bintang Sumatera Utara

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kumpulan orang, dua arah, *verbal* dan *non*

²⁶⁴ Bustami Manurung, Wakil Sekretaris DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu Tanggal 18 September 2016, pukul 16-17.30 di Caf  Yuki Plaza.

verbal, sikap saling berbagi informasi, dan perasaan antara individu dengan individu atau antar individu di dalam kelompok kecil. Miller mengatakan, bahwa memahami proses komunikasi *interpersonal* menuntut pemahaman hubungan simbiosis antara komunikasi dengan perkembangan *relation*. Karenanya, komunikasi *interpersonal* ini sangat memengaruhi perkembangan hubungan secara serentak dan melibatkan berbagai pihak dalam hubungan tersebut.

Melalui komunikasi interpersonal, seseorang dapat mengubah sikap dan perilaku dirinya dan orang lain, mengubah pendapat orang lain, dan membantu orang lain. Juga, dengan komunikasi *interpersonal* seseorang dapat bersosialisasi dengan orang lain, dan menjadikan diri sebagai suatu agen yang dapat mengubah diri dan menjadikan diri dan lingkungan sesuai dengan yang dikehendaki. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi *interpersonal* dianggap sebagai proses belajar menuju perubahan yang lebih baik.

Evert M. Rogers dalam Depari (1988) prinsip komunikasi *interpersonal* adalah :

- a. Arus pesan yang cenderung dua arah
- b. Konteks komunikasinya tatap muka
- c. Tingkat umpan balik yang terjadi tinggi
- d. Kemampuan mengatasi tingkat selektivitas, terutama *selective exposure* yang tinggi.
- e. Kecepatan jangkauan terhadap *audience* yang besar relatif lambat.
- f. Efek yang mungkin terjadi ialah perubahan sikap.

Untuk membantu Tujuan dilakukannya komunikasi *interpersonal* adalah: *Pertama*, untuk menyampaikan informasi. *Kedua*, untuk berbagi pengalaman. *Ketiga*, untuk mengembangkan simpati. *Keempat*, untuk melakukan kerjasama. Dan *kelima*, untuk mengembangkan motivasi²⁶⁵

Sedangkan kelebihan dan kekurangan Komunikasi *Interpersonal*, yakni: *Pertama*, Kelebihan. Adapun Komunikasi interpersonal tatap muka ini mempunyai banyak kelebihan, adalah :

265 Julia T Wood. *Komunikasi Teori dan Praktik* (Jakarta : Salemba Humanika, 2013) hlm 96

- a. *Feedback* antara komunikator dan komunikan akan diterima secara cepat dan dapat melihat pula reaksi yang menjadi komunikasi *non verbal* dari komunikan itu sendiri.
- b. Terdapat kedekatan emosional karena intensitas dalam berkomunikasi.
- c. Bisa mengurangi *noise* dalam berkomunikasi karena terjadi secara langsung dan bila ada gangguan langsung bisa dikonfirmasi.
- d. Dapat menyampaikan suatu pesan dengan hanya komunikasi *non verbal* tanpa komunikasi *verbal*.
- e. Tidak memerlukan biaya dalam melakukannya karena dilakukan secara langsung dan *continue*, sehingga mengobrol dalam jangka waktu yang lama tidak mengeluarkan biaya.
- f. Emosi atau perasaan antara komunikator dan komunikan lebih terlibat dan mengurangi kebohongan karena mimik wajahakan terlihat langsung oleh lawan bicaranya.

Selain mempunyai kelebihan, komunikasi *interpersonal* tatap muka juga mempunyai kelemahan, adapun kekurangannya, yaitu :

- a. Mengenai efisiensi waktu, yang dimaksudkan di sini adalah efisiensi waktu untuk bertemu. Setiap orang mempunyai kesibukan masing-masing sehingga untuk melakukan komunikasi tatap muka diperlukan waktu yang tepat agar keduanya dapat bertemu dan melakukan komunikasi interpersonal tatap muka.
- b. Tidak dapat berkomunikasi dengan orang yang ada di tempat yang berbeda karena jangkauan tatap muka ini sangat terbatas sehingga memerlukan media untuk menghubungkan antara satu sama lain agar dapat berkomunikasi. Jadi dalam tatap muka ini yang menjadi kendala adalah waktu dan jangkauannya yang terbatas.²⁶⁶

Di DPW PBB Sumatera Utara, bentuk komunikasi *interpersonal* ini juga dilaksanakan, yakni komunikasi antar personalia pengurus yang secara intens dilakukan dengan menekankan tentang pentingnya membangun ukhwh Islamiyah dan silaturahmi. Demikian juga dalam pendekatan dengan simpatisan dan masyarakat atau konstituen, maka pengurus PBB selalu mengutamakan kehangatan ukhwh atau persaudaran dalam setiap pertemuan. Masing-masing pengurus DPW PBB Sumatera Utara baik personal pimpinan maupun

266 Fatmig2.blogspot.co.id/2012/09/komunikasi-interpersonal.html

kader PPB diwajibkan mengemban misi sebagai *dua'at* atau dai, sebagaimana firman Allah dalam QS Ali Imran 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.²⁶⁷

Demikian juga Firman Allah dalam QS: An Nahl: 125

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.²⁶⁸

Sebagai pengemban misi dakwah, maka sudah tentu setiap pengurus dan pimpinan PBB Sumut diminta untuk menjalankan syariat Islam secara kaffah, termasuk dalam tata pergaulan antar sesama. Silaturahmi dalam Islam itu mencakup kedalam lima dimensi, yakni ; Taaruf (saling berkenalan), Tafahum (saling memahami), Tahabbun (saling mencintai), Taawun (saling menolong) dan Takaful (saling melindungi). Persaudaraan sesama mukmin tersebut Allah terangkan dalam QS: Ali Imran: 103 dan QS Al Hujurat: 10 yang berbunyi:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan

²⁶⁷ QS. 3 : 104

²⁶⁸ QS. 16 : 125

janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”.269

Selanjutnya QS Al Hujurat: 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.270

Data yang peneliti dapatkan dalam bentuk menyampaikan pesan-pesan partai melalui komunikasi *interpersonal*, diketahui DPW PBB Sumatera Utara juga melakukan program *door to door* (gerakan mengetuk pintu-kepintu). Istilah ini dikenal dengan *direct selling* (promosi langsung), sebenarnya di partai lain bentuk komunikasi ini juga dilakukan, seperti di PKS. Namun, dalam hal militansi dan pergerakan kader-kader, PBB kurang dan tidak maksimal menjalankan bentuk komunikasi *interpersonal* tersebut.

Komunikasi *interpersonal* juga dilakukan PBB Sumatera Utara dengan mendatangi atau bersilaturahmi bersama tokoh-tokoh ummat dan masyarakat, anjang sana dan kunjungan ini menjadi mutlak dilakukan, hal ini untuk mengetahui pandangan para tokoh Islam dan tokoh masyarakat (adat, pemuda dan lintas profesi) tentang politik Islam dan PBB, tentunya dengan harapan akan adanya masukan atau nasehat yang bermanfaat untuk membesarkan partai dan meraih suara yang signifikan. Bahkan Bustami Manurung sebagai pelaksana sekretaris DPW PBB Sumut menyatakan tentang perlunya bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh agama, sebagai berikut:

“Dalam waktu dekat ini kita mau menggagas silaturahmi ulama dan ustadz. Jadi model itu di tingkat DPW tapi di tingkat DPC dan Kecamatan (PAC). Walaupun volume kegiatannya lebih kecil. Disitulah pesan-pesan keumatan, ke-Islaman politik partai disampaikan tanpa mengintervensi

269 QS. 3 : 103

270 QS. 49 : 10

*cara berfikirnya. Kegiatannya tidak boleh campur tangan PBB, tidak boleh materi PBB yang disampaikan melainkan materi ke-Islaman.*²⁷¹

2. Komunikasi Kelompok DPW Partai Bulan Bintang Sumatera Utara

Manusia pada dasarnya ingin hidup berkelompok, terkadang memiliki persepsi dan tujuan yang berbeda dari kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Hal ini tidak terlepas dari perbedaan ruang dan waktu, bahkan juga dibedakan oleh latar belakang kultur atau budaya kelompok itu sendiri. Mengenai perbedaan ini, biasanya sering terjadi pada perkumpulan etnis. Apalagi bicara tentang etnis minoritas dan mayoritas. Perasaan superioritas *in-grup feeling* yang berlebihan dengan menganggap inferioritas pihak yang lain (*out grup*)²⁷².

Kartini kartono menyatakan kelompok adalah kumpulan terdiri dari dua atau lebih individu, dan kehadiran masing-masing mempunyai arti serta nilai bagi orang lain, dan ada dalam situasi saling mempengaruhi. Andrik Purwasito memberikan pengertian kelompok adalah, beberapa orang yang didasarkan atas dasar beberapa kesamaan mendasarkan seperti persepsi, motivasi, dan tujuan mereka dalam kelompok tersebut.²⁷³

Miftah Thohah memberikan definisi kelompok, ialah tidak terlepas dari membentuk kelompok itu sendiri. Ia juga tidak dapat melepaskannya dari karekteristik yang menonjol dari kelompok tersebut, yaitu:

- a. Adanya dua orang atau lebih
- b. Yang berinteraksi satu sama lainnya
- c. Saling membagi beberapa tujuan yang sama
- d. Melihat dirinya sebagai suatu kelompok.²⁷⁴

Sedangkan pengertian lainnya yang diberikan oleh Saodah Wok, yakni ; kelompok adalah suatu kumpulan mengandung tiga orang atau lebih yang mewujudkan bersama untuk jangka waktu tertentu. Dari berbagai pengertian kelompok (*grup*) dapat diambil benang

271 Bustami Manurung, Wakil Sekretaris DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu Tanggal 18 September 2016, pukul 16-17.30 di Café Yuki Plaza.

272 Andrik Purwasito, *Komunikasi Multikultural* (Surabaya: UMS Press, 2003), h. 165

273 *Ibid*, h. 165

274 Mifiah Thoha, *Prilaku Organisasi; Konsep Dasar dan Aplikasinya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 84

merah tentang apa itu kelompok, yaitu: Sekumpulan individu yang sama dalam hal persepsi, tujuan, interaksi, situasi dan kondisi, ikatan. Jadi tidak semua kumpulan individu dapat digolongkan kedalam kelompok. Karena bisa saja hanya berupa rombongan atau gerombolan, dimana mereka berkumpul bersama secara spontan, misalnya situasi kebakaran, penonton sepakbola, penjaja obat keliling, pasar malam dan sebagainya.

Berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang peneliti dapatkan, maka bentuk komunikasi kelompok ini juga berjalan di PBB Sumatera Utara, misalnya melalui rapat-rapat yang secara rutin dilakukan yakni dua minggu sekali sebagai ajang silaturahmi dan evaluasi untuk menjalankan roda organisasi partai. Rapat ini selalu dipimpin oleh ketua DPW PBB Dr Masri Sitanggang dengan didampingi sekretaris, namun rapat bisa saja dipimpin salah seorang pimpinan lainnya dengan seizin ketua atau ketua berhalangan. Rapat juga bisa berlangsung sekali seminggu jika dirasa ada hal-hal krusial atau mendesak yang harus diambil keputusan dengan segera.

Bentuk komunikasi kelompok lainnya yang peneliti temukan, dalam bentuk menghadapi *stratifikasi* atau *klasifikasi* masyarakat pemilih. Sebagai mana hasil temuan di lapangan, pemilih dikelompokkan ke dalam tiga jenis yakni, pemilih *tradisional*, *transaksional* dan *rasional*. Kelompok pemilih *tradisional* lebih tepat dijalankan bentuk komunikasi kelompok seperti dalam bentuk *halaqah-halaqah* atau kelompok-kelompok pengajian dan pembinaan lainnya. Pemilih *tradisional* ini punya ikatan yang kuat terhadap partai, dan hampir semua partai memiliki jenis pemilih seperti ini, apalagi PBB yang punya benang merah sejarah dengan Masyumi sebagai partai Islam yang sangat berpengaruh masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Buya M Natsir. Pemilih *tradisional* ini boleh dikatakan sebagai basis massa dan basis suara. Misalnya di PKB basis massa tradisionalnya NU, PAN basis massa tradisionalnya Muhammadiyah, PDIP basis massa tradisionalnya kaum nasionalis dan marhaenis. Bahkan Dr Masri Sitanggang melihat di PBB pemilih tradisional cukup banyak.

“Ya tradisional ini memang lebih dekat dengan ikatan-ikatan emosional, ikatan historis dan ideologikal, dan ini di PBB juga banyak, misalnya eks Masyumi dulu. Seperti halnya ada pemilih yang berkata, ini eks partai

*atokku dulu ini, bahkan yang pernah mengikuti saat mudanya dulu ikut Masyumi maka itu tetap ke PBB dan itu cukup banyak”.*²⁷⁵

Hanya saja dalam observasi yang peneliti lakukan PBB kurang serius merawat pemilih tradisional itu, di samping memang segmentasi ummat Islam yang sudah terpolarisasi di berbagai partai yang ada. Kelompok berikutnya yang menjadi andalan komunikasi kelompok di PBB Sumatera Utara adalah pemilih *rasional*, ini kelompok kaum terdidik dan rasional. Kelompok ini misalnya dari kalangan mahasiswa dan kampus. Pendekatan yang dilakukan lebih banyak bersifat diskusi dan diajak memecahkan sebuah persoalan, termasuk menampung masukan-masukan mereka.

Untuk pemilih rasional Masri Sitanggang juga tak menampik merupakan penyumbang suara yang potensial, sehingga perlu dilakukan strategi-stregegi yang signifikan, karena itu disikapi dengan mengajak dialog.

*“Kalau untuk pemilih rasional ini, ya strategi khusus kita ya, mengajak dialog, dan memberikan pencerahan sebagai alternatif untuk memilih PBB tersebut dan kita memaparkan tentang hal apa sekarang bagaimana, mau seperti anda bayangkan, jadi kita ajak ngobrol”*²⁷⁶

Sedangkan pemilih *transaksional* adalah pemilih yang bersifat pragmatis dan menjadi tantangan partai yang merusak tatanan demokrasi. Pemilih jenis terakhir ini harus dikurangi dan diberikan pencerahan, jika ingin demokrasi lebih berkualitas dan pemimpin yang dihasilkan lebih baik. Dalam memandang pemilih *transaksional* ini, Dr Masri Sitanggang menilai dapat merusak pemilih tradisional.

*“Karena ini memang tidak bisa dibendung, dan ada beberapa anggota kita akhirnya gara-gara corak ini lunturlah pemilih tradisional tersebut dan ini dominan sekali merusak”.*²⁷⁷

Sementara Bustami Manurung dalam melihat dan menyikapi pemilih *tradisional* perlu diambil strategi, bahkan langkah-langkah

²⁷⁵ Dr Masri Sitanggang MP, Ketua DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2016, pukul 14.30 s-d 16.00 di kediaman beliau Jalan Pasar 8 Bandar Khalifah Percut Sei Tuan

²⁷⁶ Dr Masri Sitanggang MP, Ketua DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2016, pukul 14.30 s-d 16.00 di kediaman beliau Jalan Pasar 8 Bandar Khalifah Percut Sei Tuan

²⁷⁷ Dr Masri Sitanggang MP, Ketua DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2016, pukul 14.30 s-d 16.00 di kediaman beliau Jalan Pasar 8 Bandar Khalifah Percut Sei Tuan

yang harus ditempuh dengan cara memberikan penjelasan kultur Partai Bulan Bintang yang memiliki benang merah dengan Masyumi.

“Menyikapi pemilih tradisional itu, pendekatan kita memang menjelaskan filosofis perjuangan partai bahwa ini adalah partai perpanjangan tangan Masyumi. Maka mengedepankan program keumatan dan sosial. Untuk pemilih rasional membuat diskusi ilmiah di kampus semua segala macam. Bahkan kita rencanakan di 2017 Yusril di-roadshow-kan di Sumatera Utara. Tapi tidak harus membawa nama partai. roadshow dengan thema penegakan keadilan dan kejelasan hukum.”²⁷⁸

Komunikasi kelompok lainnya yang dibangun di PBB Sumatera Utara adalah melalui satu lembaga yang dinamakan dengan KAPPU singkatan dari Komite Aksi Pemenangan Pemilihan Umum. Lembaga ini semacam lembaga khusus sebagai penghubung antara pimpinan partai dengan masyarakat. Lembaga ini juga berhak mengajukan pertimbangan dan masukkan kepada pimpinan partai terkait dengan program, pencalegkan dan pertimbangan lainnya di partai. Kemudian menurut, Bustami Manurung keberadaan KAPPU sangat membantu membesarkan Partai Bulan Bintang.

“Insya Allah dari kerja yang dilakukan KAPPU. Pertama kita sudah berkerja hampir setahun setengah membantu dan membuat infrastruktur partai. Terlepas undang-undang nanti yang belum diputuskan. Kita berkeyakinan dan kembali pula pak Yusril yang pernah membuat berada di parlemen pusat kembali kita daulat menjadi ketua umum. Kita bahkan punya target anggota DPR provinsi itu sudah kita tetapkan itu, dapil dapilnya sudah dihitung bahkan untuk DPRD tingkat 2 di luar daerah minoritas ada DPR-nya sekarang ada 13 kabupaten kota kita mintak naik 100%. Yang harus ada satu kursi yang daerah minoritas harus daftar tunggu. Obsesi kesana udah kita ukur dan rapatkan dengan membangun infrastruktur partai. Untuk tingkat 2 Kabupaten/Kota sekarang ada 20 kursi tersebar di beberapa kabupaten kota.”²⁷⁹

Lembaga KAPPU itu sendiri, berisikan berbagai pihak dan kalangan yang berada di luar struktur partai dan bersifat lembaga khusus, hal ini bisa ditemukan pada ART Partai Pasal 22 yang berbunyi: Badan Khusus, (1) Badan Khusus adalah lembaga yang

²⁷⁸ Bustami Manurung, Wakil Sekretaris DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu Tanggal 18 September 2016, pukul 16-17.30 di Caf  Yuki Plaza.

²⁷⁹ Bustami Manurung, Wakil Sekretaris DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu Tanggal 18 September 2016, pukul 16-17.30 di Caf  Yuki Plaza.

menangani suatu program strategis yang bersifat monumental dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum/Ketua sesuai dengan tingkatannya yang menangani. (2) Badan Khusus antara lain : Dewan Pakar, Komite Aksi Pemenangan Pemilu (KAPPU), Litbang, Badan Pengelola Pagaderan (BP2). (3) Bila dipandang perlu, Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Badan Khusus sesuai kebutuhan. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Khusus diatur dalam Pedoman Dasar dan Pedoman masing-masing yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Terkait keberadaan KAPPU ini, peneliti menemukan pada poin ke empat rekomendasi partai yang berbunyi: “Di Setiap partai politik tentu menghendaki kemenangan pada setiap pemilu, karena itu organisasi pemilu (KAPPU) yang selektif menjadi mutlak segera dibentuk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pelantikan DPP PBB periode 2010-2015. Selanjutnya diskusi diikuti dengan penetapan pembina daerah pemilihan dan caleg selambat-lambatnya bulan januari 2011”.

3. Komunikasi Massa DPW Partai Bulan Bintang Sumatera Utara

Komunikasi massa adalah proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak banyak (publik). Organisasi-organisasi media ini akan menyebarluaskan pesan-pesan yang akan mempengaruhi dan mencerminkan kebudayaan suatu masyarakat, lalu informasi ini akan mereka hadirkan serentak pada khalayak luas yang beragam. Hal ini membuat media menjadi bagian dari salah satu institusi yang kuat di masyarakat. Dalam komunikasi masa, media masa menjadi otoritas tunggal yang menyeleksi, memproduksi pesan, dan menyampaikannya pada khalayak.

Komunikasi Massa yang secara defenisi diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa, baik media cetak maupun elektronik. Media cetak di antaranya; surat kabar, buletin, majalah, tabloid dsb. Sedangkan media elektronik meliputi, radio, televisi, film, iklan di televisi, termasuk media elektronik yang sangat berpengaruh saat ini yakni internet (di internet juga terdapat media sosial baik *BBM*, *Line*, *WA*, *Facebook* maupun *Twitter*). Semua media yang disebutkan termasuk media massa. Sehingga komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan berbagai media tersebut. Ada juga media massa yang sifatnya ruang terbuka umum,

di mana bisa menghadirkan massa puluhan bahkan ratusan ribu. Misalnya kampanye akbar di ruang terbuka publik seperti lapangan, stadion sepak bola, gelanggang dll. Semua yang menggunakan media tersebut bahagian instrumen dari komunikasi massa.

Komunikasi massa penting dan harus dilakukan partai politik, termasuk Partai Bulan Bintang Sumatera Utara, karena jenis komunikasi ini memiliki berbagai kelebihan yang tidak dimiliki komunikasi *interpersonal* dan kelompok. Kelebihan-kelebihan tersebut meliputi:

- a. Biaya pembuatannya murah, karena tidak memerlukan peralatan yang banyak
- b. Dengan biaya yang murah maka, dalam penyebarannya juga cepat.
- c. Buta huruf bukan menjadi kendala. Karena mendengarkan lewat alat pendengar
- d. Bisa dinikmati sambil mengerjakan aktifitas lain.
- e. Dapat mengatasi batasan ruang dan waktu.
- f. Kapanpun dan dimanapun gambar bisa dilihat dan digunakan.
- g. Harganya murah dan mudah didapat serta digunakan.
- h. Sifat konkrit, tidak bertele-tele dan langsung pada pokok permasalahan.
- i. Muatan isinya banyak. Bisa berhalaman-halaman.
- j. Bisa dibaca berkali-kali.
- k. Analisanya tajam, sehingga pembaca dapat mengerti isi berita.

Akan tetapi komunikasi massa tetap saja memiliki kelemahan yakni ;

- a. Bergantung pada kondisi cuaca. Bila kondisi kurang baik maka suara yang dihasilkan juga kurang maksimal.
- b. Beberapa media massa jumlah isi yang disajikan sedikit. Tidak bisa sebanyak media-media lain.
- c. Media TV dan Internet hanya menampilkan persepsi indera mata. Orang buta tidak bisa menggunakan media ini.
- d. Pesepsi orang berbeda-beda sehingga menimbulkan banyak makna dan multitafsir.
- e. Beberapa meddia gambar hanya disajikan dalam ukuran yang

- kecil, sehingga kurang efektif dalam memahami isinya.
- f. Media semisal TV biaya mahal. Karena harus menggunakan peralatan yang banyak dan membutuhkan kru yang banyak.
 - g. Untuk media cetak kurang cepat dalam penyampaian berita karena harus menunggu selesai dicetak.
 - h. Tidak ada audio visual. Media cetak hanya bisa dinikmati oleh indra pengelihatannya, dan yang pandai membaca.
 - i. Pembuatannya juga rumit, karena harus melalui banyak proses.
 - j. Beberapa media dalam penyampaian berita Kurang akurat, tidak seperti media lain
 - k. Terbatas pada kalangan yang bisa menjalankan internet.
 - l. Terbatas pada jaringan. Bila tidak ada maka tidak akan bisa mengakses internet.

Secara faktual berdasarkan informasi dan penelusuran ditemukan, bentuk komunikasi massa juga berlangsung di PBB Sumatera Utara, komunikasi massa yang merupakan jenis komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak maupun elektronik. Adapun bentuk komunikasi massa yang dilakukan, meliputi *pers rilis* atau menyampaikan berita-berita kepartaian terutama dalam menyikapi suatu persoalan melalui media surat kabar. Begitu juga dengan sejumlah pemberitaan melalui surat kabar yang dilakukan pimpinan partai atau para caleg. Akan tetapi intensitas menggunakan media surat kabar ini terbatas bahkan sangat jarang.

Selanjutnya, peneliti juga menemukan beberapa tulisan Dr Masri Sitanggang di surat kabar Waspada, yang cukup baik mendapat respon pembaca. Tulisan-tulisan beliau terutama terkait dengan politik Islam, Pancasila dan negara. Dr Masri sitanggang sebagai ketua PBB Sumatera Utara sebelum memutuskan terjun ke dunia politik, dikenal sebagai akademisi atau dosen di almamaternya USU (Universitas Sumatera Utara), di samping itu dia juga aktifis dakwah yang banyak memberikan pelatihan dan perkaderan. Walau beliau berlatar belakang Doktor pertanian, namun pemahaman ilmu ke-Islamannya, juga sangat mumpuni dan menguasai. Terdapat sejumlah buku tulisan beliau, di antaranya tentang Kuliah Tauhid.

Adapun media massa lainnya yang terdapat di PBB Sumatera Utara, yakni majalah yang sifatnya resmi terbit dua mingguan,

majalah itu bernama Abadi yang diambil dari nama majalah di masa Masyumi dulu. Terbitnya majalah ini sangat berguna untuk menjadi media informasi bagi pimpinan, kader, anggota dan masyarakat luas. Melalui majalah ini disampaikan berita-berita dan sikap resmi PBB, termasuk juga kajian-kajian ke-Islaman dan politik keummatan dan kebangsaan.

Akan tetapi, menurut informasi yang peneliti dapatkan dari Drs Bustami Manurung dan Dr Masri Sitanggang bahwa DPW PBB Sumut juga memiliki majalah.

“Terbitnya majalah ini awalnya berjalan lancar, akan tetapi belakangan tidak terbit lagi, dikarenakan kendala pendanaan dan manajemen. Berita PBB Sumatera Utara di surat kabar juga masih jauh kalah dengan berita-berita partai lainnya yang lebih dominan dan maksimal memanfaatkan fungsi media surat kabar tersebut. Harian waspada misalnya setiap pemilu legislatif atau pilkada membuat kolom khusus tentang pentas politik dan demokrasi, akan tetapi PBB Sumatera Utara beritanya sangat jarang dan minim. Namun alat-alat kampanye dalam bentuk cetakan juga dimanfaatkan pimpinan dan caleg-caleg PBB Se-Sumatera Utara, berupa, brosur, spanduk, baleho berbagai ukuran baik besar, sedang maupun kecil (ada yang dipasang dipinggir jalan, kantor, rumah pengurus, rumah caleg, persimpangan maupun di becak bermotor), baju kaos, gantungan kunci, buku doa, buku yasin, pin, minuman aqua, buletin dan lain-lain, namun hal ini sifatnya lebih bersifat insidental dalam setiap masa kampanye pemilu. Media komunikasi massa elektronik baik radio dan televisi kurang dimanfaatkan PBB Sumatera Utara, hal ini terkait dengan keterbatasan dana, jika menggunakan iklan melalui televisi memerlukan biaya yang cukup besar, walaupun ada yang menggunakan media tersebut, sifatnya lebih bersifat personal, terutama dalam acara dialog interaktif. Radio juga memiliki keterbatasan pendengar, sedangkan media televisi lebih banyak bersifat nasional, karena tahun televisi nasional juga masih terbatas memancarkan siaran berita lokal. Belakangan tuntutan UU pertelevisi yang mewajibkan ada porsi daerah atau lokal, maka kita sudah temukan berita atau informasi lokal tersebut diberikan porsinya”²⁸⁰

Adapun media lokal khusus Sumatera Utara dan Medan, adalah TVRI Sumut dan Deli TV (kini berganti News TV), berita-berita tentang PBB Sumatera Utara, hampir tidak pernah terdengar sebagaimana partai-partai lainnya, seperti Golkar, PDIP, Demokrat, PKS dll yang sangat sering muncul di berita lokal. Sedangkan media

²⁸⁰ Dr Masri Sitanggang MP, Ketua DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2016, pukul 14.30 s-d 16.00 di kediaman beliau Jalan Pasar 8 Bandar Khalifah Percut Sei Tuan

elektronik berupa internet, PBB Sumatera Utara memanfaatkannya hanya dalam bentuk personal. Akun atau website PBB memang bisa ditemukan, tapi bersifat nasional, sedangkan untuk Sumatera Utara tidak peneliti temukan websitenya, akan tetapi PBB kota Medan memiliki website tersendiri, yang bisa langsung dibuka *link* internet, dengan berita menargetkan lima kursi pada pemilu legislative (pileg) yang akan datang. Walau demikian melalui penelusuran di internet, berita-berita tentang program dan kepemimpinan PBB Sumatera Utara dapat ditemukan sehingga agak membantu dalam pencarian informasi. Akan tetapi untuk sebuah akun atau *link website* yang dikelola secara profesional peneliti tidak temukan. Sejumlah pimpinan PBB Sumatera Utara juga memiliki akun di media sosial seperti *face book*, *twiter* dan WA, namun media komunikasi ini tidak bersifat resmi dari institusi PBB Sumatera Utara, melainkan hanya bersifat individual. Padahal jika media sosial ini dimanfaatkan, maka jangkauan untuk mempengaruhi pemilih cukup potensial, karena pemilih pemula sangat banyak memanfaatkan media sosial ini, mereka selalu berselancar di dunia maya, mencari pertemanan dan informasi, diprediksi pengguna internet ini terus meningkat, untuk Sumatera Utara jutaan orang aktif menggunakan media internet dan media sosial, apalagi hampir semua orang memiliki HP (telepon genggam) dan ditelepon tersebut rata-rata menggunakan fasilitas internet. Inilah era yang disebut *global village* (kampung global). Dunia seperti mengecil, semua bisa diakses dan hampir tidak ada batas-batas wilayah, tentu saja sisi positif dan negatif sebuah media menjadi sebuah keniscayaan. Dalam analisis peneliti, melalui internet yang ada di *handphone*, maka dunia sekarang berada dalam genggam seseorang. Karena itu jika PBB ingin meraih suara yang signifikan, maka pemanfaatan media ini juga harus diprogramkan dan dimanfaatkan.

Berkaitan dengan kegiatan mengumpulkan massa yang banyak, dalam bentuk tabligh akbar atau rapat umum di ruang terbuka publik, maka kegiatan ini lebih banyak dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan kampanye dengan menghadirkan caleg-caleg yang akan diperjuangkan dalam pemilu. Kegiatan ini secara terjadwal, juga diagendakan melalui KPU atau Komisi Pemilihan Umum, namun sifatnya lebih per-rayon daerah pemilihan (DAPIL) yang ada di Sumatera Utara yakni 12 Dapil (Daerah Pemilihan) yakni:

- › Dapil 1 : Medan A
- › Dapil 2 : Medan B
- › Dapil 3 : Deli Serdang
- › Dapil 4 : Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi
- › Dapil 5 : Asahan, Batu Bara dan Tanjung Balai
- › Dapil 6 : Labura, Labuhanbatu dan Labusel
- › Dapil 7 : Tapsel, Sidempuan, Madina, Palas dan Paluta
- › Dapil 8 : Kepulauan Nias
- › Dapil 9 : Taput, Humbahas, Samosir, Tobasa, Tapteng dan Sibolga
- › Dapil 10 : Siantar dan Simalungun
- › Dapil 11 : Dairi, Karo, Pak Pak Bharat
- › Dapil 12 : Langkat dan Binjai

KPU Sumatera Utara sudah membagi pembagian rayon tersebut agar dimaksimalkan untuk kampanye partai dalam rangka meyakinkan dan meraih suara pemilih, akan tetapi sejumlah partai, terutama PBB Sumatera Utara tidak memanfaatkan jadwal kampanye terbuka dalam menghadirkan massa yang banyak, akan tetapi lebih memilih kampanye tertutup dalam bentuk dialogis atau komunikasi kelompok, karena dianggap lebih bersentuhan langsung dengan pemilih. Hal ini tidak lain dikarenakan biaya yang dibutuhkan dalam kampanye terbuka tersebut sangat besar sedang hasil yang akan diperoleh tidak terlalu maksimal. Hal ini bisa dilihat dari massa yang hadir dalam kampanye terbuka satu partai, juga bisa hadir dalam kampanye terbuka partai lainnya, apalagi diiming-iming dengan baju kaos, uang transpor, uang makan dan akomodasi lainnya.

Bahkan dalam berita yang peneliti tangkap dari berbagai sumber yang bisa dipercaya, untuk menghadirkan kampanye terserbut ada juga calo atau kordinator massa yang bisa menghadirkan massa, asal harga perorang cocok dan disepakati untuk diberikan, jika selesai acara tidak diberikan, inilah yang bisa menjadi insiden dan preseden buruk bagi partai dan pemilih.

D. Peluang dan Tantangan DPW Partai Bulan Bintang Sumatera Utara

Bicara tentang peluang dan tantangan PBB Sumatera Utara, maka akan membicarakan strategi perjuangan PBB pada periode 2009-2014, sekaligus juga sebagai bahan masukan atau evaluasi untuk menentukan arah perjuangan partai pada masa yang akan datang.

1. Peluang DPW Partai Bulan Bintang Sumatera Utara

Peluang merupakan hal yang harus dijadikan semangat, peluang menjadi prospek untuk lebih maju dan bangkit lebih baik dalam berbagai hal. Dalam konteks kepartaian maka peluang menjadi penting, bahkan sangat penting untuk dimaksimalkan sehingga kinerja dan pencapaian suara partai akan lebih baik. Bagi PBB Sumatera Utara, peluang inilah yang membuat pimpinan partai tetap optimis dan bersungguh-sungguh untuk mendulang suara lebih banyak lagi, adapun peluang berupa kekuatan yang dimiliki PBB Sumatera Utara. *Pertama*, kekuatan *idiologis*. *Kedua*, kekuatan *historis*. *Ketiga*, kekuatan *sosiologis*. *Keempat*, kekuatan *organisatoris*.

Dalam konteks kekuatan idiologis PBB Sumatera Utara sebagai partai Islam memiliki spirit ke-Islaman yang bersumber dari ajaran Alquran dan Hadis, serta berbagai produk Ijtihad yang dihasilkan para ulama. Memandang Idiologi itu PBB Sumut itu, Dr Masri Sitanggang menjelaskan tentang kekuatan Idiologisnya adalah.

“Saya kembali lagi ceritanya ini dari sejarah gerakan Islam secara menyeluruh, bahwa kalau kita lihat pertarungan idiologi Islam dengan bukan Islam, inikan pakai fil mudhari’ ini, kalau bahasa Alqurannya “wala tharda anka Yahudu walannashara....” (al-Baqarah: 120), jadi dari dulu itu, sekarang dan sampai yang akan datang. Jadi yang berbau Islam itu, tetap mau dihabisi, bisa itu dikerdilkan, bisa dipecah-belah dengan cara apapun. Bisa saja partai Islam menang tapi tidak diakui, seperti kasus di Al-Jazair dan Mesir. Jadi strateginya sebelum muncul sudah dikerdilkan sedemikian rupa, sudah jelas menang saja dikalahkan. Jadi menurut saya dan ini supaya ditulis dengan tegas, bahwa partai Islam itu harus kuat, sebagaimana diperintahkan Allah dalam surah al Anfal ayat 60 itu dalam bentuk kepartaian. “maka persiapkanlah oleh kamu kekuatan kamu, apa saja yang kamu miliki dari kuda-kuda yang bisa menggetarkan musuh kamu”. Maka itu dalam partai, kekuatan ekonomi harus dibangun, intelektualitas untuk berdebat segala macam argumentasi harus dibangun, kemudian laskar. Kenapa saya minta laskar? Karena belum tentu sudah

menang bisa nanti diganggu, itu persoalannya. Sudah jelas menang, kalau tidak ada laskar itu, maka sama juga, jadi ini pekerjaan berat”.²⁸¹

Adapun Bunyi QS al-Baqarah: 120 dan al-Anfal: 60 beserta arti selengkap lengkapnya sebagai berikut:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ
الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۗ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ
مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar)”. dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu”²⁸².

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرَبِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”²⁸³

Kekuatan ideologis partai lainnya, adalah terkait dengan hubungan Islam dan negara, yakni hubungan Pancasila dengan Islam, perdebatan di BPUPKI yang berhubungan dengan dasar negara Pancasila, terutama dengan dihapusnya tujuh (7) kata pada Sila pertama Pancasila sebagaimana yang terdapat dalam Piagam Jakarta, Dr Masri Sitanggang punya pandangan yang kritis.

²⁸¹ Dr Masri Sitanggang MP, Ketua DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2016, pukul 14.30 s-d 16.00 di kediaman beliau Jalan Pasar 8 Bandar Khalifah Percut Sei Tuan.

²⁸² QS. 2 : 120.

²⁸³ QS. 8 : 60.

"Pertama, kalau bicara Pancasila ini ada tulisan saya di waspada dan tolong dikutip di sana. Dan saya menyatakan Pancasila bukan dasar negara, ini pendapat pribadi. Tapi dalam konteks berpartai tetap saja kita menggunakan terminologi Pancasila. Saya mau cerita, ini penting?. Di mana kita dapat dalam konstitusi kita yang menyatakan dasar negara kita Pancasila, dalam konstitusi UUD 1945, di mana disebutkan dasar negara kita Pancasila?, tidak ada!. Nah sekali lagi di sinilah para tokoh Islam terbawa dengan pemikiran orang dan kita lupa itu, dan akhirnya kita dibenturkan dengan Pancasila. Padahal itu tidak ada, dan orang melihat Pancasila itu kan alinea ke 4, tapi kan tidak disebutkan di butir-butir itu landasan negara Pancasila, namun disebutkan negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dst dan seterusnya. Nah Pancasila itu lahir ketika 1 juni, ketika Bung Karno berpidato di akhir sidang BPUPKI, dia sebutlah dasar negara itu Pancasila, dan Pancasila yang disebut Bung Karno berbeda dengan yang di UUD 1945. Dan sebelum bung Karno Pidato tentang Pancasila itu sudah banyak juga tokoh bicara tentang Pancasila, seperti Mr. M Yamin, Hadikusno, terjadilah perdebatan apakah dasar negara ini berdasarkan Islam atau sekuler, akhirnya dalam perdebatan tersebut dibuatlah panitia 9 untuk merumuskan hal ini. Untuk merumuskan apa dasar Indonesia merdeka. Pertanyaan saya, kalau Pancasila diterima yang 1 Juni, yang dicetuskan Soekarno, lalu untuk apa lagi dibentuk panitia 9. Itu artinya karena tidak diterima ini, maka dibentuklah panitia 9, dirumuskanlah pembukaan UUD 1945, itulah yang disebut Piagam Jakarta, lalu tanggal 18 Agustus dikurangnya 7 kata "dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" itulah yang dikurangi. Pertanyaannya, apakah pembukaan UUD 1945 itu bukan Piagam Jakarta. Ya Piagam Jakarta, tapi dikurangi 7 kata. Jadi naskah Piagam Jakarta dengan minus 7 kata. Tapi sekarang kita bilang Piagam Jakarta kok takut, inilah keanehan yang saya katakan dalam diri umat Islam ini, karena tidak mau buka sejarah dan belajar sejarah dengan benar, lalu kenapa disebut itu Pancasila?. Nah kalau dibuka itu, sebenarnya bukan lima poin tapi empat. Nah, itu ditetapkan tgl 18, mestinya, yang dibacakan tanggal 17 Agustus itu, adalah pembukaan ini. Bukan teks proklamasi. Kalaupun alinea keempat itu disebut Pancasila. Maka kelahiran Pancasila bukan tanggal 1 juni tapi tanggal 18 Agustus, lalu kenapa sekarang tgl 1 juni? Lalu Pancasila yang mana itu? Nah ini banyak yang tidak paham, apalagi para ustadz kita. Jadi ahistoris-lah (tidak paham sejarah), itulah akibat buruknya orang bicara apa saja lalu dibenturkan dengan Pancasila, kita langsung ketakutan, karena kita tidak tahu, asal disebutkan Pancasila, kita takut, padahal 99 persen yang memerdekakan bangsa ini adalah umat Islam. coba lihat UUD 1945, ini perlu diketahui para ustadz agar tidak takut lagi berhadapan dengan Pancasila, mana kalimat yang menyebut dasar negara itu Pancasila? Carilah, maka tidak ada. Yang ada adalah negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, itu yang betul, nah siapa Tuhan yang Maha Esa? Nah, kalau dibuka kepembukaan maka jawabannya adalah

Allah Swt, jadi ngak ada itu Tuhan 3 5 6 dan 10 ada kalimat berkat rahmat Allah serta didorong keinginan luhur dan seterusnya. Jadi Tuhan yang Maha Esa yang dimaksud pasal 29 itu adalah Allah, maka saya katakan Sah Syariat Islam tegak disini, nah saya ingin jelaskan ini dengan ustadz-ustadz kita, agar diisi hal ini.”²⁸⁴

Dalam pandangan Bustami Manurung secara idiologis, maka dirinci partai di Indonesia pada pemilu pertama tahun 1955 hanya dibagi kepada dua macam yakni Partai Islam dan Partai Nasionalis yang tergabung di dalamnya kaum sekuler dan non Muslim.

“Pertarungan di Indonesia ini cuma dua. Partai Islam yang dimotori Masyumi dengan Partai Nasionalis yang di dalamnya ada kaum sekuler dn kristen. Dulu bergabung mereka-kan untuk kemerdekaan bangsa setelah ini perebutan kekuasaan, di samping memang ada gerakan media lektimasi politik secara globalkan. Memang media yang berhubungan dengan umat Islam karena kita tidak punya media Islam yang kuat. Jadi kalau dibilang tak adil secara ilmu media iya tapi secara filosofis perjuangan karena bukan media kita tidak kuat. Makanya kita bersyukur sama Muhammadiyah kita berharap juga-lah. Muhammadiyah punya rumah sakit punya segala macam-kan. Salah satu organisasi massa terbaik di asia. Sudah harus mengarah ke situ jadi kenapa Muhammadiyah karena sudah yakin ya.. mengarah kesitu”²⁸⁵

Kekuatan *historis*, di sini salah satu peluang terbesar PBB Sumatera Utara, karena secara historis PBB punya hubungan bathin dengan Masyumi yang pernah mencatat tinta emas sebagai kontestan pemenang pemilu pada masa orde lama tahun 1955, bahkan saat itu Masyumi mengungguli Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin Soekarno. Jika saat ini PNI menjelma menjadi PDIP yang selalu berada diurutan teratas pemilu, maka tentu jika PBB bisa menghidupkan atau memunculkan sejarah kemenangan Masyumi tersebut, maka PBB akan bisa meraih suara yang besar. Hanya saja berbangga-bangga atau terlena dengan kebesaran sejarah masa lalu, juga suatu kekeliruan yang harus perbaiki. Benang merah sejarah harusnya jangan hanya jadi kenangan tapi menjadi *ibrah*²⁸⁶ atau motivasi untuk membangkitkan batang terendam sejarah. Disinilah

284 Dr Masri Sitanggang MP, Ketua DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2016, pukul 14.30 s-d 16.00 di kediaman beliau Jalan Pasar Bandar Khalifah Percut Sei Tuan.

285 Bustami Manurung, Wakil Sekretaris DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu Tanggal 18 September 2016, pukul 16-17.30 di Caf  Yuki Plaza.

286 *Ibrah* artinya dijadikan sebagai pelajaran berharga untuk generasi sesudah peristiwa tersebut

letak dilematisnya, penamaan PBB menjadi nama partai, sehingga menimbulkan pro kontra, ada yang setuju ada yang tidak. Dalam konteks hubungan historis ini, Dr Masri Sitanggang punya pendapat sebagai berikut.

*“Ummat Islam punya sejarah besar bahkan 99 persen yang memerdekakan bangsa ini adalah ummat Islam, sehingga menjadi kewajaran diutamakan substansi ajaran Islam tersebut dijalankan, tidak hanya sekadar penamaanya saja. Kalau negara Islam itukan hanya penamaan, kalau sama saya ngak perlu, sekarang tidak perlu pakai negara Islam, kalau sudah berlaku syariat Islam, orang sendiri akan menyatakan Islam. Saya ini tak perlu saya sebut Ustadz Masri Sitanggang, tapi ketika saya sudah ngajar ngaji maka orang sendiri yang menyebut panggilan ”ustadz” kata orang, jadi biarlah orang yang bilang. Inikan soal yang tidak dipahami orang”.*²⁸⁷

Menyangkut idiologi PBB sebagai parpol di Negara Republik Indonesia, Bustami Manurung menambahkan pernyataan pimpinannya di PBB Sumut itu, merupakan komitmen yang tak bisa di tawar-tawar, bahkan diyakinkan orang nomor 2 di PBB Sumut itu partainya yang bernafaskan Islam telah dan terus akan melahirkan ulama-ulama

*“Idiologi PBB itu harga mati, dan kita bernaung di negara Pancasila yang mengayomi umat Islam itukan, dan itu harga mati bagi PBB serta partai kedepannya akan melahirkan tokoh-tokoh ulama-lah, cuma peran politik Islam kurang. Bagi PBB itu NKRI harga mati”.*²⁸⁸

Menurut peneliti, di sinilah perlunya pimpinan dan kader-kader PBB untuk kembali ke khittah awal perjuangan partai, sebagai partai Islam yang konsern dengan dakwah Islam dan membela kepentingan ummat Islam.

Kekuatan *sosiologis*, potensi dan peluang ini juga sangat urgen untuk digarap dan dimaksimalkan pemetaannya. Secara sosiologis ummat Islam menjadi ummat mayoritas di Indonesia, demikian juga di Sumatera Utara, jika di Indonesia ummat Islam ada 85%, maka di Sumatera Utara ummat Islam berjumlah 68%, tentu potensi itu

²⁸⁷ Dr Masri Sitanggang MP, Ketua DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2016, pukul 14.30 s-d 16.00 di kediaman beliau Jalan Pasar 8 Bandar Khalifah Percut Sei Tuan.

²⁸⁸ Bustami Manurung, Wakil Sekretaris DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu Tanggal 18 September 2016, pukul 16-17.30 di Cafè Yuki Plaza.

akan sangat *signifikan* jika diyakinkan konstituen pemilih tersebut. Hanya saja di Sumatera Utara ada daerah-daerah yang umat Islam minoritas, terutama di daerah eks Tapanuli Utara (Samosir, Toba Samosir, Humbang Hasundutan), demikian juga di daerah kepulauan Nias dan ditambah dengan daerah yang umat Islam juga agak minoritas dan *fifty-fifty* dengan non muslim, seperti Karo, Pak Pak Bharat, Dairi, Siantar, Simalungun, Sibolga dan Tapanuli Tengah. Sehingga, di daerah ini peluang PBB agak kecil untuk mendapatkan kursi, akan tetapi khusus daerah Sibolga dan TapTeng, PBB selalu punya prestasi untuk menempatkan kadernya menduduki kursi DPRD yakni 1 kursi. Dari hasil penelitian yang dilakukan, perolehan kursi di Sibolga dan Tapteng itu, tidak lepas dari konsolidasi dan figuritas caleg yang ditampilkan merupakan sosok yang dikenal luas masyarakat, kemudian dana yang mencukupi.

Sementara kekuatan sosiologis lainnya, PBB Sumatera Utara, tidak berafiliasi dengan ormas tertentu, untuk masa yang akan datang, sehingga untuk menampung aspirasi umat Islam tidak terkotak pada ormas tertentu dan diharapkan menjadi peluangnya besar untuk mendulang suara umat Islam yang tidak yang tidak menjadi anggota ormas. Berikut ketegasan yang dikatakan Aidan Azwir Panggabean (wakil Ketua PBB Sumatera Utara periode 2009-2014 dan saat ini dipercaya sebagai ketua Majelis Pertimbangan PBB Sumut).

*“Ada peluang besar untuk merebut suara umat Islam. Ummat Islam itu umumnya tidak masuk di Ormas Islam tertentu, bahkan lebih banyak yang tidak ikut ormas Islam, hanya bersifat simpatsan. Jika PKB diidentikkan dengan NU, PAN diidentikkan dengan Muhammadiyah, lalu PKS dengan basis gerakan Tarbiyahnya, maka PBB lebih leluasa dan bersifat independen dengan berbagai ormas Islam dan berpeluang merebut suara umat Islam tersebut”.*²⁸⁹

Kekuatan *Organisatoris*, dalam konteks ini PBB sebagai partai yang selalu ikut pemilu semenjak orde reformasi, punya sturktur yang lengkap hingga ke tingkat ranting, bahkan anak ranting. Hal ini tentu menjadi potensi besar untuk digerakkan sebagai mesin partai dalam merebut suara umat Islam dalam setiap pemilu.

²⁸⁹ Aidan A Panggabean, Wakil Ketua DPW PBB Sumut periode 2010-2015 dan Ketua MPW PBB Sumut periode 2015-2020, wawancara diadakan tanggal 12 Desember 2016 di kompleks UIN Sumut jl Sutomo jam 16.00- 17.00

Menyinggung potensi besar PBB pada pemilu dengan sikap *independensinya*, ada sisi miris yang di kuak, di antaranya pada Pemilu tahun 2014 lalu, PBB pernah dirugikan, di mana kepesertaan PBB awalnya tidak lolos, karena dianggap tidak memenuhi ketentuan KPU tentang wajib ada di semua provinsi, 75% di tingkat Kabupaten/Kota dan 50 % ditingkat kecamatan, hingga PBB melakukan gugatan hukum, yang akhirnya dikabulkan sebagai peserta pemilu. Kondisi itu dipandang Dr Masri Sitanggang membuat PBB terutama di Sumatera Utara agak terlambat melakukan konsolidasi dan sosialisasi kepesertaan pemilu.

*“Ini sangat merugikan PBB karena dianggap bukan peserta pemilu, lalu disaat-saat terakhir setelah gugatan di pengadilan dimenangkan PBB, barulah diikutkan sebagai kontestan pemilu. PBB dirugikan secara moril dan materil, dirugikan secara sosiologi dan psikologis. Alasan inilah yang menyebabkan PBB kurang maksimal meraih suara, itupun untuk Sumatera Utara PBB bisa meraih 20 kursi di daerah tingkat dua (Kabupaten/Kota), akan tetap untuk tingkat Sumatera Utara, gagal mendapatkan kursi”.*²⁹⁰

Beda halnya, Bustami Manurung yang meyakini kekuatan organisatoris itu, akan menjadi peluang bagi PBB untuk mendulang suara, sehingga ke depan memiliki keterwakilan di parlemen pusat. Bahkan untuk menggapai harapannya itu, KAPU lah yang menjadi wadahnya di PBB dalam menampung umat Islam yang tergabung di organisasi-organisasi Ke-Islaman.

*“Insya Allah dari kerja yang dilakukan KAPU. Pertama kita sudah berkerja hampir setahun setengah membantu dan membuat infrastruktur partai. Terlepas undang-undang nanti yang belum diputuskan. Kita berkeyakinan dan kembali pula pak Yusril yang pernah membuat berada di parlemen pusat kembali kita daulat menjadi ketua umum. Kita bahkan punya target anggota DPR provinsi itu sudah kita tetapkan itu, dapil-dapilnya sudah dihitung bahkan untuk DPRD tingkat 2 di luar daerah minoritas ada DPR-nya sekarang ada 13 kabupaten kota kita mintak naik 100%. Yang harus ada satu kursi yang daerah minoritas harus daftar tunggu. Obsesi kesana udah kita ukur dan rapatkan dengan membangun infrastruktur partai. Untuk tingkat 2 Kabupaten/Kota sekarang ada 20 kursi tersebar di beberapa kabupaten kota”.*²⁹¹

²⁹⁰ Dr Masri Sitanggang MP, Ketua DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2016, pukul 14.30 s-d 16.00 di kediaman beliau Jalan Pasar 8 Bandar Khalifah Percut Sei Tuan.

²⁹¹ Bustami Manurung, Wakil Sekretaris DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu Tanggal 18 September 2016, pukul 16-17.30 di Cafè Yuki Plaza.

Tak hanya itu, dalam menggapai kesuksesan pemilu 2019 mendatang, Bustami Manurung punya optimisme yang tinggi di luar kekuatan organisatoris, dan kekuatan itu telah dibahas serius serta disosialisasikan kepada kader-kader PBB mulai tingkat DPC hingga ketingkat ranting, juga telah menjadi komitmen seluruh pengurus PBB di Sumut diberbagai tingkatan. Berikut pernyataan Bustami dalam meraih suksesi pemilu 2019 di luar organisatoris.

“Pertama adalah finansial, membangun partai tidak terlepas dari finansial. Kedua karena belum dikeluarkan undang-undang syarat parpol peserta pemilu yang masih gonjang-ganjing. Kalau sempat ada batasan lebih ketat dari 3,5% suara Nasional, harus 100% ditingkat DPC hingga ke ranting. Bagaimana PBB bermain di daerah tingkat dua yang muslim minoritas. Tapi kita punya semangat mencapai target yang ditetapkan DPW Sumut. Kita sudah memutuskan di KAPU dan DPW dalam rangka pemilihan di Labuhan Batu kemarin. Kita tidak segan DPW dan DPC tidak menjadi Caleg kalau ada orang yang kita anggap lebih berkompeten dalam berbagai hal. Hitungan kita misalnya menjadi calon yang prospektif dan produktif didudukkan menjadi caleg. Bahkan DPD sudah mengatakan dalam rapat harian kerja kalau ada yang pengurus tidak mesti jadi caleg.”²⁹²

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Aidan Nazwir Panggabean selaku wakil ketua bidang organisasi DPW PBB Sumut, terkait dengan prospek atau peluang PBB Sumatera Utara di masa yang akan datang akan dijadikan rumah bagi umat Islam, lebih menekankan kalau partai yang salah satu pelopornya Yusril Ihza Mahendra itu, tidak diidentikan dengan ormas Islam tertentu.

“Saya kira kalau PBB ini kaitannya justru menarik dalam kaitan itu, karena begini dia segmentasinya justru tidak terpecah dan ada dimana-mana, inilah uniknya PBB. Warga Muhammadiyah merasa itu adalah bagiannya, NU juga begitu. Jadi dia ngak seperti PAN jelas warnanya Muhammadiyah. Dan kalau PBB di sini perannya bisa jadi rumah bagi seluruh elemen bagi ummat Islam, itu salah satu keuntungan PBB cuman memang kita akui pada masa yang lalu kita masih seperti melempem dan seperti kurang bergiat sehingga terlena.”

Namun, persoalan sikap optimisme Aidan Nazwir serta Bustami Manurung tersebut mendapat penilaian berbeda dari Dr Masri Sitanggang, bahkan disinggung hal tersebut hanya sebagai hiburan. Disebabkan pada tataran aplikasi serta strategi komunikasi

²⁹² Bustami Manurung, Wakil Sekretaris DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu Tanggal 18 September 2016, pukul 16-17.30 di Caf e Yuki Plaza.

kurang dijalankan dengan optimal oleh fungsionaris PBB diberbagai tingkatan.

*“Kepengurusan yang diamanahkan dalam bekerja dan membangun komunikasi politik, jangan disamakan dengan partai-partai lain, di mana partai baru siap jika dekat dengan pemilu, cukup dengan bagi sembako dan kaos. Partai itu bekerja tidak hanya perminggu, tapi setiap hari bahkan setiap jamnya”.*²⁹³

Lebih jauh dari itu, ada yang menarik dari Dr Masri Sitanggang terhadap kekhawatiran PBB meraih kursi di Parlemen pusat, bahkan menurutnya komunikasi politik yang diklasifikasikan menjadi dua kategori yakni kedalam dan keluar kurang maksimal dilakukan PBB dalam menyongsong cita-cita partai Islam itu untuk mendulang suara pada pemilu 2019 ke depan.

“Komunikasi politik itu ada internal (ke dalam) dan ada eksternal (keluar). Sebenarnya kalau komunikasi politik ini, kalau hemat saya di PBB masih kurang dan PBB harus belajar banyak, karena memang yang masuk partai politik ini, sekian lama dia digodok rezim Seharjo, kira-kira begitu, pola pikir dan sikapnya itu dalam melihat PBB sama dia dengan melihat partai lain, jadi perilaku dia dengan partai lain tidak ada bedanya, bisa jadi kutu loncat, nah itu yang salah kenapa? Karena ia tidak memahami tentang gerakan Islam, jadi itu yang jadi persoalan. Maka ketika itu terjadi, maka ia berkomunikasi pun sama masyarakat nuansa dakwahnya itu tidak nampak, jadi kita lihat masih ada juga orang kita berpikir, ah nantilah, nanti dekat pemilu kita siapkan saja uang, jadi gitu. Padahal kita tidak, saya tadi sudah katakan, ada contoh paling sederhana misalnya kalau kita lihat bagaimana kekuatan ideologi, kenapa ada orang sampai mau mengikat bom dipinggangnya, lalu mau meledakkan dengan dirinya, apa karena uang, tidak, apa mau jabatan, tidak. Apa mau kaya, tidak. Itu karena kekuatan ideologi, dan itu Islam punya potensi besar untuk membuat orang begitu. Karena orang Islam kalau sampai kepada aqidah yang betul, maka ia rindu mati syahid, Cuma inikan tidak pernah kita ekspoler dalam rangka membangun partai, itu yang jadi soal, sehingga ia berpikirnya, apa yang dilakukan orang bagi-bagi beras, dia berpikir begitu. Mak pasti kalah, ada pragmatis, nah inilah jadi persoalan dalam komunikasi politik ke luar, jadi di sini PBB agak gagal, jadi mestinya, apapun latar belakang pendidikan teman-teman di PBB, harus mampu dia disebut sebagai ustadz, harusnya begitu. Jadi kalau kita lihat Masyumi

293 Aidan A Panggabean, Wakil Ketua DPW PBB Sumut periode 2010-2015 dan Ketua MPW PBB Sumut periode 2015-2020, wawancara diadakan tanggal 12 Desember 2016 di kompleks UIN Sumut jl Sutomo jam 16.00- 17.00

*dulu, pendidikan apapun harus tau dakwah, harus tau Islam. misalnya Anwar Haryono, dia itu pendidikannya SH, S2 Hukum dan Doktor bidang Hukum, tapi orang mengakuinya. Kalau beliau bicara tentang Islam maka sangat dikuasainya*²⁹⁴

2. Tantangan DPW Partai Bulan Bintang Sumatera Utara

Tantangan yang dialami DPW PBB periode 2009-2014 di bawah kepemimpinan Masri Sitanggang dengan Awaluddin Sibarani, bisa bersifat *Internal* dan *eksternal* atau dari dalam dan luar partai. Secara umum tantangan itu meliputi: *Pertama*, profesionalisme penyelenggara pemilu. *Kedua*, Finansial. *Ketiga*, Undang-Undang pemilu tentang ambang Batas. *Keempat*, Penyakit akut masyarakat tentang *money politic*. *Kelima*, Sumber daya manusia kader dan pimpinan. *Kelima*, militansi dan semangat jihad. *Keenam*, keteladanan dan akhlaqul karimah. *Ketujuh*, membangun trust masyarakat. Berikut penjabaran ke tujuh tantangan tersebut:

a. Profesionalisme Penyelenggara Pemilu

Terkait *profesionalisme* KPU sebagai penyelenggara Pemilu, Dr Masri Sitanggang menyoroti dengan tajam sikap dan netralitas KPU, bahkan KPU terbukti curang, hal itu dibuktikan dengan tidak tuntasnya masalah DPT atau daftar Pemilih tetap, hingga berujung gugatan. Demikian juga banyaknya penyelenggara pemilu yang disidangkan DKPP yang kemudian direkomendasikan dipecat atau sangsi penjara. Ini menjadi bukti kalau pemilu yang dijalankan KPU tidak berjalan netral atau tidak lepas dari berbagai kepentingan partai-partai besar. Netralitas itu, sebagaimana diungkap Shohibul Anshar Siregar sebagai pakar sosiologi politik terkemuka di Sumatera Utara.

“Pemilu yang dianggap paling jujur hanyaah pemilu tahun 1955 di masa orde lama sebagai pemilu pertama di Indonesia dan pemilu tahun 1999, pasca reformmasi, sedangkan yang lainnya, justru banyak yang di “rampok” atau dicurangi KPU, kenapa hal itu terjadi? Kata Shohibul Anshar Siregar, hal itu karena pemilu diselenggarakan oleh partai-partai politik, artinya sebagai KPUnya diminta

²⁹⁴ Dr Masri Sitanggang MP, Ketua DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2016, pukul 14.30 s-d 16.00 di kediaman beliau Jalan Pasar 8 Bandar Khalifah Percut Sei Tuan.

*langsung utusan masing-masing partai, sehingga mereka saling mengawasi di dalamnya”.*²⁹⁵

Terkait dengan hal tersebut PBB secara Nasional dan juga di Sumatera Utara selalu mendorong dan merekomendasikan agar penyelenggara pemilu dikembalikan saja ke masing-masing partai politik penyelenggara pemilu. Dalam konteks semrawutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT). Menjelang pemilu 2014, berbagai kalangan masih meragukan apakah pemilu 2014 bisa berlangsung dengan jujur dan adil, ajang pemilihan lima tahunan ini sangat penting dalam menentukan nasib bangsa dan negara kedepannya, pemilu adalah sarana bagi setiap warga negara untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara yang di jamin dalam konstitusi, hak untuk memilih dan di pilih dalam pemilu merupakan cerminan bahwa negara itu menganut paham demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang di jamin dalam konstitusi, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Namun persiapan pemilu 2014 masih menimbulkan berbagai macam polemik, pasalnya penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU masih menyisakan beberapa hal yang belum dapat terselesaikan dengan baik, salah satu hal yang mendasar yaitu penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), meskipun KPU telah menetapkan jumlah DPT di pemilu 2014 nanti yaitu 186.612.255 jumlah pemilih, dengan rincian pemilih luar negeri 2.010.280 orang, pemilih laki-laki 93.439.610 orang, pemilih perempuan 93. 172. 645 orang, tetapi masih ditemukan 10,4 Juta data pemilih yang di duga fiktif karena tidak memiliki nomor induk kependudukan.

Dalam rapat pleno penetapan DPT KPU berjanji akan melengkapi 10,4 juta data pemilih yang tidak lengkap elemen datanya tersebut dalam waktu 30 hari setelah di tetapkannya. Ada tiga hal terkait penetapan DPT yang membuat banyak pihak menilai KPU melanggar undang-undang . Salah satunya, karena KPU menetapkan DPT yang di dalamnya terdapat 10,4 juta data

²⁹⁵ *Sohibul Anshor Siregar MSI, Pengamat Sosiologi Politik Sumut, Wawancara diadakan tanggal 23 Oktober 2016, pukul 14.30-15.00 WIB, di ruang staf ahli bidang politik Fisip UMSU.*

pemilih yang elemen datanya tidak lengkap, tindakan KPU itu melanggar pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pemilu Legislatif. dalam Undang-undang tersebut daftar pemilih harus dilengkapi setidaknya lima elemen data, yaitu nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin dan nomor induk kependudukan. Namun pada faktanya, masih ada data pemilih yang tidak dilengkapi NIK, jika memang KPU berkeyakinan 10,4 juta pemilih tersebut ada di lapangan, seharusnya KPU menunggu hingga datanya dilengkapi dengan NIK. Setelah semua elemen data terlengkapi, barulah KPU bisa menetapkan DPT tersebut.

Selain itu, penetapan DPT tersebut juga tidak memiliki dasar hukum. Pasalnya Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu Legislatif 2014 memuat, penetapan DPT dijadwalkan 23 Oktober 2013. Penetapan DPT tidak memiliki dasar hukum. Kalau penetapan dilakukan 4 November, harus ada peraturan pengganti atas PKPU 19. Faktanya belum ada publikasi pengganti PKPU. Jangan sampai KPU belum pernah mengeluarkan PKPU penggantinya. Ini tentunya menjadi kritik yang mendasar bagi KPU agar dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu harus selalu berdasarkan pada aturan hukum yang telah ditetapkan.

Begitu juga polemik mengenai Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2013 (PKPU 15) tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD juga menimbulkan pro kontra. Di dalam PKPU 15 secara khusus diatur tentang alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye adalah “semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan mengajak orang memilih Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu” (pasal 20 PKPU No.1/2013). Di dalam pasal 17 ayat (1) PKPU 15/2013 ini kampanye Pemilu dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum tidak bisa sembarangan lagi. Dalam pasal ini dikatakan “alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan

bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan” (pasal 17 ayat 1a). Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye luar ruang dengan 5 ketentuan (pasal 17 ayat 1b). Pertama, baliho atau papan reklame (*billboard*) hanya diperuntukan bagi Parpol 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya memuat informasi nomor dan tanda gambar Parpol dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD. Kedua, calon anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (*billboard*) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya. Ketiga, bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh Parpol dan calon Anggota DPD pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah. Keempat, spanduk dapat dipasang oleh Parpol dan calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota bersama Pemerintah Daerah. KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/ Kelurahan, dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu.

Peraturan KPU Nomor 15/2013 menurut penulis sangatlah terlambat untuk dikeluarkan karena kebanyakan caleg sudah terlanjur memesan, mencetak, dan memasang alat peraga kampanye di mana-mana, ini tentunya dapat menimbulkan kerugian baik kepada calegnya maupun pengusaha reklame dan percetakan, kemudian PKPU 15/2013 ini terkesan menonjolkan partai politiknya dibandingkan calegnya, padahal kita ketahui bersama bahwa kebanyakan pemilih sekarang percaya kepada calegnya bukan kepada partainya, peraturan ini dianggap bertujuan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Kemungkinan besar PKPU 15/2013 ini akan mengundang banyak caleg yang melakukan uji materil ke Mahkamah Agung.

Banyaknya masalah yang bermunculan menjelang pemilu 9 april 2014 nanti membuat banyak kalangan pesimis terhadap KPU, kini muncul kekhawatiran, apakah KPU nanti bisa melaksanakan Pemilu 2014 dengan jujur, adil, dan bermartabat? Kekhawatiran tersebut dianggap sebagian pengamat sangat wajar mengingat betapa sulitnya mewujudkan demokrasi yang ideal pada bangsa ini, melihat kondisi bangsa yang begitu *plural*, dalam pemilukada saja memunculkan berbagai macam masalah, kerusuhan, pembakaran, dan bahkan saling membunuh banyak kita jumpai dalam polemik pemilukada di berbagai daerah akhir-akhir ini, persoalannya juga hampir sama, KPU dan Panwaslu daerah dianggap tidak netral atau tidak tegas dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu yang independen.

Menurut penulis ada hal yang paling mendasar dan sangat penting yang perlu kita renungi bersama, ketika nantinya KPU gagal melaksanakan pemilu 2014, ini akan menimbulkan kerusuhan diberbagai daerah sehingga negara dalam keadaan darurat, sementara Jabatan Presiden dan Wakil Presiden berakhir, maka terjadi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden, kejadian ini sama sekali belum di atur dalam konstitusi, yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 8 ayat 2 yaitu tentang kekosongan wakil presiden, begitupun dengan pasal 8 ayat 3 UUD 1945 hanya mengatur kekosongan jabatan jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan, maka yang dapat melaksanakan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama, namun ketika Presiden dan Wakil Presiden mengalami kekosongan jabatan karena masa jabatannya berakhir otomatis masa kerja Kementerian-Kementerian juga di anggap telah berakhir karena yang mengangkatnya adalah Presiden yang jabatannya juga telah berakhir. Ini sama sekali belum diatur dalam konstitusi. Jangan sampai kekosongan hukum tersebut mengakibatkan pemerintahan di ambil alih oleh militer dalam hal ini TNI POLRI, sama seperti kejadian di Mesir saat ini. Kondisi tersebut bisa saja nantinya mengancam NKRI akibat kerusuhan yang terus terjadi daerah-daerah.

Sehingga menurut penulis dalam hal ini Presiden SBY bisa saja mengeluarkan dekrit, untuk memperpanjang masa jabatannya sampai dapat di laksanakan Pemilu Ulang dan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Hal ini sama yang dilakukan Presiden Soekarno pada tahun 1959 yang mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang kembali memberlakukan UUD 1945. Tentunya kita berharap kejadian yang tersebut di atas tidaklah terjadi, sehingga ini dapat memicu semangat para pihak untuk mewujudkan proses Pemilu 2014 yang jujur, adil, bebas, dan rahasia, sertadapat menciptakan pemilu yang demokratis dan bermartabat demi tercapainya keadilan hukum dan kesejahteraan masyarakat selengkapnya²⁹⁶

Khusus mengenai Pemilu, Bustami Manurung punya segudang harapan agar penyelenggara pemilu mulai dari tingkat PPS hingga KPU Kabupaten. Kota maupun KPU Provinsi Sumut agar lebih profesional dalam menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan tersebut, hingga memperkecil peluang gugatan.

*“Kedepan kita harapkan kepada KPU dan sejenisnya, dari pusat sampai ke bawah. Kita tidak bisa mengatakan secara A B atau C secara data tapi faktual di lapangan banyak yang menentukan jadi itu adalah kawan di lapangan terutama tingkat PPK dan PPS. Contoh kasus terjadinya penundaan perhitungan suara, padahal dalam undang-undang KPU harus habis perhitungan jam sekian. Tidak sedikit gugatan tapi proses pengaduan DKPP payah, harus bawak barang bukti orang, dan itu juga butuh biaya besar. Begitujuga kesemrawutan DPT dan penyelenggaraan pemilu juga disinyalir oleh Pengurus DPW PBB Sumut sebagai celah dan semacam by design untuk kepentingan tertentu, terutama partai-partai besar yang memang sudah berspakat untuk menentukan ambang batas minimal suara yang harus diraih partai”.*²⁹⁷

Lebih jauh dari itu, dalam persoalan DPT Dr Masri Sitanggang lebih luas membuka tabir, kalau dibalik DPT itu ada skenario yang diarahkan untuk mengkerdikan partai Islam, indikator tersebut tertangkap dari validitas DPT yang meragukan,

296 WWW. Kompasiana 22 November 2013 11: 01: 03 diperbaharui 24 juni 2015 jam 04:49:22

297 Bustami Manurung, Wakil Sekretaris DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu Tanggal 18 September 2016, pukul 16-17.30 di Caf  Yuki Plaza.

di antaranya jumlah yang tidak realistis serta muaranya untuk mendukung partai-partai tertentu.

”Saya menduga-duga, tapi mudah-mudahan ini belum valid, tapi apa, menurut saya kecurangan pemilu, dari mulai Daftar Pemilih Tetap (DPT), dari mulai katakanlah jumlah penduduk yang memilih di Jakarta berapa dan sebagainya, nah masalah inikan perdebatan, apakah jumlah itu riil? Saya katakan ngak, jadi artinya ada partai tanpa pemilu sudah dapat sekian kursi, jadi tidak ikut pemilu-pun dia sudah dapat sekian kursi. Itulah jatah-jatah partai besar, makanya saya bilang kalau baginya tetap pelaksanaan pemilunya, maka partai Islam tidak akan bisa maju.”²⁹⁸

b. Tantangan Finansial dan Penyelamatan Masa Depan Partai

Dana atau pembiayaan adalah hal yang sangat penting dalam setiap kegiatan apapun. Apalagi dalam aktivitas kepartaian atau politik, yang saat ini sangat *hedonistis* dan *pragmatis*. Maka PBB Sumatera Utara mengalami kendala besar dalam pembiayaan partai tersebut.

Dalam wawancara dengan Aidan Nazwir Panggabean, peneliti tangkap, sebenarnya kendala pendanaan ini awalnya ada solusinya, yakni dengan adanya kebijakan pemerintah yang mengalokasikan dana khusus dari APBN dan APBD untuk dana pembinaan partai, di mana masing-masing partai mendapat suntikan dana yang cukup besar disesuaikan dengan jumlah kursi yang diraih di parlemen, pembiayaan itu juga bersifat hirarki dari APBN untuk DPP Partai, dan dari APBD untuk DPW dan DPC masing-masing partai ditingkat provinsi atau kabupaten, akan tetapi pendanaan tersebut belakangan dihapuskan, karena dianggap membebani keuangan negara dan partai diminta lebih mandiri dalam pembiayaan partainya. Sehingga PBB yang umumnya kepengurusan mengalami keterbatasan dana, mengalami kesulitan dalam pembiayaan partai, terutama dalam konsolidasi dan sosialisasi keberbagai media. Adapun keuangan partai PBB Sumut, umumnya bersumber dari partisipasi pengurus dan sumbangan anggota, di samping adanya sumbangan-sumbangan

²⁹⁸ Dr Masri Sitanggang MP, Ketua DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2016, pukul 14.30 s.d 16.00 di kediaman beliau Jalan Pasar 8 Bandar Khalifah Percut Sei Tuan.

yang sifatnya tidak mengikat. Sumbangan terbesar diperoleh melalui kewajiban anggota legislatif terpilih sesuai dengan aturan yang berlaku di PBB. Dari hasil penelitian ini, dapatlah dideskripsikan PBB Sumatera Utara mengalami keterbatasan *finansial* atau pendanaan, sehingga ini menjadi salah satu penyebab sulitnya partai melakukan konsolidasi dan sosialisasi. Adapun aturan sumbangan legislatif tersebut peneliti temukan didokumen sebagai berikut:

- 1) Penerimaan/Pendapatan, antara lain terdiri atas:
 - a) Uang pangkal bagi anggota partai Rp. 10.000
 - b) Iuran tetap setiap bulan bagi Anggota dan pengurus partai:
 - Dewan Pimpinan Pusat; Pengurus Harian Rp. 50.000,- dan non pengurus Harian Rp. 10.000,-
 - Dewan Pimpinan Wilayah; Pengurus Harian Rp. 25.000,- dan Non PH Rp. 10.000,-
 - Dewan Pimpinan Cabang; Pengurus Harian Rp. 15.000,- dan Non PH Rp. 5.000,-
 - DPAC/DPRt/DPART; Rp. 2.500,-
 - Anggota; Rp. 1.000,-
- 2) Infaq setiap bulan bagi anggota dan pengurus yang duduk pada jabatan/posisi legislatif, Eksekutif, Yudikatif, BUMN/BUMD, Staf/Tenaga Ahli, Staf Khusus, Asisten, dan sejenisnya pada Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, serta BUMN/BUMD yang posisi jabatannya Harian Rp. 15.000,- dan Non PH Rp. 5.000, DPAC/DPRt/DPART; Rp. 2.500. Anggota; Rp. 1.000,-
- 3) Infaq setiap bulan bagi anggota dan pengurus yang duduk pada jabatan/posisi legislatif, Eksekutif, Yudikatif, BUMN/BUMD, Staf/Tenaga Ahli, Staf Khusus, Asisten, dan sejenisnya pada Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, serta BUMN/BUMD yang posisi jabatannya atas nama Partai atau atas usulan/rekomendasi Partai, adalah:

- a) Anggota DPR RI : 20% dari Take Home Pay
- b) Anggota DPRD Provinsi : 15% dari Take Home Pay
- c) Anggota DPRD Kab/Kota : 15% dari Take Home Pay
- d) Eks/Yud/BUMN/BUMD : 25% dari Take Home Pay
- e) Pajabat Lainnya : 5% dari Take Home Pay²⁹⁹

Adapun tantangan lainnya yang sifatnya dari internal, dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, bisa juga datang dari pengurus atau pimpinan partai yang diberikan amanah untuk memimpin partai, misalnya pemahaman tentang garis-garis perjuangan partai, militansi, loyalitas dan integritas pengurus. Sebagaimana diungkap Dr. Masri Sitanggang sebagai berikut.

“Saya mau cerita dulu masa saya, kalau 3 kursi itu di awal-awal, bahkan masuk PBB enam besar, saat itu ikatan emosional masih kuat, masih banyak orang-orang kredibel masuk partai, ketika ibarat membuka tanggul airnya banyak, kita buka maka, masuklah ada lipan, kecoa dan lain-lain, lalu PBB melorot, Medan ngak ada kursi, nah waktu saya menerima amanah sebagai ketua PBB Sumatera Utara itu, barangkali hanya 10 kursi DPRD Kab Kota, tapi ketika kita pegang jadi 23 kursi DPRD Kab/Kota, jadi ada peningkatan, untuk tingkat dua, dan medan dapat lagi 1 kursi, alhamdulillah, sudah mulai bangkit, saya tidak tau periode sekarang ini, kinerja harus berubah lebih baik, jika tidak maka saya mengkhawatirkan, PBB bisa jatuh lagi, dan saya sempat punya harapan, kalau masalah dampak dari masalah Ahok tentang Al-Maidah 51, ini bisa bangkit lagi, kalau pandai memenejanya, nah inilah yang peting bagaimana cara menyukuri, kan kata Allah kalau bersyukur ditambah nikmat, jadi ditambah kursi. Nah saya belum lihat bagaimana periode sesudah saya menyukurinya seperti apa.”³⁰⁰

299 Hasil Muktamar III PBB di Medan, hal. 134-135

300 Dr Masri Sitanggang MP, Ketua DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2016, pukul 14.30 s-d 16.00 di kediaman beliau Jalan Pasar 8 Bandar Khalifah Percut Sei Tuan.

Adapun Surah al Maidah: 51 yang dimaksud *Informan* dan belakangan sangat ramai di media masa terutama media sosial sebagai bentuk penistaan agama yang dilakukan gubernur DKI Jakarta *non aktif* yang kebetulan non muslim itu, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”³⁰¹

Dari studi dokumentasi yang peneliti lakukan, ditemukan hasil keputusan partai yang berisi langkah-langkah untuk masa depan Partai Bulan Bintang dalam menghadapi pemilu yang akan datang tahun 2019, sekaligus melakukan kajian mendalam melalui *survey* yang dilakukan lembaga *independen* dari Universitas Indonesia, terkait kegagalan PBB dalam dua kali pemilu teakhir untuk mendudukkan kader-kadernya sebagai *legislator* di Senayan, walau untuk tingkat provinsi dan kabupaten/Kota PBB tetap berhak menempatkan wakilnya duduk di sana, jika memenuhi quota suara yang ditentukan sesuai dengan bilangan pembagi pemilih dan jumlah suara sah dalam pemilu tersebut. Adapun isi dokumentasi tersebut sebagai berikut; Langkah-langkah untuk masa depan PBB.

1) Latar Belakang

Pada Pemilu 2009 perolehan suara PBB sangat menurun dan tidak bisa melampaui ambang batas (PT) 2,5%, sehingga tidak dapat menematkan wakil-wakilnya di DPR RI, sehubungan dengan itu DPP PBB melalui Lembaga Survey Independen dari Universitas Indonesia (UI) telah melakukan survey untuk mengetahui sebab-sebabnya, dengan hasil: *pertama*,

301 QS. 5 : 51

Figur Caleg tidak dikenal atau tidak populer. *Kedua*, pengurus partai kurang dikenal dan tidak dekat dengan masyarakat. *Ketiga*, program dan isu tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. *Keempat*, citra pimpinan dan pengurus jarang diliput oleh media massa. *Kelima*, kinerja anggota legislatif dan kepala daerah yang berasal dari PBB tidak aspiratif dan kurang terpublikasi.

Di samping kelima faktor tadi, hasil survey juga menunjukkan bahwa :

- 53,4% Merekomendasikan agar PBB bergabung (47,8% dengan partai politik yang sealiran dan 5,7% dengan partai politik tidak sealiran);
- 34,8% merekomendasikan agar PBB dipertahankan (27,4% tetap dengan nama PBB dan 7,4% mengganti nama);
- 8,7% responden merekomendasikan PBB dibubarkan;
- Tidak satupun responden yang memilih PBB pada pemilu 2009 yang menghendaki PBB dibubarkan.

2) Langkah-Langkah Menuju Pemilu 2014

Dari gambaran hasil survey yang dilakukan Lembaga Survey Independen UI tersebut di atas, dua langkah yang dapat diambil oleh pimpinan partai sehubungan dengan pemilu tahun 2014 yaitu:

- DPP PBB periode 2010-2015 segera melakukan peninjauan kemungkinan penggabungan partai.
- Di samping melakukan peninjauan sebagaimana pada poin 1 di atas, dalam rangka PBB menjadi peserta pemilu 2014, maka DPP PBB periode 2010-2015 segera melakukan agenda sebagai berikut:
 - › Tahun 2010 harus selesai masalah konsolidasi partai;
 - › Tahun 2011 adalah tahun pencitraan;

- › Tahun 2013 adalah tahun ekspansi untuk mengukur seberapa populernya PBB;
- › Tahun 2014 adalah tahun maintenance peluang dan kesempatan yang harus dipertahankan.

Dalam rangka pemantapan agenda ini diharuskan untuk melakukan survey tahunan dengan melibatkan lembaga survey independen. DPP PBB eriode 2010-2015 harus memperjuangkan kepesertaan Partai Bulan Bintang pada Pemilihan Umum 2014.

3) Khatimah

Demikianlah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang periode 2010-2015 dalam rangka menata kembali kelemahan-kelemahan yang ada selama ini. Langkah-langkah dimaksud dilakukan secara simultan dengan memperhatikan kondisi dan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang politik khususnya undang-undang tentang pemilihan umum. Akhirnya hanya kepada Allah kita berserah diri dan semoga Allah memudahkan upaya kita untuk mewujudkan semua yang menjadi keinginan ummat, kader, dan seluruh fungsionaris partai sesuai tingkatan masing-masing. Billahi at Taufiq wa al Hidayah. Ditetapkan di: Medan Pada Tanggal: 10 Jumadil Ula 1431 H/ 25 April 2010 M.

Dan isi langkah-langkah masa depan Partai PBB tersebut semua ditanda tangani Pimpinan Muktamar III yang berlangsung di Medan, pada 10 Jumadil Ula 1431 H/25 April 2010 M. masing-masing ; Yasin Ardhy, SH (ketua), H Abdul Haq SH (sekretaris) dengan anggota: Drs Dwianto Ananias. Ir.H. Eddy Wahyudin, MBA. Drs. H. Suwito Suprayogi, Lc. Dr. Ir. H. Masri Sitanggang, MP. Drs H. Sudarno Hadi, M.Pd. Sugianto, SH, MH. Adolf Gim Perangin³⁰²

Langkah-langkah penyelamatan dan penentuan masa depan Partai Bulan Bintang melalui Muktamar di Medan ini, menjadi pijakan bagi pengurus PBB Sumatera Utara untuk bekerja lebih sungguh-

³⁰² DPP PBB, *Buku dokumentasi/Tanfidz Hasil Muktamar III Partai Bulan Bintang*, (Jakarta: 2010), h. 124-127

sejauh dan serius sehingga PBB bisa lolos ambang batas (PT) pada pemilu yang akan datang. Di samping langkah-langkah tersebut, peneliti juga menemukan sejumlah rekomendasi Partai agar untuk dijalankan dalam semua struktur partai terutama untuk DPW dan DPC hingga ke PAC dan Ranting.

Berdasarkan tanfidz dari dokumen kepartaian yang ada, maka peneliti menemukan Sejumlah Rekomendasi dalam Mukktamar III PBB baik yang bersifat *internal* maupun *eksternal*, melalui Surat Nomor: 10/TAP/Mukktamar III/2010 dengan isi sebagai berikut:

a. Internal

Menyadari dan memahami *Ibrah* maupun hikmah atas ketidakberhasilan memenuhi PT dan mengingat perjuangan politik untuk membangun masyarakat Indonesia yang berdasarkan nilai ajaran Islam adalah ibadah, maka dengan kesabaran dan *bertawakkal'alallah*, keluarga Besar Bulan Bintang berkewajiban untuk senantiasa berikhtiar mencapai masa depan yang lebih baik. Dalam menyikapi kondisi saat ini dan yang akan datang, langkah-langkah strategis yang mendesak dan harus segera dikerjakan oleh DPP Partai Bulan Bintang periode 2010-2015 adalah ;

- 1) Undang-undang tentang pemilihan umum di Indonesia selalu mengalami perubahan dan biasanya terjadi menjelang pelaksanaan pemilu berikutnya, padahal partai politik harus sejak dini melakukan persiapan berupa perencanaan dan konsolidasi, karena sudah ada kepastian dan tidak ada lagi keraguan keikutsertaan dalam pemilihan umum. Oleh karena itu DPP PBB periode 2010-2015 selayaknya secara sermat dan terus-menerus mengikuti perkembangan kecenderungan perubahan UU pemilu serta implikasinya terhadap partai, melakukan kajian secara intensif tentang arah perubahan paket undang-undang politik.
- 2) Salah satu program kerja nasional yang belum optimal dalam masa bakti DPP PBB 2005-2010 adalah konsolidasi organisasi dan beban terbentuknya infrastruktur pada sebagian besar kecamatan dan kelurahan/desa. Bahwa mesin politik kepengurusan partai adalah salah satu strategi untuk meraih kesuksesan dalam menghadapi pemilihan umum.

Dengan demikian perlu dilakukan konsolidasi organisasi dan penuntasan pemebentukan infrastruktur partai sampai ke tingkat yang paling bawah (Rukun Tetangga/RT).

- 3) Pengkaderan simultan dan berkesinambungan bagi anggota di setiap partai merupakan salah satu penentu kemajuan bagi partai. Namun kenyataan menunjukkan bahwa kaderisasi partai masih relatif terbatas. Karena itu, perlu dilaksanakan pengkaderan secara lebih massif, cerdas, dan terukur dalam rangka memenuhi kebutuhan kualifikasi kepengurusan partai di semua tingkatan yang didahului dengan semiloka pengkaderan.
- 4) Setiap partai politik tentu menghendaki kemenangan pada setiap pemilu, karena itu organisasi pemilu (KAPPU) yang selektif menjadi mutlak segera dibentuk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pelantikan DPP PBB periode 2010-2015. Selanjutnya diskusi diikuti dengan penetapan pembina daerah pemilihan dan caleg selambat-lambatnya bulan januari 2011.
- 5) Melakukan pengkajian dalam rangka merumuskan konsep-konsep penegakan syariat Islam di wilayah NKRI khususnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam bentuk konsep peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah. Pemahaman dan perilaku syariah Islam di kalangan keluarga besar Partai Bulan Bintang, untuk mengoptimalkan pemahaman tersebut dan perilaku yang lebih *syar'i*, perlu membentuk Pusat Informasi dan Kajian Syari'ah (PIKSAR) dalam bentuk lembaga khusus.
- 6) DPP PBB periode 2010-2015 merevisi surat keputusan DPP PBB No: SK/1616/2009 tentang perubahan SK PP/552/2007 tentang pedoman pelaksanaan rekrutmen pejabat publik Partai Bulan Bintang, khususnya terkait dengan pemilukada agar kewenangan mendapatkan pasangan calon kepala daerah diserahkan kepada Pimpinan Partai setingkat di atasnya.
- 7) DPP PBB periode 2010-2015 bersama seluruh tingkatan pimpinan partai, harus melakukan proses pencitraan

positif partai secara sistematis dan berkesinambungan. Proses pencitraan semakin ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya melalui berbagai media cetak dan elektronik dengan membentuk lembaga khusus yang menangani secara aktif, responsif, dan profesional.

- 8) DPP PBB periode 2010-2015 agar melakukan kajian mendalam selanjutnya merumuskan sistem kepemimpinan partai pada seluruh tingkatan partai melalui proses mekanisme yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat selambat-lambatnya 1 tahun setelah pelantikan DPP PBB periode 2010-2015.
- 9) Untuk mempertahankan eksistensi Partai Bulan Bintang maka seluruh jajaran Partai dari DPP sampai pimpinan terendah harus mengupayakan perolehan suara sah nasional pada pemilu legislatif 2014 minimal 5 %.

b. Eksternal

1) Politik dan Pemerintahan

- a) Mendesak pemerintah dan perlemen untuk mengembalikan kehidupan Lembaga Kepolisian Republik Indonesia di bawah Departemen Dalam Negeri.
- b) Mendesak pemerintah dan parlemen untuk tidak melakukan revisi terhadap Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum (minimal tiga kali penyelenggaraan pemilu).
- c) Mendesak pemerintah dan parlemen untuk memposisikan Anggota KPU berasal dari Partai Politik peserta Pemilu dan membentuk kembali PPI.
- d) Mendesak pemerintah dan parlemen untuk merealisasikan adanya Undang-undang tentang produk makanan, minuman dan obat-obatan haram dengan mencantumkan label HARAM.

2) Penegakan Hukum

- a) Pemerintah harus menetapkan target pemberantasan korupsi yang jelas, terukur dan nyata dapat dilihat oleh masyarakat luas.
- b) Pemerintah harus bersungguh-sungguh dalam penegakan hukum (*law enforshment*), dengan mereformasi aparat penegak hukum, pemberantasan mafia peradilan dan menjamin kemandirian institusi hukum.
- c) Demi keutuhan NKRI, maka Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang di dalamnya secara tegas menyatakan bahwa “Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945, menjiwai UUD 1945, dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut”. Untuk itu mutlak diperlukan peraturan perundang-undangan yang komprehensif, dinamis, adil dengan memperhatikan sungguh-sungguh hukum Islam sebagai sumber hukum nasional. Sehubungan dengan itu, kepada Legislatif dan Eksekutif harus melaksanakannya.
- d) Gerakan pemahaman aliran sesat yang berkedok agama Islam semakin tumbuh subur yang menyebabkan terjadinya perpecahan di kalangan ummat. Dalam rangka menjaga kemurnian ajara Islam dan kerukunan internal ummat Islam (penduduk mayoritas di negeri ini), maka diperlukan ketegasan pemerintah untuk memberantasnya dengan mengeluarkan peraturan yang terkait. Di samping itu, Lembaga-Lembaga Islam secara bersama-sama memberikan penyadaran kepada masyarakat di bawah koordinasi MUI.
- e) Mendesak pemerintah dan parlemen untuk menghilangkan stigma tentang terorisme yang dikaitkan dengan agama tertentu khususnya Islam.

3) Kejahatan Luar Biasa

Pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah konkrit untuk memberantas pencurian kayu, pencurian ikan, penyeludupan barang, kejahatan perbankan serta kejahatan

lain yang sangat meresahkan masyarakat seperti, jual beli anak dan wanita, narkoba serta pornografi dan pornoaksi.

- 4) Sosial Kemasyarakatan
 - a) Mendesak pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah terkait Undang-Undang Pornografi.
 - b) Mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan acara-acara dan informasi yang tidak mendidik pada media cetak dan elektronik, termasuk sektor pariwisata yang dapat merusak moral bangsa dan upaya pengikisan aqidah ummat.
- 5) Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
 - a) Pemerintah harus segera mengambil kebijakan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan dan segera membangun industri yang dapat menyerap pekerja yang lebih besar dengan memberikan intensif usaha dan kemudahan investasi.
 - b) Mendesak pemerintah agar memberikan pembinaan terhadap pengusaha kecil secara terus-menerus agar memiliki daya saing yang kuat.
 - c) Mendesak pemerintah agar meningkatkan perlindungan terhadap TKI yang berada di luar negeri.
- 6) Pendidikan
 - a) Mendesak pemerintah dan parlemen agar mengalokasikan dana pendidikan 20% dari APBN/APBD untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya kesejahteraan tenaga pendidik
 - b) Mendesak pemerintah dan parlemen agar meningkatkan pengalokasian dana dari APBN/APBD untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah dan pesantren.
 - c) Mendesak pemerintah untuk memberantas praktek komersialisasi pendidikan.

7) Kesehatan

- a) Mendesak pemerintah dan parlemen agar menyelenggarakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta terjangkau oleh masyarakat miskin.
- b) Mendesak pemerintah dan parlemen mengadakan industri obat medis dan obat tradisional yang terjangkau masyarakat miskin.
- c) Mendesak pemerintah menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan, dokter dan perawat dengan biaya terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.³⁰³

3. Undang – undang Pemilu tentang Ambang Batas

Ambang batas atau sering disebut *Parliamentary Threshold* (PT) memiliki dilema tersendiri, khususnya bagi Partai Bulan Bintang. Apalagi lahirnya regulasi tersebut datang dari DPR RI sebagai pembuat undang-undang yang diputuskan lewat voting anggota DPR yang notabene merupakan kader-kader Parpol. Sehingga anggota dewan yang duduk di senayan dan merupakan kader-kader partai besar tentunya sudah menjadi kewajaran lebih mengedepankan lahirnya regulasi seperti PT akan menguntungkan partainya dan merugikan partai lain.

Maka konsekwensinya, Partai Politik (Parpol) kecil atau yang memiliki kursi di DPRRI sedikit, tidak akan mampu meperjuangkan lahirnya regulasi yang menguntungkan parpol kecil itu sendiri lewat aturan PT. Di sinilah dilematisnya parpol seperti PBB dan lainnya pada pemilu kedepan, persisnya setelah lahir PT hasil godakan dan voting DPRRI tersebut, perolehan suaranya akan terus tergerus.

Dan itu langsung dirasakan PBB, pada Pemilu 2014 lalu, sehingga kini keterwakilan PBB tidak ada lagi di DPR RI. Artinya jika saat ini tidak memiliki keterwakilan di DPR RI dan juga kini PT lagi dalam penggodakan di DPRRI untuk diberlakukan pada Pemilu 2019 kedepan, maka besar kemungkinan parpol yang memiliki benang merah dengan Masyumi itu, akan terus tergerus.

303 *Ibid*, h. 117-123

4. Penyakit Akut Masyarakat Tentang *Money Politic*

Realitas masyarakat dalam menghadapi pemilu yang telah terbangun mindset *money politic* juga menjadi salah satu faktor tantangan yang tak bisa dipandang ringan. Apalagi berbagai upaya yang dilakukan, khususnya PBB Sumatera Utara untuk menghindari dan mensosialisasikan malah berujung perolehan suara PBB di Sumut makin melorot. Fakta itu, kini terlihat dari tidak adanya keterwakilan PBB Sumut di DPRD Sumut, padahal sebelumnya atau awal lahirnya PBB mempunyai kursi di tingkat provinsi itu. Agaknya, butuh waktu yang terbilang cukup panjang untuk membangun kesadaran masyarakat agar menghindari *money politik*, sebagaimana hal itu tercetus dari Bustami Manurung.

*“Sulit untuk merubah kesadaran masyarakat saat ini, apalagi elit-elit politik kita seperti ikut memelihara kondisi masyarakat yang terjangkit penyakit money politik tersebut. Faktanya bisa dilihat bila musim pemilu, seperti menjadi kewajiban bagi kandidat pemilu atau caleg yang akan bertarung untuk menyiapkan kost politik dengan segepok uang sehingga berbagai permintaan masyarakat tersahuti, seperti bantuan, perlengkapan sosial masyarakat berupa, tikar, kursi sound system dan lain-lain. Namun, bukan berarti PBB tinggal diam dan mengikuti sahwat politik begitu saja, dan tanpa melakukan upaya-upaya penyadaran di tengah-tengah masyarakat”.*³⁰⁴

5. Sumberdaya Manusia Kader dan Pimpinan

Secara faktual yang juga tak kalah pentingnya tantangan untuk membangun Partai Bulan Bintang dari lingkungan partai itu sendiri, seperti halnya, kemampuan atau sumberdaya kader. Idealnya, kader partai itu adalah orang yang mampu melihat masyarakat disekitarnya secara realitis atau kepedulian, kemudian membawanya dalam rapat-rapat partai untuk diambil sikap atau kebijakan partai, baik itu di tingkat ranting hingga tingkat pusat.

Seperti halnya untuk tingkat ranting atau lingkungan, sekecil-kecilnya perhatian seorang kader yakni mampu melihat keluhan masyarakat terkait tidak berfungsinya lampu jalan yang pembayaran rekeningnya telah dibebankan kepada masyarakat itu sendiri. Selanjutnya kondisi masyarakat itu dibawa ke rapat partai dan *follow up* atau tindaklanjutnya keterwakilan DPRD ditingkat kabupaten/

³⁰⁴ Bustami Manurung, Wakil Sekretaris DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu Tanggal 18 September 2016, pukul 16-17.30 di Caf  Yuki Plaza

kota mengusulkan kepada pemerintah, supaya dianggarkan dan dilaksanakannya pembangunan penerangan jalan.

Kemudian dan yang tak kalah pentingnya lagi, terhadap Sumber daya manusia ditingkat pimpinan partai juga harus turut menjadi perhatian serius, pemegang tampuk tertinggi struktural PBB yang dalam hal ini DPP PBB, khususnya dalam mengangkat dan menentukan pimpinan-pimpinan di tingkat kabupaten kota hingga ranting, sehingga pimpinan-pimpinan tersebut bisa membawa arah partai yang terorganisir mulai dari pusat hingga ranting dan golnya atau *ending*-nya mampu mendongkrak perolehan suara.

6. Militansi dan Semangat Jihad

PBB sebagai Partai Politik (Parpol) yang menyatakan bernafaskan Islami, punya sedikit perbedaan dengan parpol lainnya yang memilih nasionalis dan demokrasi. Bila seluruh program parpol nasionalis dan demokrasi mengerucut kepada pembenahan dan pembangunan masyarakat yang condong terhadap pembelaan dan perjuangan aspirasi masyarakat dalam kehidupan sosial dan berbangsa. Maka partai Islam, terkhusus PBB punya peran lain selain perjuangan itu, yakni, menyahuti aspirasi agama Islam khususnya.

Saat ini, banyak persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat di negara Indonesia yang telah mengikrarkan salah satu landasan idiologinya adalah ke Tuhanan Yang Maha Esa. Contohnya, kini sertifikasi haram yang menjadi aspirasi masyarakat Islam dan telah berhasil memiliki *legal standing* atau payung hukum setingkat Undang-undang, namun di level hirarki hukum formal tingkat bawahannya seperti Peraturan Pemerintah, Perda belum terbentuk, maka ini seyogianya menjadi perhatian maksimal parpol bernuansa Islam.

Jika hal-hal seperti seperti sertifikasi halal menjadi prioritas parpol Islam, maka semangat jihad, akan terus tertanam pada individu-individu umat Islam yang ujung-ujungnya umat Islam bisa menjadi loyalis atau simpatisan PBB, bahkan masuk menjadi kader partai yang kini ditingkat pusat di nakhodai Yusril Ihza Mahendra itu.

7. Keteladaan dan *Akhlaqul Karimah*

Keteladanan bukan lagi hal baru dalam kehidupan manusia, terlebih dalam sejarah panjang makhluk Tuhan paling tinggi derajatnya itu,

setiap suku, setiap bangsa maupun golongan memiliki pemimpin. Artinya, secara kultur manusia itu akan mencari pemimpin dan menauladaninya agar tatanan sosial terbangun seperti harapan golongan, suku dan bangsa tersebut.

Bahkan umat Islam sebagai agama samawi yang terbesar itu, telah tegas dan jelas menunjuk Nabi Muhammad itu sebagai suri tauladan. Jadi, sudah seyoginya pimpinan Parpol PBB bisa menjadi tauladan, khususnya bagi kader-kader partai, begitu juga akhlaqul karimahnyanya, harus mampu mencerminkan ajaran Islam itu sendiri. Begitu juga kader partai, idealnya, harus mampu menjaga sikap dan perilaku yang bisa mencederai Islam sebagai agama samawi yang terbesar tersebut.

Realitasnya saat ini, masyarakat atau umat Islam sudah sampai pada krisis terhadap kepemimpinan dikarenakan, banyak pemimpin yang telah terbukti secara sah melakukan hal-hal yang melanggar norma dan hukum, seperti halnya korupsi, judi, mabuk-mabukan dan lain-lainnya. Sehingga terbangun di tengah-tengah masyarakat tidak lagi menauladani pimpinan-pimpinan pemerintah maupun legislatif, seperti era orde lama dan era orde baru.

8. Membangun *Trust* Masyarakat

Untuk bangunan sosial di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara PBB sebagai Partai Islam juga punya tantangan tersendiri dari partai lainnya. Jika saat ini, terjadi krisis kepercayaan terhadap pemimpin khususnya di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif, karena perilaku yang tidak amanah. Maka Partai yang di tingkat pusat dipimpin Yusril Ihza Mahendra ini, harus mampu membangkitkan kepercayaan atau *trust* masyarakat terhadap pemimpinnya. Apalagi di dalam Islam ada ajaran yang menegaskan agar mematuhi pemimpin, sehingga sudah menjadi tugas PBB sebagai partai Islam agar opsi ajaran agama itu berjalan di tengah-tengah masyarakat, sehingga kepercayaan atau *trust* masyarakat dalam berbangsa dan bernegara bisa mematuhi pemimpin. Tentunya terhadap pemimpin yang memiliki akhlaqul karimah.

Mutlak kewajiban bagi PBB sebagai Partai Islam agar menjadi penentu dalam meletakkan dan menghasilkan kader pemimpin-pemimpin negeri yang amanah dan berakhlakul karimah, baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif, sehingga umat Islam dalam menerapkan ajarannya di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara

tidak mematuhi pemimpin yang tak amanah dan tak berakhlakul karimah. Demikian juga sebaliknya rakyat sebagai pemilik suara jangan memilih pemimpin yang culas dan khianat, teliti dan pelajari calegnya, sehingga tidak seperti membeli kucing dalam karung.

BAB VI

DISKURSUS UNSUR KOMUNIKASI POLITIK DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BULAN BINTANG SUMATERA UTARA

A. Komunikator Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Sumatera Utara

Komunikator adalah unsur komunikasi yang terpenting, komunikator adalah orang atau lembaga yang berfungsi untuk menyampaikan pesan-pesan politik atau informasi politik sebagai masukan yang akan diterima konstituen atau masyarakat politik. Komunikasi politik tidak hanya menyangkut partai politik, melainkan juga lembaga pemerintahan legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, sumber atau komunikator politik adalah mereka-mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna atau bobot politik, misalnya Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, MPR, DPR, DPD, KPU, DPRD, politisi, fungsionaris partai politik, fungsionaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan kelompok-kelompok penekan (*pressuer*) dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan.

Secara faktual komunikator politik di PBB Sumatera Utara meliputi perseorangan dan institusi yang bersifat kolektif. Komunikator politik yang bersifat individu mencakup seluruh pimpinan PBB Sumatera Utara baik Majelis Pertimbangan, Majelis Syura, Pimpinan Harian, Divisi-divisi atau bagian-bagian yang membantu tugas pimpinan, termasuk juga organisasi sayap atau organisasi otonom (ORTOM) yang ada di PBB Sumatera Utara, seperti Pemuda Bulan Bintang, Muslimat maupun *Brigade Hizbullah*. Kedudukan mereka secara pribadi adalah komunikator politik, karena itu pimpinan di PBB harus memenuhi kriteria yang digariskan organisasi kepartaian.

Adapun yang bersifat institusi atau kolektif adalah kelembagaan yang ada di PBB meliputi stuktur kepartaian mulai dari DPP, DPW, DPC, PAC, PR (Pimpinan Ranting) bahkan hingga ketingkat Rayon terendah di tingkat rukun warga dan rukun tetangga (RW/RT). Secara kelembagaan juga berfungsi sebagai komunikator politik untuk menyampaikan pesan-pesan atau program partai yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dokumentasi yang peneliti temukan terkait dengan komunikator politik yang ditujukan kepada masing-masing pimpinan partai, maka di PBB seorang pimpinan atau kader ikut dengan berbagai jenjang perkaderan di partai yang dinamakan Lantang (Perkaderan Bulan Bintang) secara berjenjang dari Lantang 1,2 hingga 3 termasuk juga mengikuti Sespimnas (Seleksi Pimpinan Nasional), kedua sistem perkaderan dan pelatihan dalam mrekrut kepemimpinan tersebut wajib dilalui dan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Karena itu pimpinan PBB harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Sesuai dengan dokumentasi kepartaian yang ada di PBB, terkait tentang kepemimpinan, baik sifat, syarat dan modelnya, ditetapkan melalui Ketetapan Muktamar III PBB Nomor: 12/TAP/Muktamar III/2010 tentang “Kepemimpinan Partai Bulan Bintang” yang didasarkan kepada upaya peningkatan kualitas pimpinan disemua jajaran partai, dan sistem perkaderan yang ada ddi PBB yang disebut dengan Lantang I, II, III dan Sespimnas (Seleksi Pimpinan Nasional) yang mewajibkan memasukkan materi management dan Kepemimpinan Partai, maka dideskripsikanlah kepemimpinan PBB sebagai berikut:

1. Dasar Pemikiran

Partai Bulan Bintang sejak awal berdirinya dirancang untuk menjadi alat untuk perjuangan penegakan syariat Islam, baik pada tataran individual (diri dan keluarga) maaupun pada tataran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di seluruh Wilayah Negara Indonesia. Oleh karena itu, adalah sebuah keharusan bagi seluruh keluarga besarnya untuk mampu menunjukkan tutur kata serta perilaku keseharian yang mencerminkan sosok Muslim yang tampilan dan wawasannya sarat dengan nilai-nilai Islam. Terlebih para fungsionaris atau para pengelola atau para pimpinan yang diamanahi untuk membawa partai dan anggotanya menuju tegaknya Syariat Islam.

Terkait dengan itu juga, mereka harus mempunyai nilai lebih (*value added*) ketimbang yang lain. Mereka bukan hanya dituntut

menjadi Muslim yang taat, tetapi lebih dari itu harus melengkapi dirinya dengan kemampuan, keteladanan (*uswah hasanah*), serta manajerial yang handal, bijaksana, dan fleksibel dalam mengambil keputusan, namun selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebenaran berdasarkan tuntunan Alquran dan as-Sunnah, serta mampu menjadi lokomotif kemenangan Partai pada pemilu 2014.

Sebagai pimpinan Partai Islam, fungsionaris PBB harus gemar menjalin silaturahmi dengan siapapun, utamanya pengurus dan anggota ormas Islam. sejak menerima amanah, seluruh jajaran fungsionaris partai ini diharapkan untuk sering tampil di masyarakat dalam rangka memperkenalkan nilai-nilai yang perjuangankan oleh Partai Bulan Bintang. Sehubungan dengan ini seluruh fungsionaris partai tanpa terkecuali dituntut untuk memahami secara baik dan benar semua ketetapan muktamar dan ketentuan partai lainnya.

2. Sifat Pimpinan

Terkait dengan tugasnya sebagai pimpinan Partai Islam, maka fungsionaris PBB diharapkan dapat memiliki sifat-sifat antara lain, sebagai berikut:

- a. *Shiddiq*, sehingga ia jujur dalam ucapannya dan berita yang disampaikan dapat diterima dengan baik;
- b. *Amanah*, sehingga ia tidak mengkhianati apa yang telah diamanahkan kepadanya;
- c. *Fathonah*, sehingga ia mempunyai kecerdasan dan kepandaian dan tidak gamang dalam melihat masalah yang menyebabkannya mudah terkecoh;
- d. *Thabligh*, sehingga ia selalu menyampaikan kebenaran kepada siapa saja yang dihadapinya;
- e. *Adil*, sehingga ia memelihara dirinya dari pengaruh permusuhan dan kebencian terhadap saudaranya dan sesama manusia, karena permusuhan akan menghalangi dirinya untuk berbuat adil dan bersikap simpatik;
- f. Ia tidak suka mengikuti hawa nafsunya, karena hawa nafsu akan mengeluarkan kebenaran kepada kebathilan dan ia tidak dapat membedakan antara yang benar dan yang bathil.

3. Persyaratan Pimpinan

Sehubungan dengan dasar pemikiran dan sifat pimpinan di atas, maka pimpinan PBB, diharapkan memiliki beberapa persyaratan antara lain sebagai berikut :

- a. Di Bidang *'Ubudyah*
 - 1) Taat dan tertib melaksanakan ibadah *mahdhah*, seperti pelaksanaan rukun Islam dan Ibadah sunnah lainnya;
 - 2) Mampu menjadi imam shalat lima waktu (baik *sirr* maupun *jahr*);
 - 3) Mampu membaca Alquran dengan Faasih.
- b. Di bidang Mu'amalah
 - 1) Memiliki wawasan sosial-kenegaraan yang Islami,
 - 2) Memiliki kemampuan menerjemahkan syariat Islam dalam lingkup sosial-kenegaraan secara operasional.
 - 3) Teguh berjuang membesarkan agama Islam di Negara yang *plural* (majemuk).
 - 4) Memiliki visi memberikan kemakmuran pada kelompok masyarakat *mustadhafin*.
 - 5) Memiliki misi memberantas kemaksiatan, kemungkar, dan kezhaliman,
 - 6) Mampu menciptakan persepsi politik yang baik sebagai strategi kemenangan dalam pemilu 2014.
 - 7) Mampu meninggalkan hal-hal yang makruh.

Demikianlah panduan singkat tentang kepemimpinan PBB yang diharapkan akan melahirkan fungsionaris yang memiliki, yakni ; *Pertama*, semangat untuk membangun PBB menjadi partai yang disegani dan diperhitungkan keberadaannya. *Kedua*, semangat membangun soliditas fungsionaris di semua tingkatan kepemimpinan partai sehingga dapat meminimalisasi perselisihan. *Ketiga*, semangat berkorban waktu, tenaga, pikiran dan bahkan hartanya untuk kemaslahatan ummat.

Beberapa item kepemimpinan tersebut telah disepakati dan ditetapkan di Medan 10 Jumadil Ula 1431 H atau 25 April 2010 M.

Sedangkan isi panduan kepemimpinan di PBB ini semua ditandatangani Pimpinan Mukhtar III yang berlangsung di Medan, masing-masing ; Yasin Ardhy, SH (ketua), H Abdul Haq SH (sekretaris) dengan anggotanya, adalah ; Drs Dwianto Ananias, Ir.H. Eddy Wahyudin, MBA, Drs. H. Suwito Suprayogi, Lc, Dr. Ir. H. Masri Sitanggang, MP, Drs H. Sudarno Hadi, M.Pd, Sugianto, SH, MH, Adolf Gim Perangin³⁰⁵

Juga syarat komunikator politik yang melekat dalam setiap pimpinan partai disebutkan pada ART, khususnya pada pasal tentang persyaratan pimpinan. Secara spesifik adalah sebagai syarat pimpinan partai adalah anggota kader dan teras yang memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

- a. Taat dan tertib melaksanakan *ibadah mahdhoh*
- b. Mampu membaca Al-Quran secara fasih
- c. Mampu menjadi Imam sholat lima waktu
- d. Memiliki wawasan yang luas
- e. Mampu meninggalkan perilaku yang tidak bermanfaat
- f. Menampilkan ketauladanan (uswatun hasanah) dengan prinsip *Shidiq, Amanah, Fathanah* dan *Tabligh*
- g. Tokoh Masyarakat
- h. Bersikap adil dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan ketentuan di atas maka kepemimpinan di PBB Sumatera Utara diharapkan lebih maksimal, militan dan loyalitas terhadap partai, akan tetapi dari penelitian dan dokumen yang peneliti temukan dari hasil wawancara dengan pengurus, perkaderan Lantang, ini sangat minim dilakukan, sehingga sumber daya manusia yang memimpin PBB tidak seperti yang diharapkan, hal itu dikarenakan perkaderan merupakan jantung sebuah organisasi.

Kader yang diambil dari bahasa Francis yakni *Cadre* berarti terlatih, inti pasukan dan terpilih. Maka dengan konsep perkaderan diikuti silabus yang ada akan berkontribusi untuk melahirkan kader-kader terbaik yang bisa diandalkan, tidak jarang juga karena keterbatasan perkaderan, akan muncul kader-kader kutu loncat, bahkan bisa juga setiap penjurangan caleg akan mengalami kekurangan stok kader untuk dijadikan caleg. Maka muncullah caleg dadakan,

305 *Ibid*, h. 128-132

direkrut dari masyarakat atau tokoh lainnya yang terkadang tidak memahami khittah perjuangan partai. Sering kita dengar dan baca di berbagai media massa, tiba-tiba artis menjadi caleg atau seorang pengusaha jadi caleg, tentu ini dari segi popularitas dan pendanaan bisa jadi solusi tapi dari segi masa depan partai dan militansi akan kurang efektif. Namun, cara-cara instan tersebut untuk masa depan partai kurang baik dan kurang mendidik. Karena keberadaan partai politik seperti PBB tidak hanya menjadi partai yang bersifat partai massa tapi juga sesuai azas, AD ART dan khittah perjuangan PBB lebih dimaksudkan sebagai partai kader.

melalui observasi yang peneliti lakukan semua partai hampir sama saja melakukan hal-hal instan seperti mencalonkan artis dan pengusaha tersebut. Hanya ada dua partai yang agak mendekati partai kader yakni PDIP dan PKS, hal itu juga diakui oleh berbagai pengamat politik termasuk yang dinyatakan pengamat politik terkemuka Sumatera Utara Shohibul Anshar Siregar. Bahkan Dr Masri Sitanggang menyatakan hanya PDIP yang paling siap untuk partai kader tersebut, dan menegaskan.

"Itu fenomena yang hampir semua partai melakukan, dan itulah persoalan besar dalam demokrasi kita yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh yang tidak memiliki kredibilitas yang bisa dibanggakan, jadi ketika demokrasi diarahkan kepada demokrasi liberal, di mana kavalitas menjadi penentu, maka tidak ada lagi idiologinya partai, kalau boleh saya katakan orang yang berkumpul dengan idiologi sekarang Cuma PDIP Inilah kenapa? Jadi mereka itu, disiapkan dulu dananya dan segala macam, kemudian mereka sengaja untuk perang idiologi, nah kembali ke partai Islam tidak seperti itu, tidak mampu dia ketika terjadi sebuah perubahan untuk mengikutinya, sementara kita justru hanyut, justru itu syukurnya kita sekarang, dalam hal yang sederhana, dulu hal ini, ketika kita menyampaikan al-Maidah ayat 51, itu orang Islam sendiri yang marah. Sekarang baru marah semua dengan yang menista al Maidah 51"³⁰⁶

Masih, menurut Dr Masri Sitanggang, Kasus akhir-akhir ini tentang penistaan agama yang dilakukan Ahok alias Basuki Tjahaya Purnama disimpulkan ada hikmahnya, bahkan sangat besar dan jika ini dirawat akan jadi momentum besar memberikan penyadaran bagi ummat Islam tentang politik Islam.

306 Dr Masri Sitanggang MP, Ketua DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2016, pukul 14.30 s-d 16.00 di kediamannya di Jalan Pasar 8 Bandar Khalifah Percut Sei Tuan.

*“Ada hikmahnya, saya dari dulu sudah menyampaikan hal ini, tak usah pilih saya, yang penting partai Islam, Calegnya Islam, calonnya Islam, Cuma dulu orang banyak yang marah, jangan bawa-bawa agama di politik? Inilah yang disebut idiologi sekuler”.*³⁰⁷

Terkait dengan keberadaan pimpinan partai dalam semua jenjang sebagai komunikator politik maka hal ini harus benar-benar disadari dan diresapi tugas dan fungsinya. Bahkan mereka semua harusnya berfungsi sebagai dai yang menyeru ummat kejalan kebaikan. Jika tugas dai ini dijalankan maka hal itu telas linier atau sejalan dengan fungsi kader dan pimpinan yang diandalkan sebagai komunikator politik. Menyikapi itu, Dr Masri Sitanggang punya pandangan tersendiri.

*”Yang pertama, ini sama dengan dakwah, kalau kita berpikir PBB itu sebuah gerakan dakwah, maka itu sama dgn dakwah, kita pahami bagaimana orang mengerti Islam itu rahmat bagi semesta Alam (rahmatan lil alamin), bagaimana hal ini bisa dipahami orang, jadi sebenarnya kalau fungsi partai politik ini sama dengan fungsi dakwah, seperti yang disampaikan buya Natsir, kalau dulu kita berpolitik lewat jalur dakwah, sekarang, kembali lagi berdakwah lewat jalur politik. Artinya jalur politik ini adalah bahagian dari dakwah, jadi tidak ada masalah, menurut saya inilah yang jadi soal juga, menjadi sulit dia ketika aparat partai, fungsionaris partai tidak memahami fungsi ini”.*³⁰⁸

Karenanya, konsep DPW PBB Sumatera Utara tentang komunikator politik yang sejalan dengan fungsi sebagai dai karena tugasnya juga mensosialisasikan kebajikan dan menolak kerusakan/kemungkarannya sebagaimana firman Allah dalam QS Ali Imran: 104, QS Ali Imran: 110 dan QS Fushilat: 33.

Q.S. Ali Imran 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari

307 Dr Masri Sitanggang MP, Ketua DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2016, pukul 14.30 s-d 16.00 di kediamannya di Jalan Pasar 8 Bandar Khalifah Percut Sei Tuan.

308 Dr Masri Sitanggang MP, Ketua DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2016, pukul 14.30 s-d 16.00 di kediamannya di Jalan Pasar 8 Bandar Khalifah Percut Sei Tuan.

yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.³⁰⁹

QS Ali Imran: 110 berbunyi:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”.³¹⁰

QS Fushilat: 33

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: “Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang menyerah diri?”.³¹¹

Setiap pimpinan partai maupun kader, lebih-lebih institusi kepartaian di PBB Sumatera Utara harus menjadi da’i dan *dakwah minded* (berpikir dakwah), dalam konteks ini menjadi komunikator politik untuk kebajikan, menyinggung itu, Dr Masri Sitanggang merinci secara lebih luas.

”Ya, kalau kita berharap semua kader itu adalah komunikator atau orang yang menyampaikan pesan, kemudian kita berharap kader partai, apalagi di tingkat pengurus DPW, mestinya dia sudah menjadi komunikator politik, menyampaikan pesan, dan pesannya itu harus dikuasai adalah idiologi partai. Contoh yang sederhana, bahkan paling sederhana, PBB itu tujuan khususnya adalah menegakkan syariat Islam di Indonesia, nah persoalannya sekarang adalah berapa banyak pengurus DPW yang paham tentang syariat Islam, ini yang jadi soal, jadi pesannya itu tidak sampai. nah ketika dia tidak menguasai pesan yang akan disampaikan kepada khalayak pendengarnya, audiensnya, maka dia tidak efektif berkomunikasi, nah di situlah persoalannya. Maka ketika orang-orang dengan pengalaman

309 QS. 3 : 104

310 QS. 3 : 110

311 QS. 41 : 33

*saya, ketika kita sampaikan itu dan ketika kita tulis di koran, maka respon orang atau khalayak bagus. Misalnya: mengapa kita perjuangkan syariat Islam di Indonesia, apakah ada hak kita memperjuangkan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka itu harus diuraikan panjang dan bisa diperdebatkan dengan khalayak ramai, termasuk juga petarung atau lawan tanding kita dengan partai lain seperti PDIP, Golkar dan lain-lain, memang harus begitu?*³¹²

B. Pesan Politik Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Sumatera Utara

Pesan atau *message* adalah informasi-informasi yang harus disampaikan kepada khalayak atau orang lain, dimana pesan tersebut harus disampaikan dengan efektif, baik dan maksimal. Karena itu, suatu pesan harus dikemas dengan sebaik-baiknya, jika diibaratkan dengan menyajikan makanan, maka antara menu makanan yang lezat dan enak harus diiringi dengan cara menghidangkan yang baik dan menarik. Karenanya, pesan politik adalah pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara *verbal* maupun *non-verbal*, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung bobot politik. Misalnya pidato politik, undang-undang kepartaian, undang-undang pemilu, pernyataan politik, artikel atau isi buku/brosur dan berita surat kabar, radio, televisi dan internet yang berisi ulasan politik, propaganda, perang urat syaraf (*psywar*), makna logo, warna baju atau bendera, bahasa badan (*body language*), dan hal-hal lain yang sejenisnaa.

Hasil penelitian yang dilakukan, pesan politik yang di ada di tubuh PBB umumnya dan PBB Sumatera Utara khususnya sebagai objek penelitian, maka pesan-pesan tersebut umumnya merujuk kepada pesan-pesan ke-Islaman yang bersumber dari syariat Islam yakni Alquran dan as-Sunnah, di samping itu pesan-pesan juga merujuk kepada ijtihad, baik Qiyas, Ijma, terutama *masalah mursalah* dalam aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Pesan-pesan komunikasi politik lainnya adalah merujuk kepada program partai dan keputusan-keputusan lainnya. Adapun program PBB yang disosialisasikan ke masyarakat, hasil studi

³¹² Dr Masri Sitanggang MP, Ketua DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2016, pukul 14.30 s-d 16.00 di kediamana di Jalan Pasar 8 Bandar Khalifah Percut Sei Tuan.

dokumentasi yang peneliti lakukan dan temukan, terdapat pada strategi perjuangan partai dan azas partai, sebagai berikut:

1. Internal Partai

- a. Pemberdayaan Organisasi dan Kaderisasi
 - 1) Membangun struktur dan personalia partai yang kuat dan efektif sampai ke tingkat bawah.
 - 2) Mengkordinasi badan otonom/badan khusus untuk meningkatkan kinerja dan memperluas jaringan partai.
 - 3) Menyelenggarakan Semiloka pengkaderan untuk mengkaji dan menyempurnakan sistem pengkaderan dan melaksanakannya secara terencana dan baik.
 - 4) Meningkatkan frekuensi kegiatan pengkaderan di seluruh tingkatan pimpinan partai dengan membangun halaqah.
 - 5) Menyelenggarakan Pesantren Moderen Terbuka (PMT) sebagai upaya mendukung kegiatan pengkaderan secara berkesinambungan.
 - 6) Penegakan disiplin melalui pemberian sanksi yang tegas kepada semua jajaran fungsionaris, pejabat publik, dan anggota partai.
 - 7) Menetapkan hubungan hukum yang jelas antara badan-badan hukum yang dibentuk partai dengan partai
- b. Dakwah dan Pembinaan Akhlaqul Karimah
 - 1) Menyusun konsep dan metode dakwah yang efektif, sistematis dan terprogram serta membangun lembaga dakwah/majelis taklim
 - 2) Memprakarsai dan melaksanakan pertemuan antar lembaga dakwah/ ormas Islam, Ulama dan Muballigh.
 - 3) Mengembangkan dakwah dengan memanfaatkan teknologi mutakhir.
 - 4) Melakukan kajian ke-Islaman untuk menjawab berbagai tantangan dan persoalan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan.

- c. Pemberdayaan Ekonomi Ummat
 - 1) Membangun dan meberdayakan ekonomi yang berbasis syariah
 - 2) Membuka peluang dan kesempatan serta jaringan untuk pengembangan usaha
 - 3) Membangun dan mengembankan pusat informasi dan komunikasi usaha bagi pengusaha/ pelaku ekonomi.
 - 4) Mendirikan lembaga permodalan dan/atau lembaga penjamin simpanan bagi usaha ekonomi.
- d. Pembentukan Badan/Tim/Forum
 - 1) Membentuk Lembaga Pengkajian Pembahasan Tafsir Asas Partai Bulan Bintang
 - 2) Membentuk Forum Silaturahmi Nasional Anggota Legislatif Partai Bulan Bintang di setiap zona dan sekretariat pusat di Jakarta.
 - 3) Membentuk Lembaga Pengkajian dan Pengawasan Parlemen dan Pemerintah (LP4)
- e. Pembinaan dan Pengembangan Profesi
 - 1) Melakukan up-grading dan pelatihan terhadap kader partai yang mengemban amanah sebagai pejabat publik
 - 2) Melakukan rekrutmen para akademisi dan profesional untuk berkiprah dalam badan khusus partai.
 - 3) Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga profesi dalam bentuk forum kajian, pemberian beasiswa dan penempatan tugas.
- f. Pemenangan Pemilihan Umum 2014.
 - 1) Membentuk Komite Aksi Pemenangan Pemilihan Umum (KAPPU)
 - 2) Menetapkan target dan strategi untuk meloloskan partai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 3) Menyusun pedoman dan panduan teknis pemenangan pemilihan umum 2014.

2. Eksternal Partai.

a. Pemerintahan Dalam Negeri

- 1) Memperjuangkan terselenggaranya pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa serta terhindar dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
- 2) Memperjuangkan berkembangnya budaya politik yang sehat dan demokratis dengan melakukan transformasi nilai-nilai Islam.
- 3) Memperjuangkan terlaksananya syariat Islam dalam skala lokal, baik pada tingkat kabupaten/kota maupun pada tingkat provinsi, yang diakomodir dalam bentuk Peraturan Daerah.
- 4) Mendorong seluruh komponen bangsa bersikap demokratis, jujur dan adil dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif/Presiden dan Wakil Presiden/Kepala Daerah secara Langsung.
- 5) Mendorong Pemerintah dan Parlemen untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Legislatif/Presiden dan Wakil Presiden/Kepala Daerah secara bersamaan.
- 6) Memperjuangkan keberadaan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) berasal dari Partai Politik peserta pemilu dan terbentuknya kembali Panitia Pemilihan Indonesia (PPI).
- 7) Memperjuangkan keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) setara dengan Lembaga Negara.

b. Luar Negeri

- 1) Mendorong arah kebijakan luar negeri dan kekuatan diplomasi untuk kepentingan nasional, mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari campur tangan asing dan juga untuk menyelesaikan masalah perbatasan dengan negara-negara tetangga.
- 2) Mendorong arah kebijakan luar negeri dan kekuatan diplomasi untuk kepentingan ekonomi nasional yaitu meningkatkan perdagangan, investasi serta perbaikan perlindungan tenaga kerja di luar negeri.

- 3) Memelihara dan mengembangkan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif yang bertumpu pada kedaulatan dan kehormatan bangsa serta kepentingan nasional Indonesia.
 - 4) Mengembangkan politik perdamaian dunia dan membangun kerjasama Internasional dengan bertumpu pada nilai-nilai kemanusiaan universal dan kesamaan derajat negara.
- c. Pertahanan dan Keamanan
- 1) Memperjuangkan lahirnya Undang-undang tentang Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 2) Mendorong peningkatan kualitas keprofesionalan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat keamanan negara.
 - 3) Memperjuangkan peningkatan Alat Utama Sistem Pertahanan dan Keamanan (ALUTISTA) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 4) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Pertanian.
- 1) Memperjuangkan program pembangunan pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai basis strategi pengembangan ekonomi nasional.
 - 2) Meningkatkan optimalisasi sumber daya alam pertanian serta teknologi tepat guna untuk mengembangkan produktivitas ekonomi nasional dalam rangka swasembada pangan.
 - 3) Memperjuangkan kemudahan akses permodalan dan jaringan pasar bagi pengembangan usaha kecil dan menengah di sektor pertanian dalam rangka kesejahteraan petani.
- e. Kehutanan
- 1) Memperjuangkan program pelestarian hutan sebagai paru-paru dunia.

- 2) Memperjuangkan perusahaan hutan berbasis pengembangan ekonomi rakyat.
 - 3) Meningkatkan optimalisasi sumber daya hutan dalam rangka peningkatan pendapatan negara.
- f. Kelautan dan Perikanan.
- 1) Mendorong pemerintah dan Parlemen untuk mengoptimalkan sumberdaya kelautan dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat.
 - 2) Memperjuangkan program pembangunan kelautan dan perikanan sebagai basis strategi pengembangan ekonomi nasional.
 - 3) Meningkatkan optimalisasi sumber daya kelautan untuk mengembangkan produktivitas ekonomi nasional.
 - 4) Memperjuangkan kemudahan akses permodalan dan jaringan pasar bagi pengembangan usaha kelautan dan perikanan.
 - 5) Memperjuangkan peningkatan standar hidup dan kesejahteraan nelayan.
- g. Lingkungan Hidup.
- 1) Menyerukan pendayagunaan (eksploitasi) lingkungan hidup mencakup tumbuhan-tumbuhan, hewan, air, udara dan semua yang ada di bumi, yang terkendalidan berdaya guna dalam rangka meningkatkan kualitas hidup rakyat.
 - 2) Memperjuangkan dan mengembangkan program-program Bioteknologi yang bertanggung jawab bagi kepentingan masyarakat.
 - 3) Menciptakan dan membangun lingkungan hidup yang harmoni, teratur, tertib, sehat dan bersih.
 - 4) Mendesak pemerintah untuk membentuk badan penyelamatan lingkungan hidup terkait dengan perubahan iklim.

h. Hukum dan HAM

- 1) Memberikan masukan kepada Legislatif, eksekutif dan Yudikatif terkait dengan peningkatan kualitas pembentukan dan penegakan hukum nasional dengan bersumber pada nilai-nilai Islam.
- 2) Mendorong peningkatan kualitas, wawasan, moral dan akhlak aparat penegak hukum melalui pendidikan.
- 3) Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang pornografi, pornoaksi, psikotropika dan trafficking.
- 4) Memperjuangkan agar memperkuat kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam benteng Undang-Undang.
- 5) Mendorong pemerintah untuk bersungguh-sungguh dalam penegakan hukum dengan mereformasi aparat penegak hukum, memberantas mafia peradilan dan menjamin kemandirian institusi hukum
- 6) Mendorong pemerintah untuk melaksanakan penegakan Haka Asasi Manusia secara adil berdasarkan nilai-nilai Islam.

i. Perhubungan dan Telekomunikasi

- 1) Mendorong Pemerintah dan Parlemen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana oerhubungan dan telekomunikasi.
- 2) Mendorong Pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi global
- 3) Mendorong Pemerintah untuk memperketat pengawasan pemberitaan media cetak dan elektronik khususnya tulisan/gambar dan acara-acara yang tidak mendidik serta dapat merusak moral bangsa dan aqidah ummat.

j. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- 1) Mendorong Pemerintah dan Parlemen untukmeningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur

- 2) Mendorong Pemerintah dan Parlemen untuk membangun fasilitas perumahan bagi rakyat kecil dan menata pemukiman kumuh dengan pola pendekatan persuasif
- k. Pembangunan Daerah Tertinggal
- 1) Mendorong pemerintah dan Parlemen untuk memberikan treatment-treatment khusus yang menjadi stimulus bagi percepatan pembangunan di kawasan daerah tertinggal.
 - 2) Mendorong pemerintah dan Parlemen untuk membangun sarana dan prasarana di pedesaan dan kawasan tertinggal, terutama di daerah terpencil dan pulau-pulau serta daerah pedalaman
- l. Pendidikan
- 1) Mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional serta melakukan pengawasan terhadap realisasi alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dalam APBN/APBD.
 - 2) Mendorong pemerintah dan Parlemen agar mengalokasikan anggaran pendidikan dari APBN/APBD untuk meningkatkan mutu pendidikan termasuk Madrasah dan Pesantren serta kesejahteraan tenaga pendidik.
 - 3) Mendorong Islamisasi ilmu pengetahuan yang diharapkan di masa mendatang dapat menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional yang melahirkan *insan kamil*.
 - 4) Mendorong pemerintah dan Parlemen untuk merevisi Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan terutama yang berhubungan dengan komersialisasi lembaga pendidikan.
- m. Pemuda dan Olahraga
- 1) Mendorong Pemerintah dan Parlemen untuk meningkatkan kualitas pemuda serta peningkatan prestasi olah raga di Indonesia
 - 2) Melakukan pembinaan generasi muda dengan model pendidikan, pelatihan dan up-grading, di berbagai profesi. Sekaligus menumbuhkan jaringan kerja sama antar pemuda di tingkat Nasional dan Internasional.

- 3) Memperjuangkan terbebasnya generasi muda dari bahaya narkoba, pergaulan bebas, dan penyakit kejiwaan lainnya yang mempunyai dampak negatif terhadap perkembangan generasi muda melalui peningkatan peranserta dan kesadaran dalam kegiatan masjid dan ke-Islaman lainnya.
- n. Pariwisata dan Kebudayaan
- 1) Mendorong pemerintah untuk mengembangkan pariwisata dan kebudayaan yang bernuansa Islam
 - 2) Mendorong pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kedisiplinan ketertiban sebagai budaya masyarakat modern dan Islami
 - 3) Ikut serta dalam mengembangkan pariwisata, seni dan budaya yang bernafaskan Islam
- o. Koperasi, UMKM dan BUMN
- 1) Mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
 - 2) Memperjuangkan kebijakan perdagangan dalam dan luar negeri untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan menengah.
 - 3) Memperjuangkan penguatan struktur industri nasional yang berbasis pada penggunaan bahan baku lokal.
 - 4) Mendorong terciptanya kerjasama Internasional yang bertumpu pada kesamaan derajat dan saling menguntungkan dalam bidang perdagangan.
 - 5) Memperjuangkan iklim investasi yang kondusif melalui pemberian insentif, penyederhanaan proses perizinan, kebijakan investasi yang progresif dan jaminan keamanan serta adanya kepastian hukum.
 - 6) Mendorong pengelolaan BUMN berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance* serta mencegah penjualan (swastanisasi) BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak.

- p. Energi dan Sumberdaya Mineral
- 1) Mendorong pemerintah dan Parlemen untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral untuk kemakmuran rakyat.
 - 2) Mendorong pemerintah untuk meningkatkan daya listrik dengan membangun sarana dan prasarana secara merata sampai kepedesaan.
 - 3) Memperjuangkan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral yang berbasis pelestarian lingkungan hidup.
 - 4) Mendorong pemerintah dan Parlemen untuk melakukan revisi terhadap Undang-undang tentang energi dan sumber daya mineral, khususnya mengenai *Contact Product Sharing* dengan pihak investor asing dan bagi hasil secara adil antara Pusat dan Daerah.
- q. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 1) Mendorong pemerintah dan Parlemen untuk meningkatkan peran serta perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya yang dilandasi nilai-nilai Islam.
 - 2) Memperjuangkan sistem jaminan sosial bagi fakir miskin, anak-anak terlantar dan jompo
 - 3) Mengawasi pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak
- r. Kependudukan dan Kesehatan
- 1) Mendorong peningkatan program - program kependudukan yang terencana untuk terciptanya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.
 - 2) Memperjuangkan pemerataan penyebaran penduduk dan perjuangan urbanisasi dari desa ke kota dengan menciptakan lapangan kerja di daerah oleh pemerintah.
 - 3) Memperjuangkan jaminan nasional tentang perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya fakir miskin.
 - 4) Memperjuangkan tumbuh dan berkembangnya industri obat tradisional yang berbasis tanaman rakyat.

- s. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
 - 1) Mendorong pemerintah untuk memberikan kemudahan pelayanan, proses administrasi dan perizinan bagi tenaga kerja Indonesia keluar negeri dan perlindungan hukum.
 - 2) Memperjuangkan adanya perlindungan asuransi bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri
 - 3) Melakukan penyempurnaan program transmigrasi yang berbasis ekonomi dan berkesinambungan
- t. Keuangan dan Perbankan
 - 1) Mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan berdasarkan prinsip syariah.
 - 2) Mendorong Pemerintah agar segera menertibkan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang perbankan Syariah.
 - 3) Memperjuangkan penyusunan peraturan perundang-undangan lembaga keuangan bukan bank yang berdasarkan prinsip Syariah.
 - 4) Memperjuangkan penggunaan mata uang emas dan perak sebagai salah satu alat tukar dalam perdagangan dalam negeri.

Pesan atau Khittah Perjuangan PBB baik secara *internal* dan *eksternal* itu ditetapkan di Medan pada 10 Jumadil Ula 1431 H/ 25 April 2010 M. Dan ini dijadikan sebagai dasar bagi pencapaian tujuan umum dan tujuan khusus yang ditetapkan dalam ADART Partai. Dan isi khittah perjuangan PBB ini semua ditanda tangani Pimpinan Muktamar III yang berlangsung di Medan, masing-masing ; Yasin Ardhy, SH (ketua), H Abdul Haq SH (sekretaris) dengan anggota ; Drs Dwianto Ananias, Ir.H. Eddy Wahyudin, MBA, Drs. H. Suwito Suprayogi, Lc, Dr. Ir. H. Masri Sitanggang, MP, Drs H. Sudarno Hadi, M.Pd, Sugianto, SH, MH, Adolf Gim Perangin

Di samping program internal dan eksternal PBB di atas yang dijadikan rujukan dan strategi perjuangan partai, maka pesan-pesan lainnya juga terkait dengan fungsi partai sebagai penyeimbang dan kontrol terhadap kekuasaan, fungsi pendidikan politik dan pemberdayaan masyarakat. Di Sumatera Utara, pesan-pesan dan fungsi tersebut dilaksanakan dengan

baik. Meski Dr Masri Sitanggang sebagai ketua DPW PBB namun tidak menduduki kursi legislatif. Tetapi peran dan fungsi dilakukan dan diterapkan kepada anggotanya yang duduk di legislatif agar menjadi pijakan dan perjuangan DPRD terpilih, dan sosok ketua di Pimpinan Wilayah Sumut saat itu, juga menyampaikan agar dewan dari PBB mengawal dan memperjuangkan kepentingan ummat Islam .

*”Ya kalau di masa saya, saya memang termasuk yang mungkin banyak memberikan tanggapan, respon, terhadap persoalan, peristiwa dan fenomena atau langkah-langkah kebijakan pemerintah, saya banyak ngomong kalau soal itu, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan ummat Islam, kita masih posisinya di situ dan, sedang saya sendiri tidak masuk anggota dewan, tapi kita perintahkan anggota dewan untuk mengkritisi hal itu, jadi sebagai lembaga partai politik kita tetap melakukan fungsi kontrol terhadap eksekutif tersebut. Sedangkan, pesan-pesan lainnya, yang penting adalah merubah mainsheet atau paradigma berfikir masyarakat tentang politik yang dianggap banyak negatif dan intriknya. Ya kalau kita sebatas yang sekarang ini, thema sentral kita adalah menegakkan Syariat Islam, kita berharap dan berkomunikasi melalui ustadz-ustadz bagaimana memberikan pemahaman kepada ummat ini supaya politik itu dianggap penting di masyarakat, kesulitan kita dan ini terlalu parah, karena kita sudah sedemikian rupa digambarkan politik ini begitu kotor sehingga dijauhi, jadi orang Islam itu sudah ngak mau cerita politik, belum lagi yang sekuler, sudah malas”.*³¹³

C. Saluran atau Media Politik Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Sumatera Utara

Unsur komunikasi politik berikutnya adalah *channel* atau saluran informasi politik. Saluran politik disebut juga dengan media politik. Sedangkan Media politik maksudnya adalah sarana atau *instrumen*/alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan politik. Sehingga saluran atau media politik itu digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya media cetak, yakni surat kabar, tabloid, majalah dan buku. Kemudian media elektronik yang penyampaian pesan politiknya berupa film, lewat radio, televisi, video, komputer, internet. Selanjutnya, Media format kecil, misalnya leaflet, brosur, selebaran, stiker, bulletin.

³¹³ Dr Masri Sitanggang MP, Ketua DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2016, pukul 14.30 s-d 16.00 di kediamana di Jalan Pasar 8 Bandar Khalifah Percut Sei Tuan.

Media luar ruang (*out door media*), misalnya baliho, spanduk, reklame, *electronic board*, bendera, jumbai, pin, logo, topi, rompi, kaos oblong, iklan mobil, gerbong kereta api, kalender, kulit buku, *block note*, pulpen, gantungan kunci, payung, dos jinjingan, kulit buku doa, kulit minuman aqua dan segala sesuatu yang biasa digunakan untuk membangun citra (*image building*), saluran komunikasi kelompok, misalnya struktur partai politik mulai dari DPP, DPW, DPD, DPC, DPAC/DPRT, RAYON, organisasi profesi, ikatan alumni, organisasi sosial keagamaan, karang taruna, kelompok pengajian, majelis taklim, kelompok tani dan nelayan, koperasi, persatuan olah raga, kerukunan keluarga, perhimpunan minat bakat dan semacamnya. Selain itu, saluran komunikasi publik, misalnya, aula, balai pertemuan, balai desa, pameran, alun-alun, panggung kesenian, pasar, swalayan (*supermarket, mall, plaza*), sekolah, kampus. Saluran komunikasi sosial, misalnya pesta perkawinan, acara sunatan, arisan, pertunjukan budaya seperti wayang, tor-tor, dan lain-lain, pesta rakyat, rumah ronda, sumur umum, pesta tani, dan semacamnya.

Data penelitian yang ditemukan di DPW PBB Sumatera Utara media politik tersebut juga dijalankan fungsinya. Ada yang bersifat media cetak dan media elektronik. Pentingnya eksistensi media tersebut diakui sendiri oleh Dr Masri Sitanggang sebagai ketua DPW PBB Sumatera Utara, persisnya ketika dirinya menulis tentang politik Islam di Media cetak surat kabar mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari konstituen atau pembaca, bahkan bisa memberikan informasi berharga tentang tujuan berpolitik dalam Islam.

“Ya, kalau kita berharap semua kader itu adalah komunikator atau orang yang menyampaikan pesan, kemudian kita berharap kader partai, apalagi di tingkat pengurus DPW, mestinya dia sudah menjadi komunikator politik, menyampaikan pesan, dan pesannya itu harus dikuasai adalah ideologi partai. Contoh yang sederhana, bahkan paling sederhana, PBB itu tujuan khususnya adalah menegakkan syariat Islam di Indonesia, nah persoalannya sekarang adalah berapa banyak pengurus DPW yang paham tentang syariat Islam, ini yang jadi soal, jadi pesannya itu tidak sampai. nah ketika dia tidak menguasai pesan yang akan disampaikan kepada khalayak pendengarnya, audiensnya, maka dia tidak efektif berkomunikasi, nah di situlah persoalannya. Maka ketika orang-orang dengan pengalaman saya, ketika kita sampaikan itu dan ketika kita tulis di koran, maka respon orang atau khalayak bagus. Misalnya: mengapa kita perjuangkan syariat Islam di Indonesia, apakah ada hak kita memperjuangkan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan

*UUD 1945, maka itu harus diuraikan panjang dan bisa diperdebatkan dengan khalayak ramai, termasuk juga petarung atau lawan tanding kita dengan partai lain spt PDIP, Golkar dan lain lain. Harus begitu memang”.*³¹⁴

Sesuai data wawancara tersebut, terlihat benar Dr Masri Sitanggang menggunakan media untuk menyampaikan pesan politik. Adapun media yang digunakan adalah media cetak yakni harian Waspada bahkan Koran harian terbitan kota Medan itu Dr Masri Sitanggang tercatat sebagai salah satu kolumnis..

Di PBB juga terdapat media cetak lainnya yakni majalah yang terbit sekali sebulan yang diperuntukkan bagi *internal* PBB, Media tersebut bernama Majalah Abadi yang dikutip dari nama majalah resmi di masa Masyumi dulu, dan majalah tersebut sangat dirasakan efektivitasnya, sebagaimana ditegaskan Dr Masri Sitanggang, sebagai berikut.

*”Di PBB ada Abadi, karena dulu namanya di Masyumi adalah Abadi, maka dibuat lagi Abadi, ada majalah Bulan Bintang. Terbitnya Sebulan sekali, tapi sekarang sudah tidak nampak lagi. Iya, dan sebenarnya kalau mau belajar banyak tentang pemikiran-pemikiran dan ide PBB, seperti, Yusril yang jadi nara sumber di berbagai even maka sangat dahsyat media tersebut, begitu juga tokoh-tokoh lain dan para ulama, hanya persoalannya sekali lagi, memang karena mungkin selama ini, sudah persepsi orang tentang partai politik ini hanya ingin menjadi anggota dewan, nah ini yang mencederai, bahkan yang seperti ini tidak tabu lagi. Bahkan secara objektif kekuatan media tersebut sangat berpengaruh, sebagai contoh kekuatan partai Nasdem yang bisa eksis meraih suara yang signifikan, karena kekuatan yang ditopang Metro TV dan Harian Media Indonesia”.*³¹⁵

Tak hanya bangunan Parpol yang bisa ditopang media, lebih dari itu, Masri yang merupakan pentolan PBB Sumatera Utara itu juga merasakan peran media yang tak hanya mampu membangun partai politik, namun mampu mengubah seluruh lini kehidupan sosial.

”Kalau peran media itu sih tidak hanya di bidang partai politik, bahkan semua aspek kehidupan sekarang ini, media itu menjadi satu kekuatan yang sangat berpengaruh dan yang merusak itu karena kita kalah bertarung dalam bidang media dalam membangun opini itulah salah satu poin pentingnya. Sekarang misalnya Metro TV dan juga beberapa stasion TV

314 Dr Masri Sitanggang MP, Ketua DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2016, pukul 14.30 s-d 16.00 di kediamana di Jalan Pasar 8 Bandar Khalifah Percut Sei Tuan.

315 Dr Masri Sitanggang MP, Ketua DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2016, pukul 14.30 s-d 16.00 di kediamana di Jalan Pasar 8 Bandar Khalifah Percut Sei Tuan.

tersebut, bahkan media cetak seperti koran Kompas, mereka memunculkan tokoh-tokoh yang Islamnya sekuler dan bukan aktivis ideologis, maka rusak-lah ummat ini, kira-kira seperti itu, jadi misalnya pesan tidak perlu partai Islam dipilih, yang penting berbuatya.³¹⁶

Jadi saluran komunikasi politik yang berlangsung di PBB melalui media cetak, yakni menggunakan surat kabar untuk menulis pesan politik, ada dalam bentuk majalah, sedang dalam bentuk buletin lebih bersifat dijalankan beberapa caleg PBB. Sedangkan melalui Media elektronik. Misalnya film, radio, televisi, video, komputer, internet. Masih sangat terbatas, karena menyangkut pendanaan. PBB sendiri ada menggunakan media internet, dengan membuka website resmi, demikian juga untuk menjangkau pemilih yang aktif di media sosial, terutama pemilih pemula, bebarapa akun *facebook* resmi juga dimiliki PBB, termasuk pengurus PBB juga aktif menggunakan media sosial tersebut. Adapun Media format kecil, misalnya leaflet, brosur, selebaran, stiker, bulletin. Media luar ruang (*out door media*), misalnya baliho, spanduk, reklame, *electronic board*, bendera, jumbai, pin, logo, topi, rompi, kaos oblong, iklan mobil, gerbong kereta api, kalender, kulit buku, *block note*, pulpen, gantungan kunci, payung, dos jinjingan, kulit buku doa, kulit minuman aqua dan segala sesuatu yang biasa digunakan untuk membangun citra (*image building*) juga digunakan PBB Sumatera Utara, tapi lebih dilaksanakan para Caleg PBB yang kreatif dan inovatif dalam merebut suara pemilih.

Adapun saluran komunikasi kelompok, misalnya partai politik (DPP, DPW, DPC, DPAC/DPRT, RAYON), secara struktural digerakkan sebagai mesin partai dalam merebut suara konstituen, akan tetapi struktur partai tersebut tentu akan berkompetisi dengan struktur partai selain PBB, baik dengan sesama parati Islam seperti PPP, PKS, PAN dan PKB, termasuk dengan partai Nasionalis PDIP, GOLKAR, DEMOKRAT, GERINDRA, NASDEM, HANURA DAN PKPI. Keberanaan kantor sekretariat partai dan fungsi humas partai juga sangat dirasakan eksistensinya.

Di Sumatera Utara, persisnya saat Dr Masri Sitanggang 2010-2015 menduduki tampuh Pimpinan Wilayah, kantor sekretariat PBB berada di Jalan Karatina Kec. Medan Timur, sedangkan saat ini kantor berpindah di Medan Amplas. Artinya keberadaan skretariat PBB Sumatera Utara belum

316 Dr Masri Sitanggang MP, Ketua DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2016, pukul 14.30 s-d 16.00 di kediamana di Jalan Pasar 8 Bandar Khalifah Percut Sei Tuan.

bersifat permanen atau belum memiliki kantor sendiri, namun bersifat, sewa-menyewa yang tentu terbatas waktu sesuai kontrak dengan pemilik. Namun pentolan DPW PBB Sumut meyakinkan bahwa fungsi humas dan sekretariat berjalan.

“Ada yang membidangi humas, sedangkan memaksimalkan fungsi humas, ukuran maksimalnya kita belum ada standart, tapi memang sistemnya ada beberapa wartawan yang kita rekrut menjaadi pengurus, yakni para wartawan yang bervisi Islam, jurnalis muslim. Nah mereka kita minta sebagai humas, tapi harus jujur kita akui fungsi humas ini masih agak kurang di PBB. Dan dulu kantornya di jalan Karantina Medan Timur, karena kantor ini belum bisa dibiayai secara penuh, kemudian pengurus partai juga kebanyakan bekerja masing-masing, sehingga fungsi sekretariat tersebut tidak atau belum maksimal, tetapi, untuk rapat-rapat tetap dijalankan, yakni dua kali seminggu dan hal-hal insidental yang sifatnya rapat juga dibuat jika ada hal yang mendesak. Paling tidak minimal sekali seminggu ada.”³¹⁷

Dr Masri juga tak menampik, kalau slogan partai yang bernafaskan Islam itu, yakni “Menjadikan Hukum sebagai Panglima” kurang populer, seperti populernya slogan partai lain, itu dikarenakan fungsi humas yang kurang maksimal.

“Nah, kerana fungsi Humas ini kurang maksimal maka slogan ini tidak begitu populer seperti populernya slogan di partai lain, antara lain : PKS dengan slogan Bersih dan Peduli. Begitu juga PDIP dengan slogan Partai Wong Cilik, serta Golkar yang berslogankan Suara Rakyat Suara Golkar dan lain-lain”³¹⁸

Secara faktual, soal saluran komunikasi kelompok ini, berdasarkan analisis peneliti terdapat *rivalitas* sesama partai Islam sendiri, baik dengan PKS, PPP, PAN, PKB, sehingga bisa memunculkan kompetisi yang tidak sehat sesama partai Islam tersebut. Terlebih ada juga wacana yang dimunculkan agar partai-partai tersebut dileburkan saja jadi satu partai atau fusi. Namun, ide atau wacana tersebut tidak mendapat respon yang kuat dari berbagai partai Islam tersebut. Padahal fusi ini sangat memungkinkan karena ada semangat ideologi yang sama. Di samping itu juga untuk menghadapi persentasi ambang batas atau PT yang semakin

³¹⁷ Dr Masri Sitanggang MP, Ketua DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2016, pukul 14.30 s-d 16.00 di kediamana di Jalan Pasar 8 Bandar Khalifah Percut Sei Tuan.

³¹⁸ Dr Masri Sitanggang MP, Ketua DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2016, pukul 14.30 s-d 16.00 di kediaman beliau Jalan Pasar 8 Bandar Khalifah Percut Sei Tuan.

diperbesar dan juga menguntungkan dalam membangun koalisi untuk pencalonan pilpres ataupun pilkada. Dan bagi ummat Islam sendiri, akan lebih memudahkan mereka untuk menyatukan pilihan dan tidak membingungkan karena banyaknya pilihan dan polarisasi elit politik Islam yang kadang memunculkan perbedaan yang tajam. Mungkinkah partai-partai Islam disatukan atau berfusi? Berikut ketegasan Dr Masri Sitanggang.

“Jadi begini, kalau orang sudah berbicara tentang partai, nah di sini kesalahan kita memandang, dan kita juga gak bisa salahkan, karena yang namanya partai adalah kekuasaan. Nah itu yang barangkali, paradigma berpartai itu yang harus dirobah, ketika kita merasa berpartai. Sayang kawan-kawan tidak melihat PPP, PKB, PAN, PKS PBB, gak bisa melihat, ini lho, lawan tanding kita bukan PKS, lawan kita yang di luar, nah ini yang tidak mampu melihatnya. Jadi kalau misalnya nanti orang PKS melihat PBB sebagai lawan tandingnya, nah ini salah. Dan itu sengaja dibuat orang agar bertanding dan kita terpancing, jadi gak usah susah-susahlah. Jadi kemarin saya buat di FB tentang fenomena Ahok ini, harus kita syukuri, inilah jalan keluar yang Allah beri Allah, sehingga ummat Islam bisa bersatu, walau elit-elit partai Islam sulit disatukan”³¹⁹

D. Sasaran atau Target Politik Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Sumatera Utara

Sasaran atau target politik yang dimaksud dalam unsur komunikasi politik ini adalah konstituen atau diistilahkan dalam ilmu komunikasi yakni komunikan. Dalam konteks komunikasi politik, maka sasaran atau target politik adalah *goal* atau tujuan yang ingin dicapai, yakni mendapatkan suara dukungan sebanyak-banyaknya dalam pemilu, sehingga suatu partai bisa memenuhi jumlah suara yang diatur undang-undang dalam alokasi satu kursi di parlemen. Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberi dukungan dalam bentuk pemberian suara (*vote*) kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum atau pesta politik. Mereka adalah konstituen atau masyarakat yang sudah punya hak suara untuk ikut menggunakan hak politiknya baik pengusaha, Pegawai Negeri Sipil (PNS), buruh, pemuda, petani, perempuan, pegawai swasta, ibu rumah tangga,

³¹⁹ Dr Masri Sitanggang MP, Ketua DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2016, pukul 14.30 s-d 16.00 di kediaman beliau Jalan Pasar 8 Bandar Khalifah Percut Sei Tuan.

pensiunan, veteran, pedagang kaki lima, para tukang (kayu, batu, cukur, becak) orang cacat, mahasiswa, tuna netra, supir angkutan, dosen, guru, nelayan, para siswa atau remaja yang sudah punya hak pilih yakni berusia minimal 17 tahun . Mereka ini semua menjadi sasaran atau target politik, sebagai komunikan yang harus direbut simpati dan suara mereka dalam pemilihan.

Masyarakat atau rakyat Sumatera Utara dikenal sangat *heterogen* atau beragam dari segi etnis, budaya, profesi, wilayah keaderahan, dan agama menjadi komunikan yang sangat unik dan kompleks dalam mendapatkan *vote* atau suara mereka. Sumatera Utara bahkan menjadi miniatur Indonesia terkait dengan keragaman tersebut, Sumut adalah Indonesia yang sesungguhnya. Di sini semua etnis ada, tidak hanya suku atau etnis asli Suatera Utara, tapi etnis pendatang juga sangat banyak, bahkan masyarakat etnis Jawa termasuk yang sangat dominan di Sumatera Utara. Organisasi Pujakesuma (Putera Jawa kelahiran Sumatera) termasuk yang besar massanya. Demikian juga dengan etnis Minangkabau, etnis Aceh, Banten, Bugis, Manado termasuk etnis Cina atau Tionghoa juga sangat banyak. Di samping itu di Sumut juga sangat dominan pengaruh ormas-ormas baik berbentuk kesukuan (Adat) ada ormas FORKALA (Forum Komunikasi Lembaga Adat), ormas masing-masing Suku, Ormas kepemudaan atau OKP, demikian juga ormas keagamaan (MUI, NU, Muhammadiyah, Al-Washliyah, Ittihadiyah, Persis, dll) sangat dominan di tengah-tengah masyarakat. Karena itu bicara tentang sasaran politik maka tidak lepas dari segmentasi masyarakat Sumut tersebut, sehingga dalam komunikasi politik dibutuhkan dukungan luas dan rekomendasi dari berbagai elemen tersebut, Shohibul Anshar Siregar sebagai ahli sosiologi politik yang banyak diundang berbagai media, menyatakan untuk duduk sebagai caleg di sumut, dibutuhkan tiga dukungan komponen besar, yang beliau istilahkan dengan USU (Uang, Suku dan Ummat).

Beda lagi, Dr Anang Anas Azhar dalam penelitian disertasinya yang mengistilahkan dukungan agar caleg duduk menjadi anggota legislatif dengan istilah 3K (Keuangan, Kesukuan dan Keagamaan). Berikut peneliti gambarkan etnis asli di Sumatera Utara dan juga jumlah penduduk berdasarkan agama yang peneliti dapatkan dari situs Badan Pusat Statistik Sumut.

Komunikan atau sasaran politik yang harus direbut oleh PBB Sumatera Utara adalah penduduk Sumatera Utara yang sudah memiliki hak suara

dari jumlah penduduk 12.982.204 secara etnis, terdiri dari delapan etnis asli yakni, Melayu, Batak Toba, Batak Mandailing/Angkola, Batak Karo, Batak Pesisir, Simalungun, PakPak dan Nias. Di samping delapan etnis asli tersebut juga terdapat etnis pendatang yang juga dominan, yakni suku Jawa, Minang, Aceh, dll. Adapun jumlah penduduk atau aspek demografis masyarakat Sumatera Utara menurut agama berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang peneliti peroleh, yakni : Jumlah penduduk provinsi Sumatera Utara dilihat dari agama yang dianut oleh penduduk Berdasarkan data sensus tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara sebesar 12.982.204 jiwa yang merupakan provinsi dengan penduduk terbesar di Pulau Sumatera, Dan penduduk terbesar di Provinsi ini berada di Kota Medan. Adapun Provinsi ini terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 kota.

Provinsi Sumatera Utara



Bila di lihat dari besaran agama yang paling banyak di anut, dominan penduduk Provinsi Sumatera Utara memeluk agama Islam, yang berikutnya adalah Agama Kristen, Katolik dan Budha. Agama Islam menjadi mayoritas di beberapa kabupaten dan kota di antaranya Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Labuhan Batu, Asahan, Simalungun, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Batu Bara, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Kota Sibolga, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Medan, Binjai dan Kota padangsidempuan, sedangkan di kota dan kabupaten lainya yang tidak disebutkan di atas, sebagian besar penduduknya menanut agama Kristen. Sedangkan Agama Katolik dengan jumlah besar di Provinsi ini ada di Kabupaten Karo, Nias Selatan, Samosir, Deli Serdang dan Simalungun, Agama Budha dengan populasi besar berada di Kota Medan.

Dalam pengambilan data dimaksud, dari total jumlah penduduk yang didata, ditemukan data yang tidak terjawab sebesar 1.760 Jiwa dan tidak ditanyakan sebesar 50.613 jiwa, dan lainnya sebesar 5.088 jiwa. Maka ketiga jumlah itu jika ditambahkan dengan jumlah penduduk yang terdata pada tabel, yang ditemukan adalah jumlah total penduduk dalam provinsi di maksud. Adapun pada kolom jumlah dalam tabel, untuk sub jumlah pada tiap kabupaten dan kota, adalah penjumlahan dari besaran yang ada pada kolom-kolom Agama di sampingnya, sedangkan selisih kurang dari jumlah tersebut adalah mereka yang masuk pada kategori data tidak terjawab dan tidak terdata seta lain-lain.

Untuk lebih lengkapnya data kependudukan dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Kota/Kabu- paten	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khong Hu Chu	Jumlah
Nias	1,536	113,293	16,510	0	0	4	131,377
Mandailing Natal	386,771	12,452	454	10	16	0	404,945
Tapanuli Selatan	207,372	51,735	2,544	3	15	0	263,815
Tapanuli Tengah	132,932	141,013	36,146	18	208	3	311,232
Tapanuli Utara	13,301	251,991	12,815	2	139	5	279,257
Toba Sa- mosir	10,738	147,894	11,424	37	74	5	173,129
Labuhan Batu	344,224	57,921	4,811	53	6,637	9	415,110
Asahan	594,366	61,161	4,513	109	6,848	11	668,272
Simalun- gun	468,328	302,302	42,132	128	1,965	13	817,720
Dairi	42,302	196,592	30,476	20	272	6	270,053
Karo	91,796	204,283	51,678	130	1,518	4	350,960
Deli Ser- dang	1,400,527	301,106	44,388	2,989	36,380	96	1,790,431
Langkat	876,405	75,001	3,997	409	7,676	20	967,535
Nias Sela- tan	7,394	223,843	58,123	6	31	2	289,708

Humbang Hasun- dutan	5,165	142,662	23,410	0	2	0	171,650
Pakpak Bharat	16,161	23,065	1,223	0	0	0	40,505
Samosir	1,884	69,947	47,575	8	5	1	119,653
Serdang Bedagai	497,855	79,502	8,299	207	7,264	43	594,383
Batu Bara	330,076	37,757	5,715	25	1,100	40	375,885
Padang La- was Utara	200,459	20,838	832	3	12	0	223,531
Padang Lawas	213,948	10,777	379	0	5	0	225,259
Labuhan Batu Sela- tan	238,682	36,870	1,318	16	622	15	277,673
Labuhan Batu Utara	271,919	52,492	4,012	30	1,801	9	330,701
Nias Utara	6,894	99,529	20,676	2	1	0	127,244
Nias Barat	1,621	64,417	15,740	2	12	1	81,807
Kota Si- bolga	48,358	29,729	3,741	2	2,512	14	84,481
Tanjung Balai	131,339	12,348	1,168	27	8,781	27	154,445
Pematang Siantar	103,029	109,236	11,065	265	10,226	27	234,698
Tebing Tinggi	113,344	18,689	1,327	217	10,313	70	145,248
Kota Med- an	1,422,237	425,253	37,552	9,296	184,807	370	2,097,610
Kota Binjai	209,426	19,396	2,004	630	13,391	182	246,154
Padangsi- dimpuan	172,290	17,123	878	0	670	5	191,531
Gunungsi- toli	17,151	99,483	9,112	0	245	2	126,202
Prov. Su- mut	8,579,830	3,509,700	516,037	14,644	303,548	984	12,982,204

Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Dari jumlah penduduk berdasarkan agama di atas maka penduduk muslim di Sumut berjumlah 8.579.830 jiwa atau berjumlah 68%, namun tidak semua penduduk tersebut punya hak pilih karena ketentuan pemilu menyatakan yang punya hak pilih harus penduduk yang sudah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Adapun jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) tahun 2014 yang disahkan KPU yakni Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara menetapkan jumlah daftar pemilih tetap untuk pemilihan

legislatif dan presiden tahun 2014 sebanyak 9.902.948 jiwa yang tersebar di 33 kabupaten/kota. Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) itu diputuskan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri komisioner 33 kabupaten/kota di Aula KPU Sumut di Medan, Jumlah DPT di Sumut itu tersebar di 27.378 tempat pemungutan suara (TPS) di 6.017 desa/kelurahan yang ada di Sumut. Jika dilihat dari aspek gender, DPT di Sumut tersebut terdiri dari 4.904.381 pemilih laki-laki dan 4.998.567 pemilih perempuan. Ditegaskan Ketua KPU Sumut Mulia Banurea .

“Berdasarkan pemutakhiran data yang dilakukan, ada penambahan pemilih sebanyak 62.386 jiwa dibandingkan DPT untuk pemilihan legislatif. Sedangkan jumlah TPS berkurang sebanyak 2.877 TPS disebabkan jumlah pemilih bertambah menjadi sekitar 800 jiwa per TPS. Pimpinan Bawaslu Sumut Aulia Andri yang menghadiri rapat pleno terbuka itu mengharapkan KPU dapat memperbaiki nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (NKK) yang invalid dan tidak dimasukkan dulu dalam DP “Jumlahnya masih banyak, khawatirnya nanti hasilnya ‘bodong’ lagi,” kata Aulia. Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka, DPT itu berada di Kabupaten Asahan 489.542 jiwa, Batubara 292.911 jiwa, Dairi 204.494 jiwa, Deliserdang 1.346.089 jiwa, Humbang Hasundutan 123.200 jiwa, Karo 275.446 jiwa, Labuhan Batu 301.010 jiwa, Labuhan Batu Selatan 191.101 jiwa, dan Labuhan Batu Utara 236.819 jiwa. Kemudian, Kabupaten Langkat 714.017 jiwa, Mandailing Natal 307.312 jiwa, Nias 89.981 jiwa, Nias Barat 54.588 jiwa, Nias Utara 86.486 jiwa, Nias Selatan 257.131 jiwa, Padang Lawas 158.973 jiwa, Padang Lawas Utara 156.109 jiwa, Pakpak Bharat 301.132 jiwa, dan Samosir 90.557 jiwa. Selanjutnya, Kabupaten Serdang Bedagai 452.315 jiwa, Simalungun 637.496 jiwa, Tapanuli Selatan 198.035 jiwa, Tapanuli Tengah 219.961 jiwa, Tapanuli Utara 210.048 jiwa, dan Toba Samosir 128.722 jiwa. Sedangkan di Kota Medan 1.746.831 jiwa, Binjai 182.642 jiwa, Gunung Sitoli 86.454 jiwa, Padangsidempuan 144.714 jiwa, Pematang Siantar 193.097 jiwa, Sibolga 62.095 jiwa, Tanjung Balai 111.569 jiwa, dan Tebing Tinggi 123.071 jiwa.³²⁰ (ant)”

Komunikasikan atau struktur masyarakat yang sangat heterogen ini, membutuhkan strategi khusus untuk merebut suara mereka. Di samping itu juga corak masyarakat yang berbeda menurut tingkat pendidikan, ekonomi, dan lain-lain menjadikan Sumatera Utara lebih dinamis dan menarik untuk diteliti. Penduduk juga terdapat di perkotaan dan pedesaan, tentu secara sosiologi, terdapat perbedaan kedua struktur masyarakat tersebut. Ketika peneliti bertanya tentang keragaman komunikasi yang di

³²⁰ Sumber Berita KPU Sumut dari Antara dan wawancara dengan Mulia Banurea, ketua KPU Sumut tanggal 23 Desember 2016 di kompleks UIN Sutom Medan

pedesaan dan perkotaan, maka menurut Dr Masri Sitanggang, komunikasi tersebut didekati dengan strategi yang berbeda juga.

*”Kalau garis besarnya ya sama saja, tapi ada teknis-teknis pendekatan yang harus berbeda, kalau di desa itu, kan masih kental ia ada tokoh yang jadi panutan (tokoh lokal), ada si Anu atau si A yang jadi rujukan, Berarti memanfaatkan tokoh-tokoh lokal Ya, kita gunakan itu, memanfaatkan tokoh-tokoh lokal, tokoh-tokoh kharismatik, nah bedanya dengan di kota, hal ini tidak terasa lagi itu, karena lebih terbuka dan egaliter”.*³²¹

Demikian juga dalam menghadapi struktur pemilih ada yang tradisional, transaksional dan rasional, maka pendekatannya juga, ada langkah-langkahnya, hanya saja jenis pemilih atau komunikasi sebagai target politik, saat ini dalam pengamatan peneliti, lebih banyak yang bersifat transaksional, atau ada nilai transaksi yang bersifat iming-iming, uang, sembako, baju kaos, bantuan mukena, kain sarung, alat *sound system* (pengeras suara), tikar, dll, pemilih jenis inilah yang merusak kualitas pemilu. Pemilih lebih bersifat *pragmatisme* dan mau dibayar, sehingga budaya *money politic* menjadi sangat kental dan terasa dalam praktek berdemokrasi kita, tidak heran jika Sumatera Utara, yang data terakhir masuk dalam zona pengawasan KPK tentang korupsi. Beberapa kepala daerah sudah dijebloskan ke penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi, seperti Gubernur Syamsul Arifin, menyusul Gatot Pudjo Nongroho, bahkan yang terakhir ini melibatkan banyak pihak, baik eksekutif maupun legislatif, sejumlah pimpinan dan anggota Paremlemen di DPRD Sumatera Utara juga sudah ditahan KPK, banyak pihak menyebutnya dengan istilah “korupsi berjamaah”.

Prilaku koruptif eksekutif dan legislatif ini, sangat berhubungan dengan perilaku pemilih yang cenderung transaksional. Karena itu untuk menjadi anggota parlemen dan kepala daerah mereka harus mengeluarkan *kost* atau dana yang cukup besar, maka setelah terpilih, mereka akan mengembalikan modal *kost* tersebut lebih dahulu, akhirnya banyak rambu-rambu hukum akan ditabrak, dan disinilah pangkal budaya koruptif tersebut. Terkait dengan tiga klasifikasi pemilih “*tradisional, transaksional dan rasional*”. Dr Masri Sitanggang punya pandangan menarik. Bahkan dikupas secara lebih rinci pemilih yang diklasifikasikan dalam tiga kategori itu.

³²¹ Dr Masri Sitanggang MP, Ketua DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2016, pukul 14.30 s-d 16.00 di kediaman beliau Jalan Pasar 8 Bandar Khalifah Percut Sei Tuan.

*“Ya tradisonal ini memang lebih dekat dengan ikatan-ikatan emosional, ikatan historis dan ideologikal, dan ini di PBB juga banyak, misalnya eks Masyumi dulu. Misalnya ada pemilih yang berkata, ini eks partai atokku dulu ini, bahkan yang pernah mengikuti saat mudanya dulu ikut Masyumi maka itu tetap ke PBB dan itu cukup banyak. Sedangkan yang transaksional juga, karena ini memang tidak bisa dibendung, dan ada beberapa anggota kita akhirnya gara-gara corak ini lunturlah pemilih tradisional tersebut dan ini dominan sekali merusak. Sedangkan pemilih rasional lebih dibutuhkan pencerahan dan dialog, jenis pemilih ini sebagai lokomotif berkualitasnya pemilu, jujur harus diakui pendidikan sebagian besar masyarakat masih banyak yang dibawah SMU/ sederajat akhirnya menjadikan kelompok pemilih ini tidak dominan sehingga dengan kondisi ini, agak sulit mendapatkan hasil pemilu yang berkualitas dan maksimal, demikian juga Aleg (Anggota Legislatif) yang dihasilkan juga akan jauh dari yang diharapkan. Seorang sarjana atau bahkan Doktor akan bisa dikalahkan yang tamat SMU asalkan memiliki cost atau anggaran kampanye yang besar, bahkan untuk mendapatkan nomor urut utama di partai juga akan bisa dia dapatkan. Untuk pemilih rasional ini, misalnya kampus, apakah ada strategi khusus untuk menggarap ini? Kalau ini strategi khusus kita ya, mengajak dialog, dan memberikan pencerahan sebagai alternatif untuk memilih PBB tersebut dan kita memaparkan tentang hal apa sekarang bagaimana, mau seperti anda bayangkan, jadi kita ajak ngobrol”.*³²²

Menyikapi pemilih transaksional itu, Bustami Manurung mengungkapkan realitas PBB tahun 2014 gagal, bahkan tak memiliki keterwakilan di parlemen tingkat pusat, bahkan dia mengurai persoalan transaksional saat itu ditabuhkan oleh yang lahir era reformasi serta memiliki benang merah dengan partai pemenang pemilu pertama itu. Adapun terkait dengan pemilih transaksional Bustami Manurung menukarkan.

“Itu jadi persoalan, pengalaman kita pemilu di 2014 termasuk kegagalan kita hampir di Sumatera Utara untuk Provinsi. Kami berada di posisi nomor dua terakhir, bahkan tidak dapat kursi. Dan tidak sedikit meskipun kami gak berani mengatakan tidak sedikit data yang kita peroleh bahwasannya kita dizholimi. Pemilih ini luar biasa transaksionalnya. Dan untuk itu bukannya orang PBB miskin-miskin kali. Cuma agak ditabuhkan, dilarang, dan itu di Lantang dalam pelatihan caleg waktu itu dibuat ada kaderisasi khusus caleg, itu memang bahasa kasarnya diharamkan.

³²² Dr Masri Sitanggang MP, Ketua DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2016, pukul 14.30 s-d 16.00 di kediaman beliau Jalan Pasar 8 Bandar Khalifah Percut Sei Tuan.

*Yang kita utamakan kala itu adalah tingkat sosialisasi pada masyarakat menjelaskan partai ini”.*³²³

Namun menariknya, masyarakat yang muslimnya minoritas PBB bisa meraih suara di Tapanuli Tengah 1 Kursi, di Sibolga meraih 2 kursi, dalam pengamatan yang peneliti lakukan, hal ini tidak lepas dari kerja keras Caleg yang ditempatkan di Dapil tersebut, di samping faktor popularitas mereka di masyarakat karena diambil dari tokoh berpengaruh di masyarakat, termasuk pendanaan yang mencukupi sehingga bisa bersaing dengan caleg-caleg dari partai-partai besar lainnya. Justru yang menarik PBB meraih 1 kursi di Nias Selatan, yang muslimnya minoritas, dan setelah peneliti wawancarai saudara Yunus Harahap, dia menyebut Caleg tersebut ternyata beragama non muslim.

Ini menjadi menarik dan unik, karena sesuai dengan azas dan khittah perjuangannya PBB berasaskan Islam, akan tetapi caleg terpilihnya beragama non Islam. bahkan PBB juga banyak meraih kursi di Papua, lalu kenapa PBB mencalonkan non muslim, berikut kejelasan yang diutarakannya.

*” Tidak ada larangan caleg atau anggota DPRD yang diajukan PBB berasal dari non muslim, karena yang utama mereka setuju dengan prinsip perjuangan partai, mereka loyal dan hal itu sudah dijelaskan sejak awal mereka bergabung dan ikut jadi caleg PBB. Di samping itu PBB juga mengembangkan misi rahmatann lil alamin, dan Azas Islam atau syariat Islam juga meenjamin kehidupan non muslim, hal yang menarik, selama ini tidak ada masalah, dan jika diminta partai mereka juga siap berkorban. Tentu pancalegkan non muslim ini juga disesuaikan dengan wilayahnya, di mana mereka mayoritas sebagai penduduknya, dan Nias Selatan mayoritas penduduknya Kristen. Terpilihnya mereka juga disebabkan faktor populer di masyarakat, tokoh kharismatik tingkat lokal, di samping memang Sumatera Utara ada jaringan kesukuan, keummatan dan keagamaan, sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya”.*³²⁴

E. Pengaruh atau Efek Komunikasi Politik Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Sumatera Utara

³²³ Bustami Manurung, Wakil Sekretaris DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu Tanggal 18 September 2016, pukul 16-17.30 di Caf  Yuki Plaza.

³²⁴ Bustami Manurung, Wakil Sekretaris DPW PBB Sumut, Wawancara yang diadakan pada hari Rabu Tanggal 18 September 2016, pukul 16-17.30 di Caf  Yuki Plaza.

Komunikasi pada prinsipnya dianggap berhasil jika terjadi persamaan pandangan antara komunikator dengan komunikan terkait isi pesan yang disampaikan, keberhasilan komunikasi sesungguhnya bukanlah pada komunikator tapi pada komunikan. Karena itu dalam berkomunikasi ada hukum komunikasi yang harus dijalankan yang disingkat dengan REACH *respect* (menghargai), *Empaty* (merasakan yang dirasakan orang lain), *Audible* (mendengarkann), *Clarity* (jelas) dan *Humble* (bersikap reendah hati). Komunikasi akan dianggap efektif dan berhasil ditandai dengan adanya pengaruh yang membuat komunikan mau melaksanakan atau tertarik dan tersugesti melaksanakan apa yang diinginkan komunikator. Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptaya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik., dimana nuansanya akan bermuara pada pemberian suara (*vote*) dalam pemilihan umum. Pemberian suara ini sangat menentukan terpilih tidaknya seorang kandidat untuk posisi mulai dari tingkat Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, anggota DPR, MPR, DPD, DPRD, termasuk dipilihnya partai politik tertentu. Karena pentingnya pengaruh politik atau efek politik tersebut maka pendidikan politik yang dilakukan partai politik menjadi suatu keharusan yang diberikan kepada masyarakat.

Efek komunikasi politik yang menjadi target DPW PBB sumatera Utara adalah untuk mendapatkan vote (suara) sebanyak-banyaknya dalam setiap even pemilu. Bagaimana konstituen tertarik dan tergerak untuk menjatuhkan pilihannya dalam bentuk perolehan suara. Sosialisasi dan penyampaian program kerja menjadi keniscayaan, demikian juga dengan citra partai dan popularitas caleg-caleg yang dimajukan, di samping masalah logistik dan finansial. Banyak faktor yang harus disiapkan untuk mendapatkan pengaruh yang bisa meyakinkan konstituen.

Berbagai teori komunikasi yang peneliti kemukakan pada bab sebelumnya (pada landasan teoretis), menjadi acuan peneliti dalam menganalisis pengaruh atau efek komunikasi politik ini, yakni :

1. Analisis Teori SOR

Teori S-O-R adalah singkatan dari *stimulus-organism-response* ini semua berasal dari psikologi. Kalau kemudian menjadi juga teori komunikasi, tidak mengherankan, karena objek material dari Psikologi dan ilmu Komunikasi adalah sama, yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen-komponen, sikap, opini, perilaku,

kognisi, afeksi dan konasi.³²⁵ Prof. Dr. Mar'af dalam bukunya "Sikap Manusia, Perubahan serta Pengukurannya" mengutip pendapat Hovland, Janis, dan Kelley yang menyatakan bahwa dalam menelaah sikap yang baru ada tiga variabel penting, yaitu: Perhatian, pengertian, penerimaan. Dalam pendekatan teori ini, maka komunikator politik DPW PBB Sumut diharuskan menyampaikan pesan secara terus-menerus dan sistematis. Ibarat sebuah pengumuman pesan tersebut tidaklah cukup disampaikan sekali, tapi harus beberapa kali dan diulang-ulang. Kalau dilihat konteks *running text* (teks berjalan) yang ada di televisi, maka teks tersebut dijalankan berulang-ulang sehingga menarik perhatian audiens atau penonton. Dalam merebut suara atau menancakan pengaruh bagi khalayak pemilih ini, maka tidaklah bisa partai dijalankan dengan konvensional atau biasa-biasa saja, tapi harus dijalankan dengan profesional dengan program yang terusus legkap dengan SOPnya. Militansi dan loyalitas komunikator politik yakni pengurus partai mutlak diperlukan, nah inilah salah satu kelemahan DPW PBB Sumatera Utara sehingga tidak mendapatkan suara yang signifikan, dengan hanya meraih 1 kursi di DPRD Sumatera Utara untuk periode 2010-2015, sedangkan periode saat ini nihil kursi parlemen.

2. Analisis Teori SMCR

Rumus S-M-C-R adalah singkatan dari istilah-istilah : S singkatan dari *Source* yang berarti sumber atau komunikator, M singkatan dari *Message* yang berarti pesan; C singkatan dari *Channel* yang berarti saluran atau media, sedangkan R singkatan dari *Receiver* yang berarti penerima atau komunikan. Dalam analisis peneliti teori SMCR ini juga kurang dijalankan dengan maksimal di DPW PBB Sumatera Utara, misalnya *source* atau komunikator, tentu harus dibekali dengan kemampuan berkomunikasi yang baik dan menarik. Kemampuan publik speaking diperlukan, namun muatan-muatan keilmuan juga penting. Pengurus partai yang menjadi komunikator mutlak dibekali dan diberikan pembekalan atau semacam diklat (pendidikan dan pelatihan), minimnya perkaderan yang dilakukan menyebabkan sumberdaya kader yang didapatkan atau ditampilkan juga jadi titik sentral kelemahan. Terkait dengan pesan-pesan yang akan disampaikan kepada khalayak, maka PBB Sumatera Utara,

³²⁵ Onong Uchjana Jfendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi* (Baandung: Citraa Aditya Bakti, 2000., h. 254

sudah memiliki sejumlah pesan-pesan menarik yang disusun dalam satu program kerja. Pesan yang bersumber dari Alquran dan Hadis juga cukup banyak yang bisa disampaikan, sehingga dalam analisis peneliti terkait pesan tidak ada kendala yang berarti, yang jadi persoalan adalah bagaimana menyajikan dan memahami pesan tersebut sehingga mudah diterima masyarakat.

Channel atau media. Maka sesuai dengan yang peneliti kemukakan pada poin unsur komunikasi politik media politik, hasil analisis peneliti, ini juga salah satu titik sentral kelemahan DPW PBB Sumatera Utara, karena kurang memaksimalkan fungsi media, padahal media komunikasi menjadi salah satu kekuatan yang sangat menentukan untuk saat ini. Jika dulu ada teori yang menyebutkan trias politika yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif yang menentukan jalannya politik bernegara sebagaimana yang dikemukakan Montesque, maka saat ini media menjadi kekuatan keempat yang bisa mempengaruhi ketiga kekuatan yang ada. Melalui media seseorang bisa dicitrakan baik atau buruk, dengan polesan media, yang biasa-biasa saja bisa menjadi luar biasa. bentuk komunikasi yang ada di DPW PBB Sumatera Utara lebih banyak bersifat tatap muka “*face to face*” pemanfaatan media sangat minim, bahkan majalah Abadi yang biasanya terbit sebulan sekali, saat ini sudah tidak terbit lagi, maka tentu hal ini menyebabkan sulitnya untuk menyampaikan pesan politik sesama pengurus. Adapun bentuk media lain, hanya terbatas pada saat-saat pemilu saja. Padahal sejatinya partai bergerak tidak hanya saat pemilu atau menjelang pemilu, tapi lima tahun satu periode sebagai pengurus harus memaksimalkan fungsi media tersebut.

Receiver atau penerima. Dalam konteks ini adalah komunikasi atau target politik. Masyarakat yang sangat heterogen, pendidikan yang beragam, tingkat pemahaman keagamaan yang berbeda-beda, harus dihadirkan dalam komunikasi politik, sehingga bisa mempengaruhi khalayak. Dalam konteks saat ini khalayak lebih banyak dipengaruhi oleh pemilih transaksional.

Ada transaksi yang didapatkan masyarakat, kalau budaya *money* politik yang jamak terjadi dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya PBB Sumatera Utara meraih suara di pemilu 2009 dan 2014. Setidaknya, *money* politik itu diketahui dari salah

seorang tokoh pendidik dan alumnus al-Azhar yang menjadi ketua Pusat Islam UMA yakni Ust Ismet Yunus, LME.

*“Kekuatan politik Islam sebenarnya ada pada kekuatan ideologi atau tauhid. Orang bertauhid adalah orang merdeka yang menafikan segala macam materi. Akan tetapi karena lemahnya iman, maka uang atau materi menjadi dominan dan inilah yang merusak ummat dan menjadi noda demokrasi. Masyarakat tidak mau memilih jika tidak diberi uang, ada istilah NPWP (nomor piro wani piro) nomor berapa dan uang berapa. Sikap masyarakat yang pragmatis dan hedonis inilah yang mendorong terjadinya korupsi di kalangan eksekutif, legislatif dan yudikator, sehingga menjadi budaya bangsa yang sangat merusak. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya pejabat politik yang ditangkap karena melakukan kejahatan korupsi. Antrean pejabat di KPK hampir setiap hari menghiasi layar kaca dan media cetak”.*³²⁶

Bukan itu saja, ust Abu Ismed juga menekankan kalau gairah politisi Islam untuk mewarnai demokrasi di negeri ini, menjadi pandangan seriusnya, bahkan sosok Dr Masri Sitanggang dianggap menjadi salah satu pelaku politik Islam di Sumatera Utara yang ulet memperjuangkan aspirasi umat Islam lewat DPW PBB Sumut serta sosok ketua DPW Sumut itu memiliki semangat yang tinggi.

*“Dari segi kualitas, ilmu, loyalitas, pendidikan dan ppembelaan ummat, apa yang diragukan dari Dr Masri Sitanggang, semua beliau miliki, popularitas, integritas, asptabilitas, yang tidak beliau dapatkan hanya elektabilitas (dipilih dalam pemilu), sebagai calon DPR yang diprioritaskan partai menduduki caleg nomor 1, beliau gagal kesenanya, jawabannya kenapa?, karena tidak ada uang 100 ribu atau 50 ribu untuk mengambil suara, akhirnya beliau gagal dalam merebut suara”.*³²⁷

Inilah analisis peneliti terkait dengan pengaruh atau efek politik dari segi teori SMCR. Sekali lagi, teori ini mengaruskan PBB Sumatera Utara untuk menjalankan partai secara modern, maju dan profesional.

3. Analisis Teori Performa Komunikatif.

Pacanowsky dan O'Donnell Trujillo menyatakan, bahwa anggota organisasi melakukan performa komunikasi tertentu yang berakibat pada munculnya budaya organisasi yang unik. Pacanowsky dan

³²⁶ H Ismet Yunus, LME, Ulama dan tokoh Islam, beliau Ketua Pusat Islam UMA, Wawancara tanggal 20 Desember 2017 pukul 14-15 di kantor Pusat Islam UMA Jl Kolam Medan Estate

³²⁷ H Ismet Yunus, LME, Ulama dan tokoh Islam, beliau Ketua Pusat Islam UMA, Wawancara tanggal 20 Desember 2017 pukul 14-15 di kantor Pusat Islam UMA Jl Kolam Medan Estate

O'Donnell meyakini bahwa performa komunikasi sangat penting bagi budaya sebuah organisasi.³²⁸ Organisasi dalam hal ini adalah organisasi politik atau yang dikenal sebagai partai politik, sedang yang akan diteliti adalah Partai Bulan Bintang di Sumatera Utara..

Performa komunikatif dibedakan menjadi lima bagian, performa ritual, performa hasrat, performa sosial, performa politis *enkulturasi*. Adapun kejelasannya : *Pertama*, performa ritual yang merupakan sebuah komunikasi yang terjadi secara teratur dan berulang. Saama seperti sebuah ritual atau ibadah, semacam sholat yang dilakukan berulang-ulang. Maka komunikasi politik yang dilakukan juga harus berulang-ulang, sehingga terpaan informasi tersebut akan bisa diterima masyarakat. Dalam observasi yang peneliti lakukan dan wawancara dengan sejumlah pengurus, komunikasi berulang ini tak terlaksana dengan baik. Ada semacam kejenuhan dan keterbatasan waktu, karena pengurus juga memiliki pekerjaan atau profesi yang beragam. Ada kecenderungan dalam mendekati masyarakat dilakukan hanya menjelang atau saat berlangsungnya *even* pemilu, dengan situasi demikian maka performa komunikasi daaam bentuk ritual tak berjalan sebagaimana mestinya. Di samping itu peneliti juga tidak menemukan ada satu ruang khusus konrensi pers, demikian juga dengan fungsi humas atau PRO, tidak ditunjuk satu orang atau bagian tertentu, sifat humas lebih diserahkan kepada satu orang pengurus. Jika kita kaji kedudukan dan fungsi PRO atau humas, maka boleh dikatakan, satu lembaga atau organisassi semacam parpol yang tidak memiliki humas yang khusus, maka akan mengalami hambatan dalam mendekati atau menjembatani sampainya suatu informasi atau kepentingan antara masyarkat dengan pimpinan. Informasi menjadi satu komando dan tidak terjadi simpang siur.

Kedua, performa hasrat, merupakan performa yang menunjukkan cita-cta dan keinginan sebuah partai politik, termasuk mencakup visi, misi, *platform*, aturan yang ada di partai dan tujuan yang ingin dicapai, dalam konteks ini, peneliti melihat PBB secara Nasional atau di Sumatera Utara, memiliki performa hasrat atay cita-cita yang mulia dan sangat lengkap, termasuk, vissi, misi, platform dan aturan yang ada di PBB, hal ini bisa kita lihat dalam manifesto politik PBB pada bagian sebelumnya. PBB sebagai partai memiliki doktrin, khittah dan

328 Richard West & Lynn H. Turner, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi* (Jakarta: salemba Humanika, 2008), h. 325

azas perjuangan untuk memajukan ummat Islam, sebagai ummat mayoritas, maka mustahil Indonesia maju, jika ummat Islamnya tidak maju dan sejahtera.

Ketiga, performa sosial, merupakan perpanjangan sikap santun dan kesopanan untuk menolong kerjasama di antara anggota organisasi, misalnya perilaku profesional, termasuk sikap empati dengan kesulitan anggota dan rakyat. *Keempat*, performa politis, merupakan perilaku organisasi yang mendemonstrasikan kekuasaan atau kontrol, karena kebanyakan organisasi bersifat *hierarkis*, harus ada seseorang yang memegang kekuasaan untuk mempertahankan eksistensi partai politik atau organisasi politik. *Kelima*, performa *enkulturasi*, hal ini merujuk kepada bagaimana anggota atau konstituen mendapatkan pengetahuan dan keahlian untuk dapat menjadi anggota organisasi yang mampu berkontribusi,³²⁹ sehingga muncul kompetisi di antara para anggota secara baik dan sehat.

4. Analisis Teori Agenda Setting

Teori agenda *setting* ini lebih menekankan fungsi media, sebagaimana David H. Weaver dalam karyanya yang berjudul “*Media Agenda Setting and Media Manipulation*” pada tahun 1981 mengatakan bahwa pers sebagai media komunikasi massa tidak merefleksikan kenyataan, melainkan menyaring dan membentuknya seperti sebuah kaleidoskop yang menyaring dan membentuk cahaya (*the press does not reflect reality, but rather filter and shapes it, much as a kaleidoscope filters and shapes it*). Dalam hubungannya dalam gerakan kampanye dan pemilihan presiden di Amerika pada tahun 1976 itu, berita surat kabar dan televisi tidak hanya sekedar merefleksikan hal-hal peristiwa-peristiwa dan argumen-argumen yang dikampanyekan, melainkan menyeleksi dan membentuknya menjadi bernilai berita (*newsvalue*) dan hanya sedikit saja yang tidak ternilai berita. Dalam pada itu para calon dalam pemilihan umum beserta kualitas citranya dalam pemberitaan diberikan penekanan sehingga lebih menonjol bagi para pemilih ketimbang mereka yang tidak diberi penekanan. Mengenai agenda *setting* itu, Alexis S Tan selanjutnya menyimpulkan bahwa media massa mempengaruhi kognisi politik dalam dua cara: *Pertama*, Media secara efektif menginformasikan peristiwa politik kepada khalayak. *Kedua*, Media mempengaruhi persepsi khalayak

329 *Ibid*, h. 325-327.

mengenai pentingnya masalah politik Sementara itu Manhein dalam pemikirannya tentang konseptualisasi agenda yang potensial untuk memahami proses agenda setting menyatakan bahwa agenda setting meliputi tiga agenda, yaitu agenda media, agenda khalayak dan agenda kebijaksanaan.

Peneliti menempatkan teori ini dalam menganalisis pengaruh atau efek media politik dalam konteks, banyaknya pemberitaan-pemberitaan negatif yang ditonjolkan tentang partai Islam, penangkapan politisi partai Islam yang tersangkut hukum, seperti kasus korupsi dan itu diulang-ulang, termasuk berbagai kasus moralitas aktivis partai Islam. Kasus presiden PKS yang terjerat korupsi impor sapi Luthfi Hasan Ishaq pada tingkat nasional, kasus anggota DPR PPP Al Amin Nur Nasution, Kasus video porno saat sidang Arifinto (PKS), demikian juga untuk tingkat Sumatera Utara kasus terjerat korupsi sejumlah partai Islam, termasuk Gubsu Gatot Pudjo Nugroho yang notabene dari Partai Islam (PKS) yang pemberitaannya terus ditonjolkan, semacam agenda *setting*, hal ini menyebabkan ummat Islam khususnya dan masyarakat umumnya, kehilangan kepercayaan terhadap partai Islam, termasuk para politisinya, maka jamak di dengar dari masyarakat, bahwa semua partai hakikatnya sama saja, malah partai Islam bisa lebih parah. Padahal jika secara objektif diungkapkan, politisi non muslim atau partai nasionalis lebih banyak lagi yang tersangkut kasus korupsi dan moral, seperti masalah perselingkuhan dan narkoba, akan tetapi *image* yang terbangun cenderung menyudutkan partai-partai Islam.

Di sinilah kekuatan media yang pada umumnya dikuasai kaum *kavitalis* dan non muslim. Peneliti melihat adanya gejala 6 F sebagai faktor yang menghinggapi media terkait dengan Islam, adalah sebagai berikut: *Pertama, Fhobia* yakni rasa alergi dan takut yang berlebihan terhadap Islam. *Kedua, Friksi* yakni membangun atau menciptakan perpecahan di kalangan ummat Islam. *Ketiga, Food* yakni ummat dirusak melalui makanan. *Keempat, Finansial* yakni melalui kekuatan ekonomi dan ummat Islam dibiarkan miskin. *Kelima, Fun* yakni melalui berbagai hiburan dan budaya barat yang merusak Islam. *Keenam, Film* yakni menghancurkan ummat Islam dan menanamkan kebencian terhadap Islam melalui tayangan film dan sinetron.

Kekuatan media dengan agenda settingnya sangat berpengaruh dalam menanamkan keyakinan dan sikap pada khalayak, makanya ada yang disebut dengan agama televisi, jihad televisi, karena media sangat tergantung dengan siapa yang bisa menguasainya. Di sinilah letak pentingnya ummat Islam umumnya dan khususnya partai Islam seperti PBB Sumatera Utara menggunakan media tersebut dalam mempengaruhi pemilih atau publik. Jika kita lihat lebih jauh pengaliran informasi dari Dunia Barat kepada negara-negara berkembang terutama negara-negara Islam seperti Indonesia terlihat ketimpangan, seperti halnya yang disebutkan Syukur Kholil MA³³⁰ sebagai ahli komunikasi Islam yang menyimpulkan, bahwa pengaliran informasi ketimpangannya sangat tajam, terdapatnya *gep* atau jurang yang dalam dan tidak objektif, karena negara-negara berkembang termasuk negara-negara Islam digambarkan selalu negatif, terbelakang, bodoh, miskin dan peperangan. Sudah tentu teori media agenda *setting* ini turut mempengaruhi pemilih atau masyarakat dalam menentukan pilihannya dalam pemilu.

330 Syukur Kholil, *Komunikasi Islam*..... h. 56

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada temuan dan pembahasan hasil penelitian Analisis Komunikasi Politik Partai Politik Islam pada pemilu orde Reformasi (Studi kasus DPW Partai Bulan Bintang Sumatera Utara tahun 2009-2014), profil dan manifesto PBB Sebagai partai politik didasarkan pada khittah perjuangan dan tafsir azas partai yang bersumber kepada Alquran dan As-Sunnah dengan visi dan misi Visi partai adalah terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami, sedangkan misi partai adalah membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa, maju, mandiri, berkepribadian tinggi, cerdas, berkeadilan, demokratis dan turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam. Adapun prinsip dan azas perjuangan PBB sebagai Partai Islam yakni konsisten menegakkan syariat dan cita-cita Islam. Pada level DPW PBB Sumatera Utara profil dan manifesto politik PBB tersebut merujuk kepada aturan-aturan dan dokumen resmi dari pedoman kepartaian, DPW PBB Sumut tahun 2009-2014 dipimpin oleh Dr Masri Sitanggang dengan memiliki struktur partai yaitu Majelis Pertimbangan Wilayah, Pimpinn wilayah dan Badan Pertimbangan Wilayah, dilegkapi Biro-biro serta organisasi otonom sebagai sayap partai, hal ini termasuk organ penting, namun untuk Sumut yang baru ada; Muslimat Bulan Bintang, Pemuda Bulan Bintang dan *Brigade Hizbullah*, sedang yang lain tidak ada dan vakum. Kesimpulan penelitian ini meliputi:

Pertama, bentuk-bentuk komunikasi polittik yang ada di DPW PBB Sumatera Utara ada yang bersifat komunikasi interpersonal yakni dengan silaturahmi, kunjungan tokoh Islam, *door to door* (pintu ke pintu) atau *direct selling* (langsung menemui konstituen). Komunikasi kelompok dilakukan lewat pengajian, majelis taklim, perwiridan dan halaqah-halaqah yang dibimbing ustadz, hanya saja kegiatan ini intesitasnya sangat minim, lemahnya militansi atau semangat jihad. Di PBB Sumut juga dibentuk satu lembaga khusus yang bernama KAPPU (Komite Aksi Pemenangan

Pemilu) untuk menjembatani komunikasi kelompok antara pimpinan partai, pengurus, anggota dan masyarakat terutama untuk mendapatkan caleg yang berkualitas dan populer di masyarakat. Adapun komunikasi massa yakni komunikasi yang dilakukan melalui media massa baik cetak maupun elektronik, hasil penelitian menggambarkan jika hal ini kurang dikelola dengan baik di PBB Sumatera Utara.

Kedua, proses komunikasi politik di PBB Sumut berawal dari proses rekrutmen pengurus dengan berbagai pihak, tokoh masyarakat, adat dan ormas Islam, dilakukan lebih bersifat informal dan tidak melalui surat resmi, hal ini untuk menghargai independensi masing-masing ormas Islam yang ada. Sebenarnya di awal-awal pemilu setelah reformasi, PBB termasuk sukses. PBB masuk enam besar, maka dianggap orang sebagai partai harapan. Padahal ketika itu, PKS masih bernama PK Cuma meraih 7 kursi, sedangkan PBB sudah meraih 13 Kursi DPR RI. Begitu juga di Sumatera Utara PBB meraih 3 kursi sedangkan PKS hanya meraih 1 Kursi yakni atas nama Sigit Pramono Asri. Karena dulu ideologi PBB masih sangat kuat dengan tingkat militansi yang tinggi.

Ketiga, peluang dan tantangan DPW PBB Sumatera Utara. Peluang, adapun peluang yang dimiliki PBB Sumatera Utara. *Pertama*, kekuatan *idiologis*. *Kedua*, kekuatan *historis*. *Ketiga*, kekuatan *sosiologis*. *Keempat*, kekuatan *organisatoris*. Dalam konteks kekuatan idiologis PBB Sumatera Utara sebagai partai Islam memiliki spirit ke-Islaman yang bersumber dari ajaran Alquran dan Hadis, serta berbagai produk Ijtihad yang dihasilkan para ulama. Kekuatan *historis*, di sini salah satu peluang terbesar PBB Sumatera Utara, karena secara historis PBB punya hubungan bathin dengan Masyumi yang pernah mencatat tinta emas sebagai kontestan pemenang pemilu pada masa orde lama tahun 1955, bahkan saat itu Masyumi mengungguli Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin Soekarno. Kekuatan *sosiologis*, potensi dan peluang ini juga sangat urgen untuk dimaksimalkan. Secara sosiologis umat Islam menjadi umat mayoritas di Indonesia, demikian juga di Sumatera Utara. Kekuatan *Organisatoris*, dalam konteks ini PBB sebagai partai yang selalu ikut pemilu semenjak orde Reformasi, punya struktur yang lengkap hingga ke tingkat ranting, bahkan anak ranting. Hal ini tentu menjadi potensi besar untuk digerakkan sebagai mesin partai dalam merebut suara umat Islam dalam setiap pemilu. Tantangan yang dialami DPW PBB periode 2009-2014 di bawah kepemimpinan Pak Masri Sitanggang bisa bersifat *Internal* dan *eksternal* atau dari dalam dan luar partai. Secara umum tantangan itu

meliputi: *Pertama*, profesionalisme penyelenggara pemilu faktor finansial. *Kedua*, Finansial. *Ketiga*, Undang-Undang pemilu tentang ambang Batas. *Keempat*, Penyakit akut masyarakat tentang *money politic*. *Kelima*, Sumber daya manusia kader dan pimpinan. *Kelima*, militansi dan semangat jihad. *Keenam*, keteladanan dan akhlaqul karimah. *Ketujuh*, membangun *trust* masyarakat. Kedelapan, tantangan ambang batas minimal suara partai “*Parlemantary Treashold*” (PT) menjadikn pimpinn dan kader PBB Sumut bekerja keras untuk lolos dan sukses sebagai peserta pemilu tahun 2019.

Keempat, unsur-unsur komunikasi politik meliputi Komunikator politik (pengurus, kader dan anggota bertidak sebagai komunikator), komunikan (masyarakat pemilih di Sumut), yang sangat heterogen, banyaknya suku, bahasa dan budaya membutuhkan strategi komunikasi politik yang lebih terbuka dan terprogram dengan baik, di samping adanya pengelompokan pemilih menjadi tig yakni, tradisional, rasional dan transaksional. Media politik, baik cetak dan elektronik sangat besar kontribusinya dalam meningkatkan performa partai di mata publik. Namun fungsi media ini kurang berjalaan di DPW PBB sumatera Utara dengan faktor keterbatasan dana, kurng termenej fungsi humas. Unsur, pesan politik DPW PBB Sumut lebih bersifat menjalankan fungsi dakwah. pesan-pesan tersebut bersumber dari ajaran Islam dan program partai sesuai yang diputuskan. Adapun efek komunikasi, PBB Sumut hanya meraih 1 kursi tahun 2009 dan tidak dapat kursi hasil pemilu 2014. Hal ini tidak lepas dari berbagai faktor, meliputi: konsolidasi partai yang kurang berjalan, kaderisasi yang minim, keterbatasan dana, krisis kepemimpinan dan keteladana yang hampir melanda semua partai Islam, pemberitaan tentang korupsi di Sumut yang begitu gencar dengan melibatkan politisi Islam juga menjadi penyebab publik memberikan *justifikasi* partai islam atau tidak Islam sama saja, faktor sekularisasi politik dan kurang dirawatnya basis pemilih tradisonal partai juga menjadi temuann sebagai faktor yang harus diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zainal Abidin, *Piagam Nabi Muhammad Saw. Konstitusi Negara yang pertama di dunia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Amin, Ahmad, *Fajr a-Islam*, Kairo: Maktabat al-Nahdhat al Mishriyat, 1979.
- Banfield, Edward C, *Political Infleunce*. New York: The Free Pessof Glencoe, 1961.
- Ali Audah, *Sejarah Hidup Muhammad*. Jakarta: Lintera Antar Nusa, 1995.
- Anwar Arifin, *Komunikasi Politik, Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Catlin, G.E.G, *The Study of Principlesof Politics*. New York: Macmillan, 1930.
- Cangara, Hafied, *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- _____, *Komunikasi Politik; Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Hofied Cangara, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2009.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*. Jakarta: Karya Insani Indonesia, 2004.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, Depag RI, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Ujungpandang: IAIN Alauddin Press, 1982.

Dudung, Abdurrahman dkk, *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga*

Modern. Yogyakarta: Fakultas Adab IAIN Sunan Kali Jaga- Lesfi, 2002.

Deddy Mulyana, *Komunikasi Politik, Membedah Visi dan Gaya Komunikasi*

Praktisi Politi, Bandung, Remaja Rosdakarya Offset, 2013.

Easton, David, *The Political System*. New York: Alfred A Knopf, 1953.
Effendy,

Onong Uchjono, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Karya, 1984.

_____, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Badung: Citra Aditya Bakti, 2000

Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara ; Transpormasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.

Eriyanto, *Kekuasaan Otoriter dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Guillaume, A, *The Influence of Yudaism on Islam*. London: Oxford The Clarenon Press, 1972.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid 1 & 2, Yogyakarta: UGM Press, 1991.

Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Medan: Istiqamah

Mulya Press, 2006.

Haikal, Muhammad Husein, *Hayat Muhammad*. Beirut: Dar al-Maarif, 1983,

(terj).

Hofied Cangara, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2009.

Harun, Rochajat dan Sumarno Ap, *Komunikasi Politik sebagai suatu pengantar*.

Bandung: Mandar Maju, 2006.

Hisyam, Ibnu, *Sirah al-Nabawiyah*. Kairo: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1955.

Hitti, Philip K., *History of The Arab*. London: The Macmillan Press Ltd, 1970.

Iqbal, Muhammad, *Masyarakat Madani Pada Masa Nabi Muhammad Saw*.

Dalam *Miqot*, Vol XXVI, No. 2, Juli 2002.

_____, *Fiqh Siyazah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta:

Gaya Media Pratama, 2007.

Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010

Jasmadi, *Piagam Madinah Dalam Perspektif Dakwah Nabi Muhammad SAW*.

Medan: PPS IAIN SU, 1996.

Kantraprawira, Rusadi, *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1983.

Katimin, *Politik Islam Indonesia ; Membuka Tabir Perjuangan Islam Ideologis*

Dalam Sejarah Politik Nasional. Bandung: Citapustaka Media, 2007.

Khan, Muhammad Zafrulah, *Muhammad Seal of the Pripheet*. London:

Routedgeang Kegan Paul, 1980.

- Kertapati, Ton, *Dasar-Dasar Publisistik*. Jakarta: Bina Akasara: 1981.
- Klalil, Yauqi Abu, (terj) Muhammad Abdul ghoftar, Atlas Alquran. Jakarta: Almahira, 2006.
- Kholil, Syukur, *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung: Citapustaka Media, 2006.
- _____, *Ilmu Komunikasi*. Medan: Fakultas Dakwah IAIN Sumatera Utara, 1994.
- _____, *Komunikasi dalam Perspektif Islam*, dalam (ed) Hasan Asari dan Amroeni Drajat, *Antologi Kajian Islam*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- _____, *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung: Citapustaka Media, 2006.
- _____, *Komunikasi Islami*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- _____, *Teori Komunikasi Massa*, Bandung, Cita Pustaka Media Perintis, 2011.
- Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasidasi Pasca Orde Baru*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Nimmo, Dan, *Komunikasi Politik ; Komunikator, Pesan dan Media*. (Terj) Tjun Surjaman, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Lasswell, Harold, *Politics: Who Gets, What, When, How*. New York: Merdian

Books, 1958.

Madjid, Nurcholis, *Cita-Cita Politik Kita dalam Aspirasi Umat Islam Indonesia*,

(ed) Bosco Carpallo dan Dasrizal. Jakarta: Leppenas, 1983.

_____, *Islam Agama dan Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, 1996.

_____, *Islam Agama dan Peradaban, Membangun Makna dan*

Relevansi doktrin Islam dalam Sejarah. Jakarta: paramadina, 1995.

Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia; Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde*

Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Mulyana, Deddy, *Kendala-kendala Pengembangan Penelitian Komunikasi di*

Indonesia. Dalam Jurnal ISKI, Vol III/, Bandung: Remaja Rosdakarya,

1999.

_____, *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan*

orang-orang berbeda Budaya. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.

_____, *Ilmu Komunikasi; Suatu pengantar*. Bandung Remaja Rosdakarya, 2004.

Muliansyah, *Political, Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik & Welfare State*,

Yogyakarta, Buku Litera, 2015.

Mahmi M Hikmat, *Ilmu Politik, Teori dan Praktik, Dalam Pilkada Langsung*,

Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2011.

Nasution, Harun, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI-Press, 1985.

- _____, *Sejarah Ringkas Islam*. Jakarta: Jembatan, 1982.
- Pamungkas, Sigit, *Partai Politik; Teori dan Praktek di Indonesia*, Sleman Yogyakarta: Perum Griya Suka Permai, 2011
- Pulungan, J Suyuthi, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Alquran*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995.
- Probonegoro, dan Nunik Kleden, *Seni Memahami sebagai Metode Humaniora dalam masyarakat Indonesia*. Dalam Jurnal LIPI jilid XXI no. 1, Jakarta: LIPI Press, 1994.
- Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, *Pedoman Penulisan Proposal dan Disertasi*. Medan: PPS IAIN SU, 2006.
- Rahmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Rauf, Maswadi, Mappa Nasrun, *Indonesia dan Komunikasi Politik*. Jakarta: Gramedia, 1993.
- Rousdy, Lathief, *Dasar-Dasar Rhetorika Komunikasi dan Informasi*. Medan: FA. Rinbow, 1985.
- Salim, Abdul Muin, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Alquran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sastropoetro, Santoro, *Pendapat Publik, pendapat umum dan pendapat khalayak dalam komunikasi sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
- Shihab, Quraish, *Membumikan Alquran*. Bandung: Mizan, 1996.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara ; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press, 1993.

- Soesanto, Astrid S, *Komunikasi Sosial*. Jakarta: Bina Cipta, 1975.
- Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 ; Kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk*. Jakarta: UI- Press, 1995.
- Surur, Muhammad Jamal al-Din, *Qiyam al-Dawlah al-'Arabiyyah al-Islamiyah fii Hayati Muhammad Saw*. Al-Qahirah: Daar al-Fikr al-'Araby, 1977.
- Syafiie, Inu Kencana, *Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Syariati, Ali,(terj) Afif Muhammad, *Rasulullah saw Sejak Hijrah hingga wafat*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.
- Suaidi Asyari, *Nalar Politik,NU dan Muhammadiyah*, Yogyakarta, LKiS Printing Cemerlang, 2009.
- Watt, W. Montgomery, *Muhammmad; Propet and Statesman*. New York: Oxford University Prass, 1964.
- _____, *Muhammad at Madina*. London: Oxford Clarendon Press, 1977.
- Wajdi, Muhammad Farid, *Dairah Ma`arif; Alquran al-'Isyrun*. Beirut: Al-Maktabah al-'ilmiyah al-jadidah, t.t.
- West, Richard, dkk, *Introducing Communication Theory Analysis and Aplication*. Singapore: Mc Grew Hill, 2007.
- Wok, Saodah, dkk, *Teori-teori komunikasi*. Kuala Lumpur: Percetakan Cergas (M) Sdn, Bhd, 2004.

DAFTAR WAWANCARA

Catatan:

1. Wawancara ini bersifat Indep Interview (Wawancara Mendalam)
2. Pedoman wawancara ini akan berkembang saat wawancara dengan informan di lapangan dengan melakukan penggalian dan elaborasi
3. Wawancara ini akan berupaya menemukan data-data yang lebih dalam dan jika ditemukan kesamaan hasil wawancara maka akan dicukupkan

A. Proses Komunikasi Politik Partai Bulan Bintang Sumatera Utara

1. Bagaimana sejarah dan proses berdirinya PBB di Indonesia?
2. Lalu bagaimana pula proses berdirinya PBB di Sumatera Utara, sistem mandatkah? Atau dibentuk dari tokoh-tokoh Islam ?
3. Apa hubungan PBB dengan Partai Masyumi di masa Orde Lama?
4. Kenapa partai ini di namakan PBB, lalu kenapa ada juga partai yang didirikan dengan memberi nama Partai Masyumi Baru?
5. Dalam proses komunikasi politik, apakah PBB melibatkan elemen ormas Islam dikepengurusan, seperti misalnya meminta resmi keterwakilan ormas?
6. Menurut Bapak/Ibu kenapa PBB sebagai Partai yang berazaskan Islam kurang atau tidak bisa merebut suara mayoritas umat Islam?
7. Dalam Konteks Sumatera Utara yang sangat heterogen, bagaimana PBB melakukan sosialisasi dan komunikasi politik, terutama di daerah-daerah Islam yang minoritas?
8. Apakah seluruh kabupaten/Kota di Sumatera Utara pada periode kepengurusan 2009-2014, sudah berdiri kepengurusan PBB disana?

9. Daerah mana saja yang belum berdiri, dan apa kendalanya?
10. Kenapa di daerah mayoritas Islam, PBB juga gagal meraih kursi, seperti di Medan, dan daerah lainnya?, dan justru kenapa di daerah Tapanuli Tengah yang Islamnya lebih sedikit dari Nasrani, PBB justru berhasil meraih 1 kursi?.

B. Bentuk-bentuk Komunikasi Partai Bulan Bintang

1. Apa pandangan bapak tentang komunikasi politik?
2. Menurut bapak/ibu apa fungsi partai politik itu?
3. Unsur-unsur komunikasi politik itu ada 5 yakni komunikator politik, Pesan Politik, Khalayak Politik, Media Politik dan efek atau pengaruh politik, menurut bapak, apakah ke lima unsur tersebut sudah dilaksanakan dan dipahami pengurus dalam menjalankan roda partai politik?
4. Apakah komunikator politik diberikan pembekalan atau perkaderan untuk bisa menjadi duta partai dalam meyakinkan masyarakat?
5. Bagaimana strategi komunikasi politik yang dilakukan PBB sumatera Utara dalam merebut suara khalayak?
6. Bagaimana bapak/ibu menilai khalayak politik yang sering terlibat money politik?
7. Pesan-pesan politik apa saja yang disampaikan kepada masyarakat dalam memberikan edukasi Politik dan meyakinkan mereka memilih PBB
8. Bagaimana bentuk-bentuk komunikasi politik yang dilakukan PBB sumatera Utara, baik komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok dan komunikasi massa?
9. Apakah PBB Sumatera Utara memaksimalkan fungsi humas dalam menjalankan kepemimpinan?
10. Menurut bapak kenapa PBB kurang populer dipilih masyarakat, padahal tokohnya Yusril Ihza Mahendra sangat dikenal luas ?

C. Analisis Unsur-Unsur Komunikasi Politik Partai Bulan Bintang dalam menyampaikan pesan-pesan Partai untuk merebut suara ummat Islam?

1. Bagaimana fungsi dan kantor kesekretariatan partai dalam pandangan bapak?

2. Sudahkan kantor dijalankan sesuai fungsi manajemen dan keorganisasian?
3. Apakah PBB punya Jargon khusus sebagai model komunikasi dalam merekrut pemilih, misalnya seperti PKS dengan slogan “bersih, peduli, Profesional”, Golkar dengan slogan “Suara Rakyat suara Golkar” dll.
4. Karena PBB ini partai Islam, apakah ada model komunikasi Islam yang dilaksanakan?
5. Apakah lengkap AD, ART dan Khittah perjuangan Partai dibuat, dan apakah sudah dipahami semua pengurus?
6. Apa kiat-kiat yang bapak/ibu lakukan dalam menyusun pencalegkan dan pertimbangan apa yang dilakukan?
7. Apa ada model sosialisasi partai yang berbeda di kota dengan di desa?
8. Apakah PBB Punya model dalam menentukan kepala daerah, dan kenapa di internal Parpol sering terjadi konflik dalam setiap pengajuan calon kepala daerah?
9. Bagaimana PBB memanfaatkan tokoh-tokoh lokal dalam menyampaikan pesan-pesan partai?
10. Apakah PBB memanfaatkan media komunikasi dalam mensosialisasikan pesan partai, media apa saja?

D. Peluang dan Tantangan Partai Bulan Bintang Sumatera Utara

1. Jika dikelompokkan Pemilih itu secara umum ada 3 pemilih tradisional, pemilih transaksional dan pemilih rasional, bagaimana pandangan bapak/ibu tentang hal ini?
2. Benarkah uang jadi penentu utama dalam kemenangan partai?
3. Apa ada kiat PBB Sumatera Utara menggarap pemilih tradisional dan sepertinya kenapa tidak memaksimalkan pemilih rasional?
4. Kenapa dalam pemilu terakhir yakni periode 2009-2014, PBB tidak lolos PT dan harus diverifikasi ulang lagi?
5. Kenapa partai-partai Islam selalu jadi partai tengah dan bahkan PBB jadi partai bawah dengan tidak lolos PT?
6. Bagaimana pandangan bapak tentang dikotomi Islam santri, priyai dan abangan?
7. Apa pandangan PBB tentang negara Pancasila dan negara Islam

8. Bagaimana peluang PBB Sumatera Utara di masa yang akan datang, mengingat PBB pernah meraih 3 kursi di DPRD Sumatera Utara, dimasa kepemimpinan Bpk Banuaran Ritonga?
9. Apa saja tantangan-tantangan PBB Sumatera Utara saat ini dan masa yang akan datang?
10. Bagaimana struktur dan proses konsolidasi partai di PBB Sumut?

Transkrip Wawancara

Bersama Dr Masri Sitanggang MP

(Ketua DPW PBB Sumatera Utara Periode 2010-2015)

P : Bagaimana sejarah berdirinya PBB di Indonesia?

I : *Pertama*, Kita ikut dulu pada masa reformasi, bahwa perjuangan untuk kembali menegakkan syariat Islam di Indonesia ini tidak berhenti, sejak Masyumi dipaksa bubar oleh Soekarno dan tidak dibenarkan lagi untuk direhabilitasi pada masa Soeharto walaupun sebenarnya itu inkonstitusional, namun tokoh-tokoh Islam ini masih kuat dan tidak kehilangan ideologinya mereka berkumpul di Dewan Dakwah yang dipimpin oleh Pak M Natsir sebagai ketua Masyumi. Ketika membentuk Dewan Dakwah ada yang menarik pada ucapan Pak Natsir, ketika kita dulu berdakwah lewat jalur politik, maka sekarang kita berpolitik lewat jalur dakwah. Maka ketika pada masa reformasi berkumpul tokoh-tokoh Islam dari golongan tua dan muda seperti Amien Rais (sering dipanggil Natsir muda), jauh sebelum reformasi terjadi Pak Natsir sudah membentuk Forum Ukhwah Islamiah (FUI).

P : lalu, bagaimana sejarah berdirinya PBB di Sumatera Utara? Apakah pakai mandat atau dibentuk dari tokoh-tokoh Islam?

I : Di Sumut terbentuklah Forum Ukhwah Islamiah (FUI) di tahun 1995, saya termasuk sekretaris di Sumut. Berkumpul organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, NU dll. Ketika terjadi reformasi berkumpul semua dan memikirkan untuk membentuk kembali partai Islam seperti Masyumi. Tetapi terjadi perbedaan pemikiran, yang satu ingin membawa simbol Islam dan yang lain tidak mau membawa simbol Islam. Orang dulu berharap dan berkeinginan partai ini membawa simbol Islam Pak Amin Rais menjadi ketua dan Pak Yusril Ihza Mahendra menjadi sekretaris jenderal (Sekjend). Nah kemudian ketika saya menjadi sekretarisnya, artinya sudah tidak sulit lagi untuk berkomunikasi. Mandat itu hanya secara administrasinya tapi karena Forum Ukhwah Islamiyah ini sudah ada, tinggal orang-orangnya sajalah yang harus memenuhi

administrasi, digunakanlah mandat dan diberikanlah kepada saya. Maka karena saya yang diberikan mandat sayapun menghubungi semua tokoh-tokoh tua, (seperti Fuad Said, Saldin Saleh, pak Yamin Lubis, dll). Alasan saya mendatangi dan menghubungi tokoh-tokoh tua ini adalah supaya komunikasi politik dan ideologi Masyumi dulu tertularkan ke yang muda-muda.

P: Jadi Hubungan PBB dengan Masyumi, apakah organisatoris, ideologis atau historis?

I: Kalau secara organisasi tentu tidak, jadi ada bahasa sederhananya begini ada pertemuan, teringat saya bulan juni tahun 1998 setelah pak Soeharto lengser bertemu disitu pak Amien Rais, Yusril semua tokoh-tokoh termasuk dari PPP ada pak A.M. Syaifuddin, Buya Ismail Hasan Materium waktu itu buya Ismail mengatakan sekiranya partai ini berdiri PPP bubar aja dibuat jadi satu prtai saja, tetapi seperti saya katakan, pak Amien Rais tidak mau membawa nama Islam ke politik lebih memilih partai nasional akhirnya disini pecah, di mana pak Amin akhirnyaa mendeklarasikan Partai Amanat Nasional. Nah, kalangan yang menginginkan simbol Islam, gerakan Islam, dan ideologi Islam itupun pecah lagi yaitu dalam membuat nama partai sebagian menginginkan namanya tetap Masyumi, jadi semangatnya Masyumi. Tapi yang lainya punya pandangan lain yang datang dari pak Anwar Haryono tokoh dewan dakwah dan juru bicara terakhir Masyumi dan beliau yang memelopori pertemuan tersebut, dia menyatakan saya khawatir kalau kita tetap menggunakan nama Masyumi generasi muda sekarang belum seberapa memahami dan belum bisa mengikuti bagaimana cara, prilaku, dan berpikinya orang Masyumi, kita khawatir malah justru membuat nilai yang kurang pas terhadap nilai perjuangan Masyumi yang sudah harum selama ini. Akhirnya beliau katakan ngak usahlah pakai nama Masyumi tapi ideologinya tetap Masyumi, lambangnya tetap Masyumi makanya Bulan Bintang lambangnya. Karena dulu kita disebut keluarga Bulan Bintang maka disebut Partai Bulan Bintang (PBB). Jadi hanya dinamakan saja dan Yusril dianggap orang sebagai tokoh muda Masyumi karena dia mendalami secara akademis tentang Masyumi dan pernah sebagai sekretarisnya buya M. Natsir.

P: Nah, inikan secara historis tapi mengapa ada juga partai yang dinamakan Partai Masyumi baru?

I: Oh, bukan. Masyumi baru itu lahir sebelum reformasi yang dibuat oleh Ridwan Saidi tapi tidak ikut pemilu. Yang ikut pemilu hanya yang

menggunakan masyumi saja. Disitulah yang saya katakan adanya perbedaan nama partai yang pecah menjadi dua pendapat, yang satu tidak menggunakan nama Masyumi yang lain Menggunakan nama Masyumi. Nah partai yang menggunakan nama Masyumi ini dipimpin oleh Abdullah Heha Mahua yang pernah menjadi pimpinan KPK dan ikut pemilu.

P : Di Forum Ukhwah Islamiyah (FUI) ada beberapa ormas Islam, apakah mereka diminta secara resmi ke PBB bergabung atau ada rekomendasi dari ormasnya atau historis saja?

I : jadi, forum ukhwah islamiyah ikut mendeklarasikan. Jadi bidan melahirkan pbb itu adalah forum ukhwah. Lalu forum itu diperbesar namanya menjadi Forum Komunikasi Umat Islam (FKUI) yang di dalamnya ada Muhammadiyah, semua juga ada disitu lalu mereka akan mendeklarasikan. Ketua Muhammadiyah saat itu adalah Amien Rais, Persis ada disitu, al-Irsyad.

P : Menurut pak Masri partai inikan berbasis Islam, tapi kurang bisa merebut suara mayoritas ummat Islam itu, apa faktor-faktornya?

I : Sebenarnya di awal-awal pemilu setelah reformasi, PBB hebat, masuk enam besar, maka dianggap orang sebagai partai harapan. PKS atau PK pada saat itu, belum masuk partai menegah, lalu bagaimana PBB menurun? Karena dulu ideologinya masih kental dan ada. Waktu itu di mana-mana Dewan Dakwah berhubungan kental dengan PBB?, Jadi PBB saat itu bermarkas di kantor Dewan Dakwah, kan saat itu juga masih ada euforia berpartai akhirnya karena terlalu banyak saluran partai-partai yang saling tidak menguatkan, jadi itu persoalannya.

P : Dalam konteks Sumatera Utara yang sangat heterogen, ada daerah-daerah minoritas Islam, seperti Tapanuli Utara, Dairi, Pak Phak Barat itu kan? Bagaimana cara mensosialisasikan PBB ini, di daerah-daerah minoritas tsb?

I : Yang pertama, ini sama dengan dakwah, kalau kita berpikir PBB itu sebuah gerakan dakwah, maka itu sama dgn dakwah, kita pahami bagaimana orang mengerti Islam itu rahmat bagi semesta Alam (*rahmatan lil alamin*), bagaimana hal ini bisa dipahami orang, jadi sebenarnya kalau fungsi partai politik ini sama dengan fungsi dakwah, seperti yang disampaikan buya Natsir, kalau dulu kita berpolitik lewat jalur dakwah, sekarang, kembali lagi berdakwah lewat jalur politik. Artinya jalur politik ini adalah bahagian dari dakwah, jadi tidak ada masalah, menurut saya

inilah yang jadi soal juga, menjadi sulit dia ketika aparat partai, fungsionaris partai tidak memahami fungsi ini.

P: Terus di masa pak Masri periode 2009-2014, apa PBB berdiri semua di daerah minoritas ini

I: Berdiri, ya semua berdiri

P: Apa 100%

I: Barangkali dari 33 itu, satu atau dua daerah yang nggak berdiri, Nias semua berdiri itukan termasuk minoritas, Tapanuli Utara beridri, barangkali berdiri semua, saya kurang ingat.

P: Tapi nggak ada non muslim yang jadi pengurusnya?

I: Ada waktu itu daerah mana, satu orang, saya nggak ingat.

P: Sebab saya dapat informasi seperti PKS ada yang non muslim jadi pengurus di daerah Indonesia Timur

I: Tapi di daerah kita tidak ada, ada satu orang tapi saya tidak ingat, tapi itu untuk masuk diverifikasi, artinya gini dulu ada aturan saat verifikasi harus ada sekian persen partai berdiri di daerah baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota, baru sebuah partai bisa berdiri.

P: Kemudian, di daerah-daerah mayoritas Islam, misalnya seperti Medan, periode awal PBB dapat satu kursi, tapi sesudah itu pernah nggak dapat, lalu ada daerah Islamnya tidak mayoritas, kayak di Tapanuli Tengah Sibolga, itu selalu ada 1 kursi, apa kira-kira kendala, kenapa di daerah moyoritas tidak dapat kursi, dan apa faktor di daerah minoritas dapat kursi?

I: Sebenarnya begini, di daerah Selatan-lah dulu kita sebutkan, itukan masih kental sentimen agama, “sentimen” kita pakai (dalam tanda kutip), jadi orangtu mau, apapun ceritanya yang penting Islam dulu, dan di situ politik uang belum muncul, *money politic* belum muncul. Nah, Medan ini persoalannya, ketika pemilu, jadi kita kembali ketika kenapa ummat Islam, tidak begitu merespon ke PBB dukungannya, sebetulnya bukan hanya karena kitanya tidak kuat, atau kurang sosialisasi, bukan, tapi gempuran dari partai-partai lain dengan politik uang ini yang PBB tidak tahan, nah di Medan itu terasa, nggak ada lagi cerita dukung ikhlas, nah disinilah saya memahami, adanya serangan fajar atau apa saja bentuknya, terus terang saya mengatakan dipertanyakan independensi KPU

P: Jadi KPU juga bisa curang ya?

I: Wah... curang

P: Makanya ada sidang DKPP yang memberhentikan KPU dan memberikan sanksi teguran

I: Wah itu banyak, bayangkan orang yang ngak pernah turun bisa dapat suara kok, bahkan dapat kursi, jadi ini persoalan sistem dari pusat sampai ke daerah itu tidak menguntungkan buat partai kecil yang memang mengandalkan ideologi dan idealisme. Dan di sini kita menuntut agar penyelenggara pemilu diserahkan saja kemasing-masing utusan partai seperti tahun 1998

P: Jadi KPU sering melanggar aturan juga ya?

I: Sampai sekarang saya yakin itu dan mohon dicatat itu sebagai persoalan besar dalam menjalankan demokrasi

P: Poin berikutnya, tentang komunikasi politik PBB, kira-kira menurut Pak Masri, apa pandangan bapak tentang komunikasi politik

I: Komunikasi politik itu ada *internal* (ke dalam) dan ada *eksternal* (keluar). Sebenarnya kalau komunikasi politik ini, kalau hemat saya di PBB masih kurang dan PBB harus belajar banyak, karena memang yang masuk partai politik ini, sekian lama dia digodok rezim Seharto, kira-kira begitu, pola pikir dan sikapnya itu dalam melihat PBB sama dia dengan melihat partai lain, jadi perilaku dia dengan partai lain tidak ada bedanya, bisa jadi kutu loncat, nah itu yang salah kenapa? Karena ia tidak memahami tentang gerakan Islam, jadi itu yang jadi persoalan. Maka ketika itu terjadi, maka ia berkomunikasi sama masyarakat nuansa dakwahnya itu tidak nampak, jadi kita lihat masih ada juga orang kita berpikir, ah nantilah, nanti dekat pemilu kita siapkan saja uang, jadi gitu. Padahal kita tidak, saya tadi sudah katakan, ada contoh paling sederhana misalnya kalau kita lihat bagaimana kekuatan ideologi, kenapa ada orang sampai mau mengikat bom dipinggangnya, lalu mau meledakkann dengan dirinya, apa karena uang, tidak, apa mau jabatan, tidak. Apa mau kaya, tidak. Itu karena kekuatan ideologi, dan itu Islam punya potensi besar untuk membuat orang begitu. Karena orang Islam kalau sampai kepada aqidah yang betul, maka ia rindu mati syahid, Cuma inikan tidak pernah kita *ekspoler* dalam rangka membangun partai, itu yang jadi soal, sehingga ia berpikirnya, apa yang dilakukan orang bagi-bagi beras, dia berpikir begitu. Mak pasti kalah, ada *pragmatis*, nah inilah jadi persoalan dalam komunikasi politik ke luar, jadi di sini PBB agak gagal, jadi mestinya, apapun latar belakang pendidikan

teman-teman di PBB, harus mampu dia disebut sebagai ustadz, harusnya begitu. Jadi kalau kita lihat Masyumi dulu, pendidikan apapun harus tau dakwah, harus tau Islam. misalnya Anwar Haryono, dia itu pendidikannya SH, S2 Hukum dan Doktor bidang Hukum, tapi orang mengakuinya. Kalau beliau bicara tentang Islam maka sangat dikuasainya.

P: Di antara fungsi partai politik itu kan ada kontrol terhadap kekuasaan, fungsi-fungsi partai politik ini bagaimana di PBB?

I: Ya kalau di masa saya, saya memang termasuk yang mungkin banyak memberikan tanggapan, respon, terhadap persoalan, peristiwa dan fenomena atau langkah-langkah kebijakan pemerintah, saya banyak ngomong kalau soal itu, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan ummat Islam, kita masih posisinya di situ dan, sedang saya sendiri tidak masuk anggota dewan, tapi kita perintahkan anggota dewan untuk mengkritisi hal itu, jadi sebagai lembaga partai politik kita tetap melakukan fungsi kontrol terhadap eksekutif tersebut.

P: Unsur komunikasi politikkan ada lima, ada komunikator politik, ada pesan politik, khalayak politik, media politik, dan efek atau pengaruh politik, ini kelima unsur ini bagaimana kira-kira kira dijalankan di PBB tentang kelima unsur tadi?

I: Ya, kalau kita berharap semua kader itu adalah komunikator atau orang yang menyampaikan pesan, kemudian kita berharap kader partai, apalagi di tingkat pengurus DPW, mestinya dia sudah menjadi komunikator politik, menyampaikan pesan, dan pesannya itu harus dikuasai adalah ideologi partai. Contoh yang sederhana, bahkan paling sederhana, PBB itu tujuan khususnya adalah menegakkan syariat Islam di Indonesia, nah persoalannya sekarang adalah berapa banyak pengurus DPW yang paham tentang syariat Islam, ini yang jadi soal, jadi pesannya itu tidak sampai. nah ketika dia tidak menguasai pesan yang akan disampaikan kepada khalayak pendengarnya, audiensnya, maka dia tidak efektif berkomunikasi, nah di situlah persoalannya. Maka ketika orang-orang dengan pengalaman saya, ketika kita sampaikan itu dan ketika kita tulis di koran, maka respon orang atau khalayak bagus. Misalnya: mengapa kita perjuangkan syariat Islam di Indonesia, apakah ada hak kita memperjuangkan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka itu harus diuraikan panjang dan bisa diperdebatkan dengan khalayak ramai, termasuk juga petarung atau lawan tanding kita dengan partai lain spt PDIP, Golkar dll. Harus begitu memang.

P: Kalau media dalam menyampaikan pesan, misalnya Dewan Dakwah-lah dulu, saya dulu langganan majalah Media Dakwah, di PBB ini ada ngak media yang khusus untuk anggota untuk menyampaikan pesan-pesan politik, misalnya jurnal atau pamflet-pamflet atau buletin, apa namanya?

I: Di PBB ada Abadi, karena dulu namanya di Masyumi adalah Abadi, maka dibuat lagi Abadi, ada majalah Bulan Bintang.

P: Itu waktu terbitnya?

I: Sebulan sekali, tapi sekarang sudah tidak nampak lagi.

P: Itu efektif dan baguskah untuk menambah wawasan?

I: Iya, dan sebenarnya kalau mau belajar banyak tentang pemikiran-pemikiran dan ide PBB, seperti, Yusril yang jadi nara sumber di berbagai even maka sangat dahsyat media tersebut, begitu juga tokoh-tokoh lain dan para ulama, hanya persoalannya sekali lagi, memang karena mungkin selama ini, sudah persepsi orang tentang partai politik ini hanya ingin menjadi anggota dewan, nah ini yang mencederai, bahkan yang seperti ini tidak tabu lagi.

P: Kekuatan media itu, misalnya partai barulah dulu anggap seperti Nasdem, nah partai ini dengan Metro TV-nya, nah Surya Paloh, partai yang dia dirikan ini bisa eksis dan meraih kursi yang signifikan, nah media ini berarti sangat penting dan berpengaruh?

I: Kalau itu sih tidak hanya di bidang partai politik, bahkan semua aspek kehidupan sekarang ini, media itu menjadi satu kekuatan yang sangat berpengaruh dan yang merusak itu karena kita kalah bertarung dalam bidang media dalam membangun opini itulah salah satu poin pentingnya. Sekarang misalnya Metro TV dan juga beberapa stasiun TV tersebut, bahkan media cetak seperti koran Kompas, mereka memunculkan tokoh-tokoh yang Islamnya sekuler dan bukan aktivis ideologis, maka rusak-lah ummat ini, kira-kira seperti itu, jadi misalnya pesan tidak perlu partai Islam dipilih, yang penting membuatnya.

P: Jadi dalam hal ini ada agenda *setting*-kah?

I: Ya *setting*-lah

P: Terus ada komunikator politik, itu mereka adakah diberikan perkaderan, pembekalan atau pelatihan di PBB?

I: Ada, namanya LANTANG, dengan berjenjang Lantang satu, Lantang dua

dan Lantang 3, sehingga mereka jadi duta di tengah-tengah masyarakat

P: Lalu bagaimana strategi komunikasi politik yang dilakukan PBB dalam merebut suara khalayak tersebut?

I: Strategi pasti ada, *pertama*, sederhananya adalah membangun struktur sampai ketinggian paling bawah atau rendah, misalnya dari DPP, DPW Sumatera Utara, DPC Tingkat Kabupaten/Kota, PAC Tingkat Kecamatan, hingga ke tingkat Desa atau Kelurahan yakni Ranting, jadi dari struktur saja sudah nampak strateginya dengan konsolidasi. Kemudian memberi mereka para pengurus pembekalan tentang pemahaman partai dan mau mendakwahnya, itu sebenarnya strategi yang *konvensional*, tapi karena bermuatan ideologis maka kita berharap strategi itu dijalankan, tapi sayang sekali lagi hal itu tidak efektif karena orang sudah tidak percaya dengan omongan-omongan itu, orang lebih percaya dengan *pragmatis*

P: Bagaimana pandangan bapak tentang *money politic* yang dilakukan khalayak?

I: Itu fenomena yang hampir semua partai melakukan, dan itulah persoalan besar dalam demokrasi kita yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh yang tidak memiliki *kredibilitas* yang bisa dibanggakan, jadi ketika demokrasi diarahkan kepada demokrasi liberal, di mana kavalitas menjadi penentu, maka tidak ada lagi ideologinya partai, kalau boleh saya katakan orang yang berkumpul dengan ideologi sekarang Cuma PDIP

P: Justru PDIP ya, kenapa begitu?

I: Inilah kenapa? Jadi mereka itu, disiapkan dulu dananya dan segala macam, kemudian mereka sengaja untuk perang ideologi, nah kembali ke partai Islam tidak seperti itu, tidak mampu dia ketika terjadi sebuah perubahan untuk mengikutinya, sementara kita justru hanyut, justru itu syukurnya kita sekarang, dalam hal yang sederhana, dulu hal ini, ketika kita menyampaikan al-Maidah ayat 51, itu orang Islam sendiri yang marah. Sekarang baru marah semua dengan yang menista al-Maidah 51.

P: Jadi ada juga hikmahnya kasus Ahok ini ya pak?

I: Ada hikmahnya, saya dari dulu sudah menyampaikan hal ini, tak usah pilih saya, yang penting partai Islam, Calegnya Islam, calonnya Islam, Cuma dulu orang banyak yang marah, jangan bawa-bawa agama di politik? Inilah yang disebut ideologi sekuler.

P: Selanjutnya, pesan-pesan politik apa saja yang disampaikan PBB dalam mengedukasi masyarakat

I: Ya kalau kita sebatas yang sekarang ini, tema sentral kita adalah menegakkan Syariat Islam, kita berharap dan berkomunikasi melalui ustadz-ustadz bagaimana memberikan pemahaman kepada ummat ini supaya politik itu dianggap penting di masyarakat, kesulitan kita dan ini terlalu parah, karena kita sudah sedemikian rupa digambarkan politik ini begitu kotor sehingga dijauhi, jadi orang Islam itu sudah nggak mau cerita politik, belum lagi yang sekuler, sudah malas.

P: jadi apatis ?

I: Tidak hanya apatis tapi juga banyak yang salah paham, ketika misalnya kita datang ke masjid berbicara tentang politik, BKM-nya sudah mewanti-wanti, pak di Masjid jangan bicara politik.

P: Padahal Nabi kan juga bicara politik di Masjid

I: Wah, ini parah dan ini merusak pikiran sangat dahsyat ini, nah untuk merubah *mainsheet* ini saja kita kepayahan, nah inilah soal yang kita hadapi

P: Oke, bentuk-bentuk komunikasi politik, misalnya dalam bentuk *interpersonal*, kelompok, kemudian lebih luas kepada khalayak, nah di PBB bagaimana bentuk-bentuk ini dilakukan, seperti komunikasi dengan tokoh masyarakat dll?

I: Itu ada, dan kita serahkan kepada pengurus dan personal kader, harusnya di manapun dia ngomong, harus bicara Islam, politik Islam, soal hukum-hukum Islam, saya yakin tidak usahpun menyebut PBB tapi jika dia sudah paham tentang perlunya memperjuangkan syariat Islam maka dia akan memilih PBB, saya kira begitu.

P: Dalam setiap institusi atau organisasi dibutuhkan humas atau PRO (*Publik Relations Officer*), lalu bagaimana di PBB, apa berjalan fungsi humas atau ada yang khusus ditunjuk sebagai humas, atau ada bidang humas di jajaran wakil ketua partai atau seperti apa?

I: Ada yang membidangi humas

P: maksimalkah fungsinya?

I: Ukuran maksimalnya kita belum ada standart, tapi memang sistemnya ada beberapa wartawan yang kita rekrut menjaadi pengurus, yakni para wartawan yang bervisi Islam, jurnalis muslim. Nah mereka kita minta

sebagai humas, tapi harus jujur kita akui fungsi humas ini masih agak kurang di PBB

P: Kenapa menurut bapak PBB tidak populer, padahal pak Yusril sangat populer itu, bahkan di DKI hampir jaadi calon Gubernur berhadapan dengan Ahok, tapi PBB-nya kurang populer, bahkan dalam catatan saya sebagai peneliti dua kali tidak lolos PT atau ambang batas suara pemilu, apa penyebabnya?

I: Ini banyak faktor, jadi misalnya faktor *internal* dan *eksternal*, tapi faktor *eksternal* itu jauh lebih hebat. Jadi memang hampir tidak ada atau bahkan hampir semua partai itu menginginkan PBB itu tidak hidup, ini skenario yang dahsyat, jadi sengaja digunduli ini PBB, sangat dahsyat betul. Bayangkan sampai beberapa kali kita masuk ke pengadilan, waktu itu misalnya saat verifikasi parati-partai politik, malah partai kecil bisa lolos verifikasi sedang PBB tidak, sampai akhirnya masuk ke pengadilan, dan akhirnya kita PBB memang, jadi memang ada upaya-upaya menghabisi PBB. Ada semacam *by design*, dan Yusril sendiripun populer tapi tidak bisa punya kesempatan. Coba bayangkan satu contoh DKI ini, sekarang kita lihat orang selama ini kepayahan menghadapi Ahok, ketika tampil Yusril, dengan dukungan ummat, ulama dan semua elemen ummat Islam, maka SBY menimbang-nimbang, memberi sinyal dan angin ke Yusril dan segala macam, tapi diujung-ujung Yusril ditikung, itulah perangai politik, karena apa? ada seorang jenderal yang menyatakan hati-hati dengan Yusril karena dia akan menegakkan syariat Islam, jadi intinya tidak disukai, seolah-olah menegakkan syariat Islam itu tidak konstitusional, nah ini perlu diberitahu kepada ummat Islam dan diberi penjelasan. Hak kita sebagai ummat Islam yang tinggal di Indonesia untuk menegakkan syariat Islam

P: Selanjutnya kantor sekretariat, apa efektif menjalankan fungsi komunikasi politik, kantornya di mana pak? Dan maksimalkah berjalan kantor tersebut?

I: Ya dulu kantornya di jalan Karantina Medan Timur, jadi saya mengukur maksimal tersebut, karena kantor ini belum bisa membiayai secara penuh, kemudian pengurus partai juga kebanyakan bekerja masing-masing, jadi fungsi sekretariat tersebut tidak atau belum maksimal, tetapi, untuk rapat-rapat tetap dijalankan, yakni dua kali seminggu dan hal-hal insidentil yang sifatnya rapat juga dibuat jika ada hal yang mendesak. Paling tidak minimal sekali seminggu ada.

P: Di partai lain ada slogan seperti di PKS ada slogan Bersih Peduli Profesional, Golkar slogannya suara rakyat suara Golkar, lalu di PBB ini slogannya apa pak?

I: Slogannya yakni “menjadikan hukum sebagai panglima” itulah jargon kami.

P: Di PBB ini apakah lengkap AD ART, Khittah Perjuangan, Asas dan visi misinya ya pak? Dan apakah itu semua dipahami pengurus?

I: Ya semua lengkap dan itu. *Pertama*, semua dicetak dan dibagikan kepada semua pengurus, ya mestinya seperti itu dipahami semua. *Kedua*, ada *training* atau perkaderan yang membahas semua itu yang disebut LANTANG, tapi ada yang belum paham ya mungkin saja

P: Menurut pak Masri sebagai ketua DPW periode 2009-2014, model sosialisasi partai di kota dan di desa apakah sama? Karena secara sosiologis itukan berbeda?

I: Kalau garis besarnya ya sama saja, tapi ada teknis-teknis pendekatan yang harus berbeda, kalau di desa itu, kan masih kental ia ada tokoh yang jadi panutan (tokoh lokal), ada si Anu atau si A yang jadi rujukan?

P: Berarti memanfaatkan tokoh-tokoh lokal?

I: Ya, kita gunakan itu, memanfaatkan tokoh-tokoh lokal, tokoh-tokoh kharismatik, nah bedanya dengan di kota, hal ini tidak terasa lagi itu, karena lebih terbuka dan *egaliter*.

P: Tentang peluang dan tantangan PBB, pemilih ini ada tiga, pemilih *tradisional*, ada *transksional* dan ada yang *rasional*. Nah, bagaimana pandangan bapak terkait tiga corak khalayak pemilih ini?

I: Ya tradisional ini memang lebih dekat dengan ikatan-ikatan emosional, ikatan historis dan ideologikal, dan ini di PBB juga banyak, misalnya eks Masyumi dulu. Misalnya ada pemilih yang berkata, ini eks partai atokku dulu ini, bahkan yang pernah mengikuti saat mudanya dulu ikut Masyumi maka itu tetap ke PBB dan itu cukup banyak. Sedangkan yang transaksional juga, karena ini memang tidak bisa dibendung, dan ada beberapa anggota kita akhirnya gara-gara corak ini lunturlah pemilih tradisional tersebut dan ini dominan sekali merusak.

P: Nah untuk pemilih rasional misalnya kampus, apakah ada strategi khusus untuk menggarap ini?

I: Kalau ini strategi khusus kita ya, mengajak dialog, dan memberikan pencerahan sebagai alternatif untuk memilih PBB tersebut dan kita memaparkan tentang hal apa sekarang bagaimana, mau seperti anda bayangkan, jadi kita ajak ngobrol.

P: Kenapa PBB menurut bapak tidak lulus PT, itu *by design*-nya seperti apa?

I: Saya menduga-duga, tapi mudah-mudahan ini belum *valid*, tapi apa, menurut saya kecurangan pemilu, dari mulai Daftar Pemilih Tetap (DPT), dari mulai katakanlah jumlah penduduk yang memilih di Jakarta berapa dan sebagainya, nah masalah inikan perdebatan, apakah jumlah itu riil? Saya katakan ngak, jadi artinya ada partai tanpa pemilu sudah dapat sekian kursi, jadi tidak ikut pemilu-pun dia sudah dapat sekian kursi. Itulah jatah-jatah partai besar, makanya saya bilang kalau begininya tetap pelaksanaan pemilunya, maka partai Islam tidak akan bisa maju.

P: Menurut pak Masri begini, partai Islam inikan PBB, PKS, PPP, kemudian anggaplah partai Islam dan karena berbasis Islam, seperti; PAN dan PKB, kenapa partai Islam dan berbasis Islam ini hanya jadi partai tengah tidak bisa jadi pemenang, dan kemungkinan apakah bisa bersatu jadi satu partai?

I: Saya kembali lagi ceritanya ini dari sejarah gerakan Islam secara menyeluruh, bahwa kalau kita lihat pertarungan idiologi Islam dengan bukan Islam, inikan pakai *fil mudhari'* ini, kalau bahasa Alqurannya "*walan tharda ankal Yahudu walannashara.....*" (al-Baqarah: 120), jadi dari dulu itu, sekarang dan sampai yang akan datang. Jadi yang berbau Islam itu, tetap mau dihabisi, bisa itu dikerdilkan, bisa dipecah-belah dengan cara apapun. Bisa saja partai Islam menang tapi tidak diakui, seperti kasus di Al-Jazair dan Mesir. Jadi strateginya sebelum muncul sudah dikerdilkan sedemikian rupa, sudah jelas menang saja dikalahkan. Jadi menurut saya dan ini supaya ditulis dengan tegas, bahwa partai Islam itu harus kuat, sebagaimana diperintahkan Allah dalam surah al Anfal ayat 60 itu dalam bentuk kepartaian. "maka persiapkanlah oleh kamu kekuatan kamu, apa saja yang kamu miliki dari kuda-kuda yang bisa menggetarkan musuh kamu". Maka itu dalam partai, kekuatan ekonomi harus dibangun, intelektualitas untuk berdebat segala macam argumentasi harus dibangun, kemudian laskar. Kenapa saya minta laskar? Karena belum tentu sudah menang bisa nanti diganggu, itu persoalannya. Sudah jelas menang, kalau tidak ada laskar itu, maka sama juga, jadi ini pekerjaan berat

P: Lalu bagaimana menurut pandangan pak Masri dengan pandangan Clifford Grit yang mengatakan Islam itu ada tiga kelompok ada *Priya* ada, *Abangan* dan *Santri*. Ada ngak pengaruhnya. Mungkin *Santri* aja yang milih PBB, sedang abangan tidak mau?

I: Ngak juga, di Papua, yang Kristen banyak milih PBB, jangankan yang Abangan di Papua itu non muslim memilih PBB, dan dapat kursi, jadi ngak ada itu tesis tersebut. Jadi kalau jujur ini pemilu, maka mari kita tanding. Apa konsep orang PDIP?, mana konsep orang Golkar, mari kesini konsep partai Islam.

P: Nah, kembali ke pertanyaan tadi, mungkinkah partai-partai Islam PBB PPP PKS PAN dan PKB ini bersatu atau berfusi?

I: Jadi begini, kalau orang sudah berbicara tentang partai, nah di sini kesalahan kita memandang, dan kita juga ngak bisa salahkan, karena yang namanya partai adalah kekuasaan. Nah itu yang barangkali, paradigma berpartai itu yang harus dirobah, ketika kita merasa berpartai. Sayang kawann-kawan tidak melihat PPP, PKB, PAN, PKS PBB, ngak bisa melihat, ini lho, lawan tanding kita bukan PKS, lawan kita yang di luar, nah ini yang tidak mampu melihatnya. Jadi kalau misalnya nanti orang PKS melihat PBB sebagai lawan tandingnya, nah ini salah. Dan itu sengaja dibuat orang agar bertanding dan kita terpancing, jadi ngak usah susah-susah-lah. Jadi kemarin saya buat di FB tentang fenomena Ahok ini, harus kita syukuri, inilah jalan keluar yang Allah beri

P: Jadi ada hikmahnya juga kasus Ahok ni?

I: Oh iya, di saat partai mentok, jalan ini mentok, dan semua tersumbat, Allah tunjukkan Ahok dengan mulut kotor, akhirnya bersatu semua, sedangkan itupun masih ada orang yang membela Ahok.

P: Bagaimana pandangan bapak tentang negara Pancasila dan negara Islam?

I: Pertama kalau bicara Pancasila ini ada tulisan saya di waspada dan tolong dikutip di sana. Dan saya menyatakan Pancasila bukan dasar negara, ini pendapat pribadi. Tapi dalam konteks berpartai tetap saja kita menggunakan terminologi Pancasila. Saya mau cerita, ini penting. Di mana kita dapat dalam konstitusi kita yang menyatakan dasar negara kita Pancasila, dalam konstitusi UUD 1945, di mana disebutkan dasar negara kita Pancasila, tidak ada. Nah sekali lagi di sinilah para tokoh Islam terbawa dengan pemikiran orang dan kita lupa itu, dan akhirnya kita dibenturkan dengan

Pancasila. Padahal itu tidak ada. Orang melihat Pancasila itu kan alinea ke 4, tapi kan tidak disebutkan di situ Pancasila, negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dst dst, nah Pancasila itu lahir ketika 1 juni, ketika Bung Karno berpidato di akhir sidang BPUPKI, dia sebutlah dasar negara itu Pancasila, dan Pancasila yang disebut Bung Karno berbeda dengan yang di UUD 1945. Dan sebelum bung Karno Pidato tentang Pancasila itu sudah banyak juga tokoh bicara tentang Pancasila, seperti Mr. M Yamin, Hadikusno, terjadilah perdebatan apakah dasar negara ini berdasarkan Islam atau sekuler, akhirnya dalam perdebatan tersebut dibuatlah panitia 9 untuk merumuskan hal ini. Untuk merumuskan apa dasar Indonesia merdeka. Pertanyaan saya, kalau Pancasila diterima yang 1 Juni, yang dicetuskan Soekarno, lalu untuk apa lagi dibentuk panitia 9. Itu artinya karena tidak diterima ini, maka dibentuklah panitia 9, dirumuskanlah pembukaan UUD 1945, itulah yang disebut Piagam Jakarta, lalu tanggal 18 Agustus dikurangnya 7 kata “dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” itulah yang dikurangi. Pertanyaannya, apakah pembukaan UUD 1945 itu bukan Piagam Jakarta. Ya Piagam Jakarta, tapi dikurangi 7 kata. Jadi naskah Piagam Jakarta dengan minus 7 kata. Tapi sekarang kita bilang Piagam Jakarta kok takut, inilah keanehan yang saya katakan dalam diri ummat Islam ini, karena tidak mau buka sejarah dan belajar sejarah dengan benar, lalu kenapa disebut itu Pancasila?. Nah kalau dibuka itu, sebenarnya bukan lima poin tapi empat. Nah, itu ditetapkan tgl 18, mestinya, yang dibacakan tanggal 17 Agustus itu, adalah pembukaan ini. Bukan teks proklamasi. Kalaupun alinea keempat itu disebut Pancasila. Maka kelahiran Pancasila bukan tanggal 1 juni tapi tanggal 18 Agustus, lalu kenapa sekarang tgl 1 juni? Lalu Pancasila yang mana itu? Nah ini banyak yang tidak paham, apalagi para ustadz kita. Jadi *ahistori*S-lah (tidak paham sejarah), itulah akibat buruknya orang bicara apa saja lalu dibenturkan dengan Pancasila, kita langsung ketakutan, karena kita tdk tahu, asal disebutkan Pancasila, kita takut, padahal 99% yang memerdekakan bangsa ini adalah ummat Islam. coba lihat UUD 1945, ini perlu diketahui para ustadz agar tidak takut lagi berhadapan dengan Pancasila, mana kalimat yang menyebut dasar negara itu Pancasila? Carilah, maka tidak ada. Yang ada adalah negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, itu yang betul, nah siapa Tuhan yang Maha Esa? Nah, kalau dibuka kepembukaan maka jawabannya adalah Allah Swt, jadi ngak ada itu Tuhan 3 5 6 dan 10 ada kalimat berkat rahmat Allah serta didorong keinginan luhur dan seterusnya. Jadi Tuhan yang Maha Esa yang dimaksud pasal 29 itu adalah

Allah, maka saya katakan Sah Syariat Islam tegak disini, nah saya ingin jelaskan ini dengan ustadz-ustadz kita, agar diisi hal ini.

P: Nah, bagaimana dengan negara Islam menurut pak Masri?

I: Kalau negara Islam itu kan hanya penamaan, kalau sama saya nggak perlu, sekarang tidak perlu pakai negara Islam, kalau sudah berlaku syariat Islam, orang sendiri akan menyatakan Islam. Saya ini tak perlu saya sebut Ustadz Masri Sitanggang, tapi ketika saya sudah ngajar ngaji maka orang sendiri yang menyebut panggilan "ustadz", kata orang, jadi biarlah orang yang bilang. Inikan soal yang tidak dipahami orang.

P: Lalu bagaimana peluang PBB masa kini dan masa yang akan datang, inikan PBB pernah dapat kursi di DPRD sumut 3, jadi bagaimana peluang PBB masa yang akan datang

I: Saya mau cerita dulu maasa saya, kalau 3 kursi itu di awal-awal, bahkan masuk PBB enam besar, saat itu ikatan emosional masih kuat, masih banyak orang-orang *kredibel* masuk partai, ketika ibarat membuka tanggul airnya banyak, kita buka maka, masuklah ada lipan, kecoa dan lain-lain, lalu PBB melorot, medan nggak ada kursi, nah waktu saya menerima amanah sebagai ketua PBB Sumatera Utara itu, barangkali hanya 10 kursi DPRD Kab Kota, tapi ketika kita pegang jadi 23 kursi DPRD Kab/Kota, jadi ada peningkatan, untuk tingkat dua, dan medan dapat lagi 1 kursi, alhamdulillah, sudah mulai bangkit, saya tidak tau periode sekarang ini, kinerja harus berubah lebih baik, jika tidak maka saya mengkhawatirkan, PBB bisa jatuh lagi, dan saya sempat punya harapan, kalau masalah dampak dari masalah Ahok tentang Al-Maidah 51, ini bisa bangkit lagi, kalau pandai memenejanya, nah inilah yg peting bagaimana cara menyukuri, kan kata Allah kalau bersyukur ditambah nikmat, jadi ditambah kursi. Nah saya belum lihat bagaiman periode sesudah saya menyukurinya seperti apa.

P: Nah, pertanyaan berikutnya, saat periode pertama DPR RI PBB dapat 13 kursi, nah bagaimana pandangan bapak tentang pembatasan PT (*Parlementry Treashold*) dengan harus meraih jumlah 2,5% minimal suara. Nah, bagaimana itu? Orang dapat suara taapi tidak dapat kursi, misalnya PBB dapat dua juta suara, tapi orang lain yang duduk, bagaimana itu?

I: Di sinilah, saaya rasa ketidakadilan demokrasi, masak suaranya diarahkan ke kita, tapi yang naik dari partai lain, itu tidak adil, makanya di sinilah yang harus kita perbaiki demokrasi kita. Tapi orangkan menikmati itu, partai-partai besar menikmati itu, dan orangkan ingin partai-partai itu

hanya 5 dan paling banyak 10, makanya diantara itu yang dibuang adalah PBB.

P: Nah dalam penyusunan Caleg seperti apa di PBB, apa terjadi konflik ?

I: Nah, ini kita ada mekanisme dan ada aturannya, dengan pakai skoring , misalnya pendidikan, loyalitas dan sebagainya dan disini tidak pernah terjadi konflik.

P: Baik pak Masri terimakasih dan semoga bermanfaat ya pak.

I: Doa saya smoga lekas jadi doktor dan sukses untuk adinda.

Lampiran Nama-Nama Anggota DPRD Sumut 2009-2014

No	Nama Anggota DPRD	Asal Partai	Ket
1	Palar Nainggolan, S.H	Partai Demokrat	
2	H. Arifin Nainggolan, S.H	Partai Demokrat	
3	Hj Meilizar Latif	Partai Demokrat	
4	M.Yusuf Siregar	Partai Demokrat	
5	Nurhasanah	Partai Demokrat	
6	Tunggul Sinaga	Partai Demokrat	
7	Enda Mora Lubis	Partai Demokrat	
8	Robert Nainggolan	Partai Demokrat	
9	Hasbullah Hadi	Partai Demokrat	
10	Tahan Manahan Panggabean	Partai Demokrat	
11	Guntur Manurung	Partai Demokrat	
12	Marahalim Harahap	Partai Demokrat	
13	Salomo Tabah Ronal Pardede	Partai Demokrat	
14	Mustofawiyah	Partai Demokrat	
15	Khairul Fuat	Partai Demokrat	
16	Amarullah Nasution	Partai Demokrat	
17	Ida Budiningsih	Partai Demokrat	
18	Jamaluddin Hasibuan	Partai Demokrat	
19	Tiaisah Ritonga	Partai Demokrat	
20	Sopar Siburian	Partai Demokrat	
21	John Hugo Silalahi	Partai Demokrat	
22	Megalia Agustina	Partai Demokrat	
23	Layari Sinukaban	Partai Demokrat	
24	Saleh Bangun	Partai Demokrat	
25	Dirkhansyah Abu Subhan Ali	Partai Demokrat	
26	Ristiwati	Partai Demokrat	
27	Ramli	Partai Demokrat	
28	Syafrida Fitrië	Partai Golongan Karya	
29	Evi Diana	Partai Golongan Karya	
30	Hemiati	Partai Golongan Karya	
31	Isma Padly	Partai Golongan Karya	
32	Chaidir Ritonga	Partai Golongan Karya	
33	Mulkan Ritonga	Partai Golongan Karya	
34	Biller Pasaribu	Partai Golongan Karya	
35	Ajib Shah	Partai Golongan Karya	
36	Syahrul M Pasaribu	Partai Golongan Karya	
37	Richard Eddy M Lingga	Partai Golongan Karya	
38	Jefri Januar Pribadi	Partai Golongan Karya	
39	Sudirman Halawa	Partai Golongan Karya	
40	Hardi Mulyono	Partai Golongan Karya	
41	Sigit Pramono Asri	Partai Keadilan Sejahtera	

42	Taufik Hidayat		Partai Keadilan Sejahtera
43	Siti Aminah		Partai Keadilan Sejahtera
44	Muhammad Nasir		Partai Keadilan Sejahtera
45	Muhammad Nuh		Partai Keadilan Sejahtera
46	Zulkarnain		Partai Keadilan Sejahtera
47	Nur Azizah Tambunan		Partai Keadilan Sejahtera
48	Amsal Nasution		Partai Keadilan Sejahtera
49	Andri Arba		Partai Keadilan Sejahtera
50	Timbas Tarigan		Partai Keadilan Sejahtera
51	Tagor	Pandapotan	PDI Perjuangan
52	Simangunsong		PDI Perjuangan
53	Brilian Moktar		PDI Perjuangan
54	Effendi S Napitupulu		PDI Perjuangan
55	Alamsyah Hamdani		PDI Perjuangan
56	Syamsul Hilal		PDI Perjuangan
57	Muhammad Afan		PDI Perjuangan
58	Edi Rangkuti		PDI Perjuangan
59	Budiman P Nadapdap		PDI Perjuangan
60	Japorman Saragih		PDI Perjuangan
61	Taufan A Ginting		PDI Perjuangan
62	Fahru Rozi		PDI Perjuangan
63	Analisman Zalukhu,	S.Sos,	Partai Amanat Nasional
64	M.Sp		Partai Amanat Nasional
65	Kamaluddin Harahap		Partai Amanat Nasional
66	Zulkifli Husein		Partai Amanat Nasional
67	Muslim Simbolon		Partai Amanat Nasional
68	Parluhutan Siregar		Partai Amanat Nasional
69	Maratua Siregar		Partai Amanat Nasional
70	Irwansyah Damanik		Partai PPP
71	Syahrial Harahap		Partai PPP
72	Rijal Sirait		Partai PPP
73	Ali Jabbar Napitupulu		Partai PPP
74	Fadly Nurzal		Partai PPP
75	Bustami		Partai PPP
76	Abul Hasan Maturidi		Partai PPP
77	A.H Hutagalung		Partai Damai Sejahtera
78	Nurul Azhar Lubis		Partai Damai Sejahtera
79	Tonies Sianturi		Partai Damai Sejahtera
80	Arlene Marpaung		Partai Damai Sejahtera
81	Marasal Hutasoit		Partai Damai Sejahtera
82	Tohanan Silalahi		Partai Hati Nurani Rakyat
83	Darmawan Sembiring		Partai Hati Nurani Rakyat
84	Musdalifah		Partai Hati Nurani Rakyat
85	Zulkifli Effendi Siregar		Partai Hati Nurani Rakyat

86	Hamamisul Bahsan	Partai Hati Nurani Rakyat	
87	Aduhot Simamora	PPRN	
88	Suasana Dachi	PPRN	
89	Washington Pane	PPRN	
90	Rahmianna Delima Pulungan	PPRN	
91	Rooslynda Marpaung	Partai Gerindra	
92	Rinawati Sianturi	Partai Gerindra	
93	Iman B Nasution	Partai Gerindra	
94	Mulyani	PPIB	
95	Yan Syahrin	PBR	
96	Sonny Firdaus	PPD	
97	Kharuddin Syah	PKB	
98	Oloan Simbolon	PBB	
99	Pasaribu Daulay Ferry Suando Tanuray Kaban Kurniawan Sarumaha	Partai Pelopor	

Catatan : 1 Orang anggota DPRD SU terpilih an HM Ali Umri tidak ikut dilantik karena lebih memilih tetap sebagai Wali Kota Binjai

Lampiran Nama-Nama Anggota DPRD Sumut 2014-2019

No	Nama Anggota DPRD	Asal Partai	Ket
1	H. Moh. Nezar Djoeli, St.	Partai NasDem	
2	H. M. Hafez, Lc., MA.	Partai Keadilan Sejahtera	
3	Brilian Moktar, SE, MM	PDI Perjuangan	
4	Agus Napitupulu, SH.	PDI Perjuangan	
5	H. M. Hanafiah Harahap, SH	Partai Golongan Karya	
6	Sonny Firdaus, SH	Partai Gerindra	
7	Hj. Meilizar Latif, SE, MM	Partai Demokrat	
8	Drs. Parluhutan Siregar, M.Sp	Partai Amanat Nasional	
9	Drs. H. Yulizar Parlagutan Lubis	Partai PPP	
10	Ir. Darwin lubis	Partai Hati Nurani	
11	H.Ikrimah Hamidy, St, M.Si	Rakyat	
12	Efendi Panjaitan, S.E, M.Sp	Partai Keadilan	
13	Drs. Baskami Ginting	Sejahtera	
14	Muhammad Faisal	PDI Perjuangan	
15	Smo Tabah Ronal Pardede, S.E	PDI Perjuangan	
16	H. Arifin Nainggolan, S.H, M.Si	Partai Golongan Karya	
17	Dr. Januari siregar, SH, M.Hum	Partai Gerindra	
18	H.Satrya Yudha Wibowo, St, M.M	Partai Demokrat	
19	Ruben Tarigan, S.E	Partai PKPI	
20	Drs. Effendi S. Napitupulu	Partai Keadilan	
21	H. Wagirin Arman, S.Sos	Sejahteraan	
22	H. Muchrid Nasution, S.E	PDI Perjuangan	

23	Ir.Yantoni Purba, M.M	PDI Perjuangan
24	Eveready	Partai Golongan Karya
25	Guntur Manurung, S.E	Partai Golongan Karya
26	H.Syahrial Tambunan	Partai Gerindra
27	Zulkifli Husein, SE	Partai Gerindra
28	Drs. Hasaidin Daulay	Partai Demokrat
29	Firman Sitorus, SE	Partai Demokrat
30	Zulfikar	Partai Amanat Nasional
31	Wasner Sianturi	Partai PPP
32	Indra Alamsyah	Partai PPP
33	Ir. Ramses Simbolon, M.Sc	Partai Keadilan Sejahtera
34	Drs. Hartoyo	PDI Perjuangan
35	H. Syamsul Qodri Marpaung, Lc.	Partai Golongan Karya
36	Ir. Zahir, M.Ap	Partai Gerindra
37	Budiman P. Nadapdap, S.E	Partai Demokrat
38	Helmiati	Partai Keadilan Sejahtera
39	Syamsul Bahri Batubara, S.H	PDI Perjuangan
40	Sri Kumala, S.E, M.M	PDI Perjuangan
41	Mustofawiyah, S.E	Partai Golongan Karya
42	Muslim Simbolon, M.A	Partai Golongan Karya
43	H. Bustami, S.H	Partai Gerindra
44	Ebenejer Sitorus, S.E	Partai Demokrat
45	Zeira Salim Ritonga	Partai Amanat Nasional
46	Basyir, A.md, S.E	Partai PPP
47	H. Muhammad Afan,S.S	Partai Hati Nurani
48	Novita Sari, S.H	Rakyat
49	Ari Wibowo	Partai Kebangkitan
50	H.T. Milwan	Bangsa Partai Keadilan
51	Drs. Aripay Tambunan, M.M	Sejahtera
52	Patar Sitompul	PDI Perjuangan
53	H. Burhanuddin Siregar, S.E	Partai Golongan Karya
54	Sutrisno Pangaribuan	Partai Gerindra
55	H.A. Yasyir RidhoLoebis, S.H, S.T	Partai Demokrat
56	Ir. H. Chaidir Ritonga. M.M	Partai Amanat Nasional
57	Parlinsyah Harahap	Partai Hati Nurani
58	Tia Isah Ritonga, S.E	Rakyat
59	Iskandar Sakti Batubara	Partai Keadilan Sejahtera
60	Ahmadan Harahap, S.Ag, M.Sp	PDI Perjuangan
61	Zulkifli Effendi Siregar, M.Sc	Partai Golongan Karya
62	Robi Agusman Harahap, S.H	Partai Golongan Karya
63	Philips Perwira Juang Nehe	Partai Gerindra
64	Analisman Zalukhu, S.Sos, M.Sp	Partai Demokrat
65	Arota Lase, A.Md	Partai Amanat Nasional
66	Fajar Waruwu	Partai PPP

67	Lidiani Lase	Partai Hati Nurani
68	Fanotona Waruwu	Rakyat
69	Jubel Tambunan, S.E	Partai PKPI
70	Dra. Delmeria	Partai Kebangkitan
71	Tigor Lumban Toruan	Bangsa
72	Sarma Hutajulu, S.H	PDI Perjuangan
73	Fernando Simanjuntak, S.H, M.H	Partai Golongan Karya
74	Donald Lumban Batu, S.E	Partai Gerindra
75	Sopar Siburian, S.H., M.H	Partai Demokrat
76	Aduhot Simamora	Partai Hati Nurani
77	Ir. Juliski Simorangkir, M.M	Rakyat
78	Inge Amelia Nasution, S.Psi	Partai NasDem
79	Dra. Hj. Hidayah Herlina Gusti	Partai NasDem
80	Jantoguh Damanik, S.Ssos	Partai Kebangkitan
81	H. Ajib Shah	Bangsa
82	Janter Sirait, S.E	PDI Perjuangan
83	Richard Pandapotan Sidabutar	Partai Golongan Karya
84	Rony Reynaldo Situmorang	Partai Gerindra
85	Rinawati Sianturi, S.H	Partai Demokrat
86	Sudarto Sitepu	Partai Hati Nurani
87	Leonard Surungan Samosir, BA	Rakyat
88	Ir. Astrayuda Bangun	Partai PKPI
89	Jenny Riany Lucia Berutu, S.H	Partai NasDem
90	Toni Togatorop, S.E	Partai Keadilan Sejahtera
91	Drs. Anhar A. Monel, M.Ap	PDI Perjuangan
92		Partai Golongan Karya
93		Partai Golongan Karya
94		Partai Gerindra
95		Partai Demokrat
96		Partai Hati Nurani
97		Rakyat
98		PDI Perjuangan
99		Partai Golongan Karya
100		Partai Gerindra
	Khairul Anuwar, S.T, M.M	Partai Demokrat
	Herman Sembiring	Partai Hati Nurani
	Putri Susi Melani Daulay, S.E	Rakyat
	Sampang Malem	Partai NasDem
	H. Ajie Karim	Partai Keadilan Sejahtera
	H. Saleh Bangun	PDI Perjuangan
	Muhri Fauzi Hafiz	Partai Golongan Karya
	H. Syah Afandin, S.H	Partai Golongan Karya
	Robby Anangga	Partai Gerindra
		Partai Demokrat